Profil Anak INDONESIA Tahun 2022

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Profil Anak Indonesia

ISSN
2089-3523

Ukuran Buku
21x29,7 cm

Jumlah Halaman
316 Halaman

Naskah
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)

Gambar Kulit
Afif Najmudin

Diterbitkan Oleh
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Tim Penyusun

Pengarah
Pribudiarta Nur Sitepu

Penanggung Jawab
Lies Rosdianty

Editor
Anita Putri Bungsu
Indah Lukitasari

Penulis Naskah
Yulina Eva Riany
Baiq Mardhiyanti Kusuma Dewi
Siti Editha Raisa

Pengolah Data
Anita Putri Bungsu
Sylvianti Angraini
Indah Lukitasari
Nurhayati

Layout
Afif Najmudin
Anita Putri Bungsu
Indah Lukitasari
Dian Surida

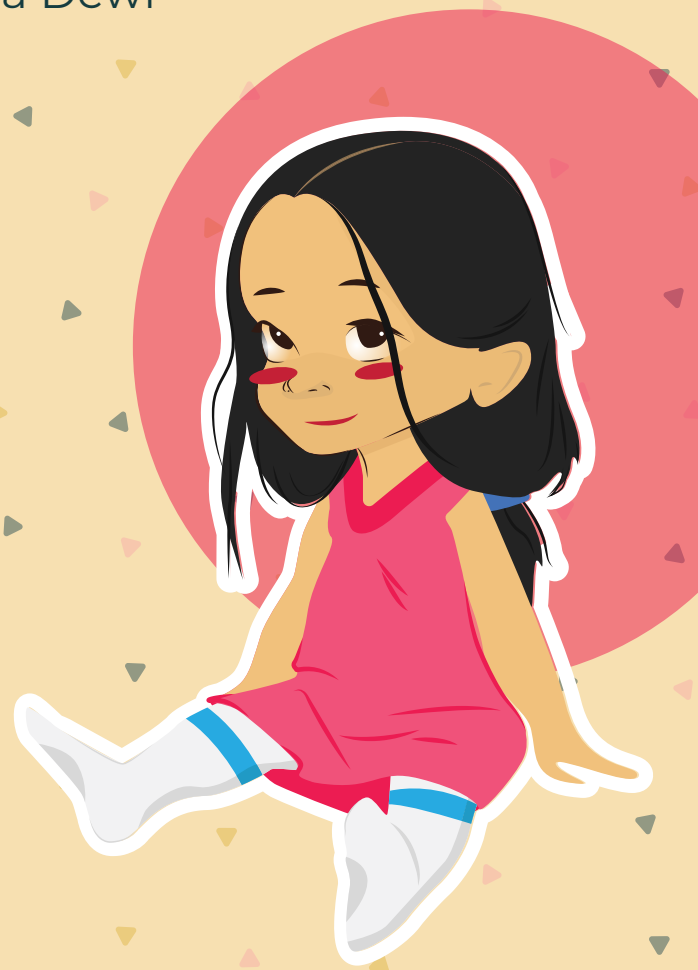

Sambutan

Anak merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dalam tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat statistic (BPS), jumlah anak Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir berkisar antara 29,15 hingga 31,56 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Komposisi ini dalam beberapa tahun ke depan berpotensi besar menjadi angkatan kerja yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menciptakan generasi yang tangguh dan berkualitas dengan menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak.

Sebagai bentuk komitmen di tingkat global dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu, secara nasional pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program perlindungan anak, tentunya diperlukan data dan informasi yang menggambarkan kondisi faktual anak Indonesia, sebagai pedoman dan acuan agar program yang dicanangkan menjadi tepat sasaran. Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyusun publikasi Profil Anak Indonesia yang memberikan gambaran kondisi anak Indonesia dalam berbagai aspek hak anak maupun isu-isu yang melingkupi mereka.

Penyusunan publikasi ini merupakan hasil kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilakukan setiap tahun, dimana berbagai data dan informasi yang disajikan bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja

Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS. Untuk itu, kami sampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kepala BPS beserta jajaran atas kerja sama yang baik ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini.

Besar harapan kami bahwa publikasi ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai dasar dalam perencanaan sekaligus sebagai bahan evaluasi, untuk memastikan pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan pembangunan perlindungan anak sudah benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak Indonesia.

Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Ringkasan Eksekutif

Buku Profil Anak Indonesia 2022 disusun dengan tujuan untuk menggambarkan data kondisi anak di Indonesia secara faktual dan menyeluruh di berbagai bidang. Data ini dinilai sangat penting sebagai referensi para pengambil kebijakan maupun stakeholders terkait anak untuk menyusun langkah, baik pencegahan maupun penanggulangan masalah anak di Indonesia. Dengan adanya buku Profil Anak Indonesia 2022, diharapkan beragam kebijakan maupun program dapat tepat sasaran dan menjawab kebutuhan di lapangan.

Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk anak (usia 0-17 tahun) di Indonesia pada tahun 2021 adalah sebanyak 79.486.424 jiwa atau sebesar 29,15 persen dari jumlah penduduk total. Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan persentase penduduk anak terbanyak, yaitu 34,87 persen. Sementara persentase penduduk anak paling sedikit terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu 24,49 persen.

Profil Anak Indonesia berdasarkan dimensi hak sipil anak atau kepemilikan akta kelahiran anak yang berusia 0-17 tahun mengalami tren peningkatan pada lima tahun terakhir. Tahun 2021 merupakan tahun dengan angka persentase kepemilikan akta kelahiran tertinggi yaitu sebesar 88,42 persen. Adanya tren peningkatan ini dapat dilihat dari beberapa program dan kebijakan yang dilakukan pemerintah termasuk bantuan serta dukungan dari lembaga terkait lainnya, antara lain mempermudah pengurusan akta kelahiran, akta kelahiran gratis, dan program jemput bola. Namun demikian sebanyak 11,58 persen anak belum memiliki akta kelahiran, dengan rincian 14,68 persen anak yang tinggal di daerah perdesaan dan 9,09 persen anak yang tinggal di daerah perkotaan.

Seiring dengan berkembangnya zaman, jarak tidak menjadi sebuah masalah bagi masyarakat untuk terhubung satu sama lain. Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian baik di kalangan profesional, amatir, dewasa maupun anak-anak. Maraknya penggunaan telepon seluler, komputer, bahkan akses internet yang dilakukan oleh anak-anak menjadi sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari sebagai bagian dari adanya perkembangan di masyarakat. Bahkan, adanya pandemi membuat hampir seluruh aktivitas manusia

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hasil analisis atas persentase anak umur 7-17 tahun yang menggunakan telepon seluler menurut tipe daerah dan jenis kelamin tahun 2021 menunjukkan bahwa, penggunaan telepon seluler oleh anak-anak baik di perdesaan dan perkotaan sudah di atas 75 persen atau lebih dari 2/3 anak. Hasil analisis data Susenas (2021) menunjukkan bahwa sebanyak 61 persen anak laki-laki di perkotaan dan 50,83 persen anak laki-laki di perdesaan sudah memiliki telepon seluler. Sedangkan untuk anak perempuan di perkotaan sebanyak 63,81 persen dan 52,55 persen anak perempuan di perdesaan telah memiliki telepon seluler.

Selain telepon seluler, komputer menjadi salah satu media penciri bagi perkembangan informasi dan teknologi di masyarakat. Persentase anak umur 7-17 tahun yang menggunakan komputer pada tahun 2021 sebanyak 10,87 persen. Jika dipilah menurut tipe daerah persentase anak yang menggunakan komputer di wilayah perkotaan adalah sebanyak 15,39 persen. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase anak yang menggunakan komputer di wilayah perdesaan yang hanya 5,27 persen.

Hasil analisis atas persentase anak umur 7-17 tahun yang pernah mengakses internet menurut provinsi pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Provinsi Papua sebagai provinsi dengan persentase anak yang mengakses internet terendah di Indonesia memiliki persentase sebesar 21,84 persen. Sementara itu, Provinsi DI Yogyakarta sebagai provinsi dengan persentase anak mengakses internet tertinggi di Indonesia memiliki persentase sebesar 93,83 persen atau lebih tinggi empat kali jika dibandingkan dengan kondisi Papua.

Profil Anak Indonesia terkait partisipasi anak, ditunjukkan dengan partisipasi anak dalam kegiatan pertemuan (rapat), organisasi di luar tempat kerja/sekolah, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Meski masih tergolong rendah, anak-anak Indonesia sudah pernah mengikuti rapat di lingkungan sekitarnya, dengan persentase anak-anak di perdesaan yang mengikuti rapat lebih tinggi dibandingkan anak-anak di perkotaan. Pola yang sama terjadi pada persentase anak yang pernah mengikuti kegiatan rapat dan memberikan saran/ pendapat. Terdapat tiga provinsi dengan tidak adanya keterlibatan anak dalam rapat serta memberikan pendapat di tahun 2021, yaitu Provinsi Papua Barat, Kalimantan Selatan dan Banten. Dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah, secara keseluruhan persentase partisipasi anak adalah

kurang dari lima persen. Sementara itu, anak laki-laki lebih banyak yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dibandingkan dengan anak perempuan.

Selama lima tahun terakhir, tepatnya sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 terjadi fluktuasi pada jumlah anak umur 3-6 tahun yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sejak tahun 2019 hingga 2021, terjadi penurunan yang tidak terlepas dari kondisi pandemi COVID-19 yang mempengaruhi keputusan orang tua dalam menyekolahkan anaknya pada jenjang PAUD. Angka partisipasi anak perempuan umur 3-6 tahun yang mengikuti PAUD pada tahun 2021 (34,13) lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki (32,90). Di sisi lain, angka partisipasi anak umur 3-6 tahun di perkotaan (33,66) lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (33,32). Berdasarkan provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi dengan angka partisipasi anak umur 3-6 tahun yang mengikuti PAUD tertinggi di Indonesia (60,68). Sementara angka partisipasi terendah berada di Provinsi Papua (9,66). Sama halnya dengan partisipasi PAUD, tren Angka Kesiapan Sekolah juga mengalami fluktuasi pada periode tahun 2017 hingga 2021.

Profil Anak Indonesia yang dianalisis berdasarkan pengasuhan menunjukkan bahwa pada tahun 2021, masih terdapat anak yang tidak tinggal dengan orang tuanya (3,75 persen). Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan target nasional yang telah ditetapkan pemerintah untuk tahun 2021, yaitu sebesar 4,66 persen. Persentase anak yang tidak tinggal bersama kedua orang tua di perdesaan lebih tinggi (4,25 persen) dibandingkan di perkotaan (3,35 persen).

Pada aspek kegiatan yang dilakukan bersama oleh anak dan orang tua menunjukkan bahwa, orang tua Indonesia memiliki kesadaran yang cukup baik akan pentingnya aktivitas makan bersama. Di sisi lain, pada tahun 2021 masih terdapat kasus perkawinan anak. Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun menurut provinsi sebesar 9,23 persen. Jika dilihat berdasarkan wilayah, Provinsi Sulawesi Barat menjadi provinsi dengan persentase tertinggi, yaitu sebesar 17,71 persen. Sementara persentase terendah berada di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 3,48 persen.

Status Gizi balita khususnya stunting dan wasting mengalami tren penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Akan tetapi, kasus underweight mengalami kenaikan pada tahun 2021 dibandingkan pada tahun sebelumnya. Selain itu, persentase anak di bawah bawah dua tahun (0-23 bulan) yang pernah diberikan

ASI juga menunjukkan hasil yang cukup baik, yaitu sebesar 94,65 persen untuk rata-rata nasional. Meskipun terdapat tren positif bagi kondisi kesehatan anak di Indonesia, upaya percepatan untuk meningkatkan persentase anak berumur 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi lengkap harus terus dilakukan. Capaian persentase anak berumur 12-23 bulan yang mendapat imunisasi lengkap baru mencapai 61,09 persen.

Hasil Susenas tahun 2021 menunjukkan adanya penurunan persentase anak perokok dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan tren yang positif bagi kesehatan anak. Terkait dengan kepemilikan jaminan kesehatan anak di Indonesia, meskipun kepemilikan jaminan kesehatan sudah meningkat, namun nyatanya tidak menjamin bagi pemilik jaminan kesehatan untuk dapat memanfaatkan layanan tersebut secara maksimal. Implementasi strategi dan inovasi di bidang kesehatan anak yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah masih sangat dibutuhkan untuk melakukan akselerasi penyediaan hak kesehatan anak sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan anak di bidang kesehatan.

Profil Anak Indonesia yang dilihat dari aspek pendidikan menunjukkan tren Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk umur 7-18 tahun sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami fluktuasi. Secara umum, telah terjadi peningkatan APS selama lima tahun terakhir. Hal ini dapat dimaknai bahwa terjadi peningkatan jumlah masyarakat Indonesia yang bersekolah. Kondisi yang fluktuatif juga terjadi pada Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Diprediksi hal tersebut disebabkan oleh tingkat partisipasi masyarakat, khususnya orang tua dalam konteks pendidikan atau dalam hal ini adalah menjalankan kewajibannya untuk menyekolahkan anak. Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Indonesia, pemerintah melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, meluncurkan sebuah kebijakan dalam bentuk Program Indonesia Pintar (PIP). Jumlah anak di perdesaan yang memperoleh PIP lebih tinggi jika dibandingkan persentase anak yang memperoleh PIP di perkotaan.

Salah satu indikator yang dapat mencerminkan kondisi perekonomian adalah bangunan tempat tinggal. Hasil Susenas 2021 menunjukkan bahwa status kepemilikan bangunan tertinggi adalah “milik sendiri”, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Meskipun demikian, tren kepemilikan bangunan tempat tinggal milik

sendiri masih cenderung lebih tinggi di perdesaan dibandingkan di perkotaan. Selain kepemilikan tempat tinggal, akses air dan sanitasi layak adalah dua komponen yang sangat esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Namun, data menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang terjadi dalam hal akses air dan sanitasi layak di daerah perkotaan dan perdesaan. Kesenjangan juga terlihat pada akses air dan sanitasi layak antara provinsi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

Adanya tekanan ekonomi pada keluarga diprediksi menjadi salah satu faktor pendorong bagi anak untuk memutuskan bekerja. Pada periode tahun 2017 sampai dengan 2021, terjadi fluktuasi persentase anak yang bekerja. Di perkotaan, anak usia 10-17 tahun yang bekerja memiliki persentase tertinggi pada lapangan pekerjaan jasa (71,19 persen). Sementara anak-anak di perdesaan paling banyak bekerja pada lapangan pekerjaan pertanian (50,97 persen). Dari segi upah, besarnya upah yang diterima anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan.

Selain aspek kemiskinan, Profil Anak Indonesia juga menganalisis angka kekerasan terhadap anak yang menunjukkan peningkatan sejak tahun 2019 hingga tahun 2021. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak tertinggi berada di Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 1.190 kasus. Tempat kejadian kekerasan terhadap anak di Indonesia paling tinggi terjadi di rumah tangga. Hal ini sesuai dengan penelitian-penelitian terdahulu yang didukung oleh data WHO (2020) yang menunjukkan bahwa meningkatnya aktivitas yang dilakukan oleh keluarga di rumah serta tingginya tingkat stres menjadi alasan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di rumah tangga. Pada tahun 2021, hubungan pelaku kekerasan terhadap korban paling banyak adalah pacar/teman sebanyak 2.959 korban. Hal ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan upaya sosialisasi bagi masyarakat, khususnya keluarga bahwa berbagai tindak kekerasan baik yang dilakukan oleh orang lain maupun keluarga atau orang terdekat sekalipun, tetap merupakan tindak kejahatan yang tidak dibenarkan. Penyediaan layanan khusus bagi korban kekerasan, penyediaan hukuman yang tegas bagi pelaku, serta partisipasi aktif komunitas dan kelompok masyarakat diharapkan dapat dilaksanakan sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

Daftar Isi

Sambutan i
Ringkasan Eksekutif iii
Daftar Isi iii

PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan 3
1.3. Sumber Data 3
1.4. Sistematika Penyajian 3

Overview 6
2.1. Presentase Penduduk Anak Dibandingkan Dewasa 6
2.2. Presentase Penduduk Anak Dibandingkan Dewasa 7
2.1. Presentase Penduduk Anak Dibandingkan Dewasa 10
2.4. Persentase Penduduk Anak Menurut Provinsi 12

Overview 18
3.1. Persentase Anak Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran 18
3.2. Tren Kepemilikan Akta Kelahiran 19
3.3. Persentase Anak Menurut Tipe Daerah dan Kepemilikan Akta Kelahiran 21
3.4. Persentase Anak Menurut Provinsi dan Kepemilikan Akta Kelahiran 22

Overview 32
4.1. Telepon Seluler dan Komputer 32
4.1.1 Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin 32
4.1.2. Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Memilik Telepon Seluler Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin 34
4.1.3. Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler Menurut Provinsi 35
4.1.4. Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Menggunakan Komputer Menurut Tipe Daerah 36
4.2. Akses Internet 38
4.2.1. Tren Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Pernah Mengakses Internet 38
4.2.2. Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Pernah Mengakses Internet Menurut Jenis Kelamin dan TujuanMengakses 39
4.2.3. Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Pernah Mengakses Internet Menurut Tipe Daerah dan Tujuan Mengakses 40
4.2.4. Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Pernah Mengakses Internet Menurut Provinsi 42

Overview **75**
5.1. Partisipasi dalam Pertemuan (Rapat) **75**
5.1.1. Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Pernah Mengikuti Kegiatan Pertemuan (Rapat) di Lingkungan Sekitar dalam Satu Tahun Terakhir Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah 75
5.1.2. Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Pernah Mengikuti Kegiatan Pertemuan (Rapat) di Lingkungan Sekitar dalam Satu Tahun Terakhir dan Memberikan Saran/ Pendapat Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah 77
5.2. Partisipasi dalam Kegiatan Organisasi **78**
5.2.1. Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Ikut Serta dalam Kegiatan Organisasi Selain di Tempat Kerja/Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah 78
5.3. Partisipasi dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan **80**
5.3.1. Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Ikut dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah 81
5.3.2. Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Ikut dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi 82

Overview **90**
6.1. Keikutsertaan PAUD **90**
6.1.1. Tren Angka Partisipasi Anak Umur 3-6 Tahun yang Mengikuti PAUD 91
6.1.2. Angka Partisipasi Anak Umur 3-6 Tahun yang Mengikuti PAUD Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah 93
6.1.2. Angka Partisipasi Anak Umur 3-6 Tahun yang Mengikuti PAUD Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah 94
6.2. Angka Kesiapan Sekolah **95**
6.2.1. Tren Angka Kesiapan Sekolah Lima Tahun Terakhir 95
6.2.2. Angka Kesiapan Sekolah Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin 96
6.2.3. Angka Kesiapan Sekolah Menurut Provinsi 97
6.3. Anak Tidak Tinggal Bersama Kedua Orang Tua **98**
6.3.1. Tren Persentase Anak yang Tidak Tinggal Bersama Kedua Orang Tua 99
6.3.2. Persentase Anak yang Tidak Tinggal Bersama Kedua Orang Tua Menurut Tipe Daerah 100
6.4. Aktivitas Anak Bersama Orang Tua/Wali **101**
6.4.1. Persentase Anak Berdasarkan Aktivitas yang Dilakukan Bersama Orang Tua/Wali Seminggu Terakhir 102
6.4.2. Persentase Anak Berdasarkan Aktivitas yang Dilakukan Bersama Orang Tua/Wali Seminggu Terakhir Menurut Provinsi 103
6.5. Perkawinan Anak **104**

6.5.1. Tren Persentase Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Umur 18 Tahun 105
6.5.2. Persentase Anak yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah 106
6.5.3. Persentase Anak yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Provinsi 107

Overview 122
7.1. Status Gizi 122
7.1.1 Prevalensi Status Gizi Balita 2021 123
7.1.2 Tren Prevalensi Status Gizi Balita (Riskesdas 2018, SSGBI 2019, SSGI 2021) 124
7.1.3 Prevalensi Status Gizi Balita Menurut Provinsi 125
7.2. Status Gizi 126
7.2.1 Tren Persentase Baduta (0-23 Bulan) yang Pernah Diberi ASI 126
7.2.2 Persentase Baduta (0-23 Bulan) yang Pernah Diberi ASI Menurut Rata-Rata Lama Pemberian ASI (Bulan) 127
7.2.3 Persentase Baduta (0-23 Bulan) yang Pernah Diberi ASI Menurut Provinsi 128
7.2.4 Persentase Bayi Umur Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif Menurut Provinsi dan Tipe Daerah 130
7.3.1 Persentase Balita yang pernah Diberi Imunisasi Menurut Tipe Daerah, dan Jenis Imunisasi 132
7.3.2 Persentase Anak Berumur 12-23 Bulan yang Mendapat Imunisasi Lengkap Menurut Tipe Daerah 133
7.3.3 Persentase Anak Berumur 12-23 Bulan yang Mendapat Imunisasi Lengkap Menurut Provinsi 134
7.4. Keluhan Kesehatan pada Anak 136
7.4.1 Persentase Anak yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin 136
7.4.2 Persentase Anak yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi 137
7.4.3 Persentase Anak yang Sakit (Terganggu Pekerjaan, Sekolah, atau Kegiatan Sehari-Hari) Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin 138
7.4.1 Persentase Anak yang Sakit (Terganggu Pekerjaan, Sekolah, atau Kegiatan Sehari-Hari) Menurut Provinsi 139
7.4.5 Persentase Anak yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin 141
7.4.6 Persentase Anak yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi 142
7.4.7 Persentase Anak yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Berdasarkan Tempat Rawat Inap 143

7.5. Anak yang Merokok 144
7.5.1 Tren Persentase Anak Umur 5-17 Tahun yang Merokok Tiga Tahun Terakhir 145
7.5.2 Persentase Anak Umur 5-17 yang Merokok Menurut Jumlah Batang Rokok yang Dihisap Per Minggu 146
7.6. Jaminan Kesehatan 147
7.6.1 Persentase Anak yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki 147
7.6.2 Persentase Anak yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi 148
7.6.3 Persentase Anak yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Menurut Tipe Daerah dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan 149
7.6.4 Persentase Anak yang Pernah Dirawat Inap dalam Satu Tahun Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan 150

Overview 189
8.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 190
8.1.1. Tren APS Penduduk Umur 7-18 Tahun 190
8.1.2. APS Penduduk Umur 7-18 Tahun Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur 191
8.1.3. APS Penduduk Umur 7-18 Tahun Menurut Provinsi dan Kelompok Umur 192
8.2. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) 192
8.2.1. Tren APM dan APK Penduduk Umur 7-18 Tahun 192
8.2.2. APM Penduduk Umur 7-18 Tahun Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan 194
8.2.3. APM Penduduk Umur 7-18 Tahun Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan 195
8.2.4. APK Penduduk Umur 7-18 Tahun Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan 196
8.3. Angka Melek Huruf 196
8.3.1. Persentase Anak Umur 5-17 tahun yang Melek Huruf Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin 197
8.3.2. Persentase Anak Umur 5-17 tahun yang Melek Huruf Menurut Provinsi 198
8.4. Program Indonesia Pintar 199
8.4.1. Persentase Anak Umur 7-17 tahun yang Memperoleh Program Indonesia Pintar (PIP) Menurut Tipe Daerah 200
8.4.2. Persentase Anak Umur 7-17 tahun yang Memperoleh Program Indonesia Pintar (PIP) Menurut Provinsi 201
8.4.3. Persentase Anak Umur 7-17 tahun yang Memperoleh Program Indonesia Pintar (PIP) dan Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) 203

Overview **229**
9.1. Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal **229**
9.1.1. Persentase Anak Menurut Tipe Daerah dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal 229
9.2.Akses Terhadap Air Minum Layak dan Sanitasi Layak **231**
9.2.1. Persentase Anak yang Tinggal di Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak Menurut Tipe Daerah 231
9.2.2. Persentase Anak yang Tinggal di Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air minum Layak Menurut Provinsi 232
9.2.3. Persentase Anak yang Tinggal di Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Tipe Daerah 234
9.2.4. Persentase Anak yang Tinggal di Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Provinsi 234

Overview **240**
10.1. Anak yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan **240**
10.1.1. Persentase Anak yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Menurut Provinsi 241
10.2. Anak yang Bekerja **242**
10.2.1. Tren Anak yang Bekerja 243
10.2.1.1. Persentase Anak Umur 10-17 Tahun yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin 243
10.2.1.2. Tren Persentase Anak yang Bekerja 245
10.2.1.3. Persentase Anak Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin 246
10.2.1.4. Persentase Anak Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi 247
10.2.2. Lapangan Pekerjaan Utama 249
10.2.2.1. Persentase Anak Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin, Tipe Daerah dan Lapangan Pekerjaan Utama 249
10.2.3. Sektor Pekerjaan Utama 250
10.2.3.1. Persentase Penduduk Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin, Tipe Daerah dan Sektor Pekerjaan Utama 250
10.2.3.2. Persentase Penduduk Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi dan Sektor Pekerjaan Utama 252
10.2.4. Jam Kerja 253
10.2.4.1. Persentase Penduduk Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Jam Kerja pada Pekerjaan Utama 253
10.2.4.2. Persentase Penduduk Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Tipe Daerah dan Jam Kerja pada Pekerjaan Utama 254

10.2.5. Status Pekerjaan Utama 255
10.2.5.1. Persentase Penduduk Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Tipe Daerah dan Status Pekerjaan Utama 255
10.2.5.2. Persentase Penduduk Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Status Pekerjaan Utama 256
10.2.5.3. Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Penduduk Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin 256
10.2.5 Status Pekerjaan Utama 257
10.3.1 Tren Kasus KtA 262
10.3.1.1 Tren Jumlah Kasus KtA 262
10.3.1.2 Kasus KtA Menurut Provinsi 263
10.3.1.3 Tren Jumlah Korban KtA 265
10.3.2 KtA Berdasarkan Kelompok Umur dan Status Perkawinan Korban 265
10.3.2.1 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Provinsi dan Kelompok Umur 265
10.3.3 Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Status Perkawinan 266
10.3.4 KtA Berdasarkan Jenis Kekerasan dan Layanan yang Diterima 267
10.3.4.1 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan 267
10.3.4.2 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Layanan yang Diterima 268
10.3.4.3 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jumlah Layanan yang Diterima 269
10.3.5 KtA Berdasarkan Tempat Kejadian 270
10.3.5.1 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Tempat Kejadian 270
10.3.6 KtA Berdasarkan Hubungan Korban dan Pelaku 270
10.3.6.1 Persentase Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hubungan Pelaku dengan Korban 270

Daftar Gambar

BAB II

Gambar 2.1 Persentase penduduk anak dibandingkan dewasa, 2021 6
Gambar 2.2 Tren Persentase Penduduk Anak (2021-2023) 7
Gambar 2.3 Tren Total Fertility Rate/ TFR (2017-2021) 8
Gambar 2.4 Komposisi penduduk menurut generasi, 2021 9
Gambar 2.5 Persentase Penduduk Anak Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 10
Gambar 2.6 Persentase penduduk anak menurut provinsi Tahun 2021 12

BAB III

Gambar 3.1 Persentase Anak Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2021 19
Gambar 3.2 Tren Kepemilikan Akta Kelahiran (2017-2021) 20
Gambar 3.2 Persentase Anak Menurut Tipe Daerah dan Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2021 21
Gambar 3.4 Persentase Anak Menurut Provinsi dan Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2021 23

BAB IV

Gambar 4.1 Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2021 33
Gambar 4.2 Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Memiliki Telepon Seluler Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2021 35
Gambar 4.3 Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler Menurut Provinsi Tahun 2021 36
Gambar 4.4 Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Menggunakan Komputer Menurut Tipe Daerah Tahun 2021 37
Gambar 4.5 Tren Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Pernah Mengakses Internet (2017-2021) 39
Gambar 4.6 Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Pernah Mengakses Internet Menurut Jenis Kelamin dan Tujuan Mengakses Tahun 2021 40
Gambar 4.7 Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Pernah Mengakses Internet Menurut Tipe Daerah dan Tujuan Mengakses Tahun 2021 41
Gambar 4.8 Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Pernah Mengakses Internet Menurut Provinsi Tahun 2021 42

BAB V

Gambar 5.1 Persentase Anak Usia 7-17 Tahun yang Pernah Mengikuti Kegiatan Pertemuan (Rapat) di Lingkungan Sekitar dalam Satu Tahun Terakhir Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah Tahun 2021 76

Gambar 5.2 Persentase Anak Usia 7-17 Tahun yang Pernah Mengikuti Kegiatan Pertemuan (Rapat) di Lingkungan Sekitar dalam Satu Tahun Terakhir dan Memberikan Saran/ Pendapat Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah Tahun 2021 77

Gambar 5.3 Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Ikut Serta dalam Kegiatan Organisasi Selain di Tempat Kerja/ Sekolah Tahun 2021 80

Gambar 5.4 Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Ikut dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah Tahun 2021 81

Gambar 5.5 Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Ikut dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi Tahun 2021 83

BAB VI

Gambar 6.1 Tren Angka Partisipasi Anak Umur 3-6 Tahun yang Mengikuti PAUD Tahun 2017-2021 92

Gambar 6.2 Angka Partisipasi Anak Umur 3-6 Tahun yang Mengikuti PAUD Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah Tahun 2021 93

Gambar 6.3 Angka Partisipasi Anak Umur 3-6 Tahun yang Mengikuti PAUD Menurut Provinsi Tahun 2021 94

Gambar 6.4 Tren Angka Kesiapan Sekolah Tahun 2017-2021 95

Gambar 6.5 Angka Kesiapan Sekolah Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2021 96

Gambar 6.6 Angka Kesiapan Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2021 97

Gambar 6.7 Perbandingan Tren Persentase Anak yang Tidak Tinggal Bersama Kedua Orang Tua dengan Target Penurunan Persentase Anak yang Tidak Tinggal Bersama Kedua Orang Tua Tahun 2021 100

Gambar 6.8 Persentase Anak yang Tidak Tinggal Bersama Kedua Orang Tua Menurut Tipe Daerah Tahun 2021 101

Gambar 6.9 Persentase Anak Berdasarkan Aktivitas yang Dilakukan Bersama Orang Tua/Wali Seminggu Terakhir Tahun 2021 102

Gambar 6.10 Tren Persentase Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Umur 18 Tahun (2017-2021) 105

Gambar 6.11 Persentase Anak yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah Tahun 2021 106
Gambar 6.12 Persentase Perkawinan Anak Menurut Provinsi Tahun 2021 107

BAB VII

Gambar 7.1 Prevalensi Status Gizi Balita Tahun 2021 123
Gambar 7.2 Tren Prevalensi Status Gizi Balita Tahun 2018-2021 124
Gambar 7.1 Prevalensi Status Gizi Balita Menurut Provinsi Tahun 2021 125
Gambar 7.3 Tren Persentase Baduta (0-23 Bulan) yang Pernah Diberi ASI Tahun 2017-2021 127
Gambar 7.4 Persentase Baduta (0-23 Bulan) yang Pernah Diberi ASI Menurut Rata-Rata Lama Pemberian ASI (Bulan) Tahun 2021 128
Gambar 7.5 Persentase Baduta (0-23 Bulan) yang Pernah Diberi ASI Menurut Provinsi Tahun 2021 129
Gambar 7.5 Persentase Bayi Umur Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapatkan ASI Eksklusif Menurut Provinsi Dan Tipe Daerah Tahun 2021 131
Gambar 7.5 Persentase Bayi Umur Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapatkan ASI Eksklusif Menurut Provinsi Dan Tipe Daerah Tahun 2021 132
Gambar 7.8 Persentase Anak Berumur 12-23 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap Menurut Tipe Daerah Tahun 2021 133
Gambar 7.9 Persentase Anak Berumur 12-23 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap Menurut Provinsi Tahun 2021 135
Gambar 7.10 Persentase Anak yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2021 137
Gambar 7.11 Persentase Anak yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2021 138
Gambar 7.12 Persentase Anak yang Sakit (Terganggu Pekerjaan, Sekolah, Atau Kegiatan Sehari-Hari) Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2021 139
Gambar 7.13 Persentase Anak yang Sakit (Terganggu Pekerjaan, Sekolah, Atau Kegiatan Sehari-Hari) Menurut Provinsi Tahun 2021 140
Gambar 7.14 Persentase Anak yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2021 141
Gambar 7.15 Persentase Anak yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi Tahun 2021 143

Gambar 7.16 Persentase Anak yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Berdasarkan Tempat Rawat Inap Tahun 2021 144
Gambar 7.17 Tren Persentase Anak Umur 5-17 Tahun yang Merokok pada Tahun 2019-2021 145
Gambar 7.18 Persentase Anak Umur 5-17 yang Merokok Menurut Jumlah Batang Rokok yang Dihisap Per Minggu Pada Tahun 2021 147
Gambar 7.19 Persentase Anak yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Tipe Daerah dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki Pada Tahun 2021 148
Gambar 7.20 Persentase Anak yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi pada Tahun 2021 149
Gambar 7.21 Persentase Anak yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Menurut Tipe Daerah dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan pada Tahun 2021 150
Gambar 7.22 Persentase Anak yang Pernah Dirawat Inap dalam Satu Tahun Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan pada Tahun 2021 151

BAB VIII
Gambar 8.1 Tren APS Penduduk Umur 7-18 Tahun (2017-2021) 191
Tabel 8.1 APS Penduduk Umur 7-18 Tahun Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2021 191
Tabel 8.2 Tren APM dan APK penduduk umur 7-18 tahun (2017-2021) 193
Tabel 8.3 APM Penduduk Umur 7-18 Tahun Menurut Jenjang Pendidikan dan Tipe Daerah/ Jenis Kelamin Tahun 2021 195
Tabel 8.4 APK penduduk umur 7-18 tahun menurut tipe daerah, jenis kelamin dan jenjang pendidikan tahun 2021 196
Gambar 8.2 Persentase Anak Umur 5-17 Tahun yang Melek Huruf Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2021 197
Gambar 8.3 Persentase Anak Umur 5-17 Tahun yang Melek Huruf Menurut Provinsi Tahun 2021 199
Gambar 8.4 Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Memperoleh PIP Menurut Tipe Daerah Tahun 2021 201
Gambar 8.5 Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Memperoleh PIP Menurut Provinsi Tahun 2021 202
Gambar 8.6 Ilustrasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) 203
Gambar 8.7 Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Memperoleh PIP dan Memiliki KIP Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2021 204

BAB IX

Gambar 9.1 Persentase Anak Menurut Tipe Daerah dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal Tahun 2021 230
Gambar 9.2 Persentase Anak yang Tinggal di Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak Menurut Tipe Daerah Tahun 2021 232
Gambar 9.3 Persentase Anak yang Tinggal di Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Layak Menurut Provinsi Tahun 2021 233
Gambar 9.4 Persentase Anak yang Tinggal di Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Tipe Daerah Tahun 2021 234
Gambar 9.5 Persentase Anak yang Tinggal di Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Provinsi Tahun 2021 235

BAB X

Gambar 10.1 Persentase Anak yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Menurut Provinsi Tahun 2021 242
Gambar 10.2 Tren persentase anak yang bekerja Tahun 2017-2021 246
Gambar 10.3 Tren persentase anak yang bekerja Tahun 2017-2021 247
Gambar 10.4 Persentase Anak Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi Tahun 2021 248
Tabel 10.1 Persentase Penduduk Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin, Tipe Daerah dan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2021 250
Tabel 10.1 Persentase Penduduk Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin, Tipe Daerah dan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2021 251
Gambar 10.5 Persentase Penduduk Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi dan Sektor Pekerjaan Utama Tahun 2021 252
Tabel 10.3 Persentase penduduk umur 10-17 tahun yang bekerja menurut jenis kelamin dan jam kerja pada pekerjaan utama tahun 2021 253
Tabel 10.4 Persentase penduduk umur 10-17 tahun yang bekerja menurut tipe daerah dan jam kerja pada pekerjaan utama tahun 2021 255
Gambar 10.6 Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Penduduk Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 257
Gambar 10.7 Tren Kasus KtA Tahun 2019-Juni 2022 262
Gambar 10.8 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Provinsi Tahun 2021 264
Gambar 10.9 Tren Jumlah Korban KtA Tahun 2021 265
Gambar 10.10 Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Status Perkawinan Tahun 2021 267

Gambar 10.11 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan Tahun 2021 268
Gambar 10.12 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Layanan yang Diterima Tahun 2021 269
Gambar 10.13 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Tempat Kejadian Tahun 2021 270
Gambar 10.14 Persentase Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hubungan Pelaku dengan Korban Tahun 2021 271

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, ciri, serta sifat khusus yang wajib dilindungi demi kepentingan bangsa di masa depan. Namun pada saat yang bersamaan, dalam aspek sosiologis, anak adalah salah satu bagian dari kelompok sosial yang diposisikan pada posisi yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempatnya berinteraksi (Ahmad, 2007). Adanya penempatan posisi anak pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok sosial yang lain mengindikasikan bahwa anak perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus dari masyarakat sosial di mana anak tersebut berada. Perlindungan anak adalah tanggung jawab seluruh pihak, baik bagi orang tua, keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan negara yang artinya bahwa anak harus mendapat perlindungan secara terus menerus demi tercapainya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya (UNICEF, 2020).

Sebagai bentuk partisipasi secara aktif dalam upaya perlindungan anak, Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut serta dalam meratifikasi hak konvensi anak serta memiliki komitmen untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya terkait pembangunan anak (Kemen PPPA, 2018). Selain itu, pemerintah Indonesia juga menjadikan pembangunan sumber daya manusia sebagai fokus utama untuk mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 yang dicantumkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki tujuan yang jelas dalam meningkatkan kesejahteraan manusia termasuk juga kesejahteraan anak.

Menurut UNICEF dan Bappenas (2017), Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan harus dimulai dari pembangunan anak-anak. Apabila seorang anak dapat dipastikan tumbuh bebas dari kemiskinan, memiliki tubuh yang sehat, terdidik, serta merasa aman dan bahagia, maka anak tersebut dapat dipastikan akan tumbuh menjadi seorang manusia

dewasa yang dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan negaranya. Hal ini yang mendasari SDGs lebih menekankan pada pembangunan dalam menciptakan sumber daya anak yang berkualitas sebagai generasi penerus bangsa.

Hasil Proyeksi Interim Penduduk tahun 2021 menunjukkan bahwa sebanyak 79.486.424 jiwa penduduk Indonesia adalah penduduk dengan usia anak (0-17 tahun). Di sisi lain, masih terdapat berbagai macam masalah yang terjadi pada anak-anak Indonesia terutama dalam kesenjangan sosial (Kemen PPPA, 2019). Meskipun sudah dipahami bersama bahwa kesenjangan sosial dapat menurunkan sumber daya anak yang berkualitas dan akan diikuti dengan menurunnya sumber daya manusia yang berkualitas pula.

Beberapa permasalahan terkait anak di Indonesia diantaranya yaitu banyaknya kasus ketidakjelasan identitas yang dapat meningkatkan kasus eksploitasi anak (Kemen PPPA, 2018), meningkatnya intensitas penggunaan gawai pada anak-anak tanpa diikuti pengawasan yang terkontrol baik (Chairulhaq et al., 2021), tingginya persentase anak yang bekerja (Sakernas, 2018), serta tingginya sanitasi buruk yang menyebabkan berbagai penularan virus dan bakteri penyakit, stunting, dampak negatif bagi pendidikan anak-anak bahkan kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga serta negara (Bappenas & UNICEF, 2017).

Untuk menanggulangi beragam permasalahan yang terkait dengan anak tersebut, diperlukan sebuah perencanaan maupun implementasi program dan kebijakan yang didasarkan atas data. Data-data tersebut yang kemudian dapat menggambarkan kondisi anak-anak di Indonesia secara faktual dan menyeluruh di berbagai bidang. Data ini dinilai sangat penting sebagai referensi para pengambil kebijakan maupun stakeholders terkait anak untuk menyusun langkah, baik pencegahan maupun penanggulangan masalah anak di Indonesia. Dengan demikian, beragam kebijakan maupun program dapat tepat sasaran dan menjawab kebutuhan di lapangan. Oleh karena itu, Kemen PPPA berinisiatif untuk menyusun buku Profil Anak Indonesia tahun 2022 yang dapat menyajikan beberapa dimensi sehingga dapat mendeskripsikan berbagai kondisi anak-anak di Indonesia. Dengan adanya data sebagai landasan dalam memantau dan mengungkap permasalahan serta kondisi anak-anak di Indonesia, diharapkan dapat membantu pemerintah serta lembaga terkait untuk mengkonstruksi program dan kebijakan yang mampu memperbaiki kualitas hidup serta sumber daya anak-anak di Indonesia.

1.2. Tujuan

Publikasi Profil Anak Indonesia tahun 2022 ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi serta menggambarkan kondisi anak-anak di Indonesia selama tahun 2021 dan beberapa tahun sebelumnya kepada seluruh pihak yang terkait, termasuk pemerintah, lembaga, institusi swasta, dan masyarakat luas. Adanya data berupa fakta statistik ini diharapkan dapat menjadi landasan dan masukan mengenai perencanaan serta evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan anak yang telah, sedang, maupun akan berlangsung secara sistematis dan tepat sasaran. Kondisi anak-anak di Indonesia yang disajikan dalam publikasi ini terdiri atas beberapa dimensi informasi tentang anak. Diantaranya yaitu informasi terkait demografi, hak sipil anak, akses anak terhadap teknologi informasi dan komunikasi, partisipasi anak dalam pertemuan dan kegiatan organisasi serta sosial kemasyarakatan, pengasuhan, angka kesiapan sekolah, perkawinan anak, kesehatan dan jaminan kesehatan anak, pendidikan anak, perumahan dan sanitasi, anak terlantar, anak bekerja, dan kekerasan terhadap anak.

1.3. Sumber Data

Data publikasi yang dianalisis bersumber dari berbagai macam sumber data baik dari BPS maupun luar BPS atau instansi lain. Berikut adalah sumber data yang digunakan dalam Profil Anak Indonesia tahun 2022:

1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas): Kor dan MSBP (Modul Sosial Budaya dan Pendidikan), 2021;
2. Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023;
3. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2021;
4. Simfoni PPA, Kemen PPPA, 2019-2022;
5. Studi Status Gizi Indonesia, 2021;
6. Survei Status Gizi Balita Indonesia, 2019;
7. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2018.

1.4. Sistematika Penyajian

Buku Profil Anak Indonesia tahun 2022 ini terdiri atas sepuluh bab yang disajikan secara informatif menggunakan tabel atau grafik serta dilengkapi dengan narasi dan analisis. Pemilihan bab pada buku ini dilakukan secara tematik dan beririsan dengan lima

kelompok pada Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 tahun 1990 yaitu: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dan kesejahteraan dasar; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan perlindungan khusus.

Bab pertama diawali dengan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang penyusunan publikasi buku Profil Anak Indonesia tahun 2022, tujuan, sumber data, dan sistematika penyajian. Bab kedua membahas tentang komposisi penduduk anak yang berusia 0-17 tahun. Bab ketiga menjabarkan tentang hak sipil anak yaitu kepemilikan akta kelahiran. Bab keempat mengulas tentang akses anak terhadap teknologi informasi dan komunikasi berupa perangkat telepon seluler, komputer, serta internet. Bab kelima mengulas tentang partisipasi anak dalam pertemuan (rapat), kegiatan organisasi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Bab keenam menyajikan informasi tentang pengasuhan anak yang terdiri dari keikutsertaan PAUD, angka kesiapan sekolah, persentase anak yang tidak tinggal dengan kedua orang tua, aktivitas anak bersama orang tua/wali, pengasuhan tidak layak, dan perkawinan anak.

Bab ketujuh pada buku ini membahas tentang kesehatan anak seperti status gizi anak, cakupan pemberian Air Susu Ibu (ASI), imunisasi, keluhan kesehatan anak, anak perokok, dan jaminan kesehatan anak. Bab kedelapan menyajikan tentang potret pendidikan anak Indonesia yaitu angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK), angka melek huruf, angka putus sekolah, dan program Indonesia pintar. Bab sembilan membahas mengenai perumahan dan sanitasi yang layak. Terakhir bab kesepuluh berisi data anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus dan terdiri dari anak terlantar yang hidup di bawah garis kemiskinan, anak yang bekerja, dan kekerasan yang terjadi pada anak.

KOMPOSISI PENDUDUK ANAK
usia 0 s.d. 17 tahun

193.196.091 (70,85%) ≥18

≤17 79.486.424 (29,15%)

TOTAL PENDUDUK 272.682.515 JIWA

ANAK PEREMPUAN
38.701.446 (48,69%)

ANAK LAKI-LAKI
40.784.978 (51, 31%)

Sumber: Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023, BPS

Overview

Pembahasan pada BAB 2 diawali dengan uraian mengenai perbandingan jumlah penduduk anak (0-17 tahun) dibandingkan jumlah penduduk dewasa yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Selanjutnya ditampilkan informasi tren persentase penduduk berusia anak berdasarkan proyeksi penduduk interim tahun 2021-2023. Komposisi Penduduk Anak (Umur 0-17 tahun) yang akan dijelaskan adalah informasi tentang persentase penduduk anak yang tidak hanya dilihat berdasarkan perbandingannya dengan penduduk dewasa, namun juga berdasarkan kelompok umur, tipe daerah dan jenis kelamin, serta berdasarkan provinsi. Tersedianya data komposisi penduduk anak bermanfaat guna mengetahui karakteristik penduduk anak.

2.1. Persentase Penduduk Anak Dibandingkan Dewasa

Negara Indonesia dengan luas wilayah sebesar 1.916.906,77 km^2 (Badan Pusat Statistik, 2022) memiliki jumlah penduduk sebanyak 272.682.515 jiwa (Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023, BPS 2021). Dari jumlah penduduk tersebut, sebanyak 79.486.424 jiwa adalah penduduk dengan usia anak (0-17 tahun). Sedangkan sisanya, yaitu sebanyak 193.196.091 jiwa atau sebanyak 70,85 persen adalah penduduk usia dewasa (Gambar 2.1).

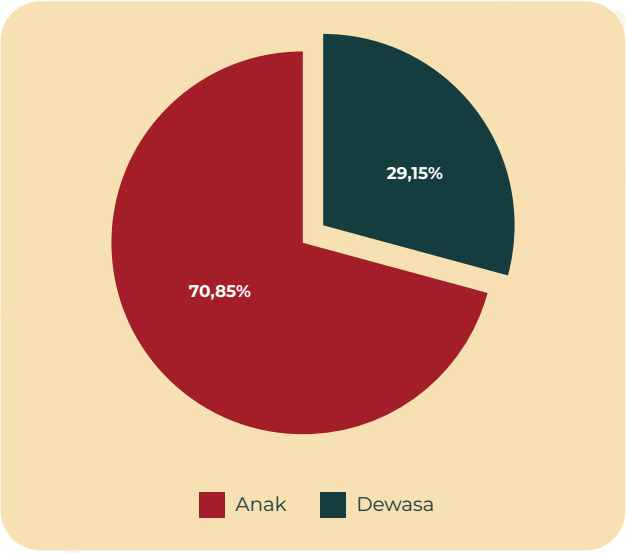

Gambar 2.1 Persentase penduduk anak dibandingkan dewasa, 2021
Sumber: Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023, BPS 2021

2.2. Tren Persentase Penduduk Anak 2021-2023 (Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023)

Data hasil proyeksi penduduk interim 2020-2023 menunjukkan bahwa selama kurun waktu tiga tahun, yaitu sejak 2021 sampai dengan 2023, terjadi perubahan jumlah penduduk anak di Indonesia. Persentase penduduk anak paling tinggi adalah di tahun 2021, yakni sebesar 29,15 persen. Pada tahun 2022, terjadi penurunan persentase penduduk anak, menjadi sebesar 28,82 persen. Hasil proyeksi juga menunjukkan bahwa kembali terjadi penurunan persentase penduduk anak di tahun 2023, dengan besar penurunan sebesar 0,30 persen, sehingga menjadi 28,52 persen. Tren persentase penduduk anak tahun 2021 sampai dengan 2023 secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.2.

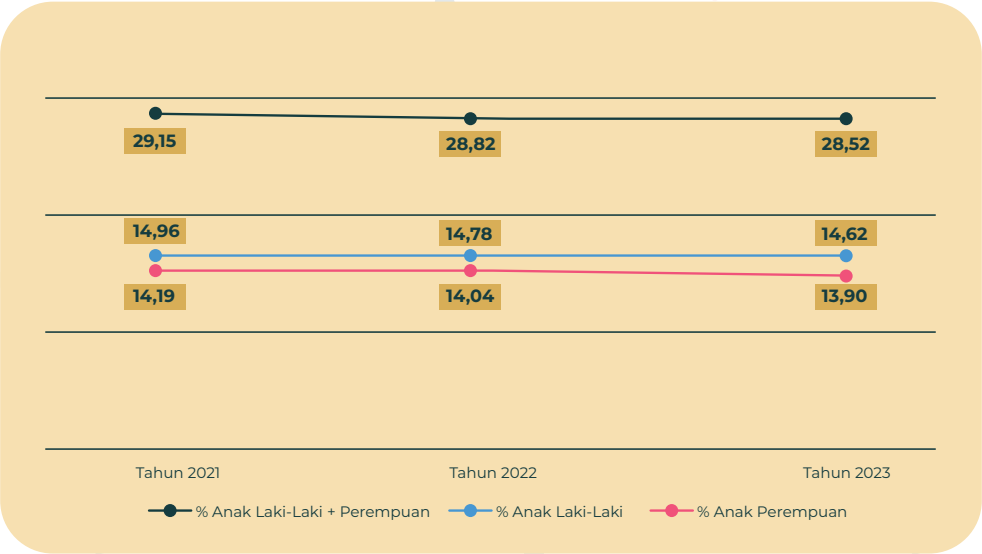

Gambar 2.2 Tren Persentase Penduduk Anak (2021-2023)
Sumber: Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023, BPS 2021

Perubahan pada jumlah penduduk anak menunjukkan terjadinya dinamika secara kuantitas yang dapat dipengaruhi oleh faktor kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan/ migrasi (Wiguna, 2020). Kondisi penurunan persentase penduduk anak pada tahun 2021 sampai dengan 2023, dapat dielaborasikan dengan tren Angka Fertilitas Total/ Total Fertility Rate (TFR) Indonesia sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 (Gambar 2.3), yaitu terjadi penurunan TFR yang berarti terjadi penurunan jumlah anak-anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (Badan Pusat Statistik, 2020).

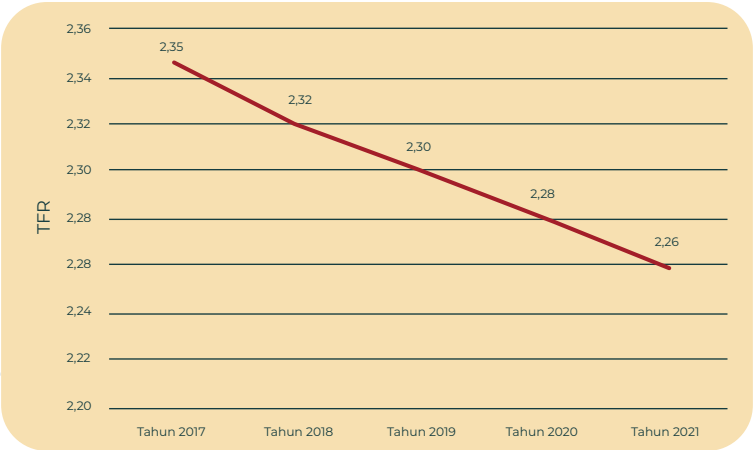

Gambar 2.3 Tren Total Fertility Rate/ TFR (2017-2021)
Sumber: Indonesia Fertility Rate 1950-2022 | MacroTrends

Terjadinya penurunan TFR selama lima tahun terakhir tentu tidak terlepas dari berbagai faktor yang menjadi penghambat terjadinya kelahiran. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah: keberhasilan implementasi Program Keluarga Berencana (KB) maupun trend untuk melakukan penundaan usia perkawinan yang semakin marak terjadi di kalangan anak muda saat ini dengan alasan menyelesaikan pendidikan dan/atau pekerjaan (Wiguna, 2020). Meskipun beberapa faktor lain juga memungkinkan untuk menyebabkan terhambatnya proses kelahiran, namun dapat diprediksi bahwa penurunan TFR di Indonesia secara bertahap merupakan dampak atas semakin majunya pemikiran wanita Indonesia dengan semakin banyak pandangan-pandangan tradisional yang ditinggalkan. Bahkan tidak jarang wanita Indonesia menunda usia perkawinannya demi menyelesaikan pendidikan atau karir. Hal inilah yang diprediksi sebagai penyebab utama terjadinya penurunan jumlah penduduk usia anak di Indonesia, khususnya sejak tahun 2019 hingga 2021.

Selanjutnya, dapat dilihat komposisi penduduk berdasarkan angkatan usia atau generasi, dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2020, yang menemukan bahwa dari 270.200.000 jiwa penduduk Indonesia, dapat dikelompokkan menjadi enam generasi, yaitu (Badan Pusat Statistik, 2021):

1. Pre-Boomer (lahir sebelum tahun 1945)
2. Baby Boomer (lahir pada tahun 1946 – 1964)
3. X (lahir pada tahun 1965 - 1980)
4. Milenial (lahir pada tahun 1981 - 1996)
5. Z (lahir pada tahun 1997 – 2012)
6. Post Z (lahir pada tahun 2013 dan setelahnya).

Data menunjukkan bahwa kelompok penduduk dengan persentase terendah adalah kelompok generasi pre-boomer dengan persentase sebesar 1,87 persen Sementara itu, persentase tertinggi adalah kelompok generasi Z, yakni sebanyak 27,94 persen dari total penduduk Indonesia. Sedangkan penduduk usia anak (umur 0-17 tahun) termasuk dalam generasi Z dan Post Z dalam kelompok generasi ini, yaitu tepatnya mereka yang lahir pada tahun 2005 dan setelahnya. Hasil analisis komposisi penduduk menurut generasi pada tahun 2021 disajikan secara lengkap pada Gambar 2.4.

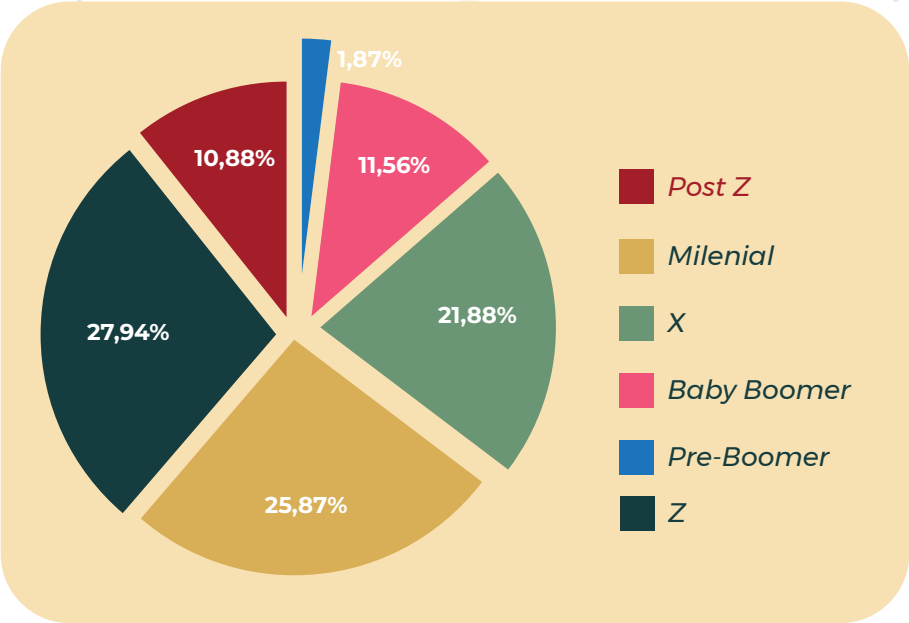

Gambar 2.4 Komposisi penduduk menurut generasi, 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Sebagai generasi dengan persentase tertinggi di Indonesia, generasi anak yang tergolong dalam generasi Z memiliki beberapa ciri khusus yang membedakan generasi Z dengan generasi lainnya, diantaranya (Jenkins, 2017): 1) Lahir dan tumbuh pada era digital, di mana terjadi kemajuan pesat dalam hal teknologi informasi dan konektivitas; 2) Memiliki karakter yang lebih beragam dalam pemikiran, perilaku dan budaya; 3) Generasi Z merupakan generasi tanpa batas (boundary-less generation) karena kemudahan dalam berkomunikasi dan berkolaborasi di seluruh dunia; dan 4) Kemudahan generasi Z dalam mengakses media sosial membuat mereka mampu untuk mempengaruhi perilaku generasi lainnya. Berbagai ciri khas Generasi Z ini tentunya tidak terlepas dari

pengaruh era digital yang menyediakan banyak sarana bagi anak-anak untuk bisa saling terhubung dan berkontribusi, salah satunya melalui media sosial. Jika diamati ciri khusus Generasi Z ini adalah potensi yang melekat pada generasi Z untuk lebih mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, khususnya lingkungan digital. Sehingga diharapkan dengan kekuatan potensi generasi Z yang ada di Indonesia, diharapkan para Generasi Z dapat berkontribusi secara lebih aktif dalam pembangunan Indonesia menuju Indonesia maju.

2.3. Persentase Penduduk Anak Menurut Jenis Kelamin

Hasil analisis atas persentase penduduk menurut jenis kelamin pada tahun 2021 disajikan pada Gambar 2.5. Data tahun 2021 menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk anak sebanyak 79.486.424 jiwa, sebanyak 51,31 persen atau sejumlah 40.784.978 jiwa adalah berjenis kelamin laki-laki. Sementara sisanya sebesar 48,69 persen atau sebanyak 38.701.446 jiwa berjenis kelamin perempuan. Perbedaan persentase penduduk anak berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.5.

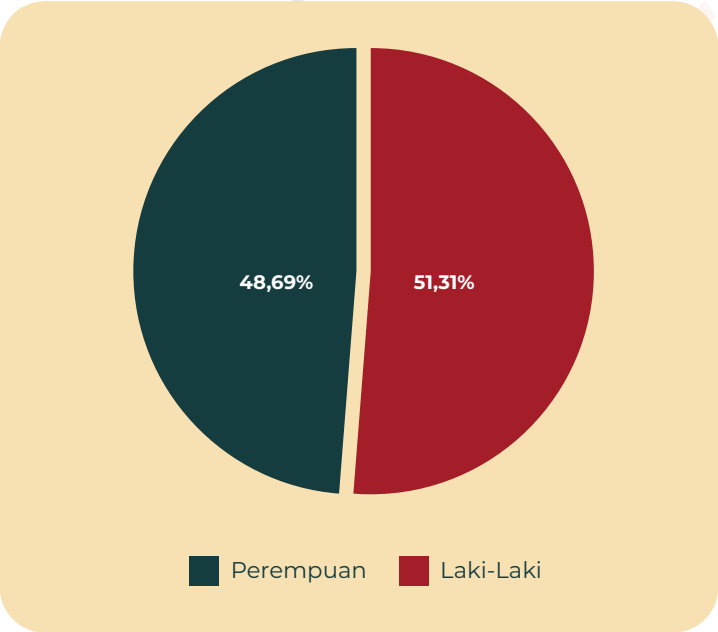

Gambar 2.5 Persentase Penduduk Anak Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021
Sumber: Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023, BPS 2021

Jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, proporsi anak menurut jenis kelamin tidak mengalami perbedaan yang signifikan, yaitu proporsi terbanyak adalah berjenis kelamin laki-laki dengan persentase sebesar 51,20 persen dan anak berjenis kelamin perempuan sebesar 48,80 persen (BPS, 2020). Hasil data Susenas menunjukkan bahwa perbedaan pada persentase penduduk anak di Indonesia menurut jenis kelamin tidak terlalu besar dan cukup berimbang. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan bagi ketimpangan pemenuhan kebutuhan serta hak-hak anak baik pada laki-laki maupun perempuan karena pada dasarnya setiap anak memiliki kesamaan kesempatan dalam kontribusi pembangunan manusia yang pada akhirnya akan berperan dalam proses pembangunan nasional negara (UNDP, 2015). Sehingga diharapkan pemenuhan hak anak baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan, termasuk pada pemenuhan hak pendidikan anak di Indonesia dapat semakin berimbang dan tidak ada ketimpangan yang signifikan.

2.4. Persentase Penduduk Anak Menurut Provinsi

Data menunjukkan bahwa persentase jumlah penduduk anak tertinggi di Indonesia berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu sebesar 34,87 persen. Sementara provinsi dengan persentase jumlah penduduk anak terkecil adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan persentase sebesar 24,49 persen. Secara rinci, persentase penduduk anak berdasarkan provinsi dapat dilihat pada Gambar 2.6.

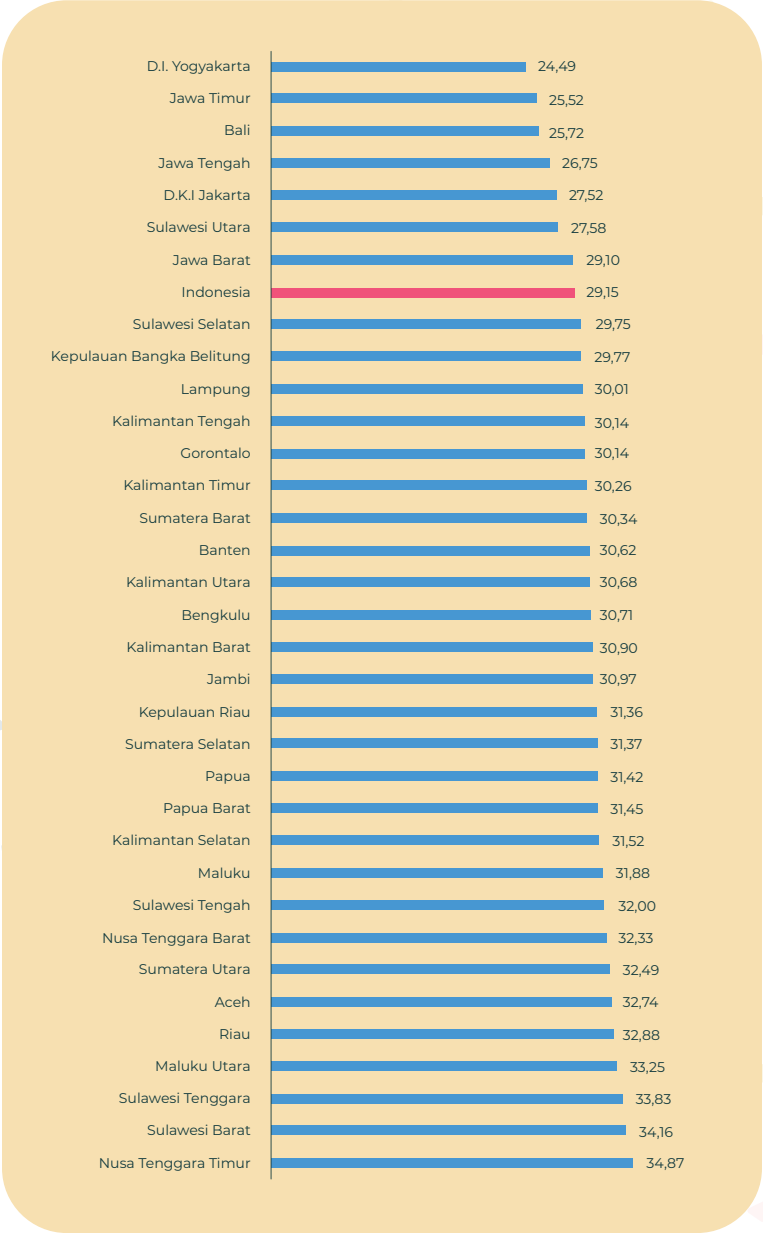

Gambar 2.6 Persentase penduduk anak menurut provinsi, 2021
Sumber: Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023, BPS 2021

Sebagai provinsi dengan persentase penduduk anak tertinggi di Indonesia, provinsi Nusa Tenggara Timur diidentifikasi sebagai provinsi dengan Angka Fertilitas Total/ Total Fertility Rate (TFR) tertinggi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka TFR di provinsi NTT adalah sebesar 3,40 (Mellinda & Sumarni, 2021). Tingginya angka TFR di provinsi ini diprediksi karena tingginya TFR pada dua Kabupaten di wilayah Provinsi NTT, yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya dengan TFR yang mencapai 5,07 dan dan Kabupaten Sumba Tengah dengan TFR yang mencapai 5,14. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa rata-rata perempuan berusia 15-49 tahun di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Tengah melahirkan setidaknya lima orang anak (Mellinda & Sumarni, 2021). Tentunya dengan semakin tinggi angka TFR akan menyebabkan semakin tingginya jumlah anak di wilayah tersebut yang berkontribusi secara signifikan bagi persentase penduduk anak di wilayah NTT.

Sebaliknya, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi dengan persentase penduduk anak terendah memiliki TFR sebesar 2,20 (Badan Pusat Statistik, 2017). Angka TFR Provinsi DI Yogyakarta tersebut masih berada di bawah TFR Indonesia yakni sebesar 2,26. Penurunan fertilitas di DI Yogyakarta diprediksi sebagai dampak positif dari semakin gencarnya masyarakat Yogyakarta menggunakan kontrasepsi secara efektif. Keberhasilan dalam penggunaan alat kontrasepsi di kalangan masyarakat Yogyakarta ini yang diprediksi sebagai penyebab rendahnya angka TFR di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Arsyad, Nugraha, & Nurhayati, 2022) sehingga berkontribusi pada rendahnya persentase penduduk anak di provinsi tersebut.

Lampiran 2.1

Jumlah Penduduk menurut Provinsi, Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	0-17 tahun		18 tahun keatas	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Aceh	895.323	850.714	1.782.332	1.805.364
Sumatera Utara	2.488.452	2.364.001	5.004.521	5.079.174
Sumatera Barat	870.164	822.948	1.940.243	1.946.877
Riau	1.096.133	1.038.883	2.228.604	2.129.983
Jambi	568.591	541.632	1.258.740	1.216.156
Sumatera Selatan	1.376.598	1.305.618	2.983.471	2.885.162
Bengkulu	320.435	303.791	719.493	689.223
Lampung	1.398.537	1.326.577	3.253.161	3.103.517
Kepulauan Bangka Belitung	225.008	213.517	532.544	502.096
Kepulauan Riau	340.806	323.502	739.911	714.020
DKI Jakarta	1.495.569	1.423.840	3.854.072	3.836.200
Jawa Barat	7.287.313	6.907.954	17.471.667	17.115.468
Jawa Tengah	5.044.130	4.783.750	13.428.497	13.486.124
DI Yogyakarta	465.573	443.530	1.373.248	1.430.545
Jawa Timur	5.346.888	5.086.518	15.047.392	15.397.991
Banten	1.896.115	1.797.426	4.251.029	4.116.905
Bali	576.507	545.373	1.617.148	1.623.710
Nusa Tenggara Barat	891.305	851.154	1.804.247	1.843.292
Nusa Tenggara Timur	960.166	918.400	1.734.131	1.775.041
Kalimantan Barat	867.791	822.924	1.943.197	1.836.885
Kalimantan Tengah	418.558	395.882	983.015	904.715
Kalimantan Selatan	666.199	633.031	1.420.304	1.403.042
Kalimantan Timur	593.143	559.042	1.387.827	1.268.223
Kalimantan Utara	112.723	106.211	263.684	231.004
Sulawesi Utara	373.953	353.848	975.614	935.216
Sulawesi Tengah	495.714	471.224	1.055.603	999.338
Sulawesi Selatan	1.394.416	1.324.855	3.143.702	3.276.558
Sulawesi Tenggara	458.813	440.684	887.840	871.819
Gorontalo	181.720	174.197	414.113	410.918
Sulawesi Barat	250.514	240.293	478.351	467.684
Maluku	305.139	288.633	637.934	630.920
Maluku Utara	221.823	210.204	443.448	423.702
Papua Barat	187.516	176.314	421.517	371.493
Papua	713.343	654.976	1.605.476	1.381.650
Indonesia	**40.784.978**	**38.701.446**	**97.086.076**	**96.110.015**

Sumber: Proyeksi penduduk interim 2020-2023, BPS, 2021

Lampiran 2.2

Jumlah Penduduk menurut Provinsi, Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin, 2022

Provinsi	0-17 tahun		18 tahun keatas	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Aceh	896.630	852.858	1.818.756	1.839.611
Sumatera Utara	2.491.640	2.369.781	5.093.353	5.160.432
Sumatera Barat	867.122	821.949	1.974.680	1.976.878
Riau	1.103.408	1.046.843	2.280.214	2.183.919
Jambi	569.258	542.779	1.280.011	1.239.088
Sumatera Selatan	1.382.277	1.312.441	3.029.335	2.932.955
Bengkulu	320.825	304.663	732.371	702.233
Lampung	1.401.072	1.329.458	3.296.145	3.149.871
Kepulauan Bangka Belitung	225.079	214.157	542.503	512.882
Kepulauan Riau	345.248	327.798	766.904	739.870
DKI Jakarta	1.483.591	1.414.668	3.892.278	3.889.414
Jawa Barat	7.281.114	6.906.246	17.786.112	17.432.336
Jawa Tengah	5.025.907	4.771.062	13.588.961	13.646.480
DI Yogyakarta	468.002	445.737	1.394.083	1.454.048
Jawa Timur	5.321.769	5.066.998	15.203.987	15.557.220
Banten	1.901.670	1.804.720	4.339.371	4.206.224
Bali	575.087	544.662	1.644.520	1.650.795
Nusa Tenggara Barat	897.680	857.651	1.844.177	1.874.163
Nusa Tenggara Timur	968.180	927.582	1.764.869	1.805.654
Kalimantan Barat	867.968	823.624	1.977.146	1.872.638
Kalimantan Tengah	417.470	395.032	1.003.411	925.162
Kalimantan Selatan	669.883	637.362	1.446.022	1.428.813
Kalimantan Timur	590.704	557.797	1.414.424	1.296.858
Kalimantan Utara	112.613	106.591	270.769	237.782
Sulawesi Utara	372.859	353.361	986.499	946.824
Sulawesi Tengah	497.656	474.388	1.074.429	1.019.670
Sulawesi Selatan	1.385.919	1.317.522	3.195.728	3.326.578
Sulawesi Tenggara	460.568	443.407	906.304	891.382
Gorontalo	180.765	173.438	420.820	417.714
Sulawesi Barat	250.443	241.156	489.206	477.801
Maluku	302.823	287.211	649.583	642.110
Maluku Utara	222.257	210.897	452.874	433.310
Papua Barat	187.932	177.028	434.954	383.393
Papua	718.676	664.548	1.630.206	1.405.151
Indonesia	**40.764.095**	**38.725.415**	**98.625.005**	**97.659.259**

Sumber: Proyeksi penduduk interim 2020-2023, BPS, 2021

Lampiran 2.3

Jumlah Penduduk menurut Provinsi, Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	0-17 tahun		18 tahun keatas	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Aceh	898.014	855.128	1.854.925	1.873.601
Sumatera Utara	2.494.461	2.375.414	5.180.980	5.240.494
Sumatera Barat	864.291	821.123	2.008.655	2.006.504
Riau	1.111.030	1.055.184	2.331.469	2.237.646
Jambi	569.928	543.908	1.300.884	1.261.724
Sumatera Selatan	1.388.056	1.319.446	3.074.237	2.979.837
Bengkulu	321.213	305.575	745.046	715.049
Lampung	1.403.548	1.332.364	3.338.026	3.195.172
Kepulauan Bangka Belitung	225.202	214.826	552.354	523.618
Kepulauan Riau	349.725	332.311	794.546	766.191
DKI Jakarta	1.472.094	1.405.232	3.928.926	3.941.978
Jawa Barat	7.277.490	6.907.256	18.095.837	17.745.022
Jawa Tengah	5.009.143	4.760.629	13.744.240	13.801.174
DI Yogyakarta	470.340	447.804	1.415.155	1.477.883
Jawa Timur	5.300.401	5.051.436	15.354.258	15.710.312
Banten	1.907.698	1.812.457	4.426.457	4.294.567
Bali	573.973	544.293	1.671.759	1.677.691
Nusa Tenggara Barat	904.021	864.304	1.883.803	1.904.375
Nusa Tenggara Timur	976.203	936.861	1.795.454	1.835.968
Kalimantan Barat	868.364	824.558	2.010.531	1.907.919
Kalimantan Tengah	416.539	394.421	1.023.543	945.331
Kalimantan Selatan	673.625	641.775	1.471.351	1.454.255
Kalimantan Timur	588.242	556.549	1.440.695	1.325.268
Kalimantan Utara	112.573	106.997	277.854	244.617
Sulawesi Utara	371.861	352.977	997.061	958.131
Sulawesi Tengah	499.892	477.777	1.092.954	1.039.804
Sulawesi Selatan	1.377.868	1.310.837	3.247.338	3.375.976
Sulawesi Tenggara	462.458	446.295	924.720	910.887
Gorontalo	179.866	172.720	427.438	424.449
Sulawesi Barat	250.379	241.982	500.026	487.929
Maluku	300.609	285.942	661.143	653.153
Maluku Utara	222.786	211.703	462.219	442.838
Papua Barat	188.294	177.740	448.548	395.382
Papua	724.309	674.425	1.653.998	1.427.823
Indonesia	**40.754.496**	**38.762.249**	**100.136.430**	**99.182.568**

Sumber: Proyeksi penduduk interim 2020-2023, BPS, 2021

HAK SIPIL ANAK

3 Provinsi dengan kepemilikan akta kelahiran terendah di Indonesia

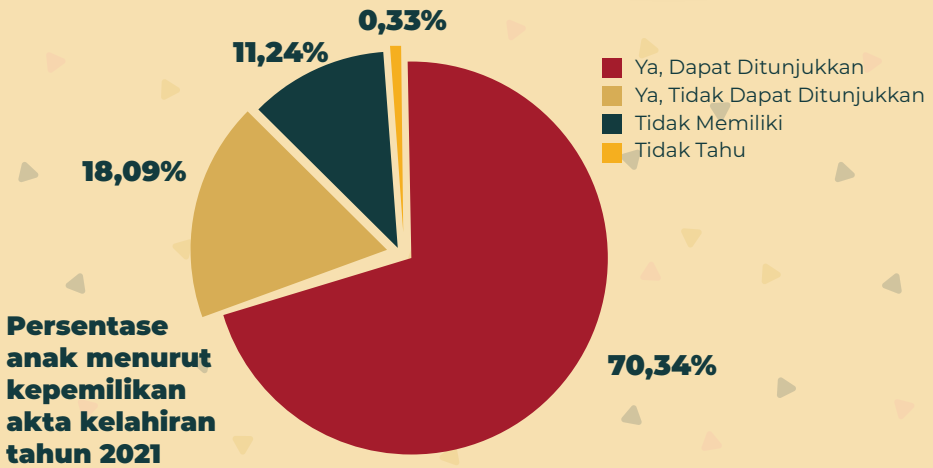

Persentase anak menurut kepemilikan akta kelahiran tahun 2021

Perdesaan
85,32 % Memiliki
14,68 % Tidak Memiliki

Perkotaan
90,91 % Memiliki
09,09 % Tidak Memiliki

Perkotaan + Perdesaan
88,42 % Memiliki
11,58 % Tidak Memiliki

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2021

Overview

Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2021 menunjukkan bahwa kepemilikan akta kelahiran anak yang berusia 0-17 tahun mengalami peningkatan pada lima tahun terakhir. Persentase kepemilikan akta kelahiran tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 88,42 persen. Adanya tren peningkatan ini dapat dilihat dari beberapa program serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan bantuan serta dukungan dari lembaga terkait lainnya. Namun, tercatat sebanyak 14,68 persen anak yang tinggal di daerah perdesaan dan 9,09 persen anak yang tinggal di daerah perkotaan masih belum memiliki akta kelahiran.

3.1. Persentase Anak Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran

Salah satu hak yang dimiliki oleh anak adalah hak berupa identitas diri yang diberikan sejak kelahirannya. Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak-Hak Anak yang diadopsi oleh pemerintah di seluruh dunia termasuk di Indonesia yang tertuang pada pasal 7 bahwa anak memiliki hak atas sebuah kewarganegaraan dan catatan kelahirannya secara resmi (UNICEF Indonesia, n.d). Selain itu, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 27 juga menyebutkan bahwa identitas diri setiap anak yang berupa akta kelahiran harus diberikan sejak kelahiran anak tersebut. Dengan demikian, pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melakukan pendataan mengenai akta kelahiran yang dimiliki anak (0-17 tahun) dengan harapan seluruh anak-anak di Indonesia dapat terpenuhi haknya, khususnya hak sipil dan kebebasan.

Akta kelahiran didefinisikan sebagai dokumen penting yang harus dimiliki oleh tiap anak. kelahiran seorang anak yang tidak/belum tercatat pada akta kelahiran dapat menimbulkan permasalahan yang terjadi pada anak. Pendataan terkait persentase penduduk umur 0-17 tahun menurut kepemilikan akta kelahiran dari kantor catatan sipil pada tahun 2021 dibagi menjadi empat kelompok. Empat kelompok tersebut adalah: 1) kelompok yang memiliki akta kelahiran dan dapat menunjukkannya; 2) kelompok yang memiliki akta kelahiran namun tidak dapat menunjukkannya; 3) kelompok yang tidak memiliki akta kelahiran; dan 4) kelompok

yang tidak tahu tentang kepemilikan akta kelahirannya. Hasil analisis atas kepemilikan akta kelahiran berdasarkan Susenas (2021) dipresentasikan pada Gambar 3.1.

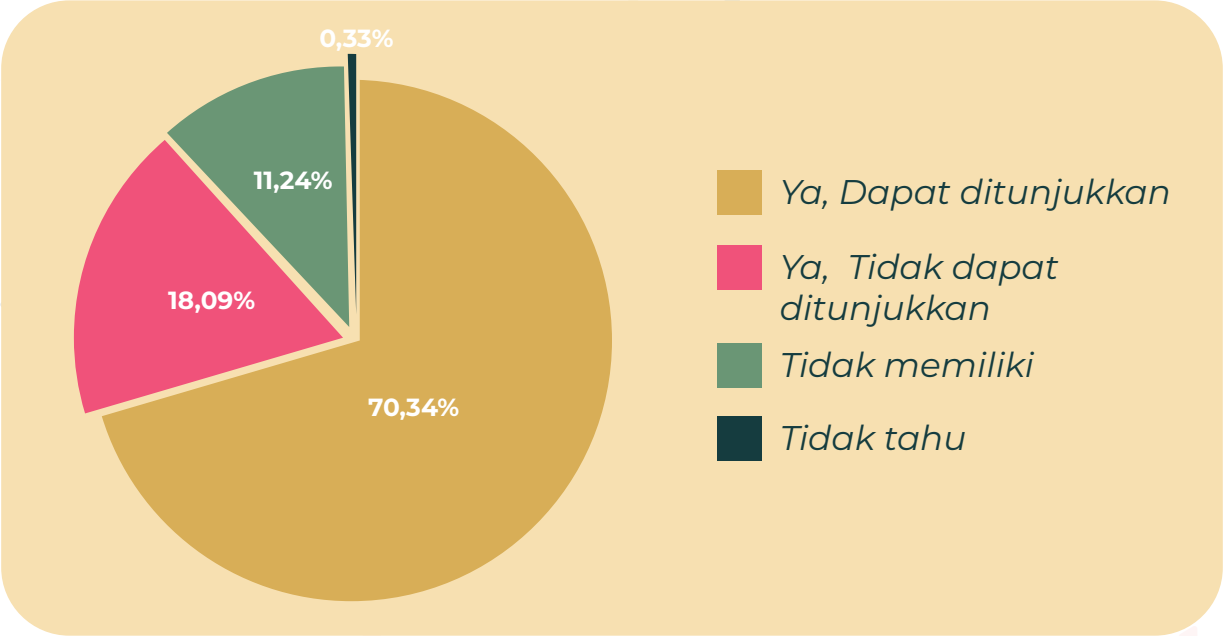

Gambar 3.1 Persentase Anak Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

Data menunjukkan bahwa sebanyak 88,42 persen anak Indonesia sudah memiliki akte kelahiran, baik yang dapat ditunjukkan atau tidak dapat ditunjukkan. Akan tetapi, masih ada sebanyak 11,24 persen anak Indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran. Bahkan, sebanyak 0,33 persen lainnya diidentifikasi tidak tahu menahu dan tidak memiliki informasi atas kepemilikan akta kelahiran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar anak telah memiliki akta kelahiran, namun pemerintah masih harus berupaya untuk mencapai target nasional yang tertuang dalam RPJMN yaitu 100 persen anak Indonesia memiliki akta kelahiran pada tahun 2024.

3.2. Tren Kepemilikan Akta Kelahiran

Kemen PPPA (2018) menyatakan bahwa ketidakjelasan identitas seorang anak berupa kepemilikan akta kelahirannya dapat meningkatkan kesempatan eksploitasi yang dilakukan terhadap anak. Berbagai bentuk eksploitasi tersebut diantaranya perdagangan bayi dan anak, eksploitasi terhadap pekerja anak,

ataupun kekerasan terhadap anak. Bahkan, laporan UNICEF pada tahun 1998 memperkirakan bahwa terdapat 40.000-70.000 anak di Indonesia yang tereksploitasi seksual dan dilacurkan termasuk anak jalanan di dalamnya (Kemen PPPA, 2016). Permasalahan ini seharusnya segera menjadi perhatian pemerintah maupun berbagai pihak lainnya agar jumlah anak yang menjadi korban eksploitasi termasuk di dalamnya sebagai akibat dari ketidakjelasan identitas diri anak tidak bertambah.

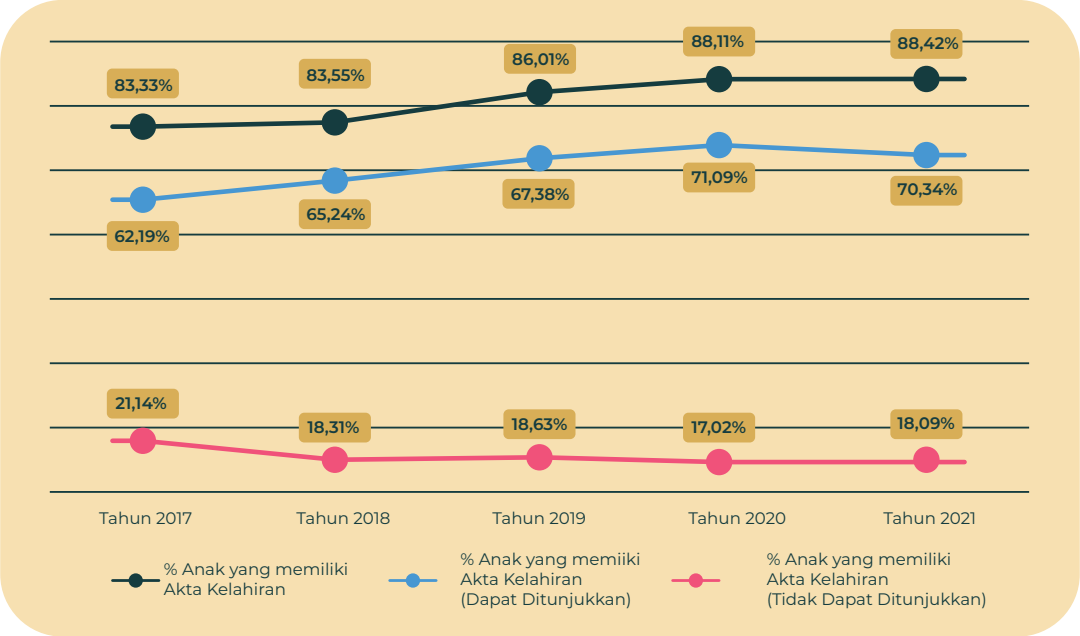

Gambar 3.2 Tren Kepemilikan Akta Kelahiran (2017-2021)
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017-2021, BPS

Kepemilikan akta kelahiran pada anak di Indonesia menunjukkan angka yang cukup fluktuatif namun menunjukkan tren yang positif dengan adanya peningkatan selama lima tahun terakhir (Gambar 3.2). Persentase kepemilikan akta kelahiran tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu 88,42 persen. Sementara itu, persentase kepemilikan akta kelahiran terendah terjadi pada tahun 2017 adalah 83,33 persen. Tren positif ini menunjukkan bahwa terdapat perbaikan dan peningkatan pemenuhan hak anak berupa pemenuhan hak sipil anak di Indonesia.

Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari beragam program dan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak anak terkait akta kelahiran, yaitu dengan adanya pemberlakuan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Selain itu, sejak tahun 2012 juga

diterbitkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran, dan penerimaan bantuan dari lembaga terkait lainnya.

Undang-undang dan Peraturan Menteri tersebut menekankan pentingnya akta kelahiran dan menyebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 60 hari sejak kelahiran di tempat tersebut. Selain itu, UNICEF Indonesia (2020) juga melaporkan adanya Program Percontohan Akta Kelahiran yang dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam memperkuat sistem registrasi kelahiran di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan di beberapa daerah yang mengalami kesulitan geografis dalam mendaftarkan kelahiran anak mereka, pemerintah telah mengimplementasikan program pendataan ke lapangan yang bertujuan untuk menyediakan kemudahan bagi orang tua untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak mereka.

3.3. Persentase Anak Menurut Tipe Daerah dan Kepemilikan Akta Kelahiran

Data Susenas pada tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kepemilikan akta kelahiran anak berdasarkan tipe daerah, yaitu daerah perkotaan dan perdesaan. Hasil analisis atas persentase anak menurut tipe daerah dan kepemilikan akta kelahiran disajikan pada Gambar 3.3. Data menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perdesaan memiliki persentase kepemilikan akta kelahiran yang lebih rendah yaitu 85,32 persen jika dibandingkan anak-anak yang bertempat tinggal di daerah perkotaan yaitu 90,91 persen.

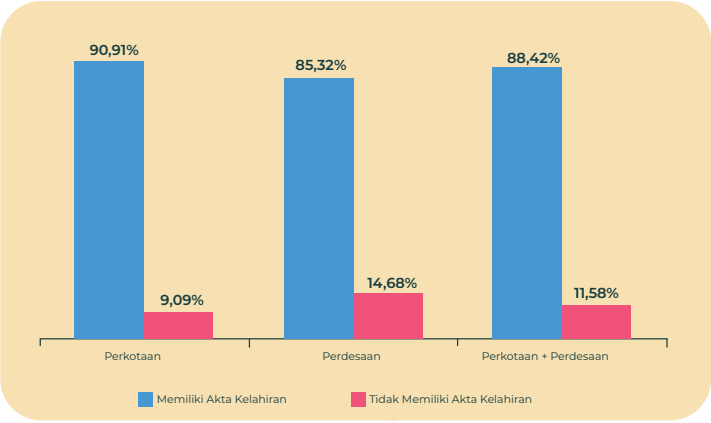

Gambar 3.2 Persentase Anak Menurut Tipe Daerah dan Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

Adanya perbedaan dalam persentase kepemilikan akta kelahiran menurut tipe daerah sebesar 5,59 persen ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. UNICEF (2020) menyebutkan dalam laporannya bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan perbedaan ini dapat dilihat dari jarak yang cukup jauh untuk mengakses layanan registrasi sipil pada daerah perdesaan. UNICEF juga menyebutkan bahwa pelayanan gratis dalam membuat akta kelahiran tidak berpengaruh terlalu banyak pada keluarga yang kurang mampu. Hal ini disebabkan karena terdapat biaya tidak langsung yang harus dikeluarkan oleh keluarga untuk mengakses dan mendapatkan layanan gratis tersebut.

Lokasi kantor layanan pencatatan sipil yang hanya ada satu pada setiap wilayah kabupaten/kota menyebabkan penduduk desa yang berada pada daerah kabupaten yang luas, penduduk pedalaman, kepulauan, maupun yang berada di wilayah perbatasan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan tersebut. Selain itu, adanya permasalahan orang tua seperti status pernikahan orang tua, kepemilikan dokumen kependudukan, dan faktor ekonomi orang tua juga menjadi beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya seorang anak untuk mendapatkan akta kelahirannya (Setiawan, 2017). Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk terus melakukan inovasi dan terobosan untuk memberikan kemudahan dalam penyediaan hak sipil anak di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di daerah perdesaan. Harapannya dengan beragam strategi memudahkan penyediaan akta kelahiran ini, gap antara kepemilikan akta kelahiran pada anak di wilayah perdesaan dan perkotaan dapat ditekan seminimal mungkin.

3.4. Persentase Anak Menurut Provinsi dan Kepemilikan Akta Kelahiran

Provinsi dengan persentase kepemilikan akta kelahiran anak terbesar adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 98,14 persen, diikuti dengan DKI Jakarta yaitu 96,93 persen, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 96,05 persen, Jawa tengah yaitu 96,03 persen, dan posisi kelima yang ditempati oleh Provinsi Bengkulu dan Aceh dengan persentase sebesar 94,52 persen (Gambar 3.4). Sementara itu, Provinsi Papua Barat memiliki persentase sebesar 74,74 persen, Nusa Tenggara Timur dengan 65,66 persen, dan Papua sebesar 45,19 persen menempati tiga posisi terakhir dalam kepemilikan akta kelahiran.

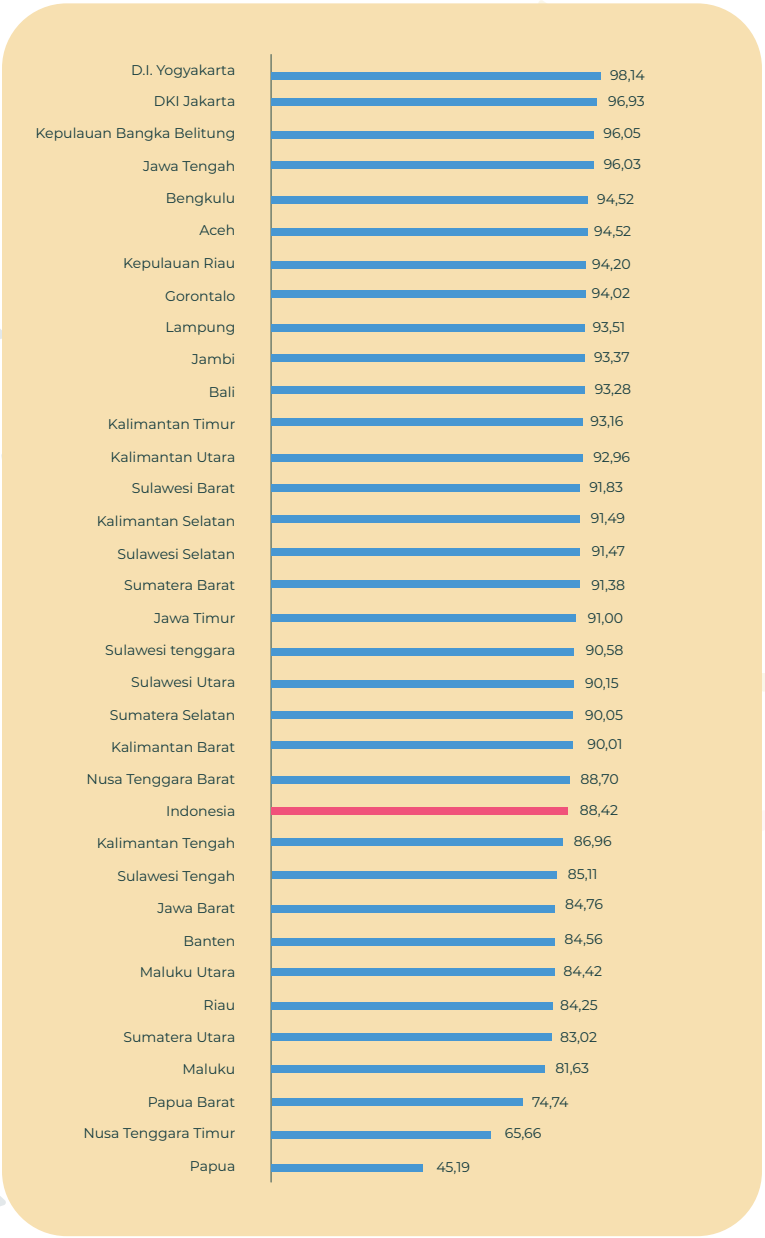

Gambar 3.4 Persentase Anak Menurut Provinsi dan Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

Hasil analisis data Susenas (2021) terkait persentase anak menurut provinsi dan kepemilikan akta kelahiran tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat rentang yang cukup jauh pada posisi provinsi dengan kepemilikan akta kelahiran tertinggi dan terendah. Perbedaan antara pesentase kepemilikan tertinggi dan terendah adalah sebesar 52,95 persen. Jika dianalisis lebih lanjut, tiga provinsi dengan kepemilikan akta kelahiran terendah adalah provinsi di wilayah Indonesia Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa

kesenjangan dalam kepemilikan akta kelahiran anak antar wilayah di Indonesia masih sangat tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu permasalahan yang terjadi dalam proses pemenuhan hak sipil atau identitas anak adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akta kelahiran (Setiawan, 2017). Selain itu, penelitian tersebut juga menyebutkan kendala lain yang dialami dalam proses pembuatan akta kelahiran adalah pelayanan yang diberikan petugas dalam proses pengurusan akta kelahiran yang belum optimal. Hal ini menyebabkan adanya keengganan masyarakat untuk berhubungan dengan petugas kantor layanan pencatatan sipil.

Sesuai dengan pernyataan tersebut, beberapa penelitian terkait pelayanan pembuatan akta kelahiran di beberapa wilayah di Provinsi Papua juga menunjukkan hasil yang serupa. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan di Kabupaten Jayawijaya, Papua, menemukan bahwa sumber daya manusia atau jumlah petugas pelayanan catatan sipil yang tersedia di wilayah Timur masih kurang (Aini & Rachman, 2020). Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun fasilitas sarana sudah tersedia di wilayah Papua, namun kapasitasnya belum memadai. Hal lainnya terkait dengan pemberian informasi mengenai persyaratan pembuatan akta kelahiran yang tidak sesuai dengan panduan, serta adanya keterlambatan dalam penyelesaian dokumen akta kelahiran dapat membuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan petugas berkurang dan masyarakat menjadi enggan untuk mengurus akta kelahiran.

Rendahnya kepemilikan akta kelahiran di wilayah Timur Indonesia salah satunya disebabkan oleh kondisi geografis yang sulit. Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya menyediakan layanan online bagi masyarakat Timur Indonesia dalam memproses akta kelahiran. Akan tetapi, pelayanan pembuatan akta kelahiran secara online di Kabupaten Mimika, Papua, masih berkualitas rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia khususnya yang berperan sebagai petugas88.42 operator serta sosialisasi mengenai inovasi pembuatan akta kelahiran menggunakan aplikasi juga dinilai kurang (Lawansi, 2022).

Berbeda halnya dengan Provinsi DI Yogyakarta yang sudah lebih inovatif dengan melakukan beberapa program pelayanan percepatan pembuatan akta kelahiran anak. Beberapa program tersebut diantaranya melalui edukasi dan sosialisasi secara

langsung ke lingkungan masyarakat serta melakukan kerja sama dengan rumah sakit, klinik, dan puskesmas untuk memastikan setiap bayi yang baru lahir sudah memiliki dokumen kependudukan (iNewsYogya.id, 2022). Adanya kesenjangan yang cukup besar pada provinsi dengan kepemilikan akta kelahiran tertinggi dan terendah ini merupakan tantangan bagi pemerintah Indonesia serta seluruh lembaga dan pihak terkait untuk terus berupaya dalam memenuhi hak tiap anak di Indonesia dalam hal penyediaan hak sipil dan kebebasan, khususnya bagi penyediaan identitas diri anak.

Lampiran 3.1

Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun menurut Provinsi dan Kepemilikan Akta Kelahiran, 2021

Provinsi	Memiliki	Tidak Memiliki	Jumlah
Aceh	94,52	5,48	100,00
Sumatera Utara	83,02	16,98	100,00
Sumatera Barat	91,38	8,62	100,00
Riau	84,25	15,75	100,00
Jambi	93,37	6,63	100,00
Sumatera Selatan	90,05	9,95	100,00
Bengkulu	94,52	5,48	100,00
Lampung	93,51	6,49	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	96,05	3,95	100,00
Kepulauan Riau	94,20	5,80	100,00
DKI Jakarta	96,93	3,07	100,00
Jawa Barat	84,76	15,24	100,00
Jawa Tengah	96,03	3,97	100,00
DI Yogyakarta	98,14	1,86	100,00
Jawa Timur	91,00	9,00	100,00
Banten	84,56	15,44	100,00
Bali	93,28	6,72	100,00
Nusa Tenggara Barat	88,70	11,30	100,00
Nusa Tenggara Timur	65,66	34,34	100,00
Kalimantan Barat	90,01	9,99	100,00
Kalimantan Tengah	86,96	13,04	100,00
Kalimantan Selatan	91,49	8,51	100,00
Kalimantan Timur	93,16	6,84	100,00
Kalimantan Utara	92,96	7,04	100,00
Sulawesi Utara	90,15	9,85	100,00
Sulawesi Tengah	85,11	14,89	100,00
Sulawesi Selatan	91,47	8,53	100,00
Sulawesi Tenggara	90,58	9,42	100,00
Gorontalo	94,02	5,98	100,00
Sulawesi Barat	91,83	8,17	100,00
Maluku	81,63	18,37	100,00
Maluku Utara	84,42	15,58	100,00
Papua Barat	74,74	25,26	100,00
Papua	45,19	54,81	100,00
Indonesia	88,42	11,58	100,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 3.2

Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun di Perkotaan menurut Provinsi dan Kepemilikan Akta Kelahiran, 2021

Provinsi	Memiliki	Tidak Memiliki	Jumlah
Aceh	95,99	4,01	100,00
Sumatera Utara	85,42	14,58	100,00
Sumatera Barat	92,08	7,92	100,00
Riau	88,85	11,15	100,00
Jambi	93,69	6,31	100,00
Sumatera Selatan	93,19	6,81	100,00
Bengkulu	95,64	4,36	100,00
Lampung	92,28	7,72	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	96,37	3,63	100,00
Kepulauan Riau	94,10	5,90	100,00
DKI Jakarta	96,93	3,07	100,00
Jawa Barat	85,16	14,84	100,00
Jawa Tengah	96,56	3,44	100,00
DI Yogyakarta	98,11	1,89	100,00
Jawa Timur	93,22	6,78	100,00
Banten	90,52	9,48	100,00
Bali	93,74	6,26	100,00
Nusa Tenggara Barat	91,92	8,08	100,00
Nusa Tenggara Timur	82,88	17,12	100,00
Kalimantan Barat	93,55	6,45	100,00
Kalimantan Tengah	91,47	8,53	100,00
Kalimantan Selatan	93,47	6,53	100,00
Kalimantan Timur	95,08	4,92	100,00
Kalimantan Utara	94,66	5,34	100,00
Sulawesi Utara	91,86	8,14	100,00
Sulawesi Tengah	89,62	10,38	100,00
Sulawesi Selatan	94,18	5,82	100,00
Sulawesi Tenggara	91,56	8,44	100,00
Gorontalo	95,04	4,96	100,00
Sulawesi Barat	94,22	5,78	100,00
Maluku	86,50	13,50	100,00
Maluku Utara	90,44	9,56	100,00
Papua Barat	85,98	14,02	100,00
Papua	87,23	12,77	100,00
Indonesia	90,91	9,09	100,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 3.3

Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun di Perdesaan menurut Provinsi dan Kepemilikan Akta Kelahiran, 2021

Provinsi	Memiliki	Tidak Memiliki	Jumlah
Aceh	93,82	6,18	100,00
Sumatera Utara	80,37	19,63	100,00
Sumatera Barat	90,75	9,25	100,00
Riau	81,25	18,75	100,00
Jambi	93,22	6,78	100,00
Sumatera Selatan	88,22	11,78	100,00
Bengkulu	93,97	6,03	100,00
Lampung	94,08	5,92	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	95,65	4,35	100,00
Kepulauan Riau	95,48	4,52	100,00
DKI Jakarta			
Jawa Barat	83,33	16,67	100,00
Jawa Tengah	95,47	4,53	100,00
DI Yogyakarta	98,20	1,80	100,00
Jawa Timur	88,27	11,73	100,00
Banten	70,91	29,09	100,00
Bali	92,18	7,82	100,00
Nusa Tenggara Barat	85,67	14,33	100,00
Nusa Tenggara Timur	60,49	39,51	100,00
Kalimantan Barat	88,11	11,89	100,00
Kalimantan Tengah	83,92	16,08	100,00
Kalimantan Selatan	89,69	10,31	100,00
Kalimantan Timur	89,19	10,81	100,00
Kalimantan Utara	90,27	9,73	100,00
Sulawesi Utara	88,20	11,80	100,00
Sulawesi Tengah	83,16	16,84	100,00
Sulawesi Selatan	89,30	10,70	100,00
Sulawesi Tenggara	90,04	9,96	100,00
Gorontalo	93,29	6,71	100,00
Sulawesi Barat	91,23	8,77	100,00
Maluku	78,30	21,70	100,00
Maluku Utara	82,31	17,69	100,00
Papua Barat	67,14	32,86	100,00
Papua	30,25	69,75	100,00
Indonesia	85,32	14,68	100,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 3.4

Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 0-17 Tahun menurut Provinsi dan Kepemilikan Akta Kelahiran, 2021

Provinsi	Memiliki	Tidak Memiliki	Jumlah
Aceh	94,62	5,38	100,00
Sumatera Utara	82,63	17,37	100,00
Sumatera Barat	91,01	8,99	100,00
Riau	84,56	15,44	100,00
Jambi	93,43	6,57	100,00
Sumatera Selatan	89,80	10,20	100,00
Bengkulu	94,26	5,74	100,00
Lampung	93,53	6,47	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	96,46	3,54	100,00
Kepulauan Riau	93,53	6,47	100,00
DKI Jakarta	97,15	2,85	100,00
Jawa Barat	84,66	15,34	100,00
Jawa Tengah	95,93	4,07	100,00
DI Yogyakarta	97,67	2,33	100,00
Jawa Timur	90,78	9,22	100,00
Banten	84,54	15,46	100,00
Bali	93,83	6,17	100,00
Nusa Tenggara Barat	89,43	10,57	100,00
Nusa Tenggara Timur	65,34	34,66	100,00
Kalimantan Barat	89,51	10,49	100,00
Kalimantan Tengah	86,56	13,44	100,00
Kalimantan Selatan	91,32	8,68	100,00
Kalimantan Timur	92,12	7,88	100,00
Kalimantan Utara	92,89	7,11	100,00
Sulawesi Utara	89,77	10,23	100,00
Sulawesi Tengah	84,32	15,68	100,00
Sulawesi Selatan	91,47	8,53	100,00
Sulawesi Tenggara	90,77	9,23	100,00
Gorontalo	93,66	6,34	100,00
Sulawesi Barat	91,20	8,80	100,00
Maluku	82,37	17,63	100,00
Maluku Utara	84,12	15,88	100,00
Papua Barat	75,21	24,79	100,00
Papua	44,33	55,67	100,00
Indonesia	88,27	11,73	100,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 3.5

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 0-17 Tahun menurut Provinsi dan Kepemilikan Akta Kelahiran, 2021

Provinsi	Memiliki	Tidak Memiliki	Jumlah
Aceh	94,42	5,58	100,00
Sumatera Utara	83,42	16,58	100,00
Sumatera Barat	91,77	8,23	100,00
Riau	83,92	16,08	100,00
Jambi	93,30	6,70	100,00
Sumatera Selatan	90,30	9,70	100,00
Bengkulu	94,79	5,21	100,00
Lampung	93,50	6,50	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	95,62	4,38	100,00
Kepulauan Riau	94,90	5,10	100,00
DKI Jakarta	96,71	3,29	100,00
Jawa Barat	84,87	15,13	100,00
Jawa Tengah	96,14	3,86	100,00
DI Yogyakarta	98,62	1,38	100,00
Jawa Timur	91,22	8,78	100,00
Banten	84,58	15,42	100,00
Bali	92,70	7,30	100,00
Nusa Tenggara Barat	87,94	12,06	100,00
Nusa Tenggara Timur	66,00	34,00	100,00
Kalimantan Barat	90,54	9,46	100,00
Kalimantan Tengah	87,37	12,63	100,00
Kalimantan Selatan	91,67	8,33	100,00
Kalimantan Timur	94,22	5,78	100,00
Kalimantan Utara	93,05	6,95	100,00
Sulawesi Utara	90,55	9,45	100,00
Sulawesi Tengah	85,91	14,09	100,00
Sulawesi Selatan	91,47	8,53	100,00
Sulawesi Tenggara	90,37	9,63	100,00
Gorontalo	94,40	5,60	100,00
Sulawesi Barat	92,48	7,52	100,00
Maluku	80,84	19,16	100,00
Maluku Utara	84,74	15,26	100,00
Papua Barat	74,23	25,77	100,00
Papua	46,13	53,87	100,00
Indonesia	88,58	11,42	100,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

AKSES TERADAP
teknologi informasi dan komunikasi

provinsi dengan persentase kurang dari 50%, anak umur 7–17 tahun yang pernah mengakses internet

Persentase anak yang menggunakan telepon seluler menurut tipe daerah dan jenis kelamin tahun 2021

Perkotaan **90,24%**	Perkotaan **89,06%**	Perkotaan **89,63%**
Perdesaan **80,54%**	Perdesaan **79,42%**	Perdesaan **79,98%**
Perkotaan dan Perdesaan **85,84%**	Perkotaan dan Perdesaan **84,81%**	Perkotaan dan Perdesaan **85,32%**

Tren persentase anak umur 7–17 tahun yang pernah mengakses internet, 2017–2021

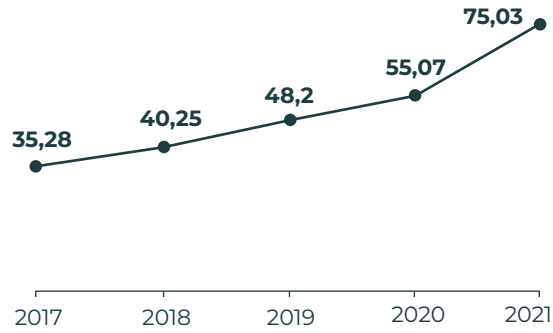

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2021

Overview

Salah satu hal yang mengindikasikan terjadinya globalisasi adalah adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Maraknya penggunaan telepon seluler, komputer, bahkan akses internet yang dilakukan oleh anak-anak menjadi sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari sebagai bagian dari adanya globalisasi di masyarakat. Adanya pandemi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya tren peningkatan pada penggunaan perangkat-perangkat tersebut. Namun, selain memberikan kemudahan pada proses komunikasi serta proses pembelajaran pada anak, telepon seluler, komputer, serta akses internet juga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif apabila digunakan dengan tidak bijak seperti anak yang sering lalai dalam mengerjakan tugasnya bahkan hingga adiksi. Hal ini menyebabkan diperlukannya pengawasan dan bimbingan yang dilakukan oleh sekolah, orang tua, maupun orang dewasa di sekitar anak.

4.1. Telepon Seluler dan Komputer

4.1.1 Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu indikasi era globalisasi yang membawa perubahan bagi tiap aspek kehidupan saat ini termasuk dalam hal komunikasi. Perkembangan teknologi yang semakin luas juga mendorong adanya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi secara terpadu yang memudahkan komunikasi antar individu. Salah satu perangkat atau hasil dari perkembangan teknologi ini adalah telepon seluler. Telepon seluler adalah perangkat komunikasi berbasis elektronik yang memiliki fungsi sama seperti telepon konvensional namun dalam bentuk yang lebih praktis hingga bisa dibawa kemanapun tanpa harus dihubungkan dengan kabel. Perkembangan teknologi yang semakin baik ini bahkan menjadikan telepon seluler memiliki berbagai macam fitur tambahan seperti: menangkap siaran televisi dan radio, pemutar audio serta video, fitur kamera, bahkan mampu mengakses game serta layanan internet (Nurhidayah, 2018). Hal ini menyebabkan penggunaan telepon

seluler tidak hanya digemari oleh dewasa tapi juga anak-anak. Hasil analisis atas persentase anak umur 7-17 tahun yang menggunakan telepon seluler menurut tipe daerah dan jenis kelamin tahun 2021 dipresentasikan pada Gambar 4.1.

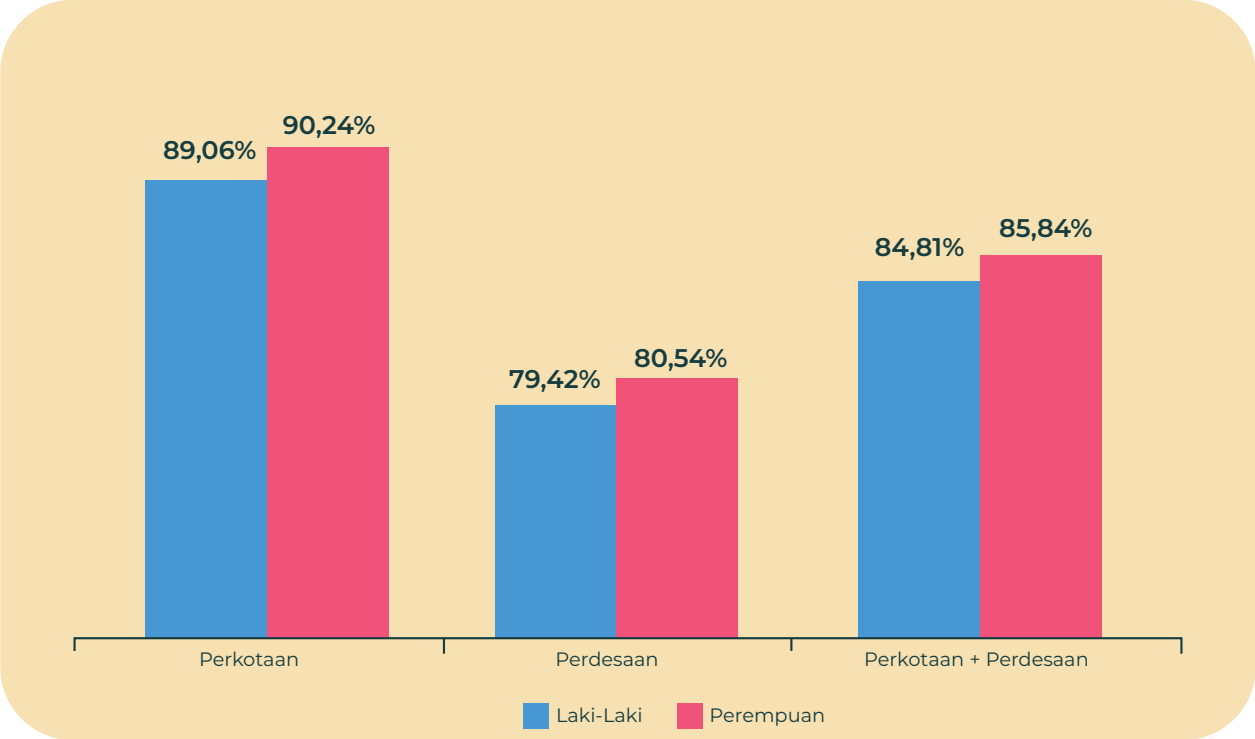

Gambar 4.1 Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

Data menunjukkan bahwa penggunaan telepon seluler oleh anak-anak baik di perdesaan dan perkotaan sudah di atas 75 persen atau lebih dari 2/3 anak. Sebanyak 89,06 persen anak laki-laki yang menggunakan telepon seluler di perkotaan, sementara itu sebanyak 79,42 persen anak laki-laki yang menggunakan telepon seluler berada di perdesaan.

Selain itu, sebanyak 90,24 persen anak perempuan di perkotaan menggunakan telepon seluler dan 80,54 persen di perdesaan. Penggunaan telepon seluler yang dilakukan oleh anak-anak baik laki-laki maupun perempuan serta baik yang tinggal di wilayah perkotaan maupun perdesaan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Data ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2018) yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam penggunaan telepon seluler oleh anak laki-

laki dan perempuan. Tidak adanya perbedaan yang signifikan atas penggunaan telepon seluler pada anak laki-laki maupun anak perempuan ini dapat disebabkan karena telepon seluler sudah dianggap sebagai kebutuhan utama di Indonesia. Bahkan, menurut Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) bahwa telepon seluler atau handphone sudah menjadi kebutuhan utama di samping pangan, sandang, dan papan (Okezone.com, 2014). Telepon seluler pada saat ini sudah tidak dapat dianggap sebagai barang mewah karena semakin banyak munculnya telepon seluler dengan harga terjangkau yang dapat diakses oleh banyak kalangan baik di perdesaan maupun di perkotaan. Hal inilah yang diprediksi sebagai faktor penyebab semakin tingginya penggunaan telepon seluler pada anak di berbagai wilayah Indonesia.

4.1.2. Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Memiliki Telepon Seluler Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin

Telepon seluler telah menjadi kebutuhan bagi banyak pihak dari usia dewasa bahkan sampai usia anak-anak. Hasil analisis data Susenas (2021) menunjukkan bahwa sebanyak 61,00 persen anak laki-laki di perkotaan dan 50,83 persen anak laki-laki di perdesaan sudah memiliki telepon seluler (Gambar 4.2). Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 63,81 persen anak perempuan di daerah perkotaan dan 52,55 persen anak perempuan di daerah perdesaan telah memiliki telepon seluler.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada persentase anak yang memiliki telepon seluler baik menurut jenis kelamin maupun menurut tipe daerah tempat tinggal anak-anak. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan telepon seluler oleh anak-anak telah menjadi fenomena yang tidak dapat terhindarkan. Penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 54 persen anak melihat orang tuanya menghabiskan waktu yang terlalu banyak dengan telepon selulernya (Setiawan, 2015 dalam Primadini, 2018). Akibatnya, anak melakukan proses imitasi seperti apa yang dilakukan oleh orang tuanya sehingga orang tua tidak mampu membendung keinginan anak untuk ikut bermain telepon seluler dan berakhir dengan menyediakan kepemilikan telepon seluler bagi anak mereka secara pribadi.

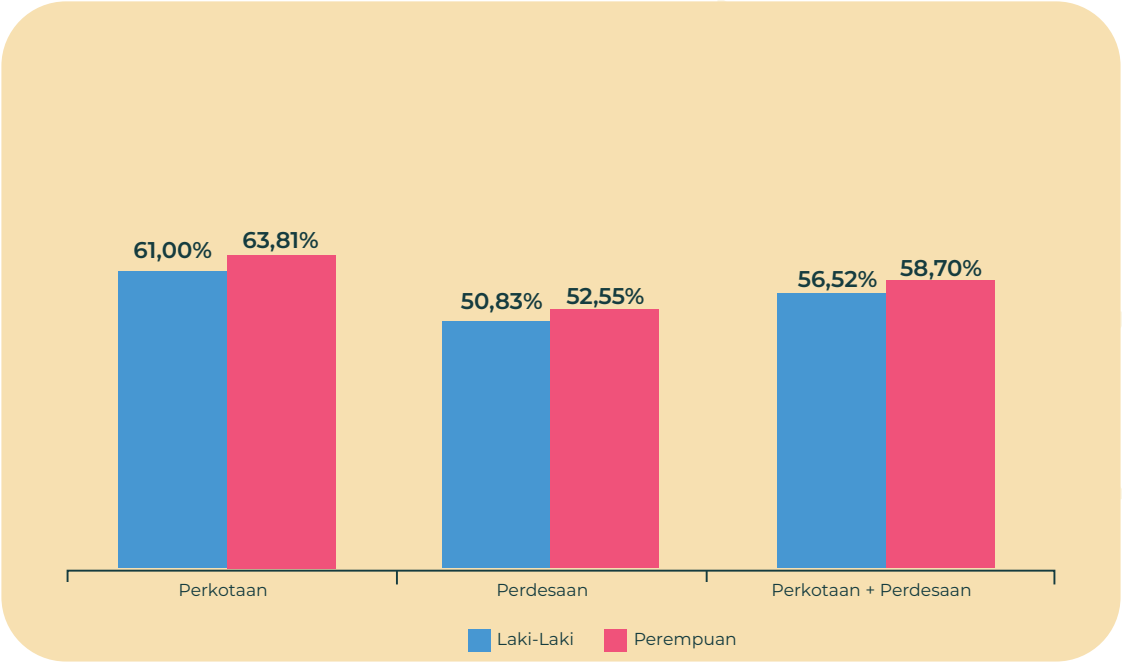

Gambar 4.2 Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Memiliki Telepon Seluler Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

4.1.3. Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler Menurut Provinsi

Hasil analisis atas persentase anak usia 7-17 tahun yang menggunakan telepon seluler berdasarkan provinsi tahun 2021 dipresentasikan pada Gambar 4.3. Data menunjukkan terdapat perbedaan yang besar pada provinsi dengan penggunaan telepon seluler tertinggi dan provinsi dengan penggunaan telepon seluler terendah, yakni sebesar 62,67 persen. Provinsi DI Yogyakarta sebagai provinsi teratas memiliki persentase anak yang menggunakan telepon seluler sebesar 95.65 persen sedangkan Provinsi Papua memiliki persentase anak yang menggunakan telepon seluler sebesar 32,98 persen (Gambar 4.3). Hal ini mengindikasikan bahwa penyebaran penggunaan telepon seluler oleh anak-anak di Indonesia masih belum merata. Kondisi ini cukup beralasan karena akses informasi dan teknologi pada provinsi Papua yang masih sangat terbatas akibat masih minimnya infrastruktur penunjang penggunaan telepon seluler di provinsi tersebut menyebabkan rendahnya partisipasi anak yang menggunakan telepon seluler di Papua.

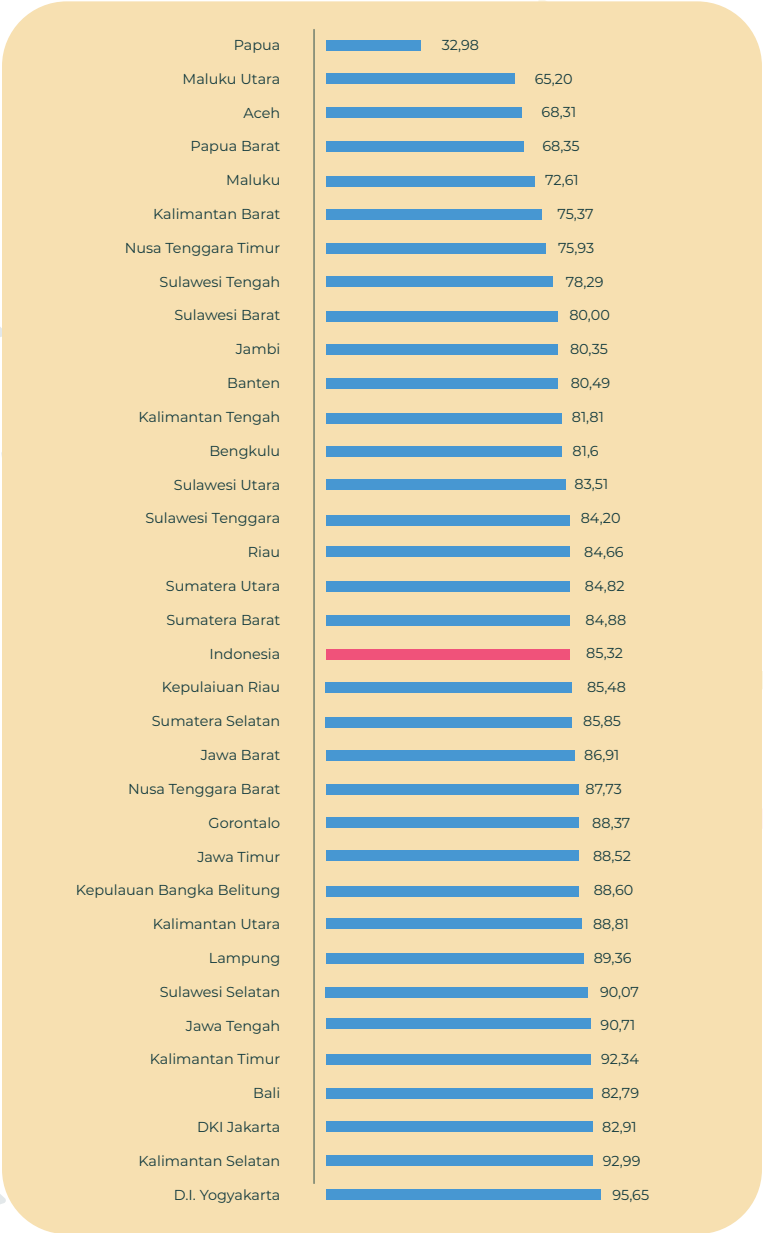

Gambar 4.3 Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler Menurut Provinsi Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

4.1.4. Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Menggunakan Komputer Menurut Tipe Daerah

Selain telepon seluler, komputer menjadi salah satu media penciri bagi perkembangan informasi dan teknologi di masyarakat. Hasil analisis atas persentase anak umur 7-17 tahun yang menggunakan komputer menurut tipe daerah tahun 2021 dipresentasikan pada Gambar 4.4. Data menunjukkan bahwa persentase anak 7-17

tahun yang menggunakan komputer di wilayah perkotaan adalah sebanyak 15,39 persen. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase anak yang menggunakan komputer di wilayah perdesaan yang hanya sebanyak 5,27 persen.

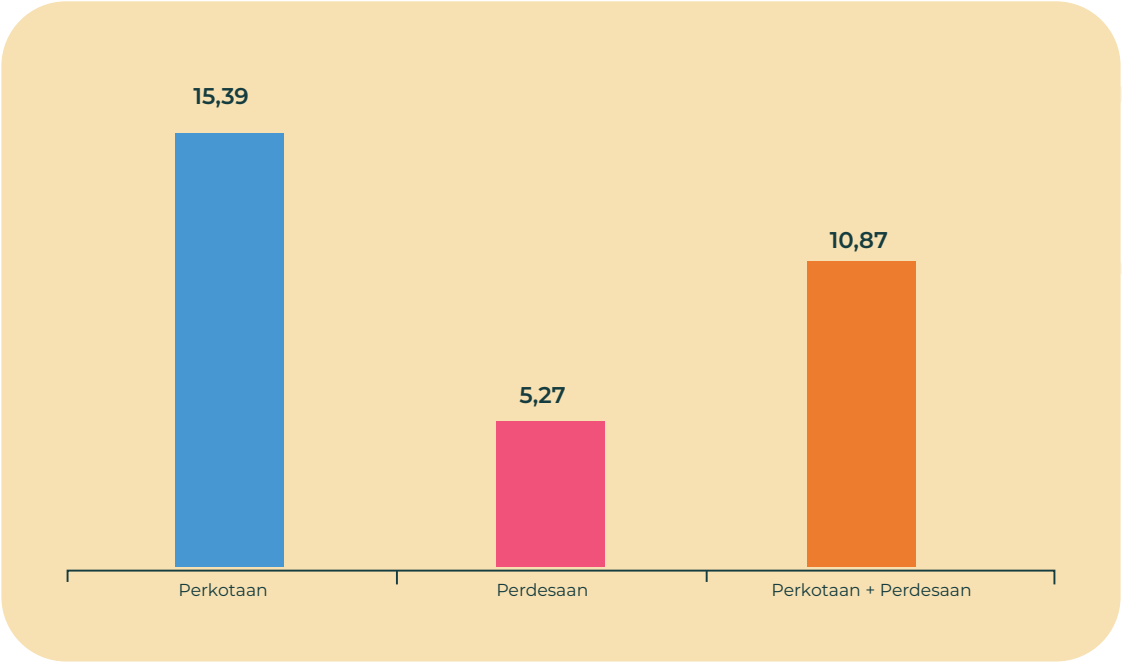

Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Menggunakan Komputer Menurut Tipe Daerah Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan komputer di kalangan anak tidak sebanyak penggunaan telepon seluler. Hal ini diprediksi akibat adanya perkembangan teknologi digital yang semakin pesat dan kemudahan bagi pemrosesan konten seperti informasi, gambar, audio, video, dan bentuk lainnya dapat diakses dimanapun dan kapanpun dalam format yang bervariasi yang ditawarkan oleh telepon seluler. Banyaknya fungsi, berbagai fitur, dan kepraktisan yang dapat diberikan oleh telepon seluler menjadi salah satu alasan mengapa banyak sebagian masyarakat lebih memilih menggunakan telepon seluler daripada komputer. Selain itu, akses yang dimiliki oleh masyarakat perdesaan dalam menggunakan komputer juga lebih rendah karena biaya operasional penggunaan komputer yang lebih besar dibandingkan dengan biaya dalam penggunaan telepon seluler.

4.2. Akses Internet

Internet adalah sebuah sistem jaringan komputer global yang saling terhubung menggunakan protokol internet (TCP/IP) serta dihubungkan oleh bahasa pemrograman yang luas mencakup peralatan elektronik, nirkabel, dan teknologi jaringan optik (Allan, 2005). Penggunaan internet pada anak biasanya digunakan sebagai media pembelajaran dan memberikan kemudahan bagi anak-anak untuk mengakses berbagai sumber informasi (Sasmita, 2020).

4.2.1. Tren Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Pernah Mengakses Internet

Hasil analisis atas tren persentase anak umur 7-17 tahun yang pernah mengakses internet tahun 2021 disajikan pada Gambar 4.5. Data menunjukkan bahwa persentase anak umur 7 hingga 17 tahun yang pernah mengakses internet terus mengalami tren positif dengan adanya peningkatan yang cukup signifikan terutama di tahun 2021. Pada tahun 2021, sebesar 75,03 persen anak mengakses internet. Hal ini dapat diprediksi akibat adanya pemberlakukan program pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang sangat bergantung pada akses internet sejak awal tahun 2020 karena pandemi COVID-19.

Selama pandemi berlangsung, banyak media pembelajaran yang harus diakses oleh anak-anak untuk memenuhi proses pembelajarannya. Banyaknya aplikasi yang diakses oleh anak-anak menjadi salah satu alasan peningkatan akses internet oleh anak. Sebagai dampak lanjutan dari pemberlakuan program pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19, anak-anak hingga saat ini menjadi lebih beresiko untuk menggunakan gadget dalam waktu yang lebih lama. Hal ini disebabkan karena anak-anak telah terbiasa untuk mengakses game online dengan frekuensi penggunaan game yang cukup tinggi (Chairulhaq et al., 2021).

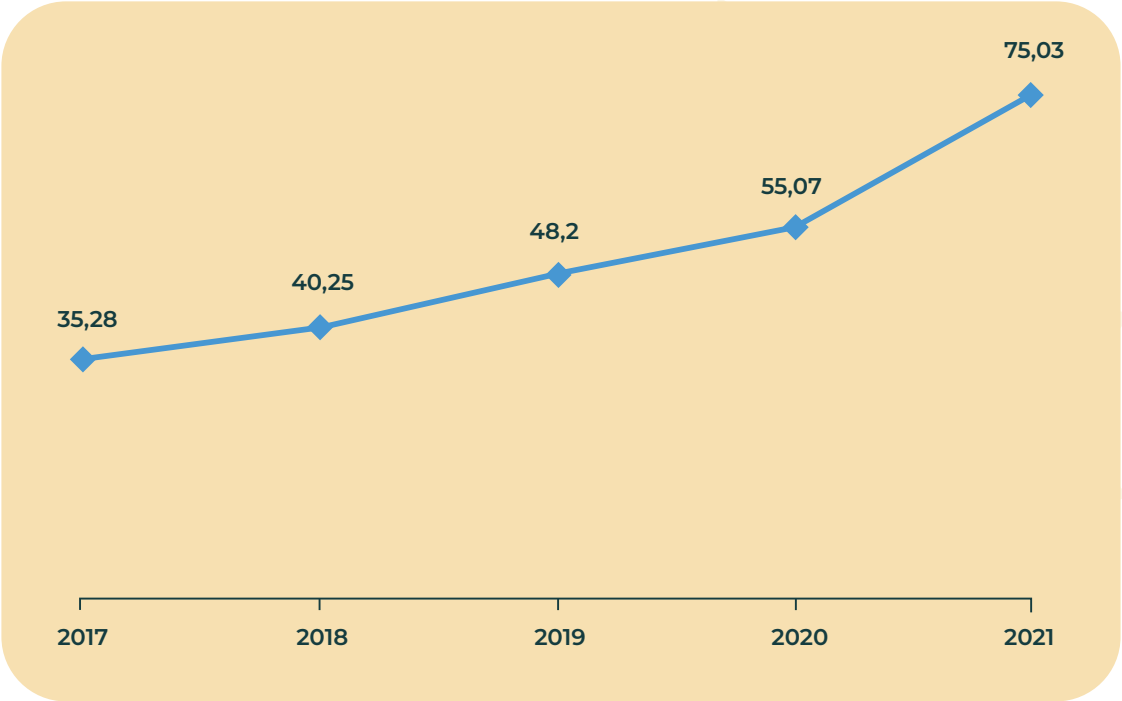

Gambar 4.5 Tren Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Pernah Mengakses Internet (2017-2021)
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017-2021, BPS

4.2.2. Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Pernah Mengakses Internet Menurut Jenis Kelamin dan Tujuan Mengakses

Hasil analisis atas persentase anak umur 7-17 tahun yang pernah mengakses internet menurut jenis kelamin dan tujuan mengakses pada tahun 2021 disajikan pada Gambar 4.6. Data menunjukkan bahwa anak laki-laki lebih banyak menghabiskan waktunya mengakses internet untuk hiburan seperti bermain game ataupun menonton video sebesar 73,54 persen dibandingkan dengan anak perempuan yaitu 67,91 persen.

Namun, data menunjukkan bahwa anak perempuan lebih banyak mengakses internet untuk mendapatkan informasi/berita, memeroleh informasi terkait pembelajaran, serta menghabiskan waktu untuk bermain media sosial dibandingkan anak laki-laki. Sementara itu, akses internet yang digunakan untuk mencari informasi dan melakukan transaksi jual-beli online baik anak laki-laki sebesar 7,26 persen dan anak perempuan sebesar 11,77 persen dapat dinyatakan sama-sama tergolong rendah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam tujuan anak dalam mengakses internet, diantaranya adalah untuk

pembelajaran, eksplorasi hal baru, bersosialisasi dengan teman, maupun untuk hiburan (Riany, 2022). Tingginya persentase anak yang mengakses internet untuk bermain game atau menonton video mengindikasikan perlunya upaya bersama untuk melakukan kontrol atas akses hiburan anak-anak melalui internet. Akses yang sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi komprehensif dari berbagai pihak termasuk keluarga, sekolah, masyarakat dan negara untuk memastikan bahwa konten yang diakses oleh anak adalah konten yang mendidik dan bermanfaat bagi proses tumbuh kembangnya yang optimal.

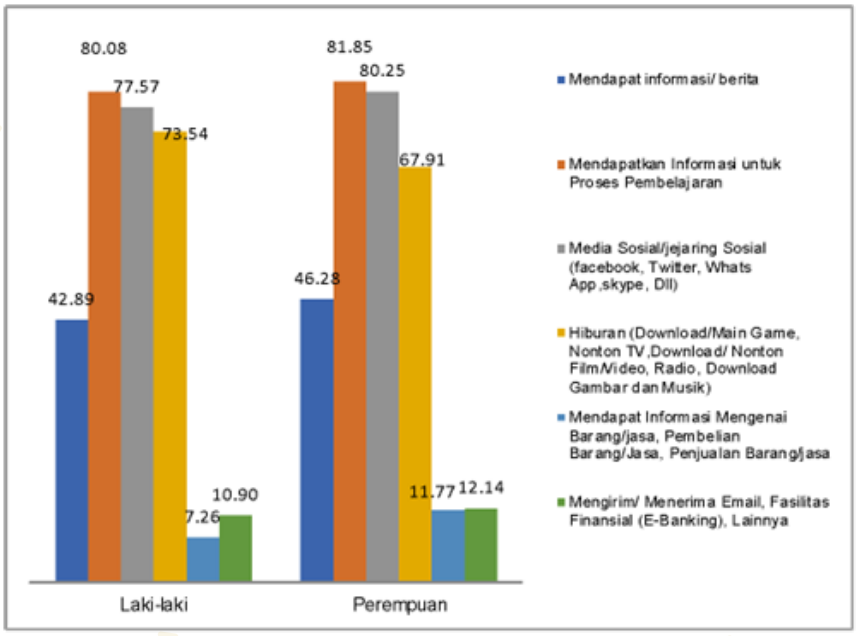

Gambar 4.6 Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Pernah Mengakses Internet Menurut Jenis Kelamin dan Tujuan Mengakses Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

4.2.3. Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Pernah Mengakses Internet Menurut Tipe Daerah dan Tujuan Mengakses

Hasil analisis atas persentase anak umur 7-17 tahun yang pernah mengakses internet menurut tipe daerah dan tujuan mengakses tahun 2021 disajikan pada Gambar 4.7. Data menunjukkan bahwa akses internet yang dilakukan oleh anak-anak di daerah perdesaan pada umumnya lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang berada di daerah perkotaan. Gambar 4.7 menunjukkan bahwa

sebanyak 83,71 persen anak yang berada di daerah perkotaan mengakses informasi untuk proses pembelajaran. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan dengan persentase anak yang mengakses informasi untuk pembelajaran di perdesaan yaitu sebesar 76,61 persen. Hal ini dapat disebabkan dengan adanya keterbatasan pada beberapa wilayah perdesaan dalam hal sarana dan prasarana dalam menghadapi pembelajaran daring (Yuhenita et al., 2021).

Namun, adanya kemudahan yang dialami oleh anak perkotaan dalam mengakses internet juga dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak-dampak negatif tersebut dapat dilihat dari persentase anak di daerah perkotaan yang mengakses internet untuk hiburan seperti bermain game atau menonton video lebih tinggi yaitu 72,15 persen dibandingkan dengan anak di daerah perdesaan yaitu sebesar 68,56 persen. Apabila hal ini dibiarkan terus menerus tanpa adanya pengawasan dari orang lain, maka tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan oleh anak-anak tersebut dapat terbengkalai dan memengaruhi kualitas pembelajarannya. Oleh karena itu, diperlukan implementasi program dan kebijakan yang berfokus pada upaya penyediaan akses internet yang ramah anak di seluruh wilayah di Indonesia. Upaya ini harus dilakukan oleh seluruh pihak yang bertanggungjawab atas anak sehingga dampak negatif akibat adanya akses konten negatif melalui internet pada anak dapat ditekan seminimal mungkin.

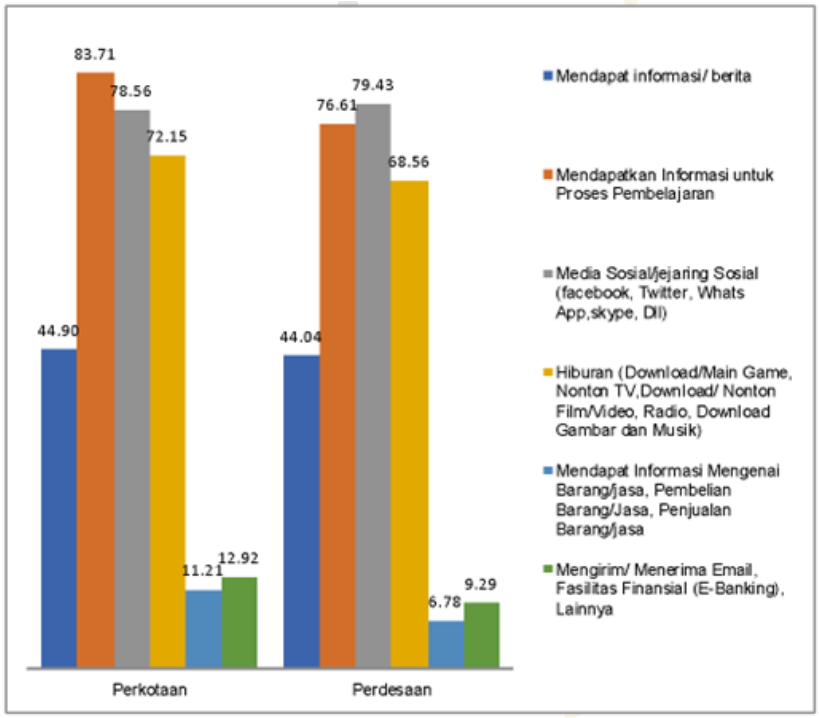

Gambar 4.7 Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Pernah Mengakses Internet Menurut Tipe Daerah dan Tujuan Mengakses Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

4.2.4. Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Pernah Mengakses Internet Menurut Provinsi

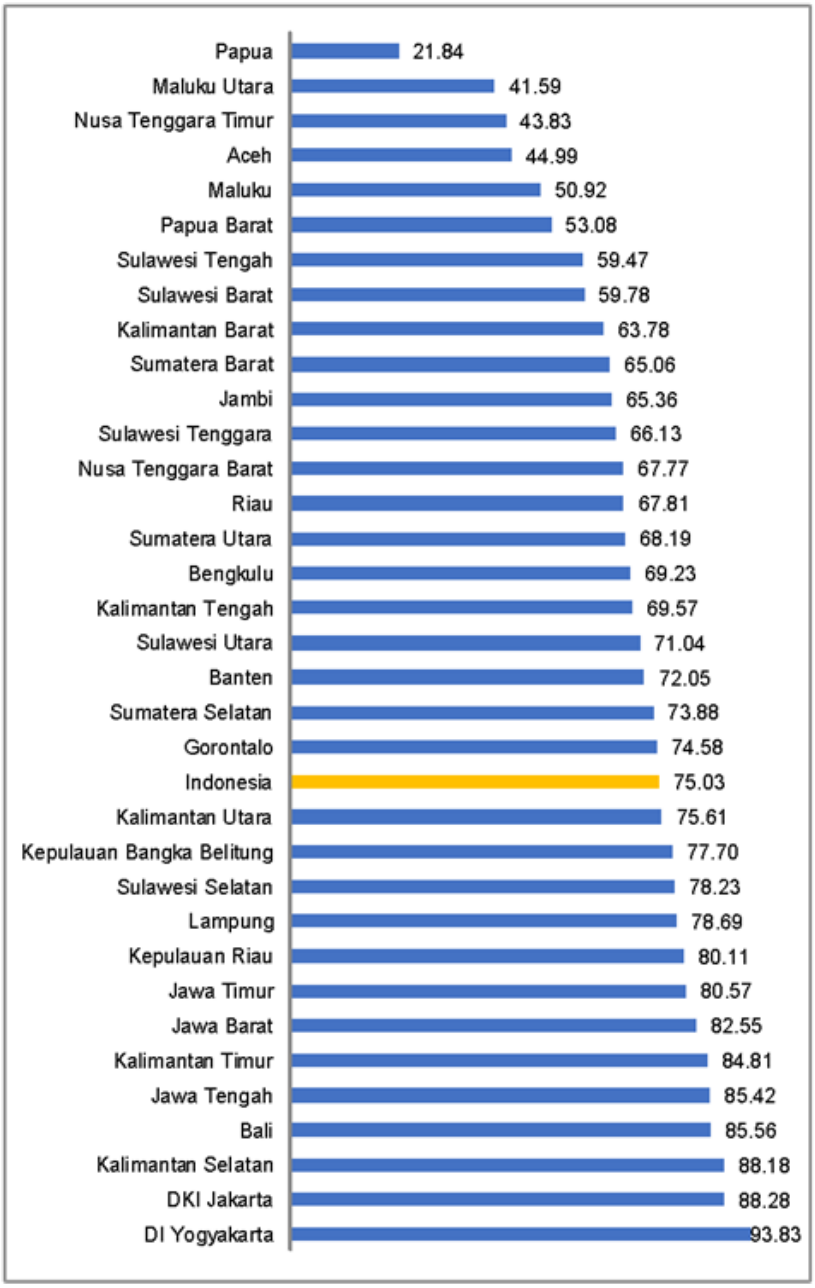

Gambar 4.8 Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Pernah Mengakses Internet Menurut Provinsi Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

Hasil analisis atas persentase anak umur 7-17 tahun yang pernah mengakses internet menurut provinsi pada tahun 2021 disajikan pada Gambar 4.8. Data menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar pada persentase anak yang mengakses internet

berdasarkan provinsi di Indonesia. Provinsi Papua sebagai provinsi dengan persentase anak yang mengakses internet terendah di Indonesia memiliki persentase sebesar 21,84 persen. Sementara itu, Provinsi DI Yogyakarta sebagai provinsi dengan persentase anak mengakses internet tertinggi di Indonesia memiliki persentase sebesar 93,83 persen atau lebih tinggi empat kali jika dibandingkan dengan kondisi Papua. Kapasitas akses internet yang kurang baik di wilayah Timur Indonesia ini dapat disebabkan karena anak tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan/atau memiliki pengetahuan yang tidak cukup baik dalam mengoperasikan perangkat internet. Hal lainnya adalah masih minimnya infrastruktur penunjang akses internet di wilayah Timur Indonesia jika dibandingkan dengan provinsi di wilayah Barat Indonesia. Apabila hal ini terus dibiarkan dan tidak mendapatkan perhatian secara khusus untuk diperbaiki dengan cepat, maka hal ini dapat mempengaruhi hasil belajar anak secara signifikan, khususnya pada kinerja proses belajar sejak pandemi COVID-19 yang sebagian besar pembelajarannya membutuhkan akses internet (Rosiyanti & Muthmainnah, 2018).

Lampiran 4.1

Persentase Penduduk Berumur 7-17 Tahun yang Menggunakan Telepon Selular menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Aceh	76,95	80,63	78,70	62,87	63,98	63,42	67,49	69,16	68,31
Sumatera Utara	87,95	90,22	89,04	79,43	81,00	80,21	83,95	85,72	84,82
Sumatera Barat	91,60	90,82	91,22	78,66	79,70	79,18	84,88	84,87	84,88
Riau	89,04	91,66	90,30	81,71	80,24	80,98	84,65	84,67	84,66
Jambi	87,27	86,99	87,14	76,56	77,86	77,21	80,05	80,67	80,35
Sumatera Selatan	92,02	93,07	92,53	80,92	83,04	81,98	85,08	86,65	85,85
Bengkulu	92,95	93,55	93,24	74,74	78,41	76,57	80,76	83,19	81,96
Lampung	89,89	91,61	90,73	88,04	89,45	88,73	88,63	90,13	89,36
Kepulauan Bangka Belitung	91,26	91,99	91,61	85,29	84,33	84,81	88,67	88,53	88,60
Kepulauan Riau	85,13	87,24	86,15	74,65	80,31	77,53	84,34	86,68	85,48
DKI Jakarta	92,72	93,10	92,91				92,72	93,10	92,91
Jawa Barat	87,67	89,37	88,48	81,00	81,67	81,34	86,24	87,61	86,91
Jawa Tengah	91,71	92,36	92,02	88,62	90,04	89,32	90,24	91,22	90,71
DI Yogyakarta	96,16	95,69	95,94	95,44	94,20	94,83	95,98	95,29	95,65
Jawa Timur	90,51	90,18	90,35	85,83	86,72	86,27	88,44	88,60	88,52
Banten	82,72	85,10	83,91	72,58	73,07	72,83	79,62	81,36	80,49
Bali	94,34	92,64	93,53	91,38	90,83	91,10	93,47	92,06	92,79
Nusa Tenggara Barat	90,47	94,88	92,63	82,47	84,00	83,23	86,33	89,17	87,73
Nusa Tenggara Timur	90,41	89,93	90,18	71,01	72,11	71,56	75,69	76,17	75,93
Kalimantan Barat	88,80	88,53	88,67	66,94	69,97	68,45	74,63	76,13	75,37
Kalimantan Tengah	88,52	89,52	89,01	78,30	75,70	77,00	82,41	81,20	81,81
Kalimantan Selatan	95,08	96,04	95,54	89,98	91,45	90,70	92,42	93,60	92,99
Kalimantan Timur	92,84	93,89	93,34	89,97	90,61	90,29	91,93	92,77	92,34
Kalimantan Utara	92,91	95,15	93,97	79,58	81,28	80,41	87,92	89,78	88,81
Sulawesi Utara	86,70	88,58	87,62	77,62	79,70	78,65	82,56	84,50	83,51
Sulawesi Tengah	82,43	89,48	85,98	74,00	76,00	74,99	76,50	80,11	78,29
Sulawesi Selatan	91,38	92,04	91,70	87,63	89,97	88,78	89,30	90,88	90,07
Sulawesi Tenggara	86,77	89,37	88,00	81,16	83,04	82,08	83,21	85,26	84,20
Gorontalo	88,13	90,21	89,11	87,59	88,11	87,85	87,82	88,95	88,37
Sulawesi Barat	88,27	93,40	90,77	76,52	77,93	77,23	78,99	81,00	80,00
Maluku	83,29	88,04	85,60	64,76	62,27	63,54	72,43	72,79	72,61
Maluku Utara	79,70	79,01	79,37	61,47	59,06	60,28	66,30	64,05	65,20
Papua Barat	80,61	81,19	80,88	60,01	60,35	60,17	68,20	68,52	68,35
Papua	72,04	73,74	72,87	19,91	18,78	19,37	32,98	32,97	32,98
Indonesia	**89,06**	**90,24**	**89,63**	**79,42**	**80,54**	**79,98**	**84,81**	**85,84**	**85,32**

Catatan: L (Laki-Laki), P (Perempuan), L+P (Laki-Laki + Perempuan)

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 4.2

Persentase Penduduk Berumur 7-17 Tahun yang Memiliki Telepon Selular menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Aceh	39,42	43,12	41,18	32,99	35,34	34,15	35,10	37,76	36,40
Sumatera Utara	49,31	55,58	52,32	41,23	44,01	42,61	45,51	49,93	47,68
Sumatera Barat	50,75	51,51	51,12	41,50	43,25	42,37	45,95	47,09	46,51
Riau	52,01	56,99	54,40	47,31	47,04	47,18	49,20	50,90	50,03
Jambi	67,76	68,25	68,00	50,89	51,67	51,28	56,39	56,76	56,57
Sumatera Selatan	66,41	67,58	66,97	53,64	55,90	54,76	58,42	60,09	59,24
Bengkulu	59,33	65,21	62,17	49,29	54,40	51,84	52,60	57,82	55,18
Lampung	59,72	65,76	62,65	53,09	54,92	53,99	55,18	58,30	56,71
Kepulauan Bangka Belitung	54,28	63,99	58,93	54,32	54,13	54,22	54,30	59,53	56,85
Kepulauan Riau	57,10	57,11	57,11	50,20	54,66	52,47	56,59	56,91	56,74
DKI Jakarta	64,98	68,55	66,75				64,98	68,55	66,75
Jawa Barat	59,04	64,35	61,59	55,96	56,60	56,28	58,38	62,58	60,42
Jawa Tengah	65,54	66,13	65,82	64,44	65,49	64,96	65,02	65,82	65,40
DI Yogyakarta	67,54	68,75	68,12	62,59	63,10	62,84	66,27	67,24	66,74
Jawa Timur	67,35	65,78	66,59	61,65	62,37	62,01	64,83	64,23	64,53
Banten	60,94	62,25	61,60	48,85	50,61	49,74	57,25	58,63	57,95
Bali	70,19	70,64	70,40	64,74	64,12	64,43	68,59	68,56	68,57
Nusa Tenggara Barat	50,22	54,66	52,39	41,94	47,21	44,56	45,94	50,75	48,31
Nusa Tenggara Timur	51,28	54,17	52,67	24,79	28,11	26,44	31,18	34,05	32,60
Kalimantan Barat	62,63	61,34	62,01	45,45	47,72	46,59	51,50	52,24	51,86
Kalimantan Tengah	72,96	68,87	70,94	58,36	57,34	57,85	64,23	61,93	63,09
Kalimantan Selatan	68,41	67,36	67,90	58,14	62,56	60,31	63,05	64,81	63,91
Kalimantan Timur	70,22	72,10	71,12	60,86	61,01	60,94	67,27	68,31	67,78
Kalimantan Utara	59,43	62,08	60,68	53,51	54,50	54,00	57,22	59,15	58,14
Sulawesi Utara	63,68	67,98	65,79	54,45	57,83	56,12	59,47	63,31	61,36
Sulawesi Tengah	54,16	61,00	57,61	47,61	48,98	48,28	49,55	52,65	51,09
Sulawesi Selatan	63,49	67,72	65,55	58,44	61,71	60,05	60,69	64,36	62,49
Sulawesi Tenggara	58,92	64,74	61,67	48,40	52,45	50,38	52,25	56,76	54,43
Gorontalo	63,29	69,49	66,23	54,97	55,29	55,13	58,51	60,99	59,72
Sulawesi Barat	49,33	62,81	55,91	44,47	49,04	46,78	45,49	51,77	48,64
Maluku	60,00	64,53	62,20	36,41	34,41	35,43	46,18	46,70	46,43
Maluku Utara	56,43	63,25	59,66	34,77	37,08	35,91	40,51	43,63	42,03
Papua Barat	61,42	62,98	62,16	39,71	40,05	39,87	48,34	49,04	48,68
Papua	57,29	59,68	58,45	9,70	9,78	9,74	21,64	22,66	22,13
Indonesia	**61,00**	**63,81**	**62,36**	**50,83**	**52,55**	**51,68**	**56,52**	**58,70**	**57,59**

Catatan: L (Laki-Laki), P (Perempuan), L+P (Laki-Laki + Perempuan)

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 4.3

Persentase Penduduk Berumur 7-17 Tahun yang Menggunakan Komputer menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Aceh	9,54	12,14	10,77	4,04	5,26	4,65	5,84	7,40	6,60
Sumatera Utara	11,62	13,56	12,55	5,11	5,68	5,40	8,56	9,72	9,13
Sumatera Barat	15,02	16,25	15,61	5,39	6,31	5,85	10,02	10,93	10,47
Riau	11,45	14,50	12,91	4,09	4,08	4,09	7,04	8,12	7,57
Jambi	13,80	18,80	16,20	5,47	7,03	6,26	8,18	10,65	9,40
Sumatera Selatan	10,04	15,00	12,43	3,38	4,33	3,86	5,87	8,17	7,00
Bengkulu	18,36	16,73	17,57	4,47	8,60	6,53	9,06	11,16	10,10
Lampung	9,40	10,68	10,02	4,21	5,34	4,76	5,85	7,00	6,41
Kepulauan Bangka Belitung	10,82	12,15	11,46	5,50	6,92	6,20	8,51	9,79	9,13
Kepulauan Riau	18,57	20,07	19,30	2,06	12,08	7,15	17,34	19,42	18,35
DKI Jakarta	23,90	27,63	25,74				23,90	27,63	25,74
Jawa Barat	12,86	14,71	13,75	3,95	6,03	5,00	10,96	12,73	11,82
Jawa Tengah	13,51	16,04	14,72	5,19	7,39	6,28	9,55	11,77	10,63
DI Yogyakarta	26,56	27,71	27,11	8,62	14,25	11,40	21,96	24,10	22,99
Jawa Timur	16,51	19,20	17,81	6,33	9,34	7,82	12,00	14,70	13,32
Banten	13,51	14,04	13,78	2,74	4,43	3,60	10,23	11,06	10,64
Bali	18,84	21,63	20,16	4,39	6,41	5,41	14,58	16,77	15,64
Nusa Tenggara Barat	10,17	12,31	11,22	4,76	4,57	4,67	7,37	8,25	7,80
Nusa Tenggara Timur	13,53	14,42	13,96	3,08	2,94	3,01	5,60	5,56	5,58
Kalimantan Barat	11,26	11,26	11,26	2,30	3,43	2,86	5,45	6,03	5,73
Kalimantan Tengah	12,65	17,41	15,00	3,24	4,79	4,01	7,02	9,81	8,41
Kalimantan Selatan	12,84	11,82	12,35	3,30	4,67	3,97	7,85	8,03	7,94
Kalimantan Timur	18,34	21,79	20,00	4,44	7,78	6,14	13,95	17,01	15,45
Kalimantan Utara	12,75	13,84	13,27	3,63	4,02	3,82	9,34	10,04	9,68
Sulawesi Utara	13,38	10,51	11,97	5,00	6,75	5,87	9,56	8,78	9,18
Sulawesi Tengah	11,03	16,01	13,54	3,16	4,33	3,74	5,49	7,90	6,69
Sulawesi Selatan	14,63	18,41	16,47	6,48	8,72	7,58	10,11	12,99	11,52
Sulawesi Tenggara	11,59	13,55	12,52	2,92	5,49	4,18	6,09	8,32	7,17
Gorontalo	6,42	16,87	11,37	5,96	6,04	6,00	6,16	10,39	8,22
Sulawesi Barat	8,00	12,87	10,38	5,14	8,24	6,71	5,74	9,16	7,45
Maluku	13,84	15,27	14,54	2,71	2,24	2,48	7,32	7,56	7,44
Maluku Utara	11,63	11,22	11,43	2,01	2,65	2,33	4,56	4,80	4,67
Papua Barat	10,75	14,10	12,35	2,78	3,67	3,21	5,95	7,76	6,82
Papua	10,49	11,87	11,16	0,93	1,16	1,04	3,33	3,92	3,61
Indonesia	**14,31**	**16,54**	**15,39**	**4,47**	**6,08**	**5,27**	**9,98**	**11,79**	**10,87**

Catatan: L (Laki-Laki), P (Perempuan), L+P (Laki-Laki + Perempuan)

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 4.3.1

Sampling Error Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 7-17 Tahun di Perkotaan yang Menggunakan Komputer menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Perkotaan				
	Laki-laki				
	estimasi	standar error	Relative standard error	selang kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	9,54	1,08	11,35	7,41	11,66
Sumatera Utara	11,62	0,86	7,39	9,94	13,30
Sumatera Barat	15,02	1,29	8,58	12,49	17,55
Riau	11,45	1,09	9,50	9,32	13,58
Jambi	13,80	1,64	11,92	10,57	17,02
Sumatera Selatan	10,04	1,18	11,71	7,73	12,34
Bengkulu	18,36	2,22	12,08	14,01	22,71
Lampung	9,40	1,25	13,26	6,96	11,85
Kepulauan Bangka Belitung	10,82	1,36	12,58	8,15	13,49
Kepulauan Riau	18,57	1,93	10,37	14,80	22,35
DKI Jakarta	23,90	1,35	5,65	21,25	26,55
Jawa Barat	12,86	0,58	4,49	11,72	13,99
Jawa Tengah	13,51	0,61	4,52	12,31	14,70
DI Yogyakarta	26,56	2,04	7,67	22,57	30,56
Jawa Timur	16,51	0,68	4,09	15,18	17,83
Banten	13,51	1,03	7,60	11,50	15,53
Bali	18,84	1,55	8,23	15,80	21,87
Nusa Tenggara Barat	10,17	1,18	11,58	7,86	12,48
Nusa Tenggara Timur	13,53	1,70	12,60	10,19	16,87
Kalimantan Barat	11,26	1,45	12,90	8,41	14,11
Kalimantan Tengah	12,65	1,59	12,57	9,53	15,77
Kalimantan Selatan	12,84	1,24	9,69	10,40	15,28
Kalimantan Timur	18,34	1,45	7,91	15,49	21,18
Kalimantan Utara	12,75	1,75	13,76	9,31	16,19
Sulawesi Utara	13,38	1,41	10,57	10,60	16,15
Sulawesi Tengah	11,03	2,32	21,05	6,48	15,58
Sulawesi Selatan	14,63	1,23	8,37	12,23	17,03
Sulawesi Tenggara	11,59	1,52	13,15	8,60	14,58
Gorontalo	6,42	1,49	23,16	3,51	9,34
Sulawesi Barat	8,00	2,26	28,29	3,57	12,44
Maluku	13,84	1,86	13,45	10,19	17,49
Maluku Utara	11,63	2,33	20,06	7,05	16,20
Papua Barat	10,75	2,05	19,05	6,74	14,77
Papua	10,49	1,33	12,68	7,88	13,09
Indonesia	**14,31**	**0,24**	**1,69**	**13,84**	**14,79**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 4.3.2

Sampling Error Persentase Penduduk Laki-Laki Berumur 7-17 Tahun di Perdesaan yang Menggunakan Komputer menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Perdesaan				
	Laki-laki				
	estimasi	standar error	Relative standard error	selang kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	4,04	0,41	10,23	3,23	4,85
Sumatera Utara	5,11	0,42	8,12	4,30	5,93
Sumatera Barat	5,39	0,52	9,69	4,37	6,41
Riau	4,09	0,49	12,04	3,12	5,05
Jambi	5,47	0,63	11,44	4,25	6,70
Sumatera Selatan	3,38	0,40	11,90	2,59	4,17
Bengkulu	4,47	0,60	13,48	3,29	5,65
Lampung	4,21	0,47	11,22	3,28	5,14
Kepulauan Bangka Belitung	5,50	1,08	19,71	3,37	7,62
Kepulauan Riau	2,06	0,80	38,98	0,49	3,64
DKI Jakarta					
Jawa Barat	3,95	0,42	10,56	3,14	4,77
Jawa Tengah	5,19	0,40	7,74	4,40	5,98
DI Yogyakarta	8,62	2,02	23,41	4,66	12,57
Jawa Timur	6,33	0,43	6,75	5,49	7,16
Banten	2,74	0,67	24,46	1,43	4,05
Bali	4,39	0,90	20,39	2,64	6,15
Nusa Tenggara Barat	4,76	0,67	14,18	3,44	6,08
Nusa Tenggara Timur	3,08	0,33	10,63	2,44	3,72
Kalimantan Barat	2,30	0,34	14,79	1,63	2,96
Kalimantan Tengah	3,24	0,50	15,52	2,25	4,22
Kalimantan Selatan	3,30	0,48	14,52	2,36	4,24
Kalimantan Timur	4,44	0,94	21,09	2,61	6,28
Kalimantan Utara	3,63	1,23	33,73	1,23	6,03
Sulawesi Utara	5,00	0,65	12,94	3,73	6,27
Sulawesi Tengah	3,16	0,42	13,27	2,34	3,98
Sulawesi Selatan	6,48	0,50	7,71	5,50	7,46
Sulawesi Tenggara	2,92	0,37	12,67	2,19	3,64
Gorontalo	5,96	1,01	16,98	3,98	7,94
Sulawesi Barat	5,14	0,75	14,51	3,68	6,60
Maluku	2,71	0,48	17,75	1,77	3,66
Maluku Utara	2,01	0,39	19,33	1,25	2,77
Papua Barat	2,78	0,46	16,42	1,88	3,67
Papua	0,93	0,18	19,03	0,58	1,28
Indonesia	**4,47**	**0,11**	**2,47**	**4,25**	**4,68**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 4.3.2 (Lanjutan)

Sampling Error Persentase Penduduk Perempuan Berumur 7-17 Tahun di Perdesaan yang Menggunakan Komputer menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Perdesaan				
	Perempuan				
	estimasi	standar error	Relative standard error	selang kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	5,26	0,50	9,47	4,28	6,24
Sumatera Utara	5,68	0,44	7,75	4,82	6,55
Sumatera Barat	6,31	0,56	8,80	5,22	7,40
Riau	4,08	0,49	12,06	3,12	5,05
Jambi	7,03	0,69	9,82	5,68	8,39
Sumatera Selatan	4,33	0,47	10,88	3,41	5,26
Bengkulu	8,60	0,89	10,39	6,85	10,35
Lampung	5,34	0,54	10,21	4,27	6,40
Kepulauan Bangka Belitung	6,92	1,12	16,15	4,73	9,11
Kepulauan Riau	12,08	2,52	20,85	7,15	17,02
DKI Jakarta					
Jawa Barat	6,03	0,55	9,15	4,95	7,11
Jawa Tengah	7,39	0,50	6,73	6,42	8,37
DI Yogyakarta	14,25	2,48	17,39	9,39	19,11
Jawa Timur	9,34	0,54	5,80	8,28	10,40
Banten	4,43	0,79	17,89	2,88	5,99
Bali	6,41	1,11	17,38	4,23	8,59
Nusa Tenggara Barat	4,57	0,63	13,74	3,34	5,80
Nusa Tenggara Timur	2,94	0,30	10,21	2,36	3,53
Kalimantan Barat	3,43	0,43	12,57	2,58	4,27
Kalimantan Tengah	4,79	0,69	14,40	3,44	6,15
Kalimantan Selatan	4,67	0,56	12,03	3,57	5,77
Kalimantan Timur	7,78	1,31	16,77	5,22	10,34
Kalimantan Utara	4,02	1,68	41,76	0,73	7,30
Sulawesi Utara	6,75	0,75	11,08	5,28	8,22
Sulawesi Tengah	4,33	0,48	11,04	3,40	5,27
Sulawesi Selatan	8,72	0,56	6,39	7,63	9,81
Sulawesi Tenggara	5,49	0,62	11,35	4,27	6,71
Gorontalo	6,04	0,96	15,81	4,17	7,92
Sulawesi Barat	8,24	0,95	11,57	6,37	10,11
Maluku	2,24	0,37	16,76	1,50	2,97
Maluku Utara	2,65	0,46	17,16	1,76	3,55
Papua Barat	3,67	0,76	20,68	2,18	5,16
Papua	1,16	0,20	17,36	0,76	1,55
Indonesia	**6,08**	**0,13**	**2,21**	**5,82**	**6,34**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 4.3.2 (Lanjutan)

Sampling Error Persentase Penduduk Laki-Laki + Perempuan Berumur 7-17 Tahun di Perdesaan yang Menggunakan Komputer menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Perdesaan				
	Laki-Laki + Perempuan				
	estimasi	standar error	Relative standard error	selang kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	4,65	0,33	7,12	4,00	5,29
Sumatera Utara	5,40	0,32	5,99	4,76	6,03
Sumatera Barat	5,85	0,40	6,76	5,07	6,62
Riau	4,09	0,37	9,01	3,36	4,81
Jambi	6,26	0,47	7,57	5,33	7,18
Sumatera Selatan	3,86	0,32	8,30	3,23	4,48
Bengkulu	6,53	0,56	8,62	5,43	7,64
Lampung	4,76	0,38	7,98	4,02	5,51
Kepulauan Bangka Belitung	6,20	0,79	12,75	4,65	7,75
Kepulauan Riau	7,15	1,38	19,32	4,44	9,86
DKI Jakarta					
Jawa Barat	5,00	0,36	7,11	4,30	5,70
Jawa Tengah	6,28	0,33	5,26	5,63	6,93
DI Yogyakarta	11,40	1,81	15,84	7,86	14,93
Jawa Timur	7,82	0,36	4,58	7,12	8,53
Banten	3,60	0,56	15,57	2,50	4,69
Bali	5,41	0,74	13,60	3,96	6,85
Nusa Tenggara Barat	4,67	0,48	10,33	3,72	5,61
Nusa Tenggara Timur	3,01	0,24	7,85	2,55	3,47
Kalimantan Barat	2,86	0,28	9,83	2,31	3,41
Kalimantan Tengah	4,01	0,43	10,69	3,17	4,85
Kalimantan Selatan	3,97	0,37	9,43	3,24	4,70
Kalimantan Timur	6,14	0,89	14,41	4,41	7,88
Kalimantan Utara	3,82	1,04	27,23	1,78	5,86
Sulawesi Utara	5,87	0,51	8,70	4,87	6,87
Sulawesi Tengah	3,74	0,33	8,86	3,09	4,39
Sulawesi Selatan	7,58	0,39	5,17	6,81	8,35
Sulawesi Tenggara	4,18	0,37	8,85	3,45	4,90
Gorontalo	6,00	0,71	11,91	4,60	7,40
Sulawesi Barat	6,71	0,63	9,37	5,47	7,94
Maluku	2,48	0,32	12,76	1,86	3,10
Maluku Utara	2,33	0,31	13,12	1,73	2,92
Papua Barat	3,21	0,45	14,04	2,32	4,09
Papua	1,04	0,14	13,06	0,77	1,30
Indonesia	**5,27**	**0,09**	**1,72**	**5,09**	**5,44**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 4.4

Persentase Penduduk Berumur 7-17 Tahun yang Mengakses Internet menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Aceh	55,21	60,03	57,51	38,39	39,85	39,11	43,91	46,12	44,99
Sumatera Utara	75,42	78,45	76,88	57,35	60,09	58,72	66,93	69,50	68,19
Sumatera Barat	74,38	74,52	74,44	55,48	57,81	56,64	64,57	65,57	65,06
Riau	76,76	80,36	78,48	61,15	60,57	60,86	67,41	68,24	67,81
Jambi	78,06	79,82	78,91	58,85	59,31	59,08	65,11	65,60	65,36
Sumatera Selatan	84,28	87,04	85,61	65,06	69,12	67,08	72,26	75,56	73,88
Bengkulu	81,91	87,02	84,38	59,28	64,70	61,99	66,76	71,75	69,23
Lampung	81,44	84,03	82,70	75,75	77,99	76,85	77,55	79,88	78,69
Kepulauan Bangka Belitung	81,13	85,57	83,26	70,65	70,77	70,71	76,57	78,89	77,70
Kepulauan Riau	81,10	82,42	81,74	58,36	63,35	60,89	79,40	80,87	80,11
DKI Jakarta	88,54	88,01	88,28				88,54	88,01	88,28
Jawa Barat	83,91	86,53	85,17	73,26	73,35	73,30	81,64	83,51	82,55
Jawa Tengah	86,69	87,31	86,99	82,68	84,84	83,75	84,78	86,09	85,42
DI Yogyakarta	95,32	94,98	95,15	91,79	88,33	90,09	94,41	93,20	93,83
Jawa Timur	84,51	84,64	84,57	75,01	76,32	75,66	80,30	80,85	80,57
Banten	76,88	77,93	77,40	59,91	60,13	60,02	71,70	72,39	72,05
Bali	88,40	87,19	87,83	81,04	79,83	80,43	86,24	84,84	85,56
Nusa Tenggara Barat	72,88	79,02	75,89	59,09	61,53	60,30	65,75	69,84	67,77
Nusa Tenggara Timur	72,01	72,68	72,33	34,46	35,72	35,09	43,52	44,16	43,83
Kalimantan Barat	81,16	80,59	80,89	52,84	56,93	54,88	62,81	64,78	63,78
Kalimantan Tengah	80,66	80,40	80,53	62,99	61,54	62,26	70,09	69,04	69,57
Kalimantan Selatan	92,64	93,31	92,97	82,60	85,18	83,86	87,40	89,00	88,18
Kalimantan Timur	86,33	88,00	87,13	79,52	80,62	80,08	84,18	85,48	84,81
Kalimantan Utara	83,71	86,19	84,88	59,83	61,22	60,50	74,78	76,53	75,61
Sulawesi Utara	75,48	81,12	78,25	60,63	64,43	62,51	68,71	73,44	71,04
Sulawesi Tengah	68,55	77,36	72,99	52,42	54,93	53,66	57,20	61,77	59,47
Sulawesi Selatan	83,60	84,58	84,08	71,31	75,93	73,58	76,79	79,74	78,23
Sulawesi Tenggara	75,23	79,67	77,33	58,35	61,49	59,88	64,52	67,86	66,13
Gorontalo	80,43	83,28	81,78	68,75	70,28	69,51	73,71	75,50	74,58
Sulawesi Barat	70,74	77,16	73,87	54,70	57,62	56,18	58,06	61,49	59,78
Maluku	74,22	75,23	74,71	35,69	32,87	34,31	51,64	50,16	50,92
Maluku Utara	68,11	69,36	68,70	30,68	33,72	32,18	40,59	42,64	41,59
Papua Barat	71,57	74,85	73,13	40,44	39,52	40,00	52,82	53,37	53,08
Papua	60,44	65,50	62,91	7,81	7,87	7,84	21,01	22,75	21,84
Indonesia	**82,25**	**83,91**	**83,05**	**64,20**	**66,03**	**65,11**	**74,30**	**75,80**	**75,03**

Catatan: L (Laki-Laki), P (Perempuan)

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 4.5

Persentase Penduduk Berumur 7-17 Tahun yang Mengakses Internet menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Tujuan Mengakses, 2021

Provinsi	Laki-laki					
	Mendapat informasi/ berita	Mendapatkan Informasi untuk Proses Pembelajaran	Media Sosial/ jejaring Sosial (facebook, Twitter, Whats App,skype, Dll)	Hiburan (Download/ Main Game, Nonton TV,Download/ Nonton Film/ Video, Radio, Download Gambar dan Musik)	Mendapat Informasi Mengenai Barang/Jasa, Pembelian Barang/Jasa dan Penjua-lan Barang/ jasa	Mengirim/ Menerima Email, Fasili-tas Finansial (E-Banking) dan Lainnya
Aceh	46,42	58,32	75,18	80,84	4,15	8,94
Sumatera Utara	44,32	79,23	77,11	74,33	5,11	9,39
Sumatera Barat	43,97	78,83	74,21	79,57	4,85	9,28
Riau	44,73	74,66	74,89	75,87	6,03	8,17
Jambi	47,20	68,50	76,05	74,83	5,33	8,26
Sumatera Selatan	41,20	77,98	79,69	71,10	5,83	8,55
Bengkulu	44,08	76,58	79,20	78,94	8,31	9,85
Lampung	36,44	81,52	75,11	69,88	4,45	6,10
Kepulauan Bangka Belitung	42,41	78,70	77,82	81,94	5,27	7,10
Kepulauan Riau	40,30	83,55	66,01	72,20	3,95	15,58
DKI Jakarta	50,10	82,05	78,80	76,52	14,23	24,95
Jawa Barat	41,27	81,91	74,08	65,66	9,59	11,02
Jawa Tengah	43,43	83,45	82,83	76,55	7,68	11,62
DI Yogyakarta	45,48	86,29	79,49	75,56	12,67	20,50
Jawa Timur	44,54	81,33	80,35	76,22	6,78	8,95
Banten	44,74	75,95	76,12	64,42	8,72	13,56
Bali	54,86	86,54	81,42	82,95	8,91	10,99
Nusa Tenggara Barat	37,91	78,83	72,81	77,74	5,40	7,22
Nusa Tenggara Timur	38,91	77,30	78,60	77,35	2,42	7,89
Kalimantan Barat	41,49	71,69	79,03	80,48	5,60	9,09
Kalimantan Tengah	44,12	75,75	81,02	79,06	5,09	13,41
Kalimantan Selatan	39,84	80,79	78,52	80,64	6,15	15,37
Kalimantan Timur	40,89	83,68	75,45	78,99	6,02	11,08
Kalimantan Utara	32,00	80,86	71,99	75,41	3,10	9,13
Sulawesi Utara	43,24	72,08	75,08	75,37	5,28	8,83
Sulawesi Tengah	34,37	73,05	78,66	76,46	3,77	8,14
Sulawesi Selatan	42,82	81,94	77,82	75,88	4,63	8,72
Sulawesi Tenggara	40,83	80,85	75,33	77,62	3,10	9,20
Gorontalo	29,21	70,40	80,24	75,53	2,52	11,64
Sulawesi Barat	32,52	76,43	71,13	76,84	4,68	6,23
Maluku	37,44	73,87	75,30	79,42	3,22	8,54
Maluku Utara	32,78	61,95	75,70	75,47	2,62	8,42
Papua Barat	37,68	70,00	75,39	76,94	2,48	8,40
Papua	47,15	73,99	75,35	67,88	4,02	7,26
Indonesia	**42,89**	**80,08**	**77,57**	**73,54**	**7,26**	**10,90**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 4.5 (Lanjutan)

Persentase Penduduk Berumur 7-17 Tahun yang Mengakses Internet menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Tujuan Mengakses, 2021

Provinsi	Perempuan					
	Mendapat informasi/ berita	Mendapatkan Informasi untuk Proses Pembelajaran	Media Sosial/ jejaring Sosial (facebook, Twitter, Whats App,skype, Dll)	Hiburan (Download/ Main Game, Nonton TV,Download/ Nonton Film/ Video, Radio, Download Gambar dan Musik)	Mendapat Informasi Mengenai Barang/ Jasa, Pembelian Barang/Jasa dan Penjualan Barang/jasa	Mengirim/ Menerima Email, Fasilitas Finansial (E-Banking) dan Lainnya
Aceh	50,48	64,09	77,12	73,57	7,03	11,38
Sumatera Utara	46,03	81,55	80,13	69,03	8,10	9,93
Sumatera Barat	46,18	81,55	78,94	72,70	8,18	9,86
Riau	46,77	79,18	75,34	69,59	8,71	9,22
Jambi	51,46	72,62	80,83	69,26	11,35	9,67
Sumatera Selatan	43,77	79,35	81,40	66,49	9,38	11,55
Bengkulu	51,89	83,13	83,45	75,06	9,67	10,91
Lampung	39,05	81,56	77,17	59,30	7,52	6,87
Kepulauan Bangka Belitung	46,48	83,69	81,94	78,53	12,08	8,34
Kepulauan Riau	41,99	83,49	70,36	64,32	11,72	17,17
DKI Jakarta	54,90	86,93	82,54	75,15	20,84	30,41
Jawa Barat	45,86	82,26	77,17	62,23	15,65	11,06
Jawa Tengah	47,39	85,39	84,73	68,33	12,41	12,06
DI Yogyakarta	48,22	90,11	84,52	66,56	20,06	21,47
Jawa Timur	47,53	82,50	83,15	69,08	12,05	10,22
Banten	47,05	74,92	79,01	61,20	12,78	16,84
Bali	56,98	86,16	80,88	73,53	11,60	9,20
Nusa Tenggara Barat	39,93	83,37	78,57	74,43	8,89	9,06
Nusa Tenggara Timur	43,73	80,21	80,69	73,39	4,59	9,30
Kalimantan Barat	48,43	74,74	80,06	75,59	9,62	11,51
Kalimantan Tengah	45,02	78,31	81,87	74,23	7,89	15,15
Kalimantan Selatan	44,57	84,41	79,22	77,08	11,53	16,63
Kalimantan Timur	42,69	86,45	76,25	74,66	7,73	13,72
Kalimantan Utara	30,75	83,27	73,68	64,68	4,14	11,01
Sulawesi Utara	45,41	73,36	77,85	67,28	7,34	10,82
Sulawesi Tengah	34,61	77,45	84,04	70,91	5,74	9,18
Sulawesi Selatan	46,70	83,04	79,60	69,87	8,26	11,11
Sulawesi Tenggara	41,15	82,72	79,43	69,72	5,93	11,44
Gorontalo	33,87	78,60	81,50	70,89	4,41	14,17
Sulawesi Barat	39,04	83,08	79,57	70,56	7,86	7,01
Maluku	41,47	82,04	79,04	73,33	5,22	10,79
Maluku Utara	36,09	69,20	80,99	70,85	2,70	10,47
Papua Barat	40,31	71,56	80,69	73,61	5,16	10,73
Papua	43,45	75,52	78,83	68,28	4,67	10,98
Indonesia	**46,28**	**81,85**	**80,25**	**67,91**	**11,77**	**12,14**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 4.5 (Lanjutan)

Persentase Penduduk Berumur 7-17 Tahun yang Mengakses Internet menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Tujuan Mengakses, 2021

Provinsi	Laki-laki+Perempuan					
	Mendapat informasi/ berita	Mendapatkan Informasi untuk Proses Pembelajaran	Media Sosial/ jejaring Sosial (facebook, Twitter, Whats App,skype, Dll)	Hiburan (Download/Main Game, Nonton TV,Download/ Nonton Film/ Video, Radio, Download Gambar dan Musik)	Mendapat Informasi Mengenai Barang/Jasa, Pembelian Barang/Jasa dan Penjualan Barang/ jasa	Mengirim/ Menerima Email, Fasilitas Finansial (E-Banking) dan Lainnya
Aceh	48,46	61,22	76,15	77,19	5,60	10,17
Sumatera Utara	45,17	80,39	78,62	71,68	6,60	9,66
Sumatera Barat	45,07	80,18	76,55	76,18	6,50	9,57
Riau	45,73	76,87	75,11	72,79	7,34	8,68
Jambi	49,32	70,55	78,43	72,06	8,32	8,96
Sumatera Selatan	42,49	78,67	80,55	68,78	7,62	10,06
Bengkulu	48,08	79,94	81,37	76,95	9,00	10,40
Lampung	37,74	81,54	76,13	64,63	5,97	6,48
Kepulauan Bangka Belitung	44,42	81,17	79,86	80,25	8,64	7,71
Kepulauan Riau	41,13	83,52	68,14	68,33	7,76	16,36
DKI Jakarta	52,47	84,45	80,64	75,85	17,49	27,64
Jawa Barat	43,53	82,08	75,60	63,98	12,57	11,04
Jawa Tengah	45,37	84,40	83,76	72,52	10,00	11,84
DI Yogyakarta	46,79	88,12	81,90	71,25	16,21	20,97
Jawa Timur	46,01	81,91	81,72	72,72	9,37	9,57
Banten	45,90	75,43	77,58	62,79	10,77	15,21
Bali	55,87	86,36	81,16	78,44	10,20	10,13
Nusa Tenggara Barat	38,94	81,14	75,74	76,05	7,18	8,16
Nusa Tenggara Timur	41,31	78,74	79,64	75,38	3,50	8,59
Kalimantan Barat	44,95	73,21	79,54	78,04	7,61	10,30
Kalimantan Tengah	44,56	77,01	81,44	76,68	6,47	14,26
Kalimantan Selatan	42,17	82,57	78,86	78,89	8,79	15,99
Kalimantan Timur	41,78	85,05	75,84	76,85	6,86	12,38
Kalimantan Utara	31,40	82,03	72,81	70,22	3,60	10,03
Sulawesi Utara	44,35	72,73	76,49	71,25	6,33	9,84
Sulawesi Tengah	34,49	75,32	81,43	73,59	4,79	8,67
Sulawesi Selatan	44,76	82,49	78,71	72,89	6,44	9,91
Sulawesi Tenggara	40,99	81,78	77,36	73,71	4,50	10,31
Gorontalo	31,51	74,45	80,86	73,24	3,45	12,89
Sulawesi Barat	35,89	79,86	75,49	73,60	6,32	6,63
Maluku	39,38	77,81	77,10	76,48	4,18	9,63
Maluku Utara	34,44	65,58	78,35	73,16	2,66	9,45
Papua Barat	38,95	70,75	77,95	75,34	3,77	9,53
Papua	45,29	74,76	77,09	68,08	4,34	9,12
Indonesia	**44,57**	**80,96**	**78,90**	**70,76**	**9,49**	**11,51**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 4.5.1

Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 7-17 Tahun yang Mengakses Internet untuk Mendapat Informasi Mengenai Barang/Jasa, Pembelian Barang/Jasa dan Penjualan Barang/Jasa menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Mendapat Informasi Mengenai Barang/Jasa, Pembelian Barang/Jasa dan Penjualan Barang/Jasa				
	Laki-Laki				
	estimasi	standar error	Relative standard error	selang kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	4,15	0,70	16,82	2,78	5,52
Sumatera Utara	5,11	1,01	10,98	4,01	6,21
Sumatera Barat	4,85	2,01	13,84	3,54	6,17
Riau	6,03	3,01	10,17	4,83	7,23
Jambi	5,33	4,01	12,98	3,97	6,68
Sumatera Selatan	5,83	5,01	10,11	4,68	6,99
Bengkulu	8,31	6,01	12,73	6,23	10,38
Lampung	4,45	7,01	10,97	3,49	5,40
Kepulauan Bangka Belitung	5,27	8,01	15,62	3,66	6,89
Kepulauan Riau	3,95	9,01	23,00	2,17	5,73
DKI Jakarta	14,23	10,01	8,02	11,99	16,46
Jawa Barat	9,59	11,01	4,85	8,68	10,50
Jawa Tengah	7,68	12,01	4,95	6,93	8,42
DI Yogyakarta	12,67	13,01	10,01	10,19	15,16
Jawa Timur	6,78	14,01	5,27	6,07	7,48
Banten	8,72	15,01	9,26	7,14	10,30
Bali	8,91	16,01	10,49	7,08	10,74
Nusa Tenggara Barat	5,40	17,01	12,20	4,11	6,69
Nusa Tenggara Timur	2,42	18,01	19,55	1,49	3,34
Kalimantan Barat	5,60	19,01	11,35	4,36	6,85
Kalimantan Tengah	5,09	20,01	13,90	3,70	6,48
Kalimantan Selatan	6,15	21,01	10,82	4,84	7,45
Kalimantan Timur	6,02	22,01	14,45	4,31	7,72
Kalimantan Utara	3,10	23,01	28,72	1,35	4,84
Sulawesi Utara	5,28	24,01	14,34	3,80	6,77
Sulawesi Tengah	3,77	25,01	17,19	2,50	5,04
Sulawesi Selatan	4,63	26,01	9,96	3,72	5,53
Sulawesi Tenggara	3,10	27,01	16,49	2,10	4,10
Gorontalo	2,52	28,01	24,90	1,29	3,74
Sulawesi Barat	4,68	29,01	20,66	2,78	6,57
Maluku	3,22	30,01	23,01	1,77	4,67
Maluku Utara	2,62	31,01	27,54	1,20	4,03
Papua Barat	2,48	32,01	35,94	0,73	4,22
Papua	4,02	33,01	22,53	2,25	5,80
Indonesia	**7,26**	**0,15**	**2,05**	**6,97**	**7,55**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 4.5.1 (Lanjutan)

Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 7-17 Tahun yang Mengakses Internet untuk Mendapat Informasi Mengenai Barang/Jasa, Pembelian Barang/Jasa dan Penjualan Barang/Jasa menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Mendapat Informasi Mengenai Barang/Jasa, Pembelian Barang/Jasa dan Penjualan Barang/Jasa				
	Perempuan				
	estimasi	standar error	Relative standard error	selang kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	7,03	0,71	10,14	5,64	8,43
Sumatera Utara	8,10	0,55	6,81	7,02	9,18
Sumatera Barat	8,18	0,73	8,94	6,75	9,61
Riau	8,71	0,75	8,65	7,23	10,19
Jambi	11,35	1,02	8,96	9,36	13,35
Sumatera Selatan	9,38	0,70	7,42	8,01	10,74
Bengkulu	9,67	1,01	10,49	7,68	11,65
Lampung	7,52	0,61	8,09	6,32	8,71
Kepulauan Bangka Belitung	12,08	1,12	9,30	9,88	14,28
Kepulauan Riau	11,72	1,69	14,45	8,40	15,04
DKI Jakarta	20,84	1,32	6,34	18,25	23,43
Jawa Barat	15,65	0,60	3,82	14,48	16,83
Jawa Tengah	12,41	0,47	3,78	11,49	13,33
DI Yogyakarta	20,06	1,59	7,94	16,94	23,18
Jawa Timur	12,05	0,47	3,90	11,13	12,97
Banten	12,78	0,96	7,51	10,90	14,67
Bali	11,60	0,99	8,54	9,66	13,55
Nusa Tenggara Barat	8,89	0,86	9,70	7,20	10,58
Nusa Tenggara Timur	4,59	0,59	12,93	3,43	5,76
Kalimantan Barat	9,62	0,81	8,45	8,03	11,21
Kalimantan Tengah	7,89	0,83	10,49	6,26	9,51
Kalimantan Selatan	11,53	0,89	7,68	9,80	13,27
Kalimantan Timur	7,73	0,81	10,45	6,15	9,32
Kalimantan Utara	4,14	0,92	22,35	2,32	5,95
Sulawesi Utara	7,34	0,75	10,24	5,87	8,81
Sulawesi Tengah	5,74	0,77	13,49	4,22	7,26
Sulawesi Selatan	8,26	0,59	7,18	7,10	9,42
Sulawesi Tenggara	5,93	0,71	12,05	4,53	7,33
Gorontalo	4,41	0,79	18,00	2,86	5,97
Sulawesi Barat	7,86	1,16	14,75	5,58	10,13
Maluku	5,22	1,00	19,11	3,26	7,17
Maluku Utara	2,70	0,76	28,12	1,21	4,18
Papua Barat	5,16	0,99	19,23	3,21	7,10
Papua	4,67	0,85	18,20	3,00	6,33
Indonesia	**11,77**	**0,18**	**1,56**	**11,41**	**12,13**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 4.6

Persentase Penduduk Laki-Laki Berumur 7-17 Tahun di Perkotaan yang Mengakses Internet menurut Provinsi, dan Tujuan Mengakses, 2021

Provinsi	Mendapat informasi/ berita	Mendapatkan Informasi untuk Proses Pembelajaran	Media Sosial/ jejaring Sosial (facebook, Twitter, Whats App,skype, Dll)	Hiburan (Download/Main Game, Nonton TV,Download/ Nonton Film/ Video, Radio, Download Gambar dan Musik)	Mendapat Informasi Mengenai Barang/ Jasa, Pembelian Barang/Jasa dan Penjualan Barang/Jasa	Mengirim/Menerima Email, Fasilitas Finansial (E-Banking) dan Lainnya
Aceh	44,42	67,95	76,67	86,23	4,26	11,75
Sumatera Utara	44,23	81,50	76,84	76,55	6,68	9,32
Sumatera Barat	46,13	83,75	76,38	83,04	6,66	12,51
Riau	43,30	81,08	76,62	74,60	7,37	7,91
Jambi	49,34	77,23	78,26	76,17	5,66	8,22
Sumatera Selatan	39,20	82,40	80,13	76,02	7,00	11,11
Bengkulu	40,88	84,96	84,33	83,93	13,63	12,76
Lampung	36,45	81,92	78,04	73,15	5,76	4,79
Kepulauan Bangka Belitung	41,31	79,76	76,43	82,73	6,68	8,28
Kepulauan Riau	40,84	84,65	65,67	72,29	3,75	15,95
DKI Jakarta	50,10	82,05	78,80	76,52	14,23	24,95
Jawa Barat	41,33	83,36	73,53	66,16	10,05	11,11
Jawa Tengah	43,83	85,07	82,63	78,64	9,83	12,26
DI Yogyakarta	47,08	86,72	80,14	78,23	13,47	18,97
Jawa Timur	45,24	84,66	79,54	77,92	8,09	9,85
Banten	43,76	79,03	75,58	66,93	9,29	15,07
Bali	53,08	87,90	81,11	84,29	11,18	13,00
Nusa Tenggara Barat	38,48	84,71	75,23	78,00	6,14	7,60
Nusa Tenggara Timur	36,69	83,94	78,16	83,66	4,60	9,84
Kalimantan Barat	44,87	78,93	81,81	87,04	9,07	10,41
Kalimantan Tengah	44,80	80,73	82,44	81,47	6,64	17,40
Kalimantan Selatan	39,55	83,37	76,66	84,91	8,23	17,84
Kalimantan Timur	43,15	86,01	77,19	83,47	7,32	13,69
Kalimantan Utara	30,08	85,49	72,69	78,03	4,42	10,02
Sulawesi Utara	40,39	74,12	72,61	77,73	5,93	10,15
Sulawesi Tengah	31,17	78,64	78,84	84,67	4,91	11,27
Sulawesi Selatan	42,55	85,36	78,56	79,13	5,65	9,05
Sulawesi Tenggara	42,08	85,72	76,97	78,85	3,94	13,21
Gorontalo	33,14	77,43	79,91	75,51	2,45	21,63
Sulawesi Barat	30,87	81,96	62,61	84,28	6,35	7,40
Maluku	34,61	80,67	77,72	82,93	4,55	10,29
Maluku Utara	35,56	67,16	74,31	82,22	4,36	14,05
Papua Barat	40,60	76,75	76,58	81,69	3,26	7,81
Papua	47,52	77,86	77,53	67,73	4,04	7,71
Indonesia	**43,27**	**83,05**	**77,24**	**74,60**	**8,88**	**12,28**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 4.6 (Lanjutan)

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 7-17 Tahun di Perkotaan yang Mengakses Internet menurut Provinsi, dan Tujuan Mengakses, 2021

Provinsi	Mendapat informasi/ berita	Mendapatkan Informasi untuk Proses Pembelajaran	Media Sosial/ jejaring Sosial (facebook, Twitter, Whats App,skype, Dll)	Hiburan (Download/Main Game, Nonton TV,Download/ Nonton Film/ Video, Radio, Download Gambar dan Musik)	Mendapat Informasi Mengenai Barang/ Jasa, Pembelian Barang/Jasa dan Penjualan Barang/Jasa	Mengirim/Menerima Email, Fasilitas Finansial (E-Banking) dan Lainnya
Aceh	45,19	68,58	76,71	79,86	8,57	13,72
Sumatera Utara	46,04	82,13	80,80	70,68	9,63	9,06
Sumatera Barat	48,46	83,03	81,22	77,29	10,54	12,78
Riau	46,15	83,45	75,92	71,29	11,83	8,08
Jambi	52,63	81,41	81,22	74,08	13,47	9,69
Sumatera Selatan	43,84	83,36	80,82	74,31	11,31	16,29
Bengkulu	50,44	88,79	86,84	79,67	12,16	10,28
Lampung	35,31	85,52	77,22	61,79	9,33	7,18
Kepulauan Bangka Belitung	48,46	84,78	81,37	81,48	12,82	9,31
Kepulauan Riau	42,00	84,86	69,54	63,80	11,83	17,51
DKI Jakarta	54,90	86,93	82,54	75,15	20,84	30,41
Jawa Barat	46,08	83,78	76,70	62,80	16,13	11,05
Jawa Tengah	47,44	87,41	85,28	70,89	14,39	12,35
DI Yogyakarta	49,00	90,82	84,18	69,00	21,26	19,90
Jawa Timur	47,82	85,60	82,41	70,93	13,11	11,56
Banten	46,22	77,98	77,31	62,17	13,01	17,76
Bali	57,46	88,59	82,58	75,91	12,64	11,08
Nusa Tenggara Barat	39,63	85,26	79,52	75,97	8,55	10,61
Nusa Tenggara Timur	39,60	87,79	80,98	80,67	5,72	9,48
Kalimantan Barat	53,00	78,89	82,43	80,40	14,65	11,97
Kalimantan Tengah	44,08	83,07	82,34	76,86	7,15	18,84
Kalimantan Selatan	41,96	86,67	77,63	78,90	14,32	19,21
Kalimantan Timur	43,79	88,27	78,58	78,92	9,43	16,50
Kalimantan Utara	28,05	85,61	74,32	68,84	4,90	13,22
Sulawesi Utara	41,28	74,01	76,89	71,26	7,66	11,74
Sulawesi Tengah	31,70	84,06	86,48	79,02	6,57	14,52
Sulawesi Selatan	46,38	86,82	78,46	74,71	9,59	13,04
Sulawesi Tenggara	41,35	86,50	81,95	75,18	7,61	17,38
Gorontalo	41,45	82,75	85,29	78,08	3,02	24,77
Sulawesi Barat	35,52	83,06	78,43	79,83	8,54	5,07
Maluku	40,58	86,23	80,62	78,13	5,94	14,33
Maluku Utara	38,47	75,11	78,51	83,55	4,78	16,67
Papua Barat	44,52	76,89	82,85	79,23	5,18	10,56
Papua	44,77	77,90	81,10	70,25	4,38	11,56
Indonesia	**46,61**	**84,39**	**79,94**	**69,58**	**13,65**	**13,59**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 4.6 (Lanjutan)

Persentase Penduduk Laki-Laki + Perempuan Berumur 7-17 Tahun di Perkotaan yang Mengakses Internet menurut Provinsi, Tujuan Mengakses, 2021

Provinsi	Mendapat informasi/ berita	Mendapatkan Informasi untuk Proses Pembelajaran	Media Sosial/ jejaring Sosial (facebook, Twitter, Whats App,skype, Dll)	Hiburan (Down-load/Main Game, Nonton TV,Download/ Nonton Film/ Video, Radio, DownloadGam-bar dan Musik)	Mendapat Informasi Mengenai Barang/ Jasa, Pembelian Barang/Jasa dan Penjualan Barang/Jasa	Mengirim/Menerima Email, Fasilitas Finansial (E-Banking) dan Lainnya
Aceh	44,80	68,26	76,69	83,07	6,40	12,73
Sumatera Utara	45,12	81,81	78,78	73,67	8,13	9,19
Sumatera Barat	47,25	83,40	78,71	80,26	8,53	12,64
Riau	44,70	82,24	76,28	72,98	9,56	7,99
Jambi	50,93	79,26	79,70	75,15	9,45	8,94
Sumatera Selatan	41,47	82,87	80,46	75,18	9,11	13,65
Bengkulu	45,64	86,87	85,58	81,81	12,90	11,53
Lampung	35,89	83,70	77,64	67,54	7,53	5,97
Kepulauan Bangka Belitung	44,83	82,23	78,86	82,11	9,70	8,78
Kepulauan Riau	41,40	84,75	67,56	68,14	7,69	16,71
DKI Jakarta	52,47	84,45	80,64	75,85	17,49	27,64
Jawa Barat	43,65	83,56	75,08	64,52	13,02	11,08
Jawa Tengah	45,56	86,19	83,90	74,93	12,01	12,30
DI Yogyakarta	47,99	88,68	82,07	73,82	17,19	19,41
Jawa Timur	46,49	85,12	80,93	74,54	10,52	10,68
Banten	44,99	78,50	76,45	64,54	11,16	16,43
Bali	55,14	88,22	81,80	80,35	11,87	12,10
Nusa Tenggara Barat	39,07	84,99	77,42	76,97	7,37	9,14
Nusa Tenggara Timur	38,09	85,80	79,52	82,22	5,14	9,67
Kalimantan Barat	48,73	78,91	82,10	83,89	11,72	11,15
Kalimantan Tengah	44,44	81,88	82,39	79,19	6,90	18,11
Kalimantan Selatan	40,72	84,97	77,13	81,99	11,18	18,51
Kalimantan Timur	43,46	87,11	77,86	81,26	8,34	15,05
Kalimantan Utara	29,11	85,55	73,47	73,62	4,65	11,55
Sulawesi Utara	40,84	74,06	74,79	74,44	6,81	10,96
Sulawesi Tengah	31,45	81,53	82,92	81,66	5,80	13,00
Sulawesi Selatan	44,43	86,08	78,51	76,96	7,58	11,00
Sulawesi Tenggara	41,73	86,10	79,39	77,07	5,72	15,24
Gorontalo	37,15	80,00	82,51	76,75	2,73	23,15
Sulawesi Barat	33,24	82,52	70,67	82,01	7,47	6,21
Maluku	37,53	83,39	79,14	80,58	5,23	12,27
Maluku Utara	36,95	70,96	76,32	82,85	4,56	15,30
Papua Barat	42,51	76,82	79,64	80,49	4,20	9,15
Papua	46,12	77,88	79,34	69,01	4,22	9,66
Indonesia	**44,90**	**83,71**	**78,56**	**72,15**	**11,21**	**12,92**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 4.6.1

Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 7-17 Tahun di Perkotaan yang Mengakses Internet untuk Mendapat Informasi Mengenai Barang/Jasa, Pembelian Barang/Jasa dan Penjualan Barang/Jasa menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Mendapat Informasi Mengenai Barang/Jasa, Pembelian Barang/Jasa dan Penjualan Barang/Jasa				
	Laki-Laki				
	estimasi	standar error	Relative standard error	selang kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	4,26	1,33	31,29	1,65	6,87
Sumatera Utara	6,68	0,89	13,37	4,93	8,43
Sumatera Barat	6,66	1,16	17,37	4,39	8,93
Riau	7,37	1,04	14,16	5,33	9,42
Jambi	5,66	1,38	24,43	2,95	8,37
Sumatera Selatan	7,00	1,13	16,14	4,79	9,21
Bengkulu	13,63	2,28	16,69	9,17	18,09
Lampung	5,76	1,05	18,16	3,71	7,81
Kepulauan Bangka Belitung	6,68	1,25	18,72	4,23	9,13
Kepulauan Riau	3,75	0,94	25,18	1,90	5,60
DKI Jakarta	14,23	1,14	8,02	11,99	16,46
Jawa Barat	10,05	0,55	5,47	8,98	11,13
Jawa Tengah	9,83	0,59	6,03	8,67	10,99
DI Yogyakarta	13,47	1,54	11,40	10,46	16,48
Jawa Timur	8,09	0,53	6,51	7,06	9,12
Banten	9,29	0,98	10,56	7,36	11,21
Bali	11,18	1,27	11,33	8,69	13,66
Nusa Tenggara Barat	6,14	1,01	16,49	4,16	8,13
Nusa Tenggara Timur	4,60	1,09	23,77	2,46	6,75
Kalimantan Barat	9,07	1,27	14,01	6,58	11,56
Kalimantan Tengah	6,64	1,32	19,82	4,06	9,23
Kalimantan Selatan	8,23	1,16	14,15	5,95	10,52
Kalimantan Timur	7,32	1,18	16,07	5,01	9,62
Kalimantan Utara	4,42	1,26	28,59	1,94	6,89
Sulawesi Utara	5,93	1,12	18,85	3,74	8,12
Sulawesi Tengah	4,91	1,50	30,67	1,96	7,86
Sulawesi Selatan	5,65	0,81	14,31	4,07	7,24
Sulawesi Tenggara	3,94	1,04	26,31	1,91	5,97
Gorontalo	2,45	0,99	40,46	0,51	4,40
Sulawesi Barat	6,35	2,27	35,76	1,90	10,80
Maluku	4,55	1,17	25,62	2,26	6,83
Maluku Utara	4,36	1,49	34,05	1,45	7,27
Papua Barat	3,26	1,54	47,37	0,23	6,28
Papua	4,04	1,08	26,69	1,93	6,16
Indonesia	**8,88**	**0,22**	**2,49**	**8,44**	**9,31**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 4.6.1 (Lanjutan)

Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 7-17 Tahun di Perkotaan yang Mengakses Internet untuk Mendapat Informasi Mengenai Barang/Jasa, Pembelian Barang/Jasa dan Penjualan Barang/Jasa menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Mendapat Informasi Mengenai Barang/Jasa, Pembelian Barang/Jasa dan Penjualan Barang/Jasa				
	Perempuan				
	estimasi	standar error	Relative standard error	selang kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	8,57	1,22	14,25	6,18	10,97
Sumatera Utara	9,63	0,85	8,82	7,96	11,29
Sumatera Barat	10,54	1,24	11,76	8,11	12,96
Riau	11,83	1,38	11,66	9,12	14,53
Jambi	13,47	1,99	14,80	9,56	17,37
Sumatera Selatan	11,31	1,35	11,94	8,66	13,95
Bengkulu	12,16	2,05	16,86	8,15	16,18
Lampung	9,33	1,29	13,78	6,81	11,85
Kepulauan Bangka Belitung	12,82	1,53	11,93	9,82	15,82
Kepulauan Riau	11,83	1,80	15,19	8,31	15,35
DKI Jakarta	20,84	1,32	6,34	18,25	23,43
Jawa Barat	16,13	0,71	4,39	14,74	17,52
Jawa Tengah	14,39	0,70	4,86	13,02	15,76
DI Yogyakarta	21,26	1,94	9,11	17,47	25,06
Jawa Timur	13,11	0,66	5,04	11,81	14,40
Banten	13,01	1,14	8,77	10,77	15,24
Bali	12,64	1,28	10,09	10,14	15,15
Nusa Tenggara Barat	8,55	1,17	13,73	6,25	10,85
Nusa Tenggara Timur	5,72	1,19	20,86	3,38	8,06
Kalimantan Barat	14,65	1,66	11,32	11,40	17,90
Kalimantan Tengah	7,15	1,22	17,05	4,76	9,54
Kalimantan Selatan	14,32	1,55	10,86	11,27	17,36
Kalimantan Timur	9,43	1,09	11,61	7,28	11,57
Kalimantan Utara	4,90	1,27	26,00	2,40	7,40
Sulawesi Utara	7,66	1,09	14,27	5,52	9,81
Sulawesi Tengah	6,57	1,67	25,43	3,30	9,85
Sulawesi Selatan	9,59	1,05	10,91	7,54	11,64
Sulawesi Tenggara	7,61	1,43	18,77	4,81	10,41
Gorontalo	3,02	0,93	30,73	1,20	4,83
Sulawesi Barat	8,54	2,51	29,45	3,61	13,47
Maluku	5,94	1,46	24,54	3,09	8,80
Maluku Utara	4,78	1,69	35,40	1,46	8,09
Papua Barat	5,18	1,50	28,84	2,25	8,11
Papua	4,38	1,00	22,74	2,43	6,34
Indonesia	**13,65**	**0,27**	**1,99**	**13,12**	**14,18**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 4.6.1 (Lanjutan)

Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 7-17 Tahun di Perkotaan yang Mengakses Internet untuk Mendapat Informasi Mengenai Barang/Jasa, Pembelian Barang/Jasa dan Penjualan Barang/Jasa menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Mendapat Informasi Mengenai Barang/Jasa, Pembelian Barang/Jasa dan Penjualan Barang/Jasa				
	Laki-Laki + Perempuan				
	estimasi	standar error	Relative standard error	selang kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	6,40	0,92	14,42	0,05	0,08
Sumatera Utara	8,13	0,69	8,47	0,07	0,09
Sumatera Barat	8,53	0,92	10,76	0,07	0,10
Riau	9,56	0,97	10,10	0,08	0,11
Jambi	9,45	1,23	13,05	0,07	0,12
Sumatera Selatan	9,11	0,93	10,18	0,07	0,11
Bengkulu	12,90	1,59	12,30	0,10	0,16
Lampung	7,53	0,86	11,42	0,06	0,09
Kepulauan Bangka Belitung	9,70	1,07	11,05	0,08	0,12
Kepulauan Riau	7,69	1,08	13,99	0,06	0,10
DKI Jakarta	17,49	0,93	5,30	0,16	0,19
Jawa Barat	13,02	0,46	3,55	0,12	0,14
Jawa Tengah	12,01	0,48	3,98	0,11	0,13
DI Yogyakarta	17,19	1,30	7,53	0,15	0,20
Jawa Timur	10,52	0,44	4,20	0,10	0,11
Banten	11,16	0,79	7,11	0,10	0,13
Bali	11,87	0,98	8,26	0,10	0,14
Nusa Tenggara Barat	7,37	0,79	10,74	0,06	0,09
Nusa Tenggara Timur	5,14	0,84	16,28	0,04	0,07
Kalimantan Barat	11,72	1,13	9,64	0,10	0,14
Kalimantan Tengah	6,90	0,97	14,09	0,05	0,09
Kalimantan Selatan	11,18	1,06	9,52	0,09	0,13
Kalimantan Timur	8,34	0,87	10,38	0,07	0,10
Kalimantan Utara	4,65	0,92	19,88	0,03	0,06
Sulawesi Utara	6,81	0,82	12,02	0,05	0,08
Sulawesi Tengah	5,80	1,18	20,27	0,03	0,08
Sulawesi Selatan	7,58	0,70	9,22	0,06	0,09
Sulawesi Tenggara	5,72	0,91	15,98	0,04	0,08
Gorontalo	2,73	0,72	26,56	0,01	0,04
Sulawesi Barat	7,47	1,90	25,39	0,04	0,11
Maluku	5,23	1,00	19,04	0,03	0,07
Maluku Utara	4,56	1,27	27,78	0,02	0,07
Papua Barat	4,20	1,11	26,35	0,02	0,06
Papua	4,22	0,80	18,87	0,03	0,06
Indonesia	**11,21**	**0,18**	**1,63**	**10,85**	**11,56**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 4.6.1

Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 7-17 Tahun di Perkotaan yang Mengakses Internet untuk Mengirim/Menerima Email, Fasilitas Finansial (E-Banking) dan Lainnya menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Mengirim/ Menerima Email, Fasilitas Finansial (E-Banking) dan Lainnya				
	Laki-Laki				
	estimasi	standar error	Relative standard error	selang kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	11,75	1,31	11,14	9,19	14,32
Sumatera Utara	9,32	0,99	10,66	7,38	11,27
Sumatera Barat	12,51	1,47	11,74	9,63	15,38
Riau	7,91	1,12	14,16	5,72	10,11
Jambi	8,22	1,58	19,18	5,13	11,32
Sumatera Selatan	11,11	1,36	12,23	8,45	13,78
Bengkulu	12,76	1,99	15,60	8,86	16,66
Lampung	4,79	0,89	18,52	3,05	6,52
Kepulauan Bangka Belitung	8,28	1,34	16,23	5,64	10,91
Kepulauan Riau	15,95	1,99	12,51	12,04	19,85
DKI Jakarta	24,95	1,45	5,81	22,11	27,79
Jawa Barat	11,11	0,60	5,40	9,93	12,29
Jawa Tengah	12,26	0,65	5,32	10,98	13,54
DI Yogyakarta	18,97	1,74	9,18	15,56	22,38
Jawa Timur	9,85	0,57	5,81	8,73	10,98
Banten	15,07	1,23	8,14	12,67	17,48
Bali	13,00	1,42	10,93	10,22	15,79
Nusa Tenggara Barat	7,60	1,13	14,81	5,40	9,81
Nusa Tenggara Timur	9,84	2,21	22,46	5,51	14,17
Kalimantan Barat	10,41	1,37	13,13	7,73	13,09
Kalimantan Tengah	17,40	1,87	10,77	13,73	21,08
Kalimantan Selatan	17,84	1,70	9,52	14,51	21,17
Kalimantan Timur	13,69	1,46	10,68	10,82	16,56
Kalimantan Utara	10,02	1,88	18,72	6,34	13,70
Sulawesi Utara	10,15	1,32	13,03	7,56	12,74
Sulawesi Tengah	11,27	2,04	18,07	7,28	15,27
Sulawesi Selatan	9,05	1,03	11,43	7,02	11,08
Sulawesi Tenggara	13,21	2,00	15,11	9,30	17,12
Gorontalo	21,63	2,66	12,30	16,42	26,84
Sulawesi Barat	7,40	2,38	32,10	2,74	12,06
Maluku	10,29	1,75	17,01	6,86	13,72
Maluku Utara	14,05	2,62	18,69	8,90	19,19
Papua Barat	7,81	1,68	21,51	4,51	11,10
Papua	7,71	1,38	17,87	5,01	10,41
Indonesia	**12,28**	**0,25**	**2,07**	**11,78**	**12,77**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 4.6.1 (Lanjutan)

Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 7-17 Tahun di Perkotaan yang Mengakses Internet untuk Mengirim/Menerima Email, Fasilitas Finansial (E-Banking) dan Lainnya menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Mengirim/ Menerima Email, Fasilitas Finansial (E-Banking) dan Lainnya				
	Perempuan				
	estimasi	standar error	Relative standard error	selang kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	13,72	1,51	11,00	10,76	16,67
Sumatera Utara	9,06	0,85	9,41	7,39	10,73
Sumatera Barat	12,78	1,38	10,77	10,08	15,48
Riau	8,08	1,08	13,38	5,96	10,19
Jambi	9,69	1,86	19,17	6,05	13,33
Sumatera Selatan	16,29	1,63	9,99	13,10	19,48
Bengkulu	10,28	1,98	19,29	6,40	14,17
Lampung	7,18	1,34	18,69	4,55	9,81
Kepulauan Bangka Belitung	9,31	1,36	14,62	6,64	11,98
Kepulauan Riau	17,51	2,18	12,43	13,24	21,78
DKI Jakarta	30,41	1,54	5,06	27,40	33,42
Jawa Barat	11,05	0,58	5,27	9,91	12,19
Jawa Tengah	12,35	0,64	5,15	11,10	13,60
DI Yogyakarta	19,90	1,83	9,22	16,31	23,50
Jawa Timur	11,56	0,65	5,64	10,28	12,84
Banten	17,76	1,39	7,81	15,05	20,48
Bali	11,08	1,29	11,68	8,54	13,61
Nusa Tenggara Barat	10,61	1,40	13,16	7,87	13,35
Nusa Tenggara Timur	9,48	1,72	18,14	6,11	12,85
Kalimantan Barat	11,97	1,43	11,94	9,17	14,78
Kalimantan Tengah	18,84	1,86	9,89	15,19	22,49
Kalimantan Selatan	19,21	1,71	8,91	15,86	22,57
Kalimantan Timur	16,50	1,50	9,08	13,57	19,44
Kalimantan Utara	13,22	2,37	17,92	8,58	17,86
Sulawesi Utara	11,74	1,46	12,45	8,87	14,60
Sulawesi Tengah	14,52	2,13	14,70	10,33	18,70
Sulawesi Selatan	13,04	1,33	10,18	10,44	15,64
Sulawesi Tenggara	17,38	2,10	12,08	13,26	21,50
Gorontalo	24,77	2,84	11,47	19,20	30,34
Sulawesi Barat	5,07	1,73	34,09	1,68	8,46
Maluku	14,33	2,49	17,40	9,44	19,22
Maluku Utara	16,67	2,83	16,97	11,12	22,21
Papua Barat	10,56	2,09	19,81	6,46	14,66
Papua	11,56	1,69	14,59	8,25	14,86
Indonesia	**13,59**	**0,26**	**1,93**	**13,08**	**14,11**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 4.6.1 (Lanjutan)

Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 7-17 Tahun di Perkotaan yang Mengakses Internet untuk Mengirim/Menerima Email, Fasilitas Finansial (E-Banking) dan Lainnya menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Mengirim/ Menerima Email, Fasilitas Finansial (E-Banking) dan Lainnya				
	Laki-Laki + Perempuan				
	estimasi	standar error	Relative standard error	selang kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	12,73	1,05	8,23	10,68	14,78
Sumatera Utara	9,19	0,74	8,00	7,75	10,63
Sumatera Barat	12,64	1,12	8,87	10,44	14,83
Riau	7,99	0,85	10,67	6,32	9,66
Jambi	8,94	1,26	14,14	6,46	11,41
Sumatera Selatan	13,65	1,15	8,40	11,40	15,90
Bengkulu	11,53	1,49	12,95	8,60	14,45
Lampung	5,97	0,84	14,09	4,32	7,62
Kepulauan Bangka Belitung	8,78	1,02	11,61	6,79	10,78
Kepulauan Riau	16,71	1,69	10,09	13,41	20,01
DKI Jakarta	27,64	1,16	4,20	25,37	29,91
Jawa Barat	11,08	0,44	3,95	10,22	11,94
Jawa Tengah	12,30	0,48	3,87	11,37	13,24
DI Yogyakarta	19,41	1,32	6,79	16,83	22,00
Jawa Timur	10,68	0,46	4,31	9,78	11,58
Banten	16,43	1,01	6,17	14,44	18,41
Bali	12,10	1,05	8,70	10,04	14,16
Nusa Tenggara Barat	9,14	0,94	10,30	7,29	10,98
Nusa Tenggara Timur	9,67	1,65	17,02	6,44	12,89
Kalimantan Barat	11,15	1,05	9,44	9,09	13,21
Kalimantan Tengah	18,11	1,44	7,94	15,29	20,93
Kalimantan Selatan	18,51	1,33	7,20	15,90	21,12
Kalimantan Timur	15,05	1,12	7,44	12,86	17,25
Kalimantan Utara	11,55	1,63	14,08	8,37	14,74
Sulawesi Utara	10,96	1,07	9,78	8,86	13,06
Sulawesi Tengah	13,00	1,70	13,04	9,68	16,33
Sulawesi Selatan	11,00	0,90	8,21	9,23	12,78
Sulawesi Tenggara	15,24	1,54	10,13	12,22	18,27
Gorontalo	23,15	2,13	9,19	18,98	27,32
Sulawesi Barat	6,21	1,62	26,14	3,03	9,40
Maluku	12,27	1,66	13,51	9,02	15,51
Maluku Utara	15,30	2,17	14,20	11,04	19,56
Papua Barat	9,15	1,49	16,30	6,23	12,07
Papua	9,66	1,27	13,09	7,18	12,14
Indonesia	**12,92**	**0,19**	**1,51**	**12,54**	**13,30**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 4.7

Persentase Penduduk Laki-Laki Berumur 7-17 Tahun di Perdesaan yang Mengakses Internet menurut Provinsi dan Tujuan Mengakses, 2021

Provinsi	Mendapat informasi/ berita	Mendapatkan Informasi untuk Proses Pembelajaran	Media Sosial/ jejaring Sosial (facebook, Twitter, Whats App,skype, Dll)	Hiburan (Download/Main Game, Nonton TV,Download/ Nonton Film/ Video, Radio, Download Gambar dan Musik)	Mendapat Informasi Mengenai Barang/ jasa, Pembelian Barang/Jasa dan Penjualan Barang/Jasa	Mengirim/ Menerima Email, Fasilitas Finansial (E-Banking) dan Lainnya
Aceh	47,82	51,56	74,13	77,05	4,08	6,97
Sumatera Utara	44,45	75,87	77,51	71,03	2,77	9,50
Sumatera Barat	41,29	72,73	71,51	75,27	2,60	5,28
Riau	45,92	69,26	73,43	76,93	4,90	8,39
Jambi	45,83	62,90	74,63	73,97	5,12	8,28
Sumatera Selatan	42,75	74,55	79,36	67,28	4,93	6,56
Bengkulu	46,26	70,87	75,70	75,54	4,68	7,87
Lampung	36,43	81,32	73,66	68,25	3,79	6,75
Kepulauan Bangka Belitung	44,06	77,13	79,90	80,77	3,18	5,35
Kepulauan Riau	31,05	64,66	71,85	70,54	7,47	9,23
DKI Jakarta						
Jawa Barat	41,01	75,80	76,41	63,55	7,62	10,62
Jawa Tengah	42,98	81,58	83,06	74,14	5,19	10,89
DI Yogyakarta	40,66	85,00	77,52	67,52	10,27	25,13
Jawa Timur	43,56	76,62	81,49	73,81	4,91	7,67
Banten	47,60	66,96	77,71	57,06	7,06	9,13
Bali	59,51	82,99	82,25	79,44	2,98	5,74
Nusa Tenggara Barat	37,27	72,05	70,02	77,44	4,54	6,78
Nusa Tenggara Timur	40,40	72,88	78,89	73,15	0,96	6,59
Kalimantan Barat	38,67	65,64	76,71	75,02	2,71	7,99
Kalimantan Tengah	43,53	71,47	79,80	76,99	3,75	9,97
Kalimantan Selatan	40,14	78,14	80,43	76,27	4,00	12,84
Kalimantan Timur	35,59	78,17	71,37	68,45	2,96	4,94
Kalimantan Utara	36,51	70,01	70,37	69,27		7,04
Sulawesi Utara	47,49	69,03	78,75	71,86	4,33	6,88
Sulawesi Tengah	36,14	69,97	78,56	71,93	3,15	6,41
Sulawesi Selatan	43,07	78,72	77,12	72,82	3,66	8,40
Sulawesi Tenggara	39,90	77,23	74,11	76,70	2,48	6,22
Gorontalo	25,82	64,32	80,52	75,55	2,57	3,01
Sulawesi Barat	33,09	74,53	74,06	74,28	4,10	5,83
Maluku	41,60	63,89	71,74	74,27	1,27	5,98
Maluku Utara	30,55	57,79	76,81	70,08	1,22	3,92
Papua Barat	34,28	62,12	74,00	71,41	1,57	9,10
Papua	46,18	63,97	69,69	68,28	3,96	6,09
Indonesia	**42,28**	**75,24**	**78,12**	**71,81**	**4,63**	**8,67**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 4.7 (Lanjutan)

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 7-17 Tahun di Perdesaan yang Mengakses Internet menurut Provinsi dan Tujuan Mengakses, 2021

Provinsi	Mendapat informasi/ berita	Mendapatkan Informasi untuk Proses Pembelajaran	Media Sosial/ jejaring Sosial (facebook, Twitter, Whats App,skype, Dll)	Hiburan (Download/Main Game, Nonton TV,Download/ Nonton Film/ Video, Radio, Download Gambar dan Musik)	Mendapat Informasi Mengenai Barang/ jasa, Pembelian Barang/Jasa dan Penjualan Barang/Jasa	Mengirim/ Menerima Email, Fasilitas Finansial (E-Banking) dan Lainnya
Aceh	54,07	61,05	77,39	69,30	5,99	9,79
Sumatera Utara	46,00	80,76	79,22	66,75	6,00	11,13
Sumatera Barat	43,64	79,88	76,39	67,58	5,55	6,59
Riau	47,29	75,59	74,86	68,15	6,09	10,17
Jambi	50,77	67,38	80,60	66,39	10,09	9,67
Sumatera Selatan	43,73	76,51	81,81	60,96	8,01	8,21
Bengkulu	52,79	79,62	81,34	72,19	8,11	11,30
Lampung	40,88	79,63	77,14	58,08	6,63	6,72
Kepulauan Bangka Belitung	43,56	82,09	82,77	74,19	10,98	6,92
Kepulauan Riau	41,79	63,44	82,24	71,99	10,14	12,16
DKI Jakarta						
Jawa Barat	45,01	76,25	79,07	59,94	13,75	11,07
Jawa Tengah	47,34	83,26	84,15	65,62	10,33	11,75
DI Yogyakarta	45,93	88,00	85,49	59,39	16,53	26,09
Jawa Timur	47,16	78,40	84,13	66,64	10,65	8,45
Banten	49,45	66,12	83,90	58,40	12,14	14,17
Bali	55,87	80,51	76,93	67,98	9,18	4,82
Nusa Tenggara Barat	40,28	81,18	77,46	72,62	9,29	7,26
Nusa Tenggara Timur	46,22	75,65	80,52	69,01	3,91	9,19
Kalimantan Barat	45,23	71,83	78,39	72,22	6,09	11,18
Kalimantan Tengah	45,83	74,21	81,47	71,97	8,52	11,96
Kalimantan Selatan	47,11	82,22	80,76	75,31	8,83	14,12
Kalimantan Timur	40,40	82,64	71,35	65,71	4,17	7,88
Kalimantan Utara	36,79	78,06	72,25	55,39	2,43	6,07
Sulawesi Utara	51,51	72,41	79,27	61,40	6,86	9,46
Sulawesi Tengah	36,41	73,35	82,52	65,88	5,22	5,87
Sulawesi Selatan	46,98	79,72	80,59	65,64	7,09	9,41
Sulawesi Tenggara	41,01	80,07	77,67	65,91	4,76	7,28
Gorontalo	27,85	75,30	78,50	65,18	5,52	5,75
Sulawesi Barat	40,21	83,09	79,95	67,50	7,63	7,65
Maluku	42,87	75,42	76,54	65,75	4,07	5,20
Maluku Utara	34,46	65,14	82,70	62,13	1,27	6,22
Papua Barat	35,16	65,04	78,05	66,75	5,12	10,94
Papua	39,61	68,64	72,24	62,57	5,49	9,31
Indonesia	**45,77**	**77,96**	**80,72**	**65,35**	**8,89**	**9,91**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 4.7 (Lanjutan)

Persentase Penduduk Laki-Laki + Perempuan Berumur 7-17 Tahun di Perdesaan yang Mengakses Internet menurut Provinsi dan Tujuan Mengakses, 2021

Provinsi	Mendapat informasi/ berita	Mendapatkan Informasi untuk Proses Pembelajaran	Media Sosial/ jejaring Sosial (facebook, Twitter, Whats App,skype, Dll)	Hiburan (Download/Main Game, Nonton TV,Download/ Nonton Film/ Video, Radio, Download Gambar dan Musik)	Mendapat Informasi Mengenai Barang/ jasa, Pembelian Barang/Jasa dan Penjualan Barang/Jasa	Mengirim/ Menerima Email, Fasilitas Finansial (E-Banking) dan Lainnya
Aceh	50,98	56,35	75,78	73,13	5,04	8,40
Sumatera Utara	45,24	78,37	78,38	68,85	4,42	10,33
Sumatera Barat	42,49	76,37	73,99	71,36	4,10	5,95
Riau	46,60	72,36	74,13	72,63	5,49	9,26
Jambi	48,32	65,16	77,64	70,15	7,63	8,98
Sumatera Selatan	43,25	75,55	80,61	64,04	6,51	7,41
Bengkulu	49,66	75,44	78,64	73,79	6,47	9,66
Lampung	38,65	80,47	75,39	63,19	5,20	6,73
Kepulauan Bangka Belitung	43,81	79,59	81,33	77,50	7,05	6,13
Kepulauan Riau	36,72	64,01	77,33	71,31	8,88	10,78
DKI Jakarta						
Jawa Barat	43,03	76,02	77,75	61,73	10,71	10,84
Jawa Tengah	45,17	82,42	83,61	69,86	7,77	11,32
DI Yogyakarta	43,21	86,45	81,38	63,59	13,30	25,60
Jawa Timur	45,36	77,51	82,81	70,22	7,78	8,06
Banten	48,54	66,53	80,85	57,74	9,64	11,69
Bali	57,69	81,75	79,59	73,72	6,07	5,28
Nusa Tenggara Barat	38,80	76,68	73,80	74,99	6,95	7,02
Nusa Tenggara Timur	43,35	74,28	79,72	71,05	2,46	7,91
Kalimantan Barat	42,06	68,85	77,58	73,57	4,46	9,64
Kalimantan Tengah	44,66	72,82	80,62	74,52	6,10	10,95
Kalimantan Selatan	43,62	80,17	80,59	75,79	6,41	13,48
Kalimantan Timur	38,06	80,46	71,36	67,05	3,58	6,45
Kalimantan Utara	36,65	73,97	71,30	62,44	1,19	6,56
Sulawesi Utara	49,54	70,76	79,01	66,52	5,62	8,19
Sulawesi Tengah	36,28	71,68	80,56	68,87	4,20	6,14
Sulawesi Selatan	45,05	79,23	78,88	69,18	5,40	8,91
Sulawesi Tenggara	40,46	78,66	75,90	71,29	3,62	6,75
Gorontalo	26,85	69,85	79,50	70,33	4,06	4,39
Sulawesi Barat	36,78	78,97	77,12	70,76	5,93	6,78
Maluku	42,20	69,32	74,00	70,25	2,59	5,61
Maluku Utara	32,57	61,58	79,85	65,97	1,24	5,11
Papua Barat	34,70	63,51	75,93	69,19	3,26	9,98
Papua	43,03	66,21	70,92	65,54	4,69	7,63
Indonesia	**44,04**	**76,61**	**79,43**	**68,56**	**6,78**	**9,29**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 4.7.1

Sampling Error Persentase Penduduk Laki-Laki Berumur 7-17 Tahun di Perkotaan yang Mengakses Internet untuk Mendapat Informasi Mengenai Barang/Jasa, Pembelian Barang/Jasa dan Penjualan Barang/Jasa menurut Provinsi 2021

Provinsi	estimasi	standar error	Relative standar error	selang kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	4,08	0,73	17,97	2,64	5,52
Sumatera Utara	2,77	0,40	14,58	1,98	3,56
Sumatera Barat	2,60	0,42	16,02	**1,78**	**3,42**
Riau	4,90	0,71	14,47	3,51	6,29
Jambi	5,12	0,71	13,84	3,73	6,50
Sumatera Selatan	4,93	0,57	11,59	3,81	6,04
Bengkulu	4,68	0,82	17,43	3,08	6,27
Lampung	3,79	0,51	13,54	2,79	4,80
Kepulauan Bangka Belitung	3,18	0,85	26,81	1,51	4,85
Kepulauan Riau	7,47	3,06	40,93	1,48	13,47
DKI Jakarta					
Jawa Barat	7,62	0,71	9,26	6,24	9,00
Jawa Tengah	5,19	0,44	8,51	4,32	6,05
DI Yogyakarta	10,27	2,13	20,74	6,09	14,44
Jawa Timur	4,91	0,43	8,82	4,06	5,76
Banten	7,06	1,35	19,18	4,41	9,72
Bali	2,98	0,63	21,18	1,74	4,21
Nusa Tenggara Barat	4,54	0,81	17,73	2,96	6,12
Nusa Tenggara Timur	0,96	0,30	30,77	0,38	1,54
Kalimantan Barat	2,71	0,48	17,54	1,78	3,65
Kalimantan Tengah	3,75	0,66	17,54	2,46	5,04
Kalimantan Selatan	4,00	0,60	15,10	2,82	5,19
Kalimantan Timur	2,96	0,87	29,52	1,25	4,68
Kalimantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sulawesi Utara	4,33	0,89	20,55	2,59	6,08
Sulawesi Tengah	3,15	0,57	18,04	2,03	4,26
Sulawesi Selatan	3,66	0,47	12,81	2,74	4,58
Sulawesi Tenggara	2,48	0,45	18,13	1,60	3,36
Gorontalo	2,57	0,79	30,83	1,02	4,12
Sulawesi Barat	4,10	1,04	25,36	2,06	6,14
Maluku	1,27	0,63	49,63	0,03	2,50
Maluku Utara	1,22	0,50	41,21	0,23	2,20
Papua Barat	1,57	0,68	43,03	0,25	2,89
Papua	3,96	1,66	41,99	0,70	7,22
Indonesia	**4,63**	**0,15**	**3,24**	**4,34**	**4,93**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 4.7.1 (Lanjutan)

Sampling Error Persentase Penduduk Perempuan Berumur 7-17 Tahun di Perkotaan yang Mengakses Internet untuk Mendapat Informasi Mengenai Barang/Jasa, Pembelian Barang/Jasa dan Penjualan Barang/Jasa menurut Provinsi 2021

Provinsi	estimasi	standar error	Relative standar error	selang kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	5,99	0,87	14,45	4,29	7,69
Sumatera Utara	6,00	0,59	9,86	4,84	7,16
Sumatera Barat	5,55	0,69	12,45	4,19	6,90
Riau	6,09	0,74	12,23	4,63	7,55
Jambi	10,09	1,10	10,92	7,93	12,25
Sumatera Selatan	8,01	0,71	8,81	6,63	9,40
Bengkulu	8,11	1,02	12,63	6,11	10,12
Lampung	6,63	0,65	9,84	5,35	7,91
Kepulauan Bangka Belitung	10,98	1,63	14,80	7,79	14,17
Kepulauan Riau	10,14	3,11	30,71	4,04	16,25
DKI Jakarta					
Jawa Barat	13,75	0,97	7,08	11,85	15,66
Jawa Tengah	10,33	0,62	5,96	9,12	11,54
DI Yogyakarta	16,53	2,65	16,04	11,33	21,73
Jawa Timur	10,65	0,65	6,14	9,36	11,93
Banten	12,14	1,76	14,52	8,69	15,60
Bali	9,18	1,44	15,67	6,36	12,00
Nusa Tenggara Barat	9,29	1,27	13,68	6,80	11,78
Nusa Tenggara Timur	3,91	0,63	16,03	2,68	5,14
Kalimantan Barat	6,09	0,73	12,02	4,65	7,52
Kalimantan Tengah	8,52	1,12	13,20	6,31	10,72
Kalimantan Selatan	8,83	0,85	9,64	7,16	10,49
Kalimantan Timur	4,17	0,97	23,35	2,26	6,08
Kalimantan Utara	2,43	0,87	35,68	0,73	4,12
Sulawesi Utara	6,86	0,92	13,48	5,05	8,67
Sulawesi Tengah	5,22	0,71	13,52	3,84	6,61
Sulawesi Selatan	7,09	0,63	8,89	5,86	8,33
Sulawesi Tenggara	4,76	0,69	14,49	3,41	6,11
Gorontalo	5,52	1,21	21,92	3,15	7,89
Sulawesi Barat	7,63	1,30	17,03	5,08	10,18
Maluku	4,07	1,15	28,17	1,82	6,31
Maluku Utara	1,27	0,51	39,98	0,27	2,26
Papua Barat	5,12	1,23	24,05	2,71	7,54
Papua	5,49	1,61	29,32	2,33	8,64
Indonesia	8,89	0,21	2,35	8,48	9,30

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 4.7.1 (Lanjutan)

Sampling Error Persentase Penduduk Laki-Laki + Perempuan Berumur 7-17 Tahun di Perkotaan yang Mengakses Internet untuk Mendapat Informasi Mengenai Barang/ Jasa, Pembelian Barang/Jasa dan Penjualan Barang/Jasa menurut Provinsi 2021

Provinsi	estimasi	standar error	Relative standar error	selang kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	5,04	0,58	11,54	3,90	6,19
Sumatera Utara	4,42	0,38	8,61	3,67	5,16
Sumatera Barat	4,10	0,42	10,29	3,27	4,93
Riau	5,49	0,55	9,97	4,41	6,56
Jambi	7,63	0,68	8,88	6,30	8,95
Sumatera Selatan	6,51	0,48	7,37	5,57	7,45
Bengkulu	6,47	0,69	10,60	5,12	7,81
Lampung	5,20	0,44	8,42	4,35	6,06
Kepulauan Bangka Belitung	7,05	0,92	13,08	5,25	8,86
Kepulauan Riau	8,88	2,23	25,15	4,50	13,26
DKI Jakarta					
Jawa Barat	10,71	0,62	5,82	9,49	11,93
Jawa Tengah	7,77	0,39	4,99	7,01	8,53
DI Yogyakarta	13,30	1,70	12,77	9,97	16,63
Jawa Timur	7,78	0,40	5,12	7,00	8,57
Banten	9,64	1,24	12,83	7,21	12,06
Bali	6,07	0,79	13,06	4,52	7,63
Nusa Tenggara Barat	6,95	0,78	11,24	5,42	8,48
Nusa Tenggara Timur	2,46	0,38	15,68	1,70	3,21
Kalimantan Barat	4,46	0,45	10,10	3,58	5,34
Kalimantan Tengah	6,10	0,68	11,17	4,76	7,43
Kalimantan Selatan	6,41	0,54	8,45	5,35	7,47
Kalimantan Timur	3,58	0,69	19,41	2,22	4,94
Kalimantan Utara	1,19	0,42	35,58	0,36	2,03
Sulawesi Utara	5,62	0,65	11,51	4,35	6,89
Sulawesi Tengah	4,20	0,47	11,13	3,28	5,11
Sulawesi Selatan	5,40	0,40	7,50	4,61	6,19
Sulawesi Tenggara	3,62	0,43	11,82	2,78	4,46
Gorontalo	4,06	0,79	19,52	2,50	5,61
Sulawesi Barat	5,93	0,88	14,81	4,21	7,66
Maluku	2,59	0,64	24,72	1,33	3,84
Maluku Utara	1,24	0,36	28,70	0,54	1,95
Papua Barat	3,26	0,69	21,15	1,91	4,61
Papua	4,69	1,19	25,34	2,36	7,03
Indonesia	**6,78**	**0,13**	**1,97**	**6,51**	**7,04**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 4.7.2

Sampling Error Persentase Penduduk Laki-Laki Berumur 7-17 Tahun di Perkotaan yang Mengakses Internet untuk Mengirim/Menerima Email, Fasilitas Finansial (E-Banking) dan Lainnya menurut Provinsi 2021

Provinsi	estimasi	standar error	Relative standar error	selang kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	6,97	0,85	12,19	5,31	8,64
Sumatera Utara	9,50	0,71	7,47	8,11	10,89
Sumatera Barat	5,28	0,67	12,63	3,97	6,59
Riau	8,39	0,93	11,06	6,57	10,21
Jambi	8,28	0,90	10,82	6,53	10,04
Sumatera Selatan	6,56	0,65	9,95	5,28	7,84
Bengkulu	7,87	0,98	12,50	5,94	9,80
Lampung	6,75	0,73	10,85	5,31	8,19
Kepulauan Bangka Belitung	5,35	1,02	19,10	3,35	7,36
Kepulauan Riau	9,23	3,44	37,23	2,50	15,96
DKI Jakarta					
Jawa Barat	10,62	0,81	7,67	9,02	12,22
Jawa Tengah	10,89	0,63	5,78	9,65	12,12
DI Yogyakarta	25,13	2,78	11,07	19,68	30,59
Jawa Timur	7,67	0,54	7,03	6,61	8,73
Banten	9,13	1,42	15,52	6,35	11,91
Bali	5,74	1,08	18,75	3,63	7,86
Nusa Tenggara Barat	6,78	1,24	18,28	4,35	9,20
Nusa Tenggara Timur	6,59	0,74	11,28	5,14	8,05
Kalimantan Barat	7,99	0,90	11,33	6,21	9,76
Kalimantan Tengah	9,97	1,14	11,46	7,73	12,21
Kalimantan Selatan	12,84	1,00	7,81	10,88	14,81
Kalimantan Timur	4,94	0,89	18,08	3,19	6,69
Kalimantan Utara	7,04	2,05	29,10	3,02	11,05
Sulawesi Utara	6,88	0,99	14,34	4,95	8,81
Sulawesi Tengah	6,41	0,82	12,75	4,81	8,01
Sulawesi Selatan	8,40	0,67	8,03	7,08	9,73
Sulawesi Tenggara	6,22	0,72	11,65	4,80	7,64
Gorontalo	3,01	0,74	24,69	1,55	4,46
Sulawesi Barat	5,83	1,22	20,94	3,44	8,22
Maluku	5,98	1,32	22,16	3,38	8,57
Maluku Utara	3,92	1,07	27,27	1,83	6,02
Papua Barat	9,10	1,48	16,27	6,20	12,01
Papua	6,09	1,15	18,82	3,84	8,33
Indonesia	**8,67**	**0,20**	**2,26**	**8,29**	**9,06**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 4.7.2 (Lanjutan)

Sampling Error Persentase Penduduk Perempuan Berumur 7-17 Tahun di Perkotaan yang Mengakses Internet untuk Mengirim/Menerima Email, Fasilitas Finansial (E-Banking) dan Lainnya menurut Provinsi 2021

Provinsi	estimasi	standar error	Relative standar error	selang kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	9,79	0,99	10,11	7,85	11,73
Sumatera Utara	11,13	0,80	7,16	9,57	12,70
Sumatera Barat	6,59	0,73	11,08	5,16	8,03
Riau	10,17	0,98	9,60	8,26	12,09
Jambi	9,67	1,00	10,39	7,70	11,63
Sumatera Selatan	8,21	0,75	9,11	6,74	9,67
Bengkulu	11,30	1,25	11,07	8,85	13,75
Lampung	6,72	0,70	10,36	5,35	8,08
Kepulauan Bangka Belitung	6,92	1,36	19,65	4,25	9,58
Kepulauan Riau	12,16	3,39	27,83	5,53	18,80
DKI Jakarta					
Jawa Barat	11,07	0,85	7,72	9,39	12,74
Jawa Tengah	11,75	0,67	5,73	10,44	13,07
DI Yogyakarta	26,09	2,92	11,19	20,37	31,81
Jawa Timur	8,45	0,59	7,02	7,28	9,61
Banten	14,17	1,77	12,52	10,70	17,65
Bali	4,82	1,01	20,99	2,84	6,80
Nusa Tenggara Barat	7,26	1,15	15,79	5,01	9,51
Nusa Tenggara Timur	9,19	0,89	9,65	7,45	10,92
Kalimantan Barat	11,18	1,05	9,37	9,13	13,24
Kalimantan Tengah	11,96	1,26	10,55	9,49	14,43
Kalimantan Selatan	14,12	1,07	7,56	12,03	16,21
Kalimantan Timur	7,88	1,37	17,35	5,20	10,56
Kalimantan Utara	6,07	1,99	32,71	2,18	9,96
Sulawesi Utara	9,46	1,06	11,17	7,39	11,53
Sulawesi Tengah	5,87	0,82	13,91	4,27	7,47
Sulawesi Selatan	9,41	0,69	7,34	8,06	10,76
Sulawesi Tenggara	7,28	0,86	11,83	5,59	8,97
Gorontalo	5,75	1,26	21,90	3,28	8,22
Sulawesi Barat	7,65	1,61	21,03	4,50	10,81
Maluku	5,20	1,05	20,11	3,15	7,25
Maluku Utara	6,22	1,35	21,67	3,58	8,86
Papua Barat	10,94	1,68	15,35	7,65	14,23
Papua	9,31	1,94	20,81	5,51	13,10
Indonesia	**9,91**	**0,21**	**2,14**	**9,49**	**10,32**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

PARTISIPASI ANAK

Persentase anak usia 10–17 tahun yang ikut dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir menurut provinsi

Persentase anak usia 7–17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar dalam satu tahun terakhir dan memberikan saran/ pendapat menurut jenis kelamin dan tipe daerah tahun 2021

Perkotaan **90,24%**	Perkotaan **89,06%**	Perkotaan **89,63%**
Perdesaan **80,54%**	Perdesaan **79,42%**	Perdesaan **79,98%**
Perkotaan dan Perdesaan **85,84%**	Perkotaan dan Perdesaan **84,81%**	Perkotaan dan Perdesaan **85,32%**

Persentase anak usia 10–17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/ sekolah tahun 2021

Perkotaan **90,24%**	Perkotaan **89,06%**	Perkotaan **89,63%**
Perdesaan **80,54%**	Perdesaan **79,42%**	Perdesaan **79,98%**
Perkotaan dan Perdesaan **85,84%**	Perkotaan dan Perdesaan **84,81%**	Perkotaan dan Perdesaan **85,32%**

Sumber: Susenas MSBP, BPS, 2021

Overview

Terdapat tiga aspek yang ditinjau dalam membahas mengenai partisipasi anak, yaitu partisipasi anak dalam rapat, kegiatan organisasi, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Sebagaimana dijelaskan dalam Teori Sistem Ekologi, bahwa dalam perkembangannya, anak tidak hanya berada di lingkungan terdekatnya saja, di mana dalam hal ini adalah keluarga, di sisi lain, anak juga akan berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas serta kondisi yang lebih beragam (Bronfenbrenner, 1979). Hal tersebut juga berkaitan dengan tugas perkembangan individu, sebagaimana dijelaskan dalam Teori Psikososial (Erikson, 1968), bahwa setiap orang dalam setiap usianya, akan dihadapkan dengan tugas perkembangan yang harus dilalui (Santrock, 2011). Partisipasi anak pada lingkungan yang lebih luas, dapat mendorong anak untuk menjadi pribadi yang lebih kritis dan memiliki keterampilan untuk hidup bermasyarakat. Adanya partisipasi anak dapat dimaknai sebagai upaya melibatkan anak guna berperan aktif, bersama dengan seluruh unsur masyarakat lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk karakter bertanggung jawab dalam diri anak, serta diharapkan anak dapat memperoleh manfaat positif dari proses pembangunan (Rizki, Sulastri, & Irfan, 2015).

5.1. Partisipasi dalam Pertemuan (Rapat)

Keterlibatan anak dalam mengikuti kegiatan pertemuan (rapat), dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan anak bahwa rapat ialah salah satu bentuk komunikasi antar individu dalam mencapai tujuan yang sama atau guna memecahkan masalah tertentu berdasarkan kesepakatan bersama anggota rapat (Jumiyati & Azlina, 2021).

5.1.1. Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Pernah Mengikuti Kegiatan Pertemuan (Rapat) di Lingkungan Sekitar dalam Satu Tahun Terakhir Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah

Hasil analisis atas persentase anak usia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar dalam satu tahun terakhir menurut jenis kelamin dan tipe daerah tahun 2021 menunjukkan bahwa berdasarkan jenis kelamin, persentase anak laki-laki yang mengikuti pertemuan atau rapat lebih tinggi (4,14 persen) dibandingkan anak perempuan (3,08 persen). Apabila

ditinjau berdasarkan tipe daerah, persentase anak di perdesaan yang mengikuti rapat lebih tinggi (4,16 persen) dibandingkan dengan anak-anak di perkotaan (3,21 persen). Secara keseluruhan, persentase keterlibatan anak pada kegiatan pertemuan di Indonesia hanya sebesar 3,62 persen saja. Rendahnya keterlibatan anak pada kegiatan pertemuan di lingkungan sekitar ini menunjukkan bahwa masih rendahnya upaya pemenuhan hak kebebasan anak dalam berekspresi dan bersosialisasi. Hal ini dapat menjadi perhatian khusus bagi berbagai pihak untuk semakin membuka akses bagi anak untuk dapat mendapatkan hak kebebasannya terutama pada partisipasinya di berbagai kegiatan pertemuan di wilayah sekitarnya.

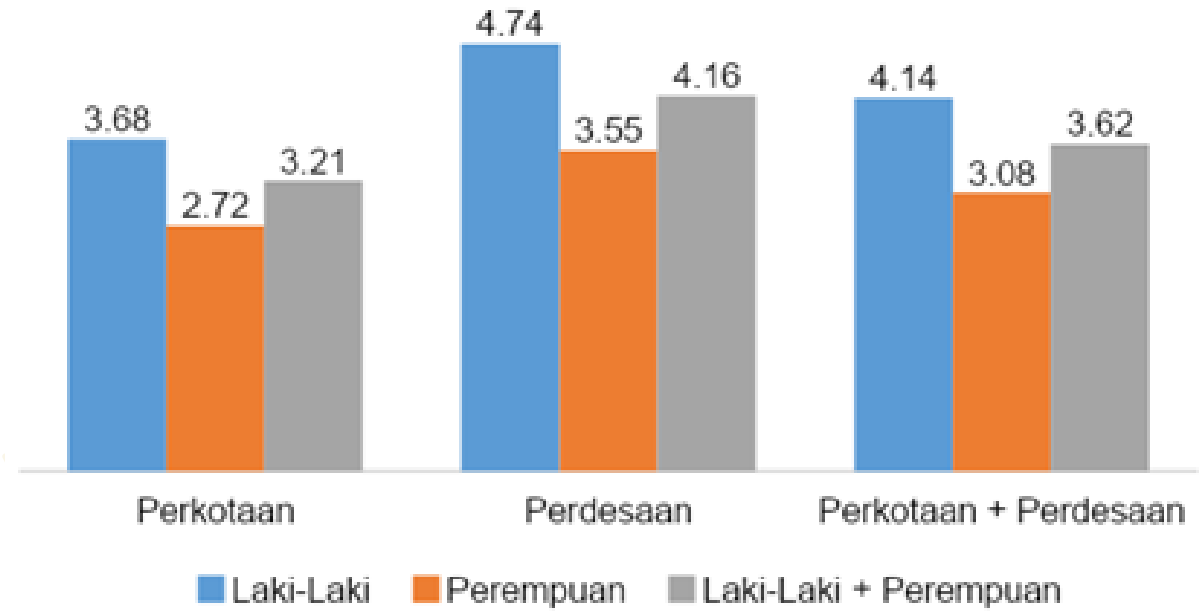

Gambar 5.1 Persentase Anak Usia 7-17 Tahun yang Pernah Mengikuti Kegiatan Pertemuan (Rapat) di Lingkungan Sekitar dalam Satu Tahun Terakhir Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah Tahun 2021
Sumber: Susenas MSBP, BPS, 2021

5.1.2. Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Pernah Mengikuti Kegiatan Pertemuan (Rapat) di Lingkungan Sekitar dalam Satu Tahun Terakhir dan Memberikan Saran/ Pendapat Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah

Pasal 12 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa,

> "Tiap anak berhak mengemukakan pendapat dan didengar dan dipertimbangkan pendapatnya saat pengambilan suatu keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya atau kehidupan anak lain."

Hal ini bermakna bahwa anak juga memiliki hak berupa kesempatan untuk mengungkapkan apa yang dipikirkan serta dirasakannya. Apabila dikaitkan dengan banyaknya anak yang memberikan pendapatnya dalam kegiatan pertemuan, didapati bahwa persentasenya lebih kecil dibandingkan dengan persentase anak yang terlibat dalam rapat. Secara keseluruhan, kurang dari satu persen anak yang memberikan pendapatnya ketika mengikuti rapat. Hasil analisis persentase anak usia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar dalam satu tahun terakhir dan memberikan saran/ pendapat menurut jenis kelamin dan tipe daerah disajikan pada Gambar 5.2.

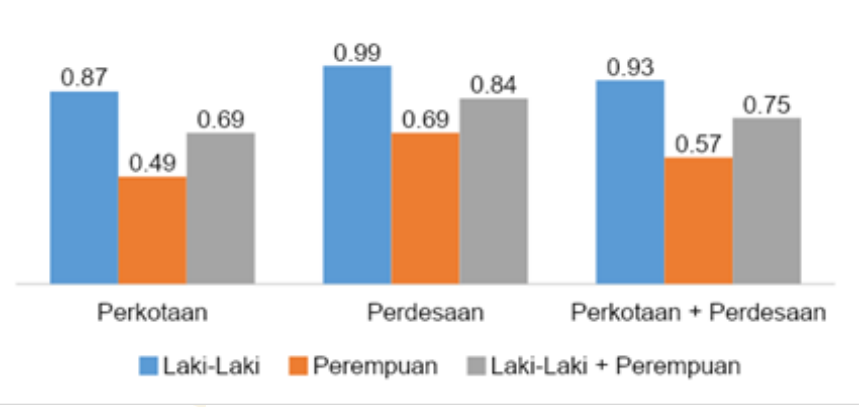

Gambar 5.2 Persentase Anak Usia 7-17 Tahun yang Pernah Mengikuti Kegiatan Pertemuan (Rapat) di Lingkungan Sekitar dalam Satu Tahun Terakhir dan Memberikan Saran/ Pendapat Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah Tahun 2021
Sumber: Susenas MSBP, BPS, 2021

Data menunjukkan bahwa pada konteks tempat tinggal, persentase anak di perdesaan yang memberikan pendapatnya dalam rapat lebih tinggi (0,84 persen) jika dibandingkan dengan anak di perkotaan (0,69 persen). Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, anak laki-laki menunjukkan persentase partisipasi dalam rapat dan mengemukakan pendapat lebih tinggi (0,93 persen) dibandingkan dengan anak perempuan (0,57 persen). Partisipasi anak dapat dianggap semu, ketika anak hanya sekadar mengikuti rapat tanpa berani dan/atau diberi kesempatan dalam mengungkapkan pandangannya. Dengan demikian, anak perlu difasilitasi agar mampu menyuarakan pendapatnya. Melibatkan anak dalam kegiatan pertemuan, dapat dimanfaatkan sebagai sarana melatih anak dalam mendengarkan dan menghargai pendapat orang yang mungkin berbeda dengannya. Di sisi lain, anak juga dapat dilatih untuk memiliki keberanian dalam memberikan pendapat. Namun, apabila hak anak tersebut kurang terpenuhi, maka dapat memicu beberapa dampak terhadap keterampilan anak, salah satunya adalah anak tidak memiliki kepercayaan diri dalam mengkritisi atau berpendapat, serta kurangnya keterampilan komunikasi yang dimiliki anak (Thoomaszen, 2017).

Sebagai upaya meningkatkan partisipasi anak dalam kegiatan pertemuan (rapat), Kemen PPPA telah membentuk Forum Anak guna mendukung anak untuk berpartisipasi dan berperan sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) serta PAPP (Partisipasi Anak Pada Pembangunan), dimulai dari tingkat nasional hingga tingkat desa.

5.2. Partisipasi dalam Kegiatan Organisasi

Partisipasi dalam kegiatan organisasi didefinisikan sebagai banyaknya keterlibatan anak usia 10-17 tahun dalam kegiatan organisasi, selain di tempat kerja dan/atau sekolah. Partisipasi anak dapat ditinjau berdasarkan jenis kelamin, tipe daerah, serta provinsi.

5.2.1. Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Ikut Serta dalam Kegiatan Organisasi Selain di Tempat Kerja/Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah

Selain partisipasi dalam kegiatan rapat di lingkungan organisasi masyarakat, partisipasi anak dapat juga dilihat dalam keikutsertaannya pada kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah.

Pada lingkup di luar kegiatan belajar mengajar di sekolah, siswa dapat memanfaatkan fasilitas ekstrakulikuler. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 62 tahun 2014 tentang Ekstrakulikuler pada Pendidikan Dasar, menjelaskan bahwa ekstrakulikuler ialah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama dan kemandirian siswa secara optimal yang dilakukan di luar jam belajar. Adapun fungsi dari ekstrakulikuler adalah sebagai wahana pengembangan, sosial, rekreatif, serta persiapan karir peserta didik (Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud, 2022).

Beberapa hasil penelitian mengungkapkan manfaat ekstrakulikuler bagi anak, diantaranya:

- Ekstrakulikuler PRAMUKA dapat membentuk karakter dan kepribadian siswa, meliputi karakter disiplin, beriman, berakhlak mulia, bertakwa, taat hukum, memiliki jiwa patriotik, menjunjung nilai-nilai luhur bangsa, berjiwa Pancasila, serta menjadi anggota masyarakat yang berguna (Pratiwi, 2020); (Sari & Irianto, 2020).
- Ekstrakulikuler rohis berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar siswa (Ferdiansyah, Triwoelandari, & Gustiawati, 2019).
- Siswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakulikuler akan memiliki keterampilan dalam berorganisasi, bersosialisasi, serta memecahkan masalah sesuai karakteristik ekstrakulikuler yang diikuti (Inriyani, Wahjoedi, & Sudarmiatin, 2017).

Selain mengikuti ekstrakulikuler, anak juga dapat mengikuti organisasi lain di luar kegiatan yang ada di sekolah. Diantaranya turut aktif dalam organisasi keagamaan di lingkungan sekitar dan Karang Taruna. Pedoman Kegiatan Karang Taruna Departemen Sosial menjelaskan, Karang Taruna adalah sebuah organisasi kemasyarakatan untuk pelayanan kesejahteraan sosial yang berfungsi untuk menampung aspirasi dan mengendalikan setiap kegiatan pada remaja yang tidak bernaung di bawah organisasi politik (Rukanda, Nurhayati, & Ganda, 2020).

Secara keseluruhan, persentase partisipasi anak dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah, adalah kurang dari lima persen. Hasil analisis persentase anak usia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah menurut jenis kelamin dan tipe daerah disajikan pada Gambar 5.3. Data menunjukkan bahwa kegiatan organisasi di luar tempat kerja/sekolah lebih banyak diikuti oleh anak yang tinggal di perdesaan (3,87 persen), dibandingkan dengan anak yang tinggal di perkotaan (3,38

persen). Sementara itu, persentase anak perempuan yang mengikuti kegiatan organisasi lebih tinggi (3,67 persen) dibandingkan anak laki-laki (3,52 persen). Meskipun perbedaan persentase ini tidak signifikan, hasil analisis mengindikasikan bahwa anak yang tinggal di perdesaan memiliki kesempatan untuk ikut aktif dalam organisasi di masyarakatnya dibandingkan dengan anak yang tinggal di kota. Hal ini diprediksi akibat masih tingginya kekerabatan dan kebersamaan, serta interaksi antar penduduk perdesaan, yang selanjutnya diwariskan juga kepada anak mereka. Selain itu, anak perempuan lebih memiliki kesempatan untuk ikut berorganisasi dalam masyarakat di luar tempat kerja/ sekolah. Diprediksi bahwa anak perempuan lebih memiliki banyak kesempatan untuk ikut serta berorganisasi dalam masyarakat, seperti ikut sanggar menari, seni budaya, maupun kegiatan organisasi lain sehingga keikutsertaan mereka lebih banyak dibandingkan anak laki-laki meski tidak berbeda jauh.

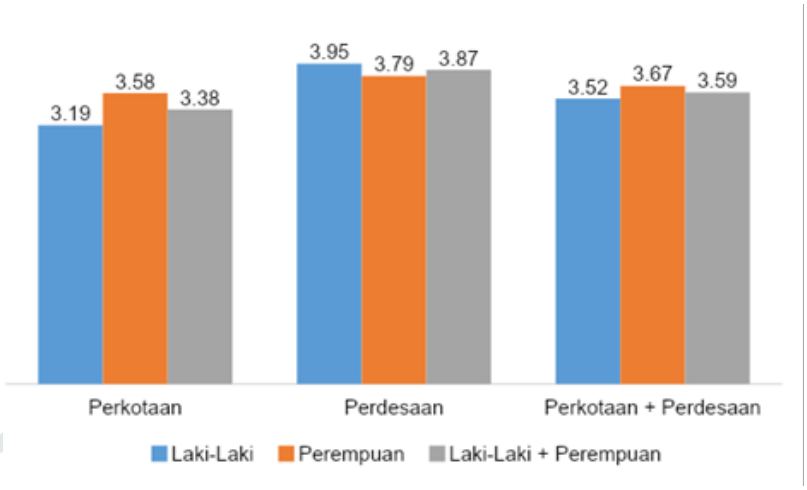

Gambar 5.3 Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Ikut Serta dalam Kegiatan Organisasi Selain di Tempat Kerja/ Sekolah Tahun 2021
Sumber: Susenas MSBP, BPS, 2021

5.3. Partisipasi dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Memberikan kesempatan pada anak untuk turut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dapat dijadikan sebagai salah satu wahana dalam melatih empati pada diri anak. Salah satu bentuk partisipasi anak dalam kegiatan sosial kemasyarakatan ialah dengan melakukan gotong royong.

5.3.1. Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Ikut dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah

Hasil analisis persentase anak usia 10-17 tahun yang ikut dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir menurut jenis kelamin dan tipe daerah pada tahun 2021 yang disajikan pada Gambar 5.4, menunjukkan bahwa persentase anak laki-laki yang mengikuti kegiatan sosial kemasyakatan lebih tinggi (54,72 persen), dibandingkan dengan anak perempuan (50,13 persen).

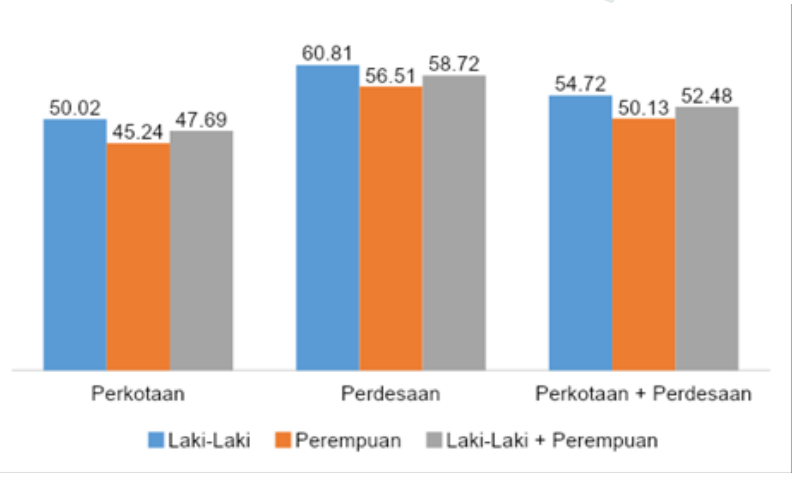

Gambar 5.4 Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Ikut dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah Tahun 2021
Sumber: Susenas MSBP, BPS, 2021

Selanjutnya, berdasarkan tipe daerah, persentase anak-anak di perdesaan yang terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan lebih tinggi (58,72 persen), dibandingkan anak di perkotaan (47,69 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa anak-anak di perdesaan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan dibandingkan dengan anak-anak di perkotaan. Keguyuban masyarakat yang tinggal di perdesaan mendorong anak-anak yang tinggal di lingkungan tersebut merasa nyaman untuk ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan di desanya. Sebaliknya, kondisi perkotaan yang sangat kompleks ditambah dengan sarana online yang baik, menyebabkan anak-anak yang tinggal di perkotaan lebih memilih untuk tinggal di rumah dan berkutat dengan kesehariannya di

dunia maya dibandingkan berinteraksi secara aktif di lingkungan masyarakat. Hal ini perlu mendapat perhatian dari seluruh pihak, khususnya msayarakat dan orang tua untuk dapat memastikan bahwa anak-anak mereka memiliki ragam aktivitas yang positif selepas dari waktunya di sekolah.

5.3.2. Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Ikut dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi

Hasil analisis terhadap persentase anak usia 10-17 tahun yang ikut dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir menurut provinsi tahun 2021 disajikan pada Gambar 5.5. Data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 52,48 persen anak Indonesia usia 10-17 tahun mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (Gambar 5.5).

Hasil analisis menunjukkan bahwa provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah provinsi dengan persentase anak usia 10-17 tahun yang ikut dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir tertinggi di Indonesia (72,44 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat NTB memberikan kesempatan yang tinggi untuk anak-anak mereka ikut serta secara aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan mereka. Masyarakat NTB, atau dikenal dengan masyarakat Suku Sasak memiliki sebuah tradisi gotong royong yang kuat. Hal ini ditunjukkan dengan beragam aktifitas kemasyarakatan yang sering dilakukan bersama. Sebagai contoh, apabila ada keluarga dan/atau tetangga yang akan menyelenggarakan pesta/syukuran dan/atau meninggal dunia, masyarakat termasuk anak-anak akan bahu membahu bekerjasama menyukseskan acara adat tersebut. Tradisi tersebut dikenal dengan istilah "begawe", yang dapat diartikan sebagai upaya bahu-membahu guna melancarkan sebuah acara sejak persiapan hingga acara selesai, di mana di dalamnya terdapat pembagian peran dan tugas (Maulin, 2021). Pada tradisi tersebut, para orang tua akan melibatkan anak-anaknya untuk turut mengambil bagian dan berpartisipasi aktif.

Sementara itu, hanya 26,75 persen anak yang terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini berkaitan dengan semakin memudarnya semangat gotong royong di wilayah perkotaan, khususnya metropolitan seperti di provinsi DKI Jakarta. Masyarakat, khususnya anak-anak mungkin sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas rutin sehari-hari yang

menyita waktu. Sehingga tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk berinteraksi atau bersosialiasi bersama masyarakat di sekitar mereka (Jamaludin, 2015).

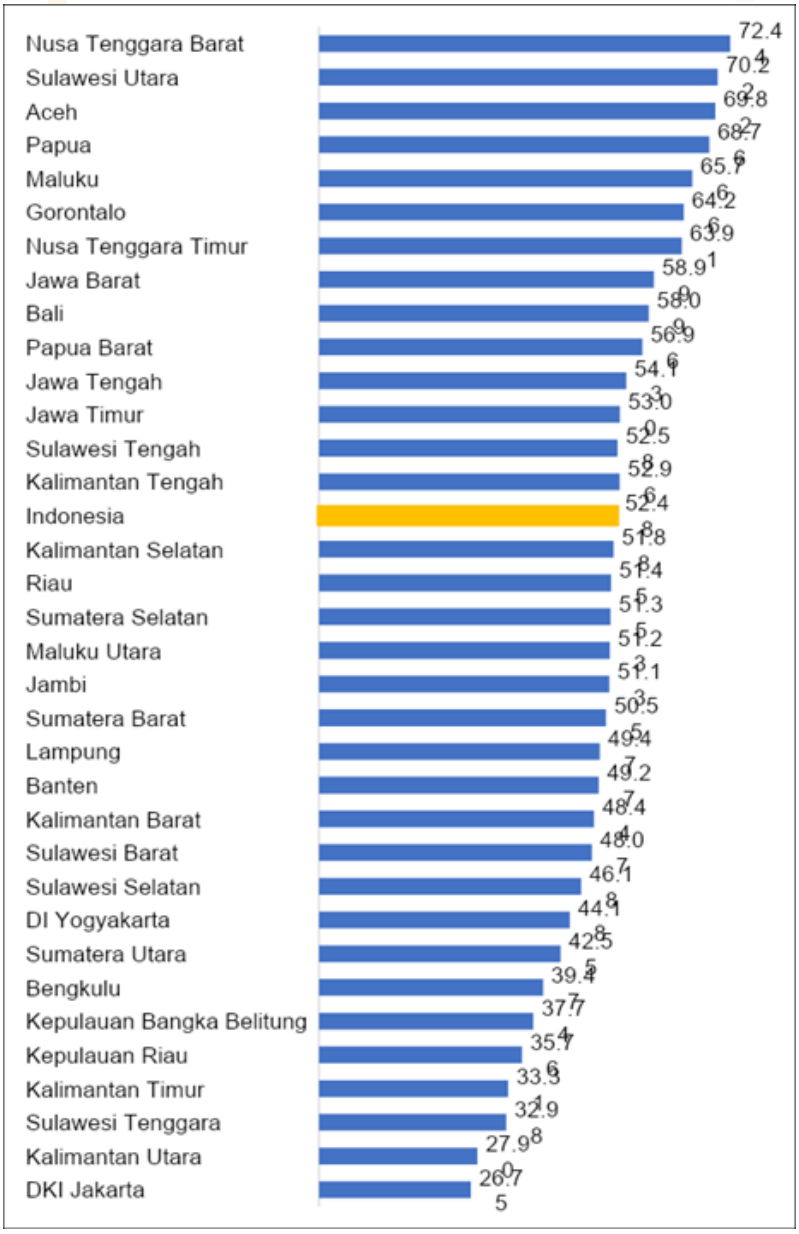

Gambar 5.5 Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Ikut dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi Tahun 2021
Sumber: Susenas MSBP, BPS, 2021

Lampiran 5.1

Persentase Penduduk Berumur 10-17 tahun yang Ikut dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dalam 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
Aceh	66,23	57,88	62,35	75,14	71,92	73,56	72,06	67,40	69,82
Sumatera Utara	43,40	41,18	42,29	45,47	40,08	42,85	44,38	40,67	42,55
Sumatera Barat	52,69	51,09	51,91	48,90	49,63	49,26	50,76	50,34	50,55
Riau	54,46	37,71	46,29	57,85	51,73	54,89	56,51	46,10	51,45
Jambi	32,64	35,62	34,10	64,48	55,51	60,19	53,56	48,52	51,13
Sumatera Selatan	45,57	50,54	48,02	55,25	51,71	53,50	51,44	51,25	51,35
Bengkulu	24,01	30,05	26,86	45,11	46,32	45,70	37,98	41,07	39,47
Lampung	32,23	40,45	36,28	58,80	52,91	55,98	50,17	48,71	49,47
Kepulauan Bangka Belitung	25,61	27,90	26,74	56,77	45,35	51,56	39,99	35,29	37,74
Kepulauan Riau	33,28	33,62	33,45	69,08	48,34	60,01	36,79	34,73	35,76
DKI Jakarta	28,96	24,44	26,75				28,96	24,44	26,75
Jawa Barat	59,27	51,44	55,49	72,73	72,49	72,61	62,01	55,77	58,99
Jawa Tengah	51,34	43,01	47,39	65,11	57,78	61,59	57,84	50,06	54,13
DI Yogyakarta	44,09	42,97	43,54	49,36	43,25	46,16	45,32	43,04	44,18
Jawa Timur	51,37	48,31	49,87	59,24	54,39	56,88	54,89	51,02	53,00
Banten	46,45	44,25	45,40	66,06	50,30	58,33	52,23	46,09	49,27
Bali	53,97	56,08	54,98	64,67	66,61	65,58	57,15	59,14	58,09
Nusa Tenggara Barat	72,99	78,02	75,66	70,61	67,85	69,23	71,76	73,08	72,44
Nusa Tenggara Timur	56,47	49,73	53,19	68,31	66,23	67,27	65,43	62,37	63,91
Kalimantan Barat	49,73	31,87	40,57	55,88	49,72	52,85	53,73	43,15	48,44
Kalimantan Tengah	37,02	47,18	42,16	57,98	63,08	60,42	49,70	56,37	52,96
Kalimantan Selatan	40,85	40,16	40,50	62,49	62,51	62,50	52,25	51,50	51,88
Kalimantan Timur	31,29	20,54	25,83	51,39	46,62	49,25	38,23	28,17	33,31
Kalimantan Utara	21,87	15,07	18,59	41,63	46,71	44,02	29,21	26,47	27,90
Sulawesi Utara	68,93	75,47	72,21	66,66	69,26	67,91	67,86	72,67	70,22
Sulawesi Tengah	31,54	36,47	34,11	62,08	59,29	60,72	53,20	51,96	52,58
Sulawesi Selatan	47,13	35,20	41,17	53,63	46,75	50,20	50,74	41,60	46,18
Sulawesi Tenggara	29,14	21,08	25,26	36,03	38,27	37,11	33,63	32,29	32,98
Gorontalo	66,16	65,78	65,97	62,15	64,01	63,04	63,78	64,76	64,26
Sulawesi Barat	25,23	22,74	23,98	58,74	49,32	54,18	52,16	43,78	48,07
Maluku	68,38	66,21	67,31	63,28	66,06	64,70	65,40	66,12	65,76
Maluku Utara	62,02	37,35	50,02	54,08	49,01	51,70	56,25	45,66	51,23
Papua Barat	33,77	39,40	36,37	73,39	68,29	70,96	57,11	56,79	56,96
Papua	51,96	62,70	57,38	72,59	71,94	72,28	67,86	69,69	68,76
Indonesia	50,02	45,24	47,69	60,81	56,51	58,72	54,72	50,13	52,48

Catatan: L (Laki-Laki), P (Perempuan), L+P (Laki-Laki + Perempuan)

Sumber: Susenas MSBP, BPS, 2021

Lampiran 5.1.1

Sampling Error Persentase Penduduk Perkotaan Berumur 10-17 tahun yang Ikut dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dalam 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Laki-laki				
	estimasi	standar error	Relative stan-dar error	selang kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	66,23	4,95	7,47	56,53	75,92
Sumatera Utara	43,40	4,04	9,30	35,49	51,32
Sumatera Barat	52,69	5,33	10,11	42,24	63,13
Riau	54,46	5,75	10,56	43,19	65,74
Jambi	32,64	7,44	22,78	18,07	47,21
Sumatera Selatan	45,57	4,69	10,29	36,38	54,76
Bengkulu	24,01	7,78	32,42	8,75	39,26
Lampung	32,23	4,89	15,18	22,65	41,82
Bangka Belitung	25,61	6,11	23,86	13,64	37,59
Kepulauan Riau	33,28	6,32	18,99	20,89	45,66
DKI Jakarta	28,96	3,71	12,80	21,70	36,22
Jawa Barat	59,27	2,26	3,81	54,84	63,70
Jawa Tengah	51,34	2,91	5,66	45,64	57,04
DI Yogyakarta	44,09	5,46	12,39	33,38	54,80
Jawa Timur	51,37	2,59	5,04	46,29	56,44
Banten	46,45	4,19	9,01	38,24	54,65
Bali	53,97	4,85	8,98	44,48	63,47
Nusa Tenggara Barat	72,99	5,86	8,03	61,51	84,48
Nusa Tenggara Timur	56,47	6,02	10,66	44,68	68,27
Kalimantan Barat	49,73	8,13	16,35	33,79	65,66
Kalimantan Tengah	37,02	7,33	19,81	22,64	51,39
Kalimantan Selatan	40,85	5,25	12,84	30,57	51,13
Kalimantan Timur	31,29	5,76	18,39	20,01	42,58
Kalimantan Utara	21,87	6,20	28,36	9,71	34,03
Sulawesi Utara	68,93	5,29	7,67	58,57	79,30
Sulawesi Tengah	31,54	7,96	25,24	15,94	47,14
Sulawesi Selatan	47,13	5,04	10,69	37,25	57,01
Sulawesi Tenggara	29,14	7,23	24,80	14,98	43,31
Gorontalo	66,16	6,97	10,54	52,50	79,83
Sulawesi Barat	25,23	10,52	41,69	4,61	45,85
Maluku	68,38	4,51	6,60	59,54	77,22
Maluku Utara	62,02	6,75	10,89	48,78	75,26
Papua Barat	33,77	7,34	21,72	19,39	48,15
Papua	51,96	6,74	12,97	38,75	65,17
Indonesia	**50,02**	**0,97**	**1,94**	**48,12**	**51,92**

Sumber: Susenas MSBP, BPS, 2021

Lampiran 5.1.1 (Lanjutan)

Sampling Error Persentase Penduduk Perkotaan Berumur 10-17 tahun yang Ikut dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dalam 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Perempuan				
	estimasi	standar error	Relative standar error	selang kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	57,88	5,96	10,30	46,20	69,57
Sumatera Utara	41,18	4,24	10,30	32,87	49,49
Sumatera Barat	51,09	5,82	11,39	39,69	62,49
Riau	37,71	5,28	14,01	27,36	48,07
Jambi	35,62	8,23	23,12	19,48	51,76
Sumatera Selatan	50,54	5,97	11,81	38,84	62,23
Bengkulu	30,05	9,20	30,62	12,01	48,09
Lampung	40,45	8,07	19,95	24,64	56,26
Bangka Belitung	27,90	6,73	24,13	14,70	41,09
Kepulauan Riau	33,62	7,17	21,31	19,57	47,66
DKI Jakarta	24,44	3,39	13,88	17,79	31,09
Jawa Barat	51,44	2,63	5,12	46,28	56,61
Jawa Tengah	43,01	2,63	6,11	37,86	48,17
DI Yogyakarta	42,97	5,60	13,03	32,00	53,95
Jawa Timur	48,31	2,88	5,96	42,67	53,95
Banten	44,25	4,28	9,67	35,87	52,63
Bali	56,08	5,53	9,86	45,25	66,92
Nusa Tenggara Barat	78,02	5,00	6,41	68,22	87,83
Nusa Tenggara Timur	49,73	6,13	12,33	37,72	61,75
Kalimantan Barat	31,87	6,73	21,10	18,69	45,06
Kalimantan Tengah	47,18	8,03	17,03	31,43	62,92
Kalimantan Selatan	40,16	5,26	13,10	29,85	50,47
Kalimantan Timur	20,54	3,56	17,33	13,56	27,52
Kalimantan Utara	15,07	5,49	36,46	4,30	25,84
Sulawesi Utara	75,47	4,09	5,42	67,45	83,49
Sulawesi Tengah	36,47	7,12	19,52	22,51	50,42
Sulawesi Selatan	35,20	5,07	14,41	25,26	45,14
Sulawesi Tenggara	21,08	5,83	27,67	9,65	32,52
Gorontalo	65,78	7,37	11,20	51,35	80,22
Sulawesi Barat	22,74	6,44	28,33	10,12	35,37
Maluku	66,21	5,67	8,57	55,09	77,33
Maluku Utara	37,35	9,00	24,11	19,70	55,00
Papua Barat	39,40	9,71	24,63	20,38	58,43
Papua	62,70	6,23	9,93	50,50	74,90
Indonesia	**45,24**	**1,05**	**2,31**	**43,19**	**47,29**

Sumber: Susenas MSBP, BPS, 2021

Lampiran 5.1.1 (Lanjutan)

Sampling Error Persentase Penduduk Perkotaan Berumur 10-17 tahun yang Ikut dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dalam 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Laki-Laki + Perempuan				
	estimasi	standar error	Relative stan-dar error	selang kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	62,35	4,52	7,24	53,50	71,20
Sumatera Utara	42,29	3,53	8,34	35,38	49,20
Sumatera Barat	51,91	4,73	9,11	42,63	61,18
Riau	46,29	5,06	10,93	36,37	56,20
Jambi	34,10	7,01	20,55	20,36	47,83
Sumatera Selatan	48,02	4,81	10,02	38,58	57,45
Bengkulu	26,86	7,14	26,57	12,87	40,85
Lampung	36,28	4,85	13,37	26,77	45,79
Bangka Belitung	26,74	5,49	20,51	15,99	37,49
Kepulauan Riau	33,45	5,57	16,66	22,53	44,38
DKI Jakarta	26,75	3,04	11,36	20,79	32,71
Jawa Barat	55,49	2,12	3,82	51,34	59,64
Jawa Tengah	47,39	2,35	4,96	42,78	51,99
DI Yogyakarta	43,54	4,85	11,13	34,04	53,03
Jawa Timur	49,87	2,34	4,69	45,29	54,46
Banten	45,40	3,67	8,08	38,21	52,58
Bali	54,98	4,66	8,48	45,84	64,12
Nusa Tenggara Barat	75,66	4,65	6,15	66,54	84,78
Nusa Tenggara Timur	53,19	4,83	9,08	43,72	62,66
Kalimantan Barat	40,57	6,66	16,42	27,51	53,63
Kalimantan Tengah	42,16	6,89	16,34	28,66	55,66
Kalimantan Selatan	40,50	4,48	11,06	31,73	49,28
Kalimantan Timur	25,83	3,88	15,01	18,23	33,43
Kalimantan Utara	18,59	4,63	24,91	9,51	27,67
Sulawesi Utara	72,21	4,10	5,67	64,18	80,23
Sulawesi Tengah	34,11	7,18	21,06	20,03	48,20
Sulawesi Selatan	41,17	4,46	10,84	32,42	49,92
Sulawesi Tenggara	25,26	5,30	20,98	14,87	35,64
Gorontalo	65,97	6,15	9,33	53,91	78,04
Sulawesi Barat	23,98	7,62	31,77	9,05	38,91
Maluku	67,31	4,10	6,10	59,27	75,36
Maluku Utara	50,02	6,83	13,66	36,63	63,41
Papua Barat	36,37	7,14	19,63	22,38	50,36
Papua	57,38	5,47	9,54	46,65	68,10
Indonesia	**47,69**	**0,86**	**1,80**	**46,00**	**49,37**

Sumber: Susenas MSBP, BPS, 2021

Lampiran 5.2

Persentase Penduduk Berumur 10-17 Tahun yang Ikut dalam Kegiatan Organisasi selain di Tempat Kerja/Sekolah menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2021

Tipe Daerah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
Perkotaan	3,19	3,58	3,38
Perdesaan	3,95	3,79	3,87
Perkotaan+Perdesaan	3,52	3,67	3,59

Sumber: Susenas MSBP, BPS, 2021

Lampiran 5.3

Persentase Penduduk Berumur 10-17 Tahun yang Ikut dan Aktif dalam Kegiatan Organisasi selain di Tempat Kerja/Sekolah menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2021

Tipe Daerah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
Perkotaan	2,64	2,82	2,73
Perdesaan	3,28	3,23	3,25
Perkotaan+Perdesaan	2,91	3,00	2,95

Sumber: Susenas MSBP, BPS, 2021

Lampiran 5.4

Persentase Penduduk Berumur 10-17 Tahun yang Pernah Mengikuti Kegiatan Pertemuan (Rapat) di Lingkungan Sekitar dalam Satu Tahun Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2021

Tipe Daerah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
Perkotaan	3,68	2,72	3,21
Perdesaan	4,74	3,55	4,16
Perkotaan+Perdesaan	4,14	3,08	3,62

Sumber: Susenas MSBP, BPS, 2021

Lampiran 5.5

Persentase Penduduk Berumur 10-17 Tahun yang Pernah Mengikuti Kegiatan Pertemuan (Rapat) dan Memberikan Saran/Pendapat di Lingkungan Sekitar dalam Satu Tahun Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2021

Tipe Daerah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
Perkotaan	0,87	0,49	0,69
Perdesaan	0,99	0,69	0,84
Perkotaan+Perdesaan	0,93	0,57	0,75

Sumber: Susenas MSBP, BPS, 2021

PENGASUHAN ANAK

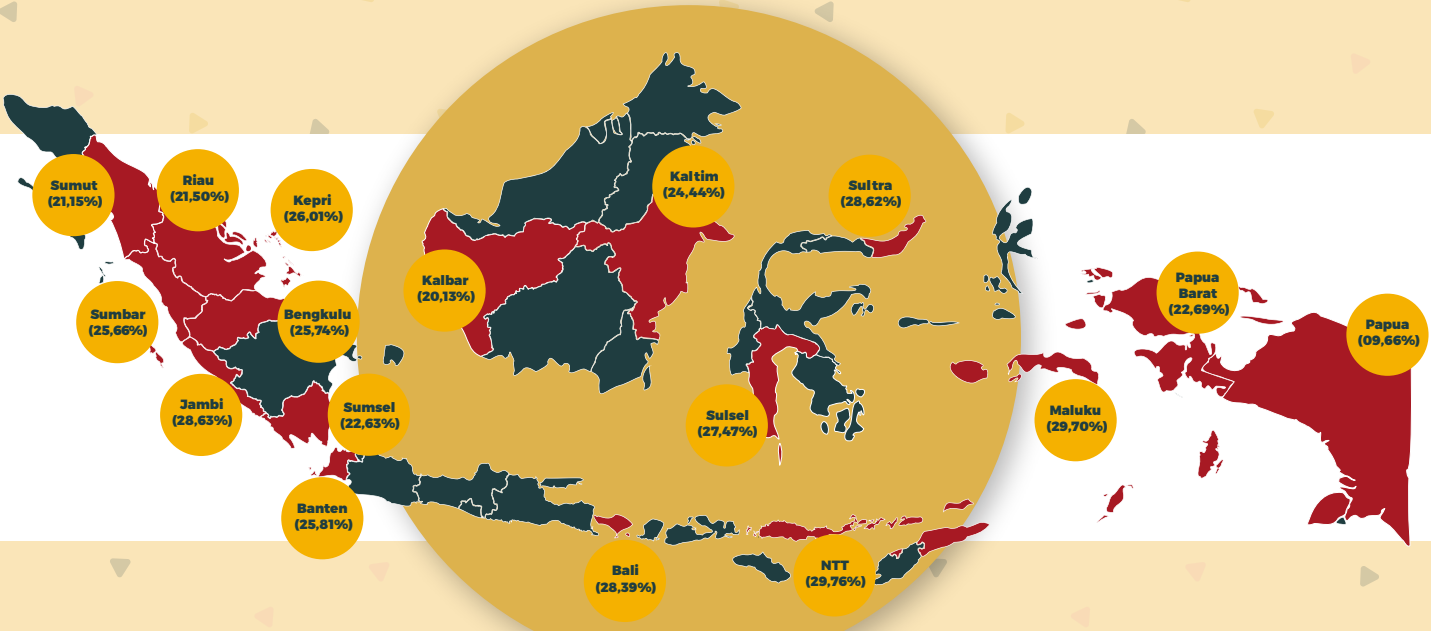

17 provinsi yang memiliki angka partisipasi anak umur 3–6 tahun yang mengikuti PAUD kurang dari 30%.

Presentase Perkawinan anak

Laki-Laki
0,78%
Perempuan
9,23%

Perdesaan
7,48%
Perkotaan
3,25%

5 provinsi dengan persentase perkawinan anak tertinggi

Sulbar
9,29%

Kalteng
8,67%

Kalbar
7,88%

NTB
9,08%

Kalsel
8,03%

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2021

Overview

Pengasuhan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup, perawatan, perkembangan dan kesejahteraan anak, di mana di dalamnya melibatkan sejumlah fungsi yang saling terkait secara bertahap, dan berubah selama perkembangan anak. Strategi orang tua menjalankan fungsi pengasuhannya akan berdampak pada penyesuaian, kesehatan fisik dan mental, serta kesejahteraan anak di masa mendatang (Riany, 2021). Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, menjelaskan bahwa pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam bab ini akan diuraikan kondisi pengasuhan orang tua yang dijelaskan dalam konteks keikutsertaan anak dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Angka Kesiapan Sekolah, anak tinggal bersama kedua orang tua, aktivitas anak bersama orang tua/wali, pengasuhan tidak layak, serta perkawinan anak. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

6.1. Keikutsertaan PAUD

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Berikut ini akan diuraikan tren angka partisipasi anak umur 3-6 tahun yang mengikuti PAUD, angka partisipasi anak umur 3-6 tahun yang mengikuti PAUD menurut jenis kelamin dan tipe daerah, serta angka partisipasi anak umur 3-6 tahun yang mengikuti PAUD menurut provinsi.

6.1.1. Tren Angka Partisipasi Anak Umur 3-6 Tahun yang Mengikuti PAUD

Berdasarkan tahap perkembangan kognitif anak menurut Piaget (Santrock, 2011), anak umur 3-6 tahun berada pada tahap perkembangan pra operasional (Pre-Operational Stage). Pada tahapan ini anak sudah mulai mampu menggunakan representasi mental untuk memahami dunia. Pemikiran terkait simbolik anak sudah dapat dilihat dalam penggunaan kata-kata dan gambar (Santrock, 2011). Oleh karena itu, keikutsertaan anak pada pendidikan pra sekolah yang berkualitas dapat menstimulasi kondisi perkembangan kognitif dan sosial anak yang lebih baik, meminimalisir masalah keterlambatan perkembangan kognitif anak, serta dapat meningkatkan kesiapan belajar anak (Elmanora, Hastuti, & Muflikati, 2017). Tren angka partisipasi anak umur 3-6 tahun yang mengikuti PAUD pada tahun 2017-2021 dipresentasikan pada Gambar 6.1. Selama lima tahun terakhir, tepatnya sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 terjadi fluktuasi pada jumlah anak umur 3-6 tahun yang mengikuti PAUD. Angka partisipasi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 38,61 persen setelah terjadi kenaikan 4,25 poin sejak tahun 2017. Akan tetapi, sejak tahun 2018 hingga 2021 terjadi penurunan angka partisipasi, di mana pada tahun 2021 adalah angka partisipasi terendah selama lima tahun terakhir (33,51 persen).

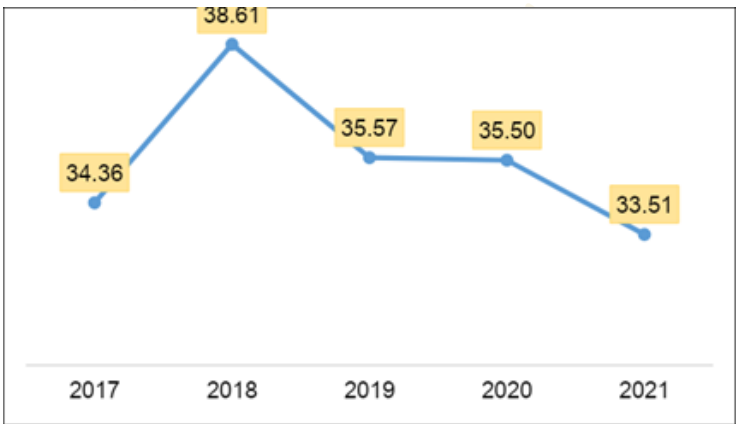

Gambar 6.1 Tren Angka Partisipasi Anak Umur 3-6 Tahun yang Mengikuti PAUD Tahun 2017-2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017-2021, BPS

Penurunan angka partisipasi anak pada PAUD ini dapat disebabkan oleh banyak faktor. Penelitian menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya, khususnya pada tahun 2021 adalah karena adanya faktor keluarga dan pandemi COVID-19 (Azzahra, Ichsan, & Andriani, 2022). Faktor keluarga yang dimaksud adalah preferensi keluarga untuk tidak menyekolahkan anak mereka di PAUD. Hal ini diprediksi akibat kondisi kestabilan perekonomian keluarga yang mengalami perubahan akibat adanya pandemi COVID-19 ataupun untuk alasan kesehatan, sehingga para orang tua menunda untuk mendaftarkan anak mereka di PAUD.

Sementara itu, faktor-faktor yang menjadi daya tarik terhadap Lembaga PAUD adalah standar pembiayaan, layanan, serta sarana dan prasarana. Penelitian lain menemukan bahwa faktor kebutuhan dan tujuan atau motif pribadi orang tua, sekolah, dan masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi minat orang tua menyekolahkan anaknya di PAUD (Safitri, Marlina, & Murtopo, 2022). Oleh karena itu, seiring dengan semakin membaiknya kondisi pandemi COVID-19, diharapkan masyarakat dapat kembali meningkatkan keikutsertaan anak mereka di PAUD sebagai upaya optimalisasi tumbuh kembang anak.

6.1.2. Angka Partisipasi Anak Umur 3-6 Tahun yang Mengikuti PAUD Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah

Angka partisipasi anak umur 3-6 tahun yang mengikuti paud menurut jenis kelamin dan tipe daerah pada tahun 2021 disajikan pada Gambar 6.2. Hasil analisis berdasarkan jenis kelamin dan tipe daerah, angka partisipasi anak perempuan umur 3-6 tahun yang mengikuti PAUD pada tahun 2021 lebih tinggi (34,13) dibandingkan anak laki-laki (32,90). Di sisi lain, angka partisipasi anak umur 3-6 tahun di perkotaan lebih tinggi (33,66) dibandingkan di perdesaan (33,32). Hal ini mengindikasikan bahwa anak-anak di perkotaan memiliki kesempatan lebih tinggi untuk mengakses pendidikan usia dini. Hasil tersebut sejalan dengan beberapa penelitian yang menemukan bahwa, pendidikan anak usia dini di Indonesia masih berfokus pada wilayah perkotaan saja, karena masih adanya ketergantungan pada partisipasi orang tua dalam pengelolaan PAUD (Anas, Riana, & Apsari, 2015); (Mahbub, Purnamawati, Maslamah, & Fauziddin, 2020); (Rohmani, 2021).

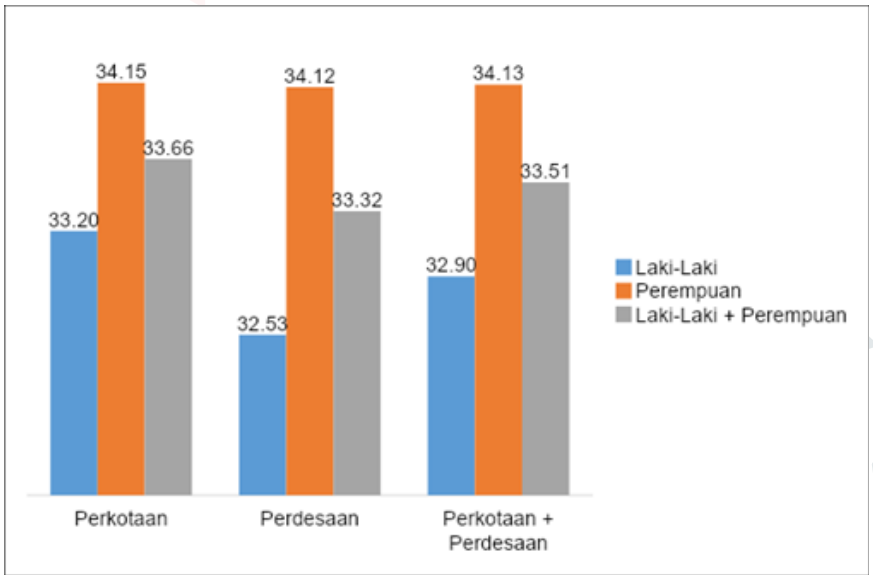

Gambar 6.2 Angka Partisipasi Anak Umur 3-6 Tahun yang Mengikuti PAUD Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

6.1.2. Angka Partisipasi Anak Umur 3-6 Tahun yang Mengikuti PAUD Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah

Angka partisipasi anak umur 3-6 tahun yang mengikuti PAUD menurut provinsi pada tahun 2021 disajikan pada Gambar 6.3. Data menunjukkan bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi dengan angka partisipasi anak umur 3-6 tahun yang mengikuti PAUD tertinggi di Indonesia (60,68). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan angka partisipasi Indonesia (33,51). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran pemerintah daerah Provinsi DIY guna mempermudah akses PAUD dan pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik (Oebaidillah, 2018).

Sementara itu, angka partisipasi terendah berada di Provinsi Papua (9,66). Penelitian menemukan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya angka partisipasi PAUD di Provinsi Papua adalah masih rendahnya informasi terkait pentingnya PAUD untuk anak usia prasekolah (Tijow & Risamasu, 2022). Oleh karena itu, diperlukan peran seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah Papua untuk menyebarluaskan dan mensosialisasikan pentingnya peran PAUD bagi penciptaan generasi muda yang berkualitas. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat diharapkan dapat membuka wawasan keluarga untuk ikut tergerak dalam mengikutsertakan anak mereka untuk mengenyam pendidikan PAUD sebelum pendidikan sekolah dasar.

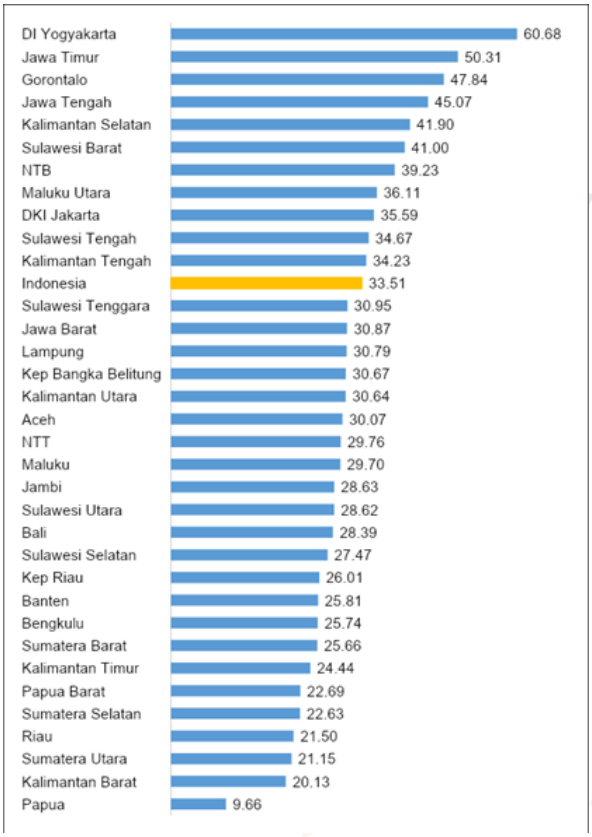

Gambar 6.3 Angka Partisipasi Anak Umur 3-6 Tahun yang Mengikuti PAUD Menurut Provinsi Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, BPS

6.2. Angka Kesiapan Sekolah

Angka Kesiapan Sekolah didefinisikan sebagai persentase anak yang masih bersekolah di kelas 1 jenjang SD/sederajat dan pernah mengikuti pendidikan prasekolah (Tahun Ajaran 2020/2021 atau sebelum Tahun Ajaran 2020/2021) berupa Taman Kanak-kanak (TK); Bustanul Athfal; Raudatul Athfal (BA/RA); atau Satuan PAUD Sejenis (PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUDTAAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, dll), (BPS).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal bagi Layanan PAUD, pendidikan anak usia dini menjadi pendidikan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Hal ini tentunya merupakan sebuah landasan bagi kemajuan pendidikan di Indonesia karena sejatinya kesiapan sekolah anak di jenjang sekolah dasar dan seterusnya sangat dipengaruhi oleh hasil pembelajaran anak di jenjang pendidikan anak usia dini.

6.2.1. Tren Angka Kesiapan Sekolah Lima Tahun Terakhir

Tren angka kesiapan sekolah lima tahun terakhir dipresentasikan pada Gambar 6.4. Terjadi peningkatan angka kesiapan sekolah dari tahun 2017 ke 2019. Setelah itu, angka kesiapan sekolah menurun sejak tahun 2019 hingga 2021. Angka kesiapan sekolah paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 75,07 persen. Sementara itu, angka kesiapan sekolah terendah terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 74,51 persen.

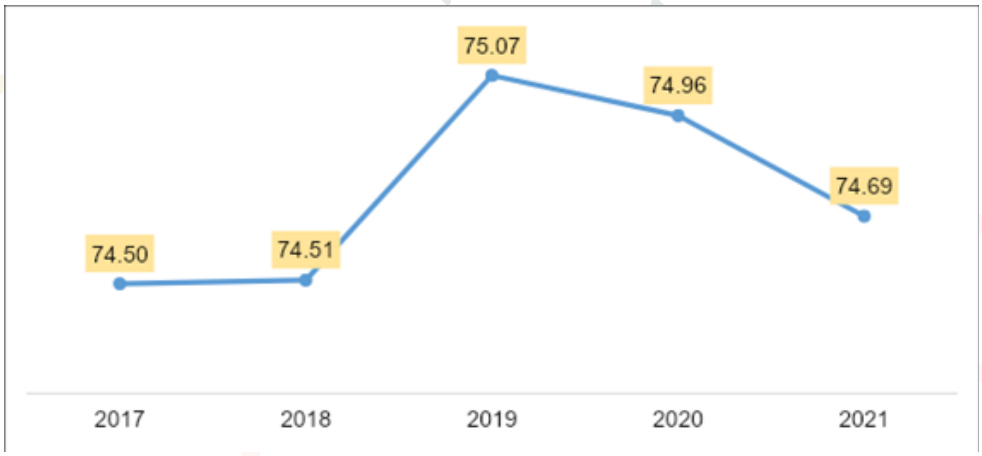

Gambar 6.4 Tren Angka Kesiapan Sekolah Tahun 2017-2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

6.2.2. Angka Kesiapan Sekolah Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin

Angka kesiapan sekolah menurut tipe daerah dan jenis kelamin pada tahun 2021 dipresentasikan pada Gambar 6.5.

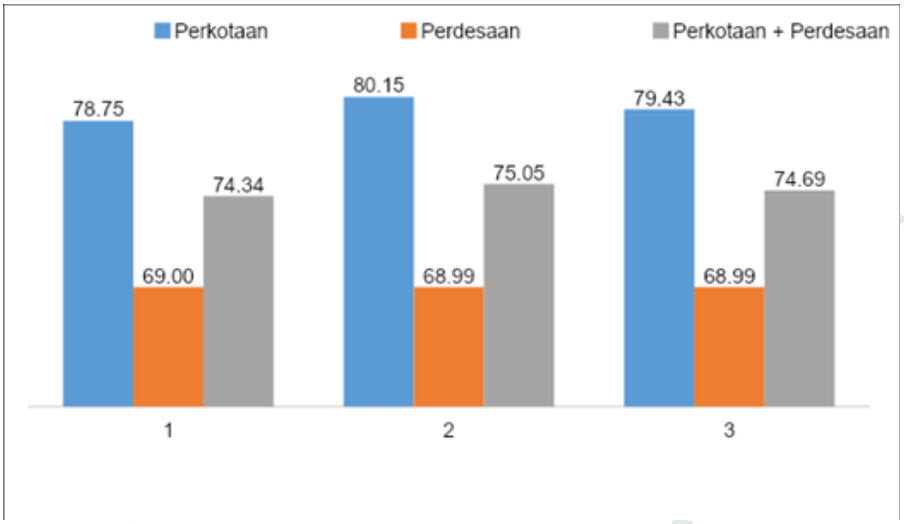

Gambar 6.5 Angka Kesiapan Sekolah Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

Hasil analisis menunjukkan bahwa berdasarkan tipe daerah dan jenis kelamin, angka kesiapan sekolah di perkotaan lebih tinggi (79,43) dibandingkan di perdesaan (68,99). Hal ini cukup beralasan karena anak di kota lebih banyak mendapatkan paparan informasi dan stimulasi dari lingkungan sekitarnya dibandingkan dengan anak yang berada di perdesaan (Yuhenita et al., 2021). Penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan kesiapan sekolah seorang anak (Irwanto et al., 2011), diantaranya:

1. Dukungan keluarga: tingkat pendidikan orang tua, frekuensi waktu yang dihabiskan bersama anak, dan jumlah anak.
2. Kesiapan masyarakat: partisipasi yang dilakukan oleh kader, tokoh masyarakat, dan sekolah serta otonomi pemangku kebijakan.
3. Status kesehatan dan gizi anak.

Sementara itu, hasil analisis data menunjukkan bahwa angka kesiapan sekolah anak perempuan lebih tinggi (75,05) dibandingkan anak laki-laki (74,34). Hal ini sejalan dengan berbagai hasil penelitian

yang menunjukkan bahwa anak perempuan memiliki kemampuan untuk beradaptasi lebih tinggi terhadap lingkungan baru dibandingkan laki-laki. Penelitian yang dilakukan oleh Severiens et al. pada tahun 1998 bahkan menyebutkan bahwa anak perempuan cenderung memiliki motivasi berprestasi, keterampilan, dan kedisiplinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki. Namun lagi-lagi, hal ini menjadi ironi karena anak perempuan masih dibatasi aksesnya terhadap pendidikan di beberapa daerah dan kebudayaan tertentu (Roziqin et al., 2019).

6.2.3. Angka Kesiapan Sekolah Menurut Provinsi

Angka kesiapan sekolah menurut provinsi pada tahun 2021 dipresentasikan pada Gambar 6.6. Sejalan dengan angka partisipasi PAUD, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi dengan angka kesiapan sekolah tertinggi di Indonesia dengan angka sebesar 99,01. Sementara Provinsi Papua memiliki angka kesiapan sekolah terendah, yaitu sebesar 35,65. Hasil ini dapat dimaknai bahwa hanya sebanyak 35,65 persen siswa kelas 1 SD pada tahun ajaran 2020/2021 di Provinsi Papua yang telah mengikuti PAUD.

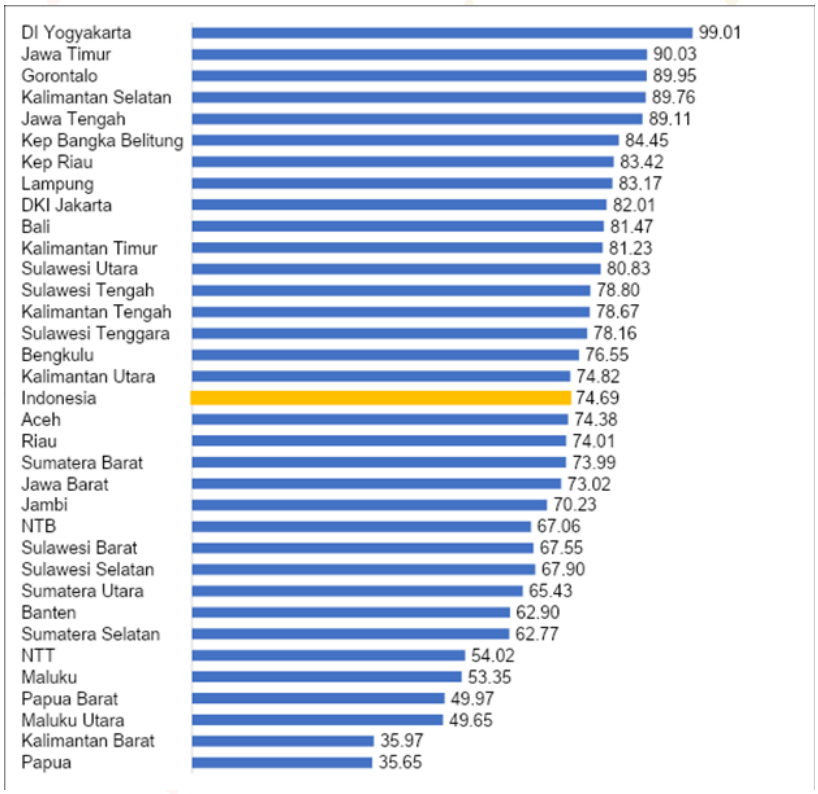

Gambar 6.6 Angka Kesiapan Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, BPS

Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih tingginya perbedaan kualitas dan kuantitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, utamanya antara wilayah barat dan timur Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya angka partisipasi PAUD di Papua diantaranya: masih terbatasnya jumlah PAUD/ TK/ RA/ sederajat di provinsi tersebut. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) 2021, masih terdapat sekitar 19.000 desa yang belum memliki satuan PAUD (Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rahmani (2021) dan Nurjannah (2018) menjelaskan bahwa kesiapan sekolah yang rendah dapat disebabkan oleh rendahnya pengetahuan orang tua mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini dan status sosial ekonomi keluarga. Dengan demikian, perlu menjadi perhatian bersama khususnya pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan angka partisipasi anak pada jenjang PAUD, khususnya di wilayah Timur Indonesia. Melalui berbagai terobosan dan inovasi, diharapkan kesenjangan angka partisipasi anak di PAUD antar wilayah Indonesia dapat ditekan seminimal mungkin.

6.3. Anak Tidak Tinggal Bersama Kedua Orang Tua

Pasal 9 Konvensi Hak Anak (UNICEF, 2018), menyebutkan bahwa:

> "Tiap anak berhak tinggal bersama orang tua mereka kecuali jika hal itu justru merugikan sang anak – sebagai contoh jika anak mendapatkan perlakuan tidak baik atau diabaikan oleh salah satu orang tua. Tiap anak berhak tetap berhubungan dengan orangtuanya apabila ia tinggal terpisah dari salah satu atau kedua orangtuanya".

Apabila dikaitkan dengan fungsi keluarga (sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga), penerapan delapan fungsi keluarga dilandasi oleh empat konsep utama dalam membangun keluarga bahagia sejahtera, yaitu (BKKBN, 2017):

1. Keluarga berkumpul, di mana memanfaatkan waktu luang bersama keluarga untuk berkumpul dengan melakukan aktifitas yang dapat memperkuat ikatan di antara masing-masing anggota keluarga;
2. Keluarga berinteraksi, komunikasi dan diskusi di antara anggota keluarga secara langsung;
3. Keluarga berdaya, keluarga mandiri yang tidak bergantung kepada orang lain; serta
4. Keluarga peduli dan berbagi, antar anggota keluarga saling memahami dan menghargai satu sama lain, serta gortong royong dalam menghadapi permasalahan dalam keluarga.

6.3.1. Tren Persentase Anak yang Tidak Tinggal Bersama Kedua Orang Tua

Tren persentase anak yang tidak tinggal bersama kedua orang tua selama lima tahun terakhir (2017-2021) disajikan pada Gambar 6.7. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018, sebanyak 4,82 persen anak di Indonesia tidak tinggal dengan orang tuanya dengan berbagai alasan, di antaranya karena faktor ekonomi dan kondisi orang tua yang bercerai (Sary, 2022).

Berdasarkan data pada tahun 2018 tersebut, pemerintah menyusun target penurunan untuk tahun 2019 sampai dengan 2025. Selanjutnya pada tahun 2021, hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional MSBP menunjukkan hasil bahwa persentase anak yang tidak tinggal bersama kedua orang tua sebanyak 3,75 persen. Apabila dibandingkan dengan target penurunan yang telah ditetapkan (4,66 persen), maka dapat diketahui bahwa target penurunan pada tahun 2021 telah tercapai (3,75 persen).

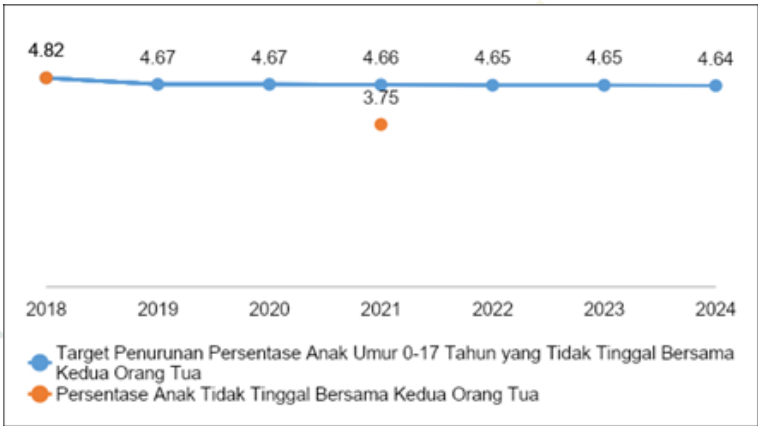

Gambar 6.7 Perbandingan Tren Persentase Anak yang Tidak Tinggal Bersama Kedua Orang Tua dengan Target Penurunan Persentase Anak yang Tidak Tinggal Bersama Kedua Orang Tua Tahun 2021
Sumber: Target: Indeks Perlindungan Anak, Kemen PPPA 2019
Capaian: Survei Sosial Ekonomi Nasional MSBP, BPS 2018 dan 2021

Penurunan persentase anak tidak tinggal bersama kedua orang tua yang terjadi khususnya pada tahun 2021 tidak lain adalah indikasi dari keberhasilan pemerintah dalam upayanya memenuhi hak anak akan tinggal bersama dengan orang tuanya. Berbagai program dan kebijakan diimplementasikan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah demi terlaksananya fungsi keluarga maupun sebagai bentuk upaya nyata dalam menurunkan jumlah anak yang tidak tinggal dengan orang tuanya.

6.3.2. Persentase Anak yang Tidak Tinggal Bersama Kedua Orang Tua Menurut Tipe Daerah

Persentase anak yang tidak tinggal bersama kedua orang tua menurut tipe daerah pada tahun 2021 disajikan pada Gambar 6.8. Hasil analisis menunjukkan bahwa jika ditinjau dari tipe daerah, hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional MSBP 2021 menunjukkan bahwa persentase anak yang tidak tinggal bersama kedua orang tua di perdesaan lebih tinggi (4,25 persen) dibandingkan di perkotaan (3,35 persen). Hal ini dapat dikaitkan dengan pekerjaan mayoritas penduduk perdesaan sebagai petani. Guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, orang tua akan bekerja keras dan menghabiskan lebih banyak waktu mereka di kebun/ladang, sehingga muncul anggapan bahwa akan lebih baik jika anak tinggal bersama orang tua pengganti yang juga masih memiliki kekerabatan. Selain itu, beberapa anak di perdesaan tidak tinggal dengan orang tua karena orang tua mereka harus bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia

(PMI) di luar negeri (Fono, Fridani, & Meilani, 2019).

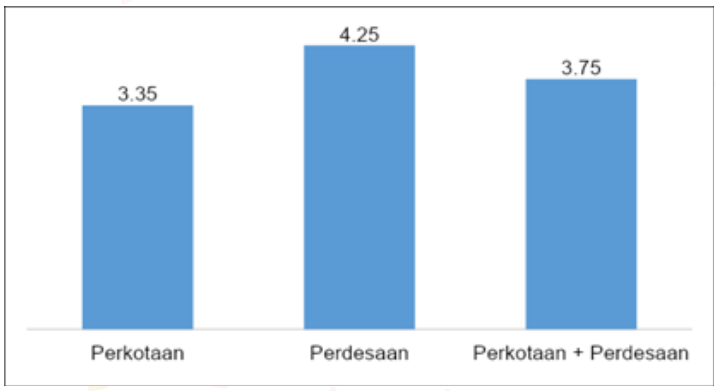

Gambar 6.8 Persentase Anak yang Tidak Tinggal Bersama Kedua Orang Tua Menurut Tipe Daerah Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MSBP, BPS 2021

Rendahnya persentase anak yang tidak tinggal bersama kedua orang tua di perkotaan, diprediksi karena orang tua di perkotaan telah memiliki pengetahuan dan kesadaran yang lebih baik akan pentingnya interaksi yang timbul antara orang tua dan anak, khususnya guna menciptakan kondisi kelekatan yang aman (secure attachment). Oleh karena itu, diperlukan adanya kerja sama dari berbagai pihak guna mendorong terciptanya pekerjaan yang ramah keluarga, sehingga keluarga dapat sejahtera, tanpa meninggalkan fungsi, peran, serta tugasnya dalam memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak (Sunarti, 2015).

6.4. Aktivitas Anak Bersama Orang Tua/Wali

Aktivitas anak bersama orang tua/wali dinilai memiliki manfaat yang luar biasa bagi tumbuh kembang anak. Interaksi yang berkualitas dengan kuantitas yang cukup dapat mendukung upaya menciptakan kelekatan yang aman (secure attachment) bagi anak.

6.4.1. Persentase Anak Berdasarkan Aktivitas yang Dilakukan Bersama Orang Tua/Wali Seminggu Terakhir

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi nasional MSBP tahun 2021, setidaknya terdapat 11 aktivitas yang biasa atau rutin dilakukan anak bersama orang tua/wali, diantaranya:

1. Makan/belajar makan;
2. Menonton TV;
3. Belajar atau membaca buku;
4. Dibacakan buku cerita atau diceritakan dongeng;
5. Beribadah atau berdoa;
6. Berbincang-bincang atau mengobrol;
7. Bermain/berkreasi/berolahraga;
8. Bermain game;
9. Mengakses internet;
10. Mengurus rumah tangga;
11. Membantu penambah penghasilan.

Dari 11 aktivitas tersebut, makan atau belajar makan menjadi aktivitas yang biasa dilakukan anak bersama orang tua/wali dengan persentase tertinggi (87,75 persen). Sementara persentase terendah untuk aktivitas membantu penambah penghasilan (2,08 persen). Secara rinci, persentase anak berdasarkan aktivitas yang dilakukan bersama orang tua/wali disajikan pada Gambar 6.9.

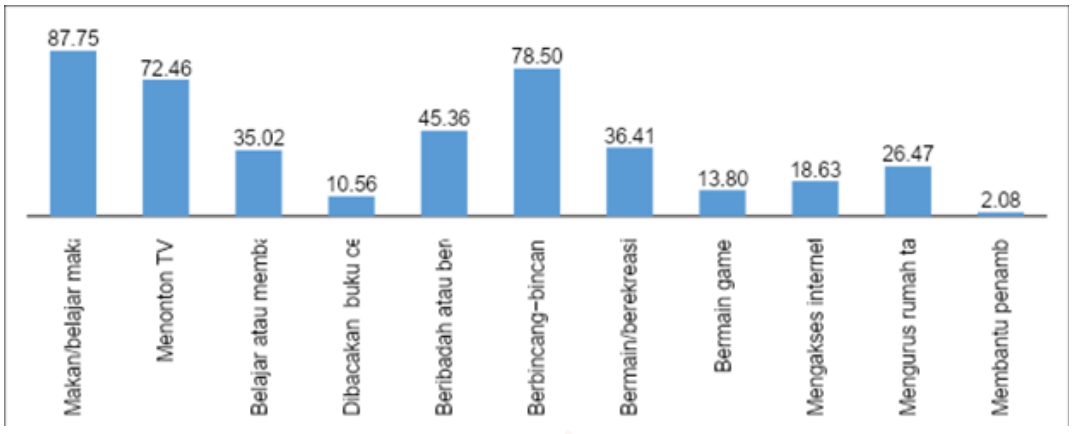

Gambar 6.9 Persentase Anak Berdasarkan Aktivitas yang Dilakukan Bersama Orang Tua/Wali Seminggu Terakhir Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MSBP, BPS 2021

Hasil ini menunjukkan bahwa orang tua Indonesia memiliki kesadaran yang cukup baik akan pentingnya aktivitas makan yang dilakukan bersama dengan anak mereka. Hasil penelitian menjelaskan setidaknya terdapat tiga aspek penting dalam penerapan pola asuh makan yang dapat terpenuhi dengan baik melalui kegiatan makan atau belajar makan yang dilakukan bersama orang tua (Indriyani, 2014), yaitu:

1. Aspek fisiologis, yaitu memenuhi kebutuhan gizi anak untuk proses tumbuh kembang, aktivitas, serta metabolisme anak.
2. Aspek psikologis, yaitu memberikan kepuasan psikologis anak. Anak yang melihat bagaimana orang tua dalam menyiapkan makanan dan memberikan makan dapat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak dalam hal makan.
3. Aspek edukatif, yaitu melatih keterampilan anak dalam menggunakan alat makan, melatih kebiasaan dan perilaku makan yang benar, serta memilih dan menyukai makanan tanpa melanggar ketentuan keyakinan.

6.4.2. Persentase Anak Berdasarkan Aktivitas yang Dilakukan Bersama Orang Tua/Wali Seminggu Terakhir Menurut Provinsi

Ditinjau berdasarkan provinsi, makan atau belajar makan juga menjadi aktivitas yang dilakukan anak bersama orang tua/wali dengan persentase tertinggi. Persentase Anak berdasarkan aktivitas yang dilakukan bersama orang tua/wali seminggu terakhir menurut provinsi tahun 2021 disajikan pada Lampiran 6.7. Data menunjukkan bahwa Provinsi Maluku Utara adalah provinsi dengan persentase tertinggi orang tua melakukan aktivitas makan bersama dengan persentasenya mencapai 92,63 persen.

Sementara itu, anak-anak di Provinsi Banten lebih memilih menonton TV sebagai aktivitas yang dilakukan bersama orang tua/wali dengan persentase tertinggi (81,69 persen). Aktivitas belajar atau membaca buku (42,92 persen), dibacakan buku cerita atau diceritakan dongeng (19,98 persen), serta bermain game (26,42 persen) menjadi aktivitas yang paling sering dilakukan oleh anak dengan orang tua/wali di Provinsi DKI Jakarta. Berbeda dengan anak-anak di Provinsi Papua Barat yang paling banyak melakukan aktivitas beribadah atau berdoa bersama dengan orang tua (60,03

persen).

Anak-anak di Provinsi Sulawesi Tenggara paling banyak memilih berbincang atau mengobrol dengan orang tua, dengan persentase sebesar 88,46 persen. Sedangkan, anak-anak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih menyenangi aktivitas bermain/berkreasi/berolahraga (47,93 persen) dan mengakses internet (36,41 persen) bersama dengan orang tua/wali. Dalam hal membantu orang tua, anak-anak di Provinsi Bali menunjukkan persentase tertinggi (40,73 persen) dalam aktivitas mengurus rumah tangga. Selain itu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki persentase tertinggi untuk aktivitas anak bersama orang tua untuk menambah penghasilan (5,17 persen). Tingginya persentase tersebut, sangat berbeda jauh dengan provinsi lain di Indonesia. Hal tersebut juga sejalan dengan kondisi tingginya persentase anak di Provinsi NTT yang bekerja, sebagaimana dijelaskan lebih rinci pada Bab 10.

Berdasarkan uraian di atas, mengindikasikan bahwa pada umumnya anak-anak di seluruh wilayah Indonesia masih terbiasa untuk melaksanakan aktivitas bersama orang tua meskipun aktivitas yang dilakukan cukup bervariasi. Aktivitas bersama yang dilakukan oleh anak bersama orang tua memiliki dampak yang signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan demikian, aktivitas bersama ini harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan baik frekuensi maupun durasinya.

6.5. Perkawinan Anak

Perkawinan anak dapat dimaknai sebagai perkawinan yang terjadi sebelum seseorang berumur 18 tahun. Penelitian yang dilakukan tahun 2016, menemukan bahwa Indonesia berada di urutan 37 negara dengan persentase perkawinan anak tinggi, serta sebagai negara tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja (PROGRAM STUDI KAJIAN GENDER Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, 2016). Sementara itu, data UNICEF (2021) menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara tertinggi ke delapan di dunia dengan kasus angka perkawinan anak tertinggi. Posisi ini sejajar dengan beberapa negara seperti India maupun beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin.

6.5.1. Tren Persentase Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Umur 18 Tahun

Tren persentase perkawinan anak menunjukkan kondisi yang terus menurun selama lima tahun terakhir (Gambar 6.10). Sejak tahun 2017 hingga 2021, persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun terus menurun dari 11,54 persen di tahun 2017 menjadi 9,23 persen di tahun 2021. Persentase terendah angka perkawinan anak terjadi pada tahun 2021 dengan angka penurunan tren sebesar 1.12 persen dari angka capaian di tahun 2020.

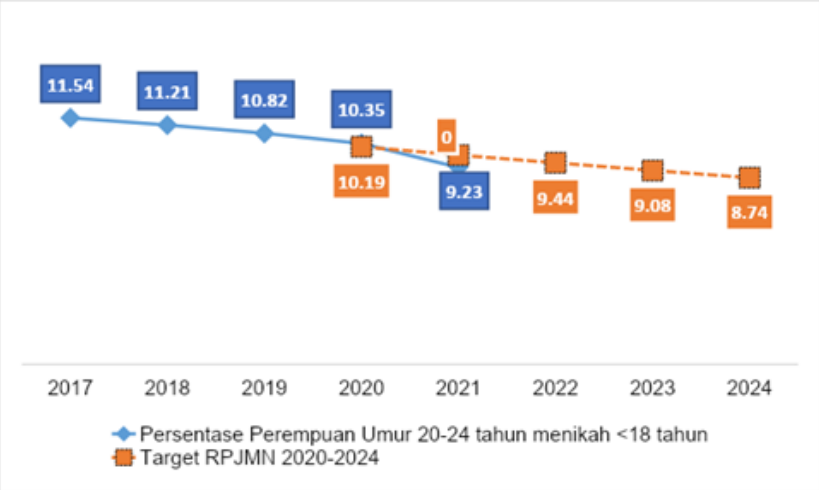

Gambar 6.10 Tren Persentase Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Umur 18 Tahun (2017-2021)
Sumber: Capaian: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2018-2021
Target: Lampiran III Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024

Apabila dibandingkan dengan target sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, pada tahun 2021, persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun telah lebih rendah 0,57 persen dari target RPJMN yaitu sebesar 9,80 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa target telah tercapai, dan diharapkan akan terus menurun di tahun mendatang.

Tren penurunan angka perkawinan anak ini salah satunya adalah keberhasilan pemerintah pusat yang bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk terus berupaya menurunkan prevalensi perkawinan anak salah satunya melalui Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) yang diluncurkan pada tahun 2020 oleh Menteri PPN. Kepala Bappenas bersama Menteri

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun lima strategi kunci yang diusung untuk pencegahan perkawinan anak di Indonesia, yaitu: (1) Optimalisasi kapasitas anak; (2) Lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak; (3) Aksesibilitas dan perluasan layanan; (4) Penguatan regulasi dan kelembagaan; serta (5) Penguatan koordinasi pemangku kepentingan (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Namun demikian, masih perlu upaya yang kuat dari pemerintah pusat maupun daerah untuk terus berupaya menurunkan angka perkawinan anak pada level terendah.

6.5.2. Persentase Anak yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah

Persentase anak yang menikah sebelum usia 18 tahun menurut jenis kelamin dan tipe daerah pada tahun 2021 disajikan pada Gambar 6.11. Data menunjukkan bahwa persentase anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun lebih tinggi (9,23 persen) dibandingkan anak laki-laki (0,78 persen). Sementara itu, persentase anak yang menikah sebelum usia 18 tahun di perdesaan lebih tinggi (7,48 persen) dibandingkan anak di perkotaan (3,25 persen).

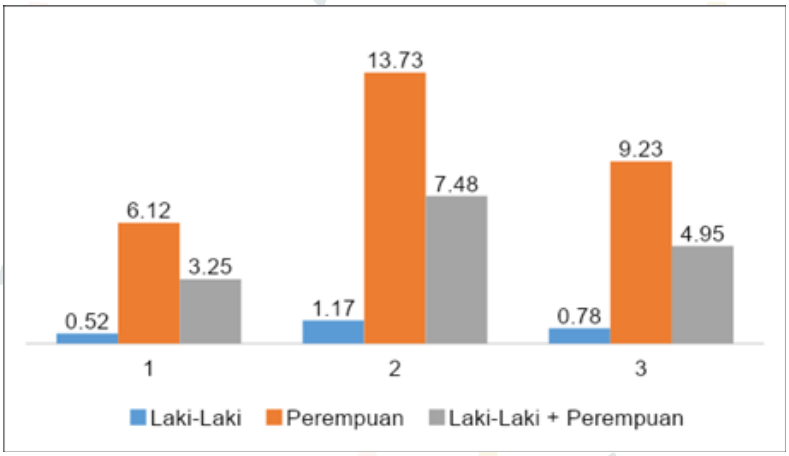

Gambar 6.11 Persentase Anak yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah Tahun 2021
Sumber: Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

6.5.3. Persentase Anak yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Provinsi

Persentase anak yang menikah sebelum usia 18 tahun menurut provinsi tahun 2021 disajikan pada Gambar 6.12. Hasil analisis menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Barat menjadi provinsi dengan persentase perkawinan anak tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 9,29 persen pada tahun 2021. Sementara persentase terendah berada di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 1,60 persen.

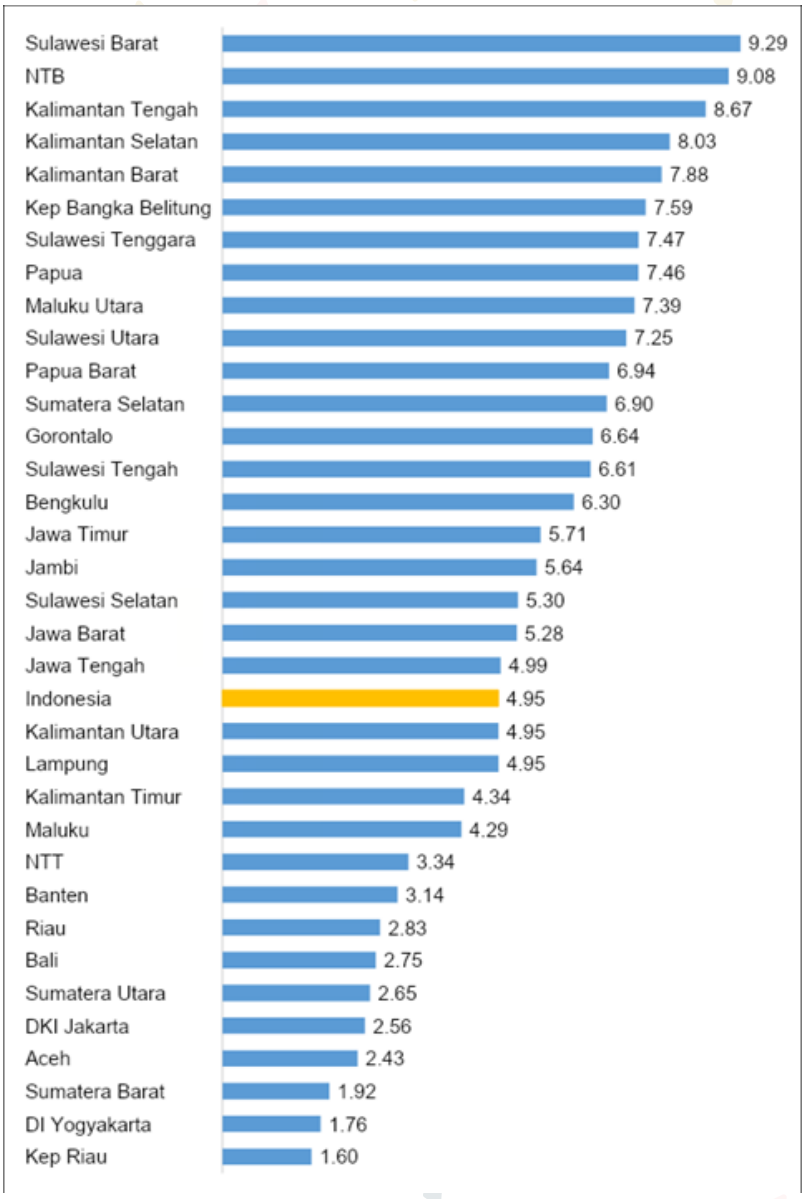

Gambar 6.12 Persentase Perkawinan Anak Menurut Provinsi Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

Penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya perkawinan anak di Provinsi Sulawesi Barat, di antaranya: (1) Kekhawatiran orang tua jika anak lambat menikah; (2) Budaya perjodohan; (3) Ekonomi; dan (4) Akses pendidikan. Terkait budaya perjodohan, juga sejalan dengan hasil bahwa persentase perkawinan anak lebih banyak terjadi di perdesaan, di mana antar keluarga akan membuat kesepakatan untuk mengawinkan anaknya (Nurhadi & Sudirman, 2019). Perlu upaya yang strategis dalam menurunkan angka perkawinan anak khususnya di provinsi yang masih memiliki tren angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Sosialisasi atas dampak negatif perkawinan anak atau pendekatan secara adat adalah strategi yang mungkin dapat diterapkan sehingga angka perkawinan anak dapat diminimalisasi baik di level nasional maupun daerah.

Lampiran 6.1

Angka Partisipasi Anak Berumur 3-6 Tahun di Perkotaan yang Sedang Mengikuti PAUD menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021

Provinsi	3-4 tahun	5-6 tahun	3-6 tahun
Aceh	15,47	47,72	31,54
Sumatera Utara	9,48	32,45	21,13
Sumatera Barat	10,28	37,16	24,75
Riau	5,99	34,17	20,57
Jambi	17,15	35,88	26,66
Sumatera Selatan	17,56	22,75	20,32
Bengkulu	15,13	35,68	25,66
Lampung	13,05	47,61	30,94
Kep Bangka Belitung	15,64	38,71	27,17
Kep Riau	19,43	31,93	25,49
DKI Jakarta	35,08	36,08	35,59
Jawa Barat	11,73	48,27	30,47
Jawa Tengah	29,19	60,66	45,96
DI Yogyakarta	37,93	76,93	56,93
Jawa Timur	29,75	70,62	49,83
Banten	14,20	43,23	28,45
Bali	13,90	44,80	29,94
NTB	21,25	56,37	38,83
NTT	10,52	43,46	26,51
Kalimantan Barat	8,42	36,59	22,36
Kalimantan Tengah	15,82	55,47	37,48
Kalimantan Selatan	23,05	57,43	40,36
Kalimantan Timur	11,58	35,61	23,55
Kalimantan Utara	22,80	33,64	28,27
Sulawesi Utara	18,34	29,16	23,67
Sulawesi Tengah	17,30	36,49	27,09
Sulawesi Selatan	14,89	35,52	24,97
Sulawesi Tenggara	15,25	40,50	28,25
Gorontalo	25,76	50,78	37,62
Sulawesi Barat	25,90	42,51	34,08
Maluku	22,28	27,50	25,08
Maluku Utara	18,56	41,22	29,49
Papua Barat	18,85	30,85	25,14
Papua	7,83	28,91	18,35
Indonesia	**18,89**	**47,95**	**33,66**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 6.2

Angka Partisipasi Anak Berumur 3-6 Tahun di Perdesaan yang Sedang Mengikuti PAUD menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021

Provinsi	3-4 tahun	5-6 tahun	3-6 tahun
Aceh	15,79	41,54	29,35
Sumatera Utara	14,58	27,91	21,16
Sumatera Barat	11,58	41,69	26,47
Riau	9,63	34,42	22,11
Jambi	19,26	40,86	29,58
Sumatera Selatan	17,28	30,70	23,97
Bengkulu	17,00	35,61	25,78
Lampung	9,63	51,63	30,72
Kep Bangka Belitung	23,05	45,77	34,47
Kep Riau	29,19	37,00	33,44
DKI Jakarta			
Jawa Barat	14,23	48,64	32,39
Jawa Tengah	26,25	59,84	44,13
DI Yogyakarta	62,52	82,65	72,40
Jawa Timur	35,81	65,41	50,88
Banten	14,30	24,30	19,66
Bali	12,19	37,21	24,62
NTB	25,26	53,94	39,63
NTT	25,47	35,54	30,67
Kalimantan Barat	12,20	26,02	18,87
Kalimantan Tengah	18,82	45,42	32,11
Kalimantan Selatan	24,30	60,89	43,36
Kalimantan Timur	12,76	40,29	26,31
Kalimantan Utara	27,90	40,05	34,25
Sulawesi Utara	23,37	43,85	33,71
Sulawesi Tengah	26,57	49,18	37,89
Sulawesi Selatan	15,75	42,04	29,61
Sulawesi Tenggara	17,22	47,84	32,45
Gorontalo	42,95	67,66	55,37
Sulawesi Barat	30,79	55,03	42,51
Maluku	30,90	34,45	32,74
Maluku Utara	33,05	44,04	38,44
Papua Barat	21,46	20,61	21,04
Papua	5,06	8,53	6,84
Indonesia	**20,65**	**45,48**	**33,32**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 6.3

Angka Partisipasi Anak Berumur 3-6 Tahun yang Sedang Mengikuti PAUD menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021

Provinsi	3-4 tahun	5-6 tahun	3-6 tahun
Aceh	15,68	43,50	30,07
Sumatera Utara	11,98	30,29	21,15
Sumatera Barat	11,00	39,45	25,66
Riau	8,20	34,32	21,50
Jambi	18,61	39,18	28,63
Sumatera Selatan	17,38	27,65	22,63
Bengkulu	16,41	35,64	25,74
Lampung	10,66	50,37	30,79
Kep Bangka Belitung	19,18	42,10	30,67
Kep Riau	20,00	32,30	26,01
DKI Jakarta	35,08	36,08	35,59
Jawa Barat	12,24	48,35	30,87
Jawa Tengah	27,76	60,26	45,07
DI Yogyakarta	43,86	78,32	60,68
Jawa Timur	32,44	68,22	50,31
Banten	14,23	37,18	25,81
Bali	13,38	42,65	28,39
NTB	23,22	55,18	39,23
NTT	22,02	37,20	29,76
Kalimantan Barat	10,85	29,91	20,13
Kalimantan Tengah	17,70	49,61	34,23
Kalimantan Selatan	23,68	59,23	41,90
Kalimantan Timur	11,96	37,10	24,44
Kalimantan Utara	24,78	36,23	30,64
Sulawesi Utara	20,79	36,50	28,62
Sulawesi Tengah	23,85	45,35	34,67
Sulawesi Selatan	15,34	39,16	27,47
Sulawesi Tenggara	16,54	45,16	30,95
Gorontalo	35,42	60,74	47,84
Sulawesi Barat	29,93	52,75	41,00
Maluku	27,56	31,64	29,70
Maluku Utara	29,23	43,31	36,11
Papua Barat	20,45	24,87	22,69
Papua	5,75	13,42	9,66
Indonesia	**19,67**	**46,85**	**33,51**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 6.4

Angka partisipasi Anak Berumur 3-6 tahun yang sedang mengikuti PAUD menurut provinsi, tipe daerah dan jenis kelamin, 2021

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
Aceh	28,87	34,22	31,54	28,18	30,48	29,35	28,41	31,69	30,07
Sumatera Utara	22,14	20,08	21,13	21,38	20,93	21,16	21,78	20,49	21,15
Sumatera Barat	26,79	22,57	24,75	25,51	27,47	26,47	26,12	25,16	25,66
Riau	18,36	23,00	20,57	20,93	23,34	22,11	19,89	23,21	21,50
Jambi	22,54	31,20	26,66	29,15	30,05	29,58	27,00	30,42	28,63
Sumatera Selatan	19,86	20,77	20,32	25,01	22,97	23,97	23,12	22,16	22,63
Bengkulu	26,96	24,29	25,66	22,35	29,48	25,78	23,87	27,74	25,74
Lampung	31,14	30,74	30,94	30,06	31,40	30,72	30,39	31,20	30,79
Kep Bangka Belitung	26,22	28,22	27,17	32,66	36,01	34,47	29,10	32,19	30,67
Kep Riau	22,43	28,45	25,49	31,17	35,81	33,44	23,02	28,91	26,01
DKI Jakarta	34,81	36,35	35,59				34,81	36,35	35,59
Jawa Barat	28,83	32,19	30,47	28,18	36,46	32,39	28,70	33,11	30,87
Jawa Tengah	45,17	46,84	45,96	45,93	42,43	44,13	45,52	44,61	45,07
DI Yogyakarta	63,36	50,41	56,93	72,78	71,93	72,40	65,81	55,22	60,68
Jawa Timur	49,71	49,96	49,83	48,57	53,23	50,88	49,21	51,47	50,31
Banten	29,86	26,88	28,45	18,91	20,51	19,66	26,55	24,97	25,81
Bali	31,15	28,71	29,94	27,26	21,99	24,62	30,02	26,74	28,39
NTB	38,60	39,09	38,83	39,15	40,11	39,63	38,86	39,61	39,23
NTT	28,73	23,88	26,51	31,48	29,88	30,67	30,84	28,65	29,76
Kalimantan Barat	18,78	25,89	22,36	17,87	19,88	18,87	18,20	22,08	20,13
Kalimantan Tengah	35,04	40,07	37,48	33,91	30,21	32,11	34,36	34,10	34,23
Kalimantan Selatan	37,89	43,09	40,36	40,53	46,06	43,36	39,20	44,67	41,90
Kalimantan Timur	24,05	23,08	23,55	24,71	27,89	26,31	24,26	24,61	24,44
Kalimantan Utara	29,24	27,27	28,27	35,95	32,81	34,25	31,72	29,60	30,64
Sulawesi Utara	23,56	23,79	23,67	32,64	34,81	33,71	27,87	29,44	28,62
Sulawesi Tengah	25,78	28,72	27,09	36,52	39,31	37,89	33,13	36,36	34,67
Sulawesi Selatan	25,57	24,37	24,97	29,13	30,10	29,61	27,50	27,45	27,47
Sulawesi Tenggara	23,93	32,98	28,25	31,83	33,08	32,45	28,93	33,04	30,95
Gorontalo	36,68	38,50	37,62	57,38	53,35	55,37	48,77	46,94	47,84
Sulawesi Barat	28,87	39,26	34,08	42,57	42,45	42,51	40,14	41,87	41,00
Maluku	24,72	25,51	25,08	32,49	33,01	32,74	29,32	30,13	29,70
Maluku Utara	28,92	30,05	29,49	37,86	39,04	38,44	35,60	36,63	36,11
Papua Barat	23,22	27,31	25,14	19,92	22,17	21,04	21,29	24,16	22,69
Papua	21,37	14,94	18,35	5,45	8,36	6,84	9,39	9,95	9,66
Indonesia	**33,20**	**34,15**	**33,66**	**32,53**	**34,12**	**33,32**	**32,90**	**34,13**	**33,51**

Catatan: L (Laki-Laki), P (Perempuan), L+P (Laki-Laki + Perempuan)

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 6.5

Angka Kesiapan Sekolah menurut provinsi, tipe daerah dan jenis kelamin, 2021

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
Aceh	78,23	82,51	80,17	72,23	70,59	71,35	74,54	74,23	74,38
Sumatera Utara	71,47	71,34	71,41	60,18	59,02	59,60	65,86	64,97	65,43
Sumatera Barat	73,20	79,89	76,38	71,60	72,27	71,94	72,36	75,67	73,99
Riau	76,59	81,96	79,22	73,16	67,10	70,28	74,57	73,41	74,01
Jambi	62,01	77,53	69,05	71,96	69,03	70,67	69,28	71,42	70,23
Sumatera Selatan	63,85	64,51	64,14	61,96	61,99	61,98	62,76	62,77	62,77
Bengkulu	73,76	85,43	78,46	71,48	80,77	75,75	72,21	82,03	76,55
Lampung	85,04	89,73	87,39	81,99	80,78	81,41	82,86	83,50	83,17
Kep Bangka Belitung	88,97	84,76	87,00	84,38	78,27	80,92	87,27	81,73	84,45
Kep Riau	81,68	84,03	82,97	96,18	85,11	89,48	82,57	84,11	83,42
DKI Jakarta	84,01	80,10	82,01				84,01	80,10	82,01
Jawa Barat	72,67	76,11	74,36	68,40	67,40	67,91	71,78	74,31	73,02
Jawa Tengah	92,72	89,62	91,20	84,79	88,97	86,82	88,92	89,31	89,11
DI Yogyakarta	100,00	97,65	98,67	100,00	100,00	100,00	100,00	98,30	99,01
Jawa Timur	92,17	94,74	93,37	85,50	85,94	85,68	89,14	91,11	90,03
Banten	76,73	74,60	75,74	46,28	33,29	39,68	66,48	59,02	62,90
Bali	90,41	88,13	89,19	53,75	72,18	63,80	79,49	83,20	81,47
NTB	73,47	72,04	72,75	59,66	63,22	61,21	66,23	68,00	67,06
NTT	70,54	64,11	67,92	48,36	51,89	50,16	53,94	54,11	54,02
Kalimantan Barat	41,23	43,23	42,04	31,92	34,02	32,96	35,36	36,68	35,97
Kalimantan Tengah	85,06	72,13	79,21	71,91	85,82	78,36	76,74	80,94	78,67
Kalimantan Selatan	91,94	87,84	90,11	87,27	92,02	89,50	89,35	90,24	89,76
Kalimantan Timur	79,93	77,94	79,04	88,19	84,09	86,02	82,25	80,10	81,23
Kalimantan Utara	80,48	74,05	77,26	60,04	86,99	70,36	72,25	77,87	74,82
Sulawesi Utara	80,23	81,81	81,08	84,46	76,49	80,61	82,54	79,18	80,83
Sulawesi Tengah	80,35	80,21	80,29	79,20	77,17	78,22	79,53	77,99	78,80
Sulawesi Selatan	68,57	71,34	69,98	65,36	67,59	66,40	66,64	69,24	67,90
Sulawesi Tenggara	63,16	81,11	71,29	78,34	83,76	81,19	73,23	83,03	78,16
Gorontalo	92,17	92,00	92,09	85,34	91,33	88,60	88,23	91,57	89,95
Sulawesi Barat	55,19	69,67	62,33	68,43	69,31	68,89	65,61	69,38	67,55
Maluku	60,24	59,62	59,94	46,62	53,60	50,00	51,14	55,65	53,35
Maluku Utara	54,65	56,94	55,86	51,14	45,37	48,17	51,81	47,65	49,65
Papua Barat	55,48	65,42	59,56	38,50	49,88	44,35	45,56	54,84	49,97
Papua	62,18	62,59	62,37	22,66	24,06	23,30	35,03	36,38	35,65
Indonesia	**78,75**	**80,15**	**79,43**	**69,00**	**68,99**	**68,99**	**74,34**	**75,05**	**74,69**

Catatan: L (Laki-Laki), P (Perempuan), L+P (Laki-Laki + Perempuan)

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 6.6

Persentase Penduduk Berumur 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua menurut tipe daerah dan jenis kelamin, 2021

Tipe Daerah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
Perkotaan	3,20	3,51	3,35
Perdesaan	4,40	4,09	4,25
Perkotaan+Perdesaan	3,73	3,77	3,75

Sumber: Susenas MSBP, 2021

Lampiran 6.7

Persentase Penduduk Berumur 0-17 tahun yang melakukan aktifitas bersama orang tua/wali seminggu terakhir menurut provinsi dan jenis aktifitas, 2021

Provinsi	Makan/ belajar makan	Menonton TV	Belajar/ membaca buku	dibacakan buku cerita/ diceritakan dongeng	beribadah atau berdoa	berbincang
Aceh	86,16	63,28	32,96	7,53	46,51	71,81
Sumatera Utara	91,36	72,29	32,33	6,68	42,97	76,11
Sumatera Barat	88,69	69,13	34,96	10,05	36,61	83,97
Riau	90,09	74,97	36,35	8,48	49,53	74,98
Jambi	89,78	74,32	35,25	9,91	40,22	75,03
Sumatera Selatan	88,36	75,79	33,62	6,95	36,90	76,99
Bengkulu	88,66	72,18	29,46	6,57	32,08	82,62
Lampung	91,98	78,57	35,66	6,66	42,93	73,00
Kep Bangka Belitung	92,19	71,72	39,26	10,73	41,52	76,00
Kep Riau	90,72	75,06	41,92	16,54	53,48	75,92
DKI Jakarta	87,01	77,28	42,92	19,08	44,87	75,20
Jawa Barat	86,83	75,13	35,00	13,84	43,66	80,18
Jawa Tengah	88,75	78,03	38,70	11,29	48,63	84,24
DI Yogyakarta	86,01	76,86	46,39	17,73	45,19	86,50
Jawa Timur	81,23	75,95	36,90	11,93	44,34	78,63
Banten	84,55	81,69	36,11	11,50	53,69	74,00
Bali	90,88	70,38	33,93	11,65	59,59	81,49
NTB	90,71	69,01	28,59	8,09	43,02	75,15
NTT	89,61	41,01	27,93	7,32	49,57	84,30
Kalimantan Barat	89,58	67,65	31,41	6,36	46,21	71,26
Kalimantan Tengah	88,86	68,04	31,40	7,87	46,90	74,05
Kalimantan Selatan	90,85	76,51	35,30	10,28	49,95	83,60
Kalimantan Timur	90,91	73,19	40,22	9,71	55,26	81,88
Kalimantan Utara	85,84	54,81	29,78	7,24	54,91	69,95
Sulawesi Utara	88,53	67,60	37,04	8,18	59,76	79,36
Sulawesi Tengah	92,52	65,09	29,50	5,42	40,55	75,88
Sulawesi Selatan	91,74	71,19	32,94	6,75	42,06	78,35
Sulawesi Tenggara	91,87	61,95	25,82	5,16	26,83	88,46
Gorontalo	86,03	61,10	32,19	8,39	26,27	80,73
Sulawesi Barat	92,22	61,84	22,69	4,32	31,73	66,08
Maluku	91,87	47,86	34,89	8,62	57,91	76,44
Maluku Utara	92,63	52,40	31,56	4,15	38,77	64,67
Papua Barat	86,18	36,82	26,90	7,76	60,03	76,12
Papua	84,03	29,84	16,51	5,31	55,02	66,18
Indonesia	87,75	72,46	35,02	10,56	45,36	78,50

Sumber: Susenas MSBP, 2021

Lampiran 6.7 (Lanjutan)

Persentase Penduduk Berumur 0-17 tahun yang melakukan aktifitas bersama orang tua/wali seminggu terakhir menurut provinsi dan jenis aktifitas, 2021

Provinsi	bermain/ berekreasi/ olahraga	bermain game	mengakses internet	mengurus rumah tangga	membantu penambah penghasilan
Aceh	32,36	7,50	6,49	22,00	1,42
Sumatera Utara	32,01	12,84	12,76	31,39	4,68
Sumatera Barat	38,07	15,51	15,16	33,02	2,32
Riau	38,48	14,40	17,97	29,63	1,64
Jambi	34,87	12,07	10,44	22,52	1,66
Sumatera Selatan	32,09	8,82	13,87	21,70	1,72
Bengkulu	31,64	7,26	15,20	24,42	1,31
Lampung	29,75	10,41	16,42	31,91	2,44
Kep Bangka Belitung	40,95	13,98	18,99	29,32	1,20
Kep Riau	36,40	11,94	17,88	25,14	0,79
DKI Jakarta	41,51	24,62	31,45	11,75	0,29
Jawa Barat	39,79	16,39	22,42	24,81	0,72
Jawa Tengah	38,28	13,72	22,76	28,60	2,71
DI Yogyakarta	47,93	16,30	36,41	29,49	3,73
Jawa Timur	37,03	14,86	21,47	23,63	1,69
Banten	32,82	16,51	16,56	19,25	1,06
Bali	40,80	17,65	24,55	40,73	4,06
NTB	46,65	10,63	15,69	29,56	3,55
NTT	30,45	9,06	8,63	38,02	5,17
Kalimantan Barat	28,84	7,12	8,62	22,18	1,65
Kalimantan Tengah	36,09	10,21	16,57	29,19	1,69
Kalimantan Selatan	34,72	15,62	24,13	29,93	2,36
Kalimantan Timur	35,77	13,47	25,70	28,69	1,70
Kalimantan Utara	39,35	15,78	19,85	29,12	1,12
Sulawesi Utara	38,36	13,47	13,96	24,59	1,22
Sulawesi Tengah	39,96	7,88	10,88	33,90	3,45
Sulawesi Selatan	33,01	13,19	13,24	29,86	3,06
Sulawesi Tenggara	24,00	8,90	13,07	35,12	2,92
Gorontalo	37,21	11,07	15,74	29,22	2,97
Sulawesi Barat	27,86	5,54	8,64	24,57	3,30
Maluku	39,18	13,51	14,68	29,78	2,03
Maluku Utara	25,33	5,16	3,59	20,39	2,34
Papua Barat	37,22	7,26	13,55	29,73	4,27
Papua	29,22	6,04	4,38	24,77	3,69
Indonesia	**36,41**	**13,80**	**18,63**	**26,47**	**2,08**

Sumber: Susenas MSBP, 2021

Lampiran 6.7.1

Sampling error RSE Persentase Penduduk Berumur 0-17 tahun yang melakukan aktifitas bersama orang tua/wali seminggu terakhir menurut provinsi dan jenis aktifitas, 2021

Provinsi	Bermain Game				
	Estimasi	Standar Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	7,53	0,94	12,48	5,89	9,60
Sumatera Utara	6,68	0,86	12,84	5,18	8,57
Sumatera Barat	10,05	1,56	15,57	7,37	13,55
Riau	8,48	1,16	13,63	6,47	11,03
Jambi	9,91	1,27	12,77	7,69	12,68
Sumatera Selatan	6,95	0,98	14,10	5,26	9,14
Bengkulu	6,57	1,14	17,36	4,66	9,20
Lampung	6,66	1,06	15,93	4,86	9,07
Kepulauan Bangka Belitung	10,73	1,73	16,08	7,79	14,61
Kepulauan Riau	16,54	3,81	23,01	10,35	25,39
DKI Jakarta	19,08	1,84	9,62	15,74	22,94
Jawa Barat	13,84	0,89	6,42	12,19	15,68
Jawa Tengah	11,29	0,64	5,69	10,09	12,61
DI Yogyakarta	17,73	2,30	12,95	13,67	22,69
Jawa Timur	11,93	0,82	6,88	10,42	13,64
Banten	11,50	1,27	11,06	9,23	14,24
Bali	11,65	1,56	13,36	8,93	15,06
Nusa Tenggara Barat	8,09	1,02	12,58	6,31	10,33
Nusa Tenggara Timur	7,32	0,88	12,09	5,76	9,26
Kalimantan Barat	6,36	0,81	12,77	4,94	8,16
Kalimantan Tengah	7,87	1,09	13,82	5,98	10,28
Kalimantan Selatan	10,28	1,25	12,12	8,08	13,00
Kalimantan Timur	9,71	1,47	15,12	7,18	12,99
Kalimantan Utara	7,24	1,76	24,36	4,46	11,56
Sulawesi Utara	8,18	1,17	14,34	6,16	10,80
Sulawesi Tengah	5,42	0,81	15,04	4,02	7,25
Sulawesi Selatan	6,75	0,86	12,76	5,25	8,65
Sulawesi Tenggara	5,16	0,91	17,73	3,63	7,28
Gorontalo	8,39	2,46	29,26	4,67	14,63
Sulawesi Barat	4,32	1,14	26,29	2,57	7,18
Maluku	8,62	1,65	19,17	5,88	12,45
Maluku Utara	4,15	0,81	19,47	2,82	6,05
Papua Barat	7,76	1,48	19,05	5,32	11,20
Papua	5,31	1,03	19,41	3,61	7,73
Indonesia	**10,56**	**0,26**	**2,48**	**10,06**	**11,09**

Sumber: Susenas MSBP, 2021

Lampiran 6.7.1 (Lanjutan)

Sampling error RSE Persentase Penduduk Berumur 0-17 tahun yang melakukan aktifitas bersama orang tua/wali seminggu terakhir menurut provinsi dan jenis aktifitas, 2021

Provinsi	Bermain Game				
	Estimasi	Standar Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	7,50	0,96	12,76	5,83	9,60
Sumatera Utara	12,84	1,27	9,92	10,55	15,56
Sumatera Barat	15,51	2,11	13,64	11,80	20,12
Riau	14,40	1,63	11,33	11,48	17,90
Jambi	12,07	1,73	14,33	9,07	15,89
Sumatera Selatan	8,82	1,30	14,79	6,58	11,73
Bengkulu	7,26	1,11	15,34	5,36	9,77
Lampung	10,41	1,31	12,61	8,10	13,28
Kepulauan Bangka Belitung	13,98	2,24	15,99	10,15	18,97
Kepulauan Riau	11,94	2,39	20,06	7,98	17,48
DKI Jakarta	24,62	2,43	9,88	20,17	29,69
Jawa Barat	16,39	1,04	6,34	14,45	18,53
Jawa Tengah	13,72	0,86	6,26	12,12	15,50
DI Yogyakarta	16,30	2,70	16,54	11,68	22,30
Jawa Timur	14,86	0,93	6,24	13,13	16,77
Banten	16,51	1,55	9,39	13,70	19,78
Bali	17,65	2,19	12,38	13,77	22,35
Nusa Tenggara Barat	10,63	1,33	12,51	8,29	13,53
Nusa Tenggara Timur	9,06	1,01	11,16	7,26	11,25
Kalimantan Barat	7,12	0,92	12,91	5,52	9,15
Kalimantan Tengah	10,21	2,12	20,73	6,75	15,17
Kalimantan Selatan	15,62	1,65	10,57	12,65	19,14
Kalimantan Timur	13,47	1,83	13,57	10,27	17,47
Kalimantan Utara	15,78	2,96	18,74	10,80	22,47
Sulawesi Utara	13,47	1,90	14,12	10,16	17,65
Sulawesi Tengah	7,88	1,15	14,54	5,91	10,44
Sulawesi Selatan	13,19	1,25	9,45	10,93	15,82
Sulawesi Tenggara	8,90	1,40	15,76	6,51	12,06
Gorontalo	11,07	1,89	17,04	7,87	15,34
Sulawesi Barat	5,54	1,28	23,07	3,50	8,64
Maluku	13,51	1,95	14,41	10,12	17,79
Maluku Utara	5,16	1,65	31,91	2,74	9,53
Papua Barat	7,26	1,45	19,99	4,88	10,67
Papua	6,04	1,04	17,25	4,29	8,44
Indonesia	**13,80**	**0,32**	**2,33**	**13,18**	**14,44**

Sumber: Susenas MSBP, 2021

Lampiran 6.7.1 (Lanjutan)

Sampling error RSE Persentase Penduduk Berumur 0-17 tahun yang melakukan aktifitas bersama orang tua/wali seminggu terakhir menurut provinsi dan jenis aktifitas, 2021

Provinsi	mengakses internet				
	Estimasi	Standar Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	6,49	0,92	14,13	4,91	8,54
Sumatera Utara	12,76	1,42	11,13	10,23	15,82
Sumatera Barat	15,16	1,44	9,49	12,55	18,20
Riau	17,97	1,94	10,77	14,49	22,08
Jambi	10,44	1,69	16,17	7,56	14,23
Sumatera Selatan	13,87	1,20	8,69	11,67	16,40
Bengkulu	15,20	2,31	15,19	11,20	20,30
Lampung	16,42	1,50	9,16	13,68	19,59
Kepulauan Bangka Belitung	18,99	3,32	17,48	13,31	26,36
Kepulauan Riau	17,88	2,89	16,15	12,90	24,25
DKI Jakarta	31,45	2,74	8,71	26,34	37,05
Jawa Barat	22,42	1,19	5,30	20,18	24,83
Jawa Tengah	22,76	0,99	4,33	20,88	24,74
DI Yogyakarta	36,41	3,24	8,91	30,32	42,98
Jawa Timur	21,47	0,98	4,55	19,62	23,45
Banten	16,56	1,50	9,08	13,81	19,72
Bali	24,55	2,62	10,69	19,77	30,05
Nusa Tenggara Barat	15,69	1,72	10,97	12,60	19,36
Nusa Tenggara Timur	8,63	1,07	12,39	6,75	10,97
Kalimantan Barat	8,62	1,01	11,76	6,83	10,82
Kalimantan Tengah	16,57	1,89	11,38	13,20	20,61
Kalimantan Selatan	24,13	1,95	8,09	20,51	28,15
Kalimantan Timur	25,70	3,33	12,97	19,72	32,76
Kalimantan Utara	19,85	4,02	20,23	13,12	28,88
Sulawesi Utara	13,96	1,82	13,02	10,77	17,92
Sulawesi Tengah	10,88	1,32	12,17	8,54	13,76
Sulawesi Selatan	13,24	1,37	10,37	10,77	16,17
Sulawesi Tenggara	13,07	1,86	14,25	9,83	17,17
Gorontalo	15,74	3,08	19,56	10,60	22,75
Sulawesi Barat	8,64	2,47	28,64	4,87	14,88
Maluku	14,68	1,99	13,54	11,19	19,01
Maluku Utara	3,59	0,90	25,13	2,19	5,85
Papua Barat	13,55	2,07	15,24	9,99	18,13
Papua	4,38	0,91	20,70	2,91	6,55
Indonesia	**18,63**	**0,36**	**0,44**	**17,94**	**19,35**

Sumber: Susenas MSBP, 2021

Lampiran 6.8

Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun menurut provinsi, 2021

Provinsi	Persentase
Aceh	4,60
Sumatera Utara	4,82
Sumatera Barat	3,48
Riau	5,55
Jambi	10,67
Sumatera Selatan	12,24
Bengkulu	11,93
Lampung	9,77
Kep Bangka Belitung	14,05
Kep Riau	2,89
DKI Jakarta	4,68
Jawa Barat	10,09
Jawa Tengah	9,75
DI Yogyakarta	3,52
Jawa Timur	10,44
Banten	6,00
Bali	5,06
NTB	16,59
NTT	5,95
Kalimantan Barat	13,84
Kalimantan Tengah	15,47
Kalimantan Selatan	15,30
Kalimantan Timur	8,64
Kalimantan Utara	10,16
Sulawesi Utara	13,56
Sulawesi Tengah	12,51
Sulawesi Selatan	9,25
Sulawesi Tenggara	13,26
Gorontalo	11,64
Sulawesi Barat	17,71
Maluku	7,08
Maluku Utara	13,09
Papua Barat	12,27
Papua	13,21
Indonesia	**9,23**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

KESEHATAN ANAK

Prevelensi Status Gizi Balita, 2021

24,4 % anak mengalami *stunting* paling tinggi di provinsi **Nusa Tenggara Timur (37,8%).**

7,1% anak mengalami *wasting* paling tinggi berada di **Provinsi Maluku (12%).**

17% anak memiliki berat badan yang kurang *(underweight)* paling tinggi di provinsi **NTT (29,3%).**

Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

Persentase BADUTA (anak 0-23 bulan) yang pernah diberi ASI menurut rata-rata lama pemberian ASI, tahun 2021:

< 6 bulan = 25,96%

6-23 bulan = 74,04%

Immunisasi

Persentase anak berumur 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi lengkap menurut tipe daerah, 2021:

Perkotaan = 62,01%

Perdesaan = 59,89%

Perkotaan dan Perdesaan =61,09%

PERMENKES No. 2/2020 tentang Standar Antropometri Anak, menjelaskan:

1. Stunted/ stunting (pendek menurut umur): status yang menunjukkan masalah gizi kronis akibat kekurangan gizi maupun infeksi dalam jangka waktu yang lama.
2. Wasted/wasting (kurus menurut tinggi badan): status yang menunjukkan indikasi masalah gizi akut yang sensitif terhadap perubahan secara cepat seperti wabah penyakit maupun kelaparan.
3. Underweight (berat badan kurang menurut umur): status yang mengindikasikan masalah gizi secara umum.

Overview

Kondisi kesehatan anak di Indonesia mengalami fluktuasi pada tiap tahunnya. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh dari pandemi COVID-19 yang dialami masyarakat Indonesia. Status Gizi balita khususnya stunting dan wasting mengalami tren penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Akan tetapi, kasus underweight mengalami kenaikan pada tahun 2021 dibandingkan pada tahun sebelumnya. Selain itu, persentase baduta (0-23 bulan) yang pernah diberikan ASI juga menunjukkan hasil yang cukup baik yaitu sebesar 94,65 persen untuk rata-rata nasional. Meskipun terdapat tren positif bagi kondisi kesehatan anak di Indonesia, upaya percepatan untuk meningkatkan persentase anak berumur 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi lengkap harus terus dilakukan. Hal ini penting karena hasil rata-rata nasional hanya menunjukkan persentase sebesar 61,09 persen. Hasil Susenas tahun 2021 juga menunjukkan adanya penurunan persentase anak perokok dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan tren yang positif bagi kesehatan anak. Terkait dengan kepemilikan jaminan kesehatan anak di Indonesia, hasil analisis menunjukkan kepemilikan jaminan kesehatan nyatanya tidak menjamin untuk dapat dimanfaatkan secara maksmimal saat anak-anak berobat jalan atau dirawat inap. Oleh karena itu, implementasi strategi dan inovasi di bidang kesehatan anak yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah masih sangat dibutuhkan untuk melakukan akselerasi penyediaan hak kesehatan anak sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan anak di bidang kesehatan.

7.1. Status Gizi

Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021 mengelompokkan status gizi balita di Indonesia menjadi tiga kelompok yaitu stunted, wasted, dan underweight. Menurut Permenkes No. 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak, stunted atau stunting (pendek menurut umur) adalah status yang menunjukkan masalah gizi kronis akibat kekurangan gizi maupun infeksi dalam jangka waktu yang lama. Wasted atau wasting (kurus menurut tinggi badan) adalah status yang menunjukkan indikasi masalah gizi akut yang sensitif terhadap perubahan secara cepat seperti wabah penyakit maupun kelaparan. Terakhir

underweight (berat badan kurang menurut umur) adalah status yang mengindikasikan masalah gizi secara umum.

7.1.1 Prevalensi Status Gizi Balita 2021

Prevalensi Status Gizi Balita tahun 2021 disajikan pada Gambar 7.1. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebanyak 24,40 persen anak Indonesia mengalami stunted pada tahun 2021. Sementara itu, sebanyak 7,10 persen balita Indonesia mengalami wasted. Sisanya sebanyak 17,00 persen balita Indonesia memiliki berat badan yang kurang atau underweight. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki masalah gizi balita yang cukup serius. Kementerian Kesehatan RI (2021) menyebutkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN seperti Vietnam sebesar 23,00 persen, Malaysia sebesar 17,00 persen, Thailand sebesar 16,00 persen, dan Singapura sebesar 4,00 persen. Namun, Kementerian Kesehatan RI juga menyebutkan bahwa tingkat prevalensi stunting di Indonesia terus menurun. Adanya penekankan dalam penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola pengasuhan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta akses minum dan sanitasi diharapkan dapat mempercepat penurunan stunting di Indonesia.

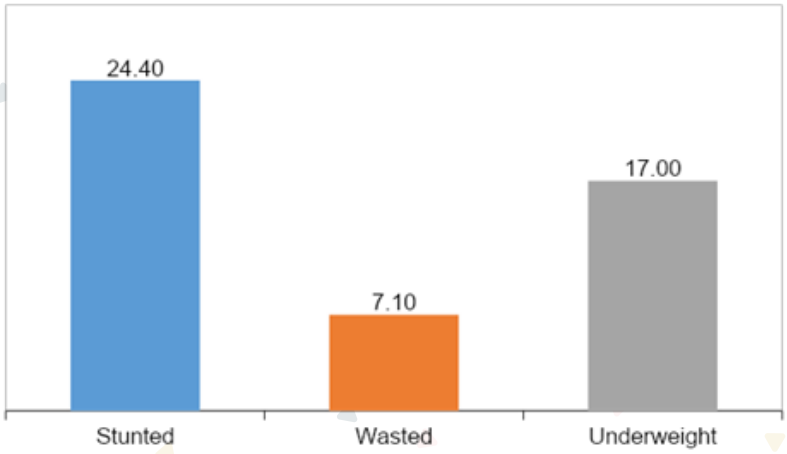

Gambar 7.1 Prevalensi Status Gizi Balita Tahun 2021
Sumber: SSGI, Kemenkes, 2021

7.1.2 Tren Prevalensi Status Gizi Balita (Riskesdas 2018, SSGBI 2019, SSGI 2021)

Tren prevalensi status gizi balita selama empat tahun terakhir disajikan pada Gambar 7.2. Data menunjukkan bahwa kondisi status gizi balita di Indonesia mengalami perubahan pada tiap tahunnya. Terhitung mulai tahun 2018, status gizi balita di Indonesia yang mengalami stunting mengalami penurunan sebanyak 6,40 persen hingga tahun 2021. Meskipun terjadi penurunan angka stunting di Indonesia hingga tahun 2021, upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia harus lebih dapat dilakukan sebaik-baiknya. Hal ini cukup beralasan karena target penurunan stunting yang dicanangkan oleh Presiden RI adalah 14,00 persen pada tahun 2024 (Kemenko PMK, 2021). Selain itu, data World Bank pada tahun 2020 juga menunjukkan posisi Indonesia yang berada pada urutan ke-115 dari 151 negara di dunia.

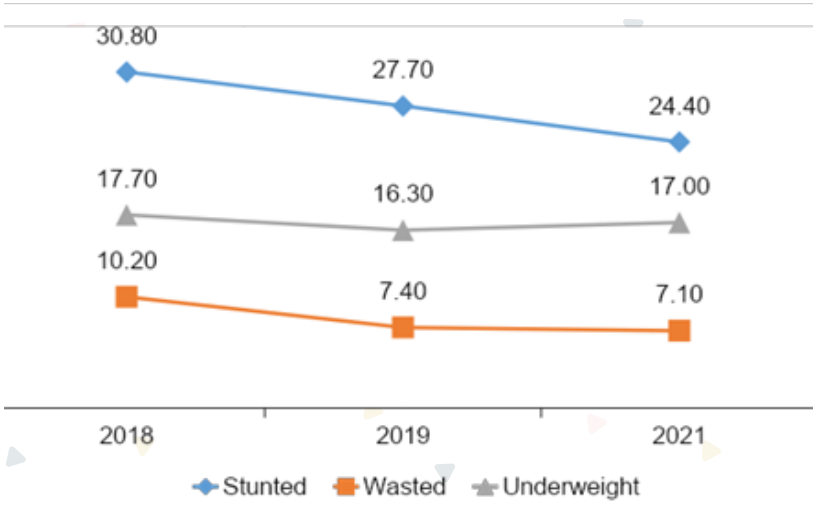

Gambar 7.2 Tren Prevalensi Status Gizi Balita Tahun 2018-2021
Sumber: Riskesdas 2018; SSGBI 2019; SSGI 2021

Selain itu, Gambar 7.2 menunjukkan bahwa status wasting pada balita di Indonesia juga mengalami penurunan pada tiap tahunnya yaitu sebanyak 10,20 persen pada tahun 2018 menjadi 7,10 persen pada tahun 2021. Sementara status underweight balita di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2018 ke tahun 2019 namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021. Salah satu penyebab adanya kenaikan pada status gizi underweight balita di Indonesia adalah adanya pandemi COVID-19. Adanya pandemi COVID-19

memberikan pengaruh besar pada kondisi di masyarakat terutama pada kelompok miskin yang akan berdampak pada menurunnya daya beli terhadap pangan bergizi (Kemenko PMK, 2021). Oleh karena itu, diharapkan dengan semakin membaiknya kondisi pandemi di Indonesia, kondisi perekonomian yang berpengaruh langsung pada kapasitas daya beli keluarga dapat semakin membaik. Dengan demikian kualitas kondisi gizi balita di Indonesia dapat semakin ditingkatkan.

7.1.3 Prevalensi Status Gizi Balita Menurut Provinsi

Provinsi	Stunted	Wasted	Underweight
Nusa Tenggara Timur	37.80	10.10	29.30
Sulawesi Barat	33.80	7.10	23.00
Aceh	33.20	10.70	23.80
Nusa Tenggara Barat	31.40	7.50	22.40
Sulawesi Tenggara	30.20	6.60	20.90
Kalimantan Selatan	30.00	10.30	24.30
Kalimantan Barat	29.80	10.00	24.00
Sulawesi Tengah	29.70	9.40	23.80
Papua	29.50	8.80	19.30
Gorontalo	29.00	10.20	22.70
Maluku	28.70	12.00	26.40
Kalimantan Utara	27.50	6.80	17.60
Maluku Utara	27.50	10.60	22.40
Kalimantan Tengah	27.40	7.60	19.60
Sulawesi Selatan	27.40	6.20	19.00
Papua Barat	26.20	10.80	19.90
Sumatera Utara	25.80	7.90	16.50
Sumatera Selatan	24.80	7.60	15.70
Jawa Barat	24.50	5.30	15.00
Banten	24.50	6.30	16.50
Jawa Timur	23.50	6.40	16.10
Sumatera Barat	23.30	7.40	18.10
Kalimantan Timur	22.80	8.10	16.20
Jambi	22.40	9.10	16.70
Riau	22.30	9.20	19.30
Bengkulu	22.10	5.00	12.90
Sulawesi Utara	21.60	7.10	14.10
Jawa Tengah	20.90	6.70	14.00
Kepulauan Bangka Belitung	18.60	6.20	15.20
Lampung	18.50	7.20	14.60
Kepulauan Riau	17.60	7.70	13.40
DI Yogyakarta	17.30	5.80	12.30
DKI Jakarta	16.80	6.90	13.70
Bali	10.90	3.00	7.00
Indonesia	24.40	7.10	17.00

Gambar 7.1
Prevalensi Status Gizi Balita Menurut Provinsi Tahun 2021
Sumber: SSGI, Kemenkes, 2021

Selain itu, data menunjukkan bahwa status gizi balita di Indonesia yang mengalami wasted tertinggi berada di Provinsi Maluku yaitu sebesar 12,00 persen, Provinsi Papua Barat sebesar 10,80 persen, dan diikuti Provinsi Aceh dan Provinsi Maluku Utara masing-masing sebesar 10,70 persen dan 10,60 persen (Tabel 7.1). Data lainnya menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menjadi Provinsi dengan status gizi balita yang mengalami underweight tertinggi yaitu sebesar 29,30 persen. Sementara itu, provinsi Bali menjadi Provinsi dengan status gizi balita dengan underweight terendah sebesar 7,00 persen, lebih rendah 10,00 persen dari prevalensi underweight balita di Indonesia secara umum yaitu 17,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan strategi yang lebih baik baik oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan gizi balita di Indonesia. Sejatinya masalah gizi balita adalah masalah serius yang harus ditangani secara komprehensif oleh pemerintah karena kualitas sumberdaya manusia yang akan datang sangat ditentukan oleh kondisi anak-anak saat ini.

7.1. Status Gizi

PP No. 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif menjelaskan bahwa Air Susu Ibu (ASI) adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu yang berguna sebagai makanan bagi bayi. ASI memiliki manfaat bagi beberapa aspek tumbuh kembang seorang anak. Aspek-aspek tersebut adalah: 1) aspek gizi (kekebalan tubuh); 2) aspek psikologi (ikatan kasih sayang ibu-bayi dan rasa aman); dan 3) aspek kecerdasan (perkembangan sistem syaraf otak) (Rahmawati & Ramadhan, 2019). Pemberian ASI secara eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan dapat mencukupi kebutuhan zat-zat gizi untuk perkembangan dan pertumbuhan bayi (IDAI, 2008). Hal ini menyebabkan pemberian ASI menjadi penting untuk dilakukan karena kekurangan gizi pada masa ini dapat memberikan dampak panjang bahkan bersifat permanen (Kemenkes, 2016).

7.2.1 Tren Persentase Baduta (0-23 Bulan) yang Pernah Diberi ASI

Tren persentase baduta (0-23 bulan) yang pernah diberi ASI sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami fluktuasi. Terdapat penurunan persentase sebesar 1,56 persen dari tahun 2017 ke tahun 2018 namun terdapat kenaikan sebesar 2,19 persen dari tahun

2018 ke tahun 2019. Setelah tahun 2019, persentase baduta yang pernah diberi ASI mengalami penurunan menjadi 95,02 persen di tahun 2020 dan kembali menurun menjadi 94,65 persen di tahun 2021. Hal ini dapat diartikan bahwa ada penurunan pemberian ASI pada baduta dan diprediksi terdapat kenaikan pada pemberian susu formula pada baduta. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa faktor dominan yang memberikan pengaruh pemberian ASI eksklusif dibandingkan dengan susu formula adalah faktor kondisi kesehatan, persepsi, serta dukungan dari petugas kesehatan (Tsalats, 2017). Adanya pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 dan tahun 2021 dapat menjadi salah satu penyebab menurunnya kondisi kesehatan ibu sehingga mengalami kendala dalam memberikan ASI pada baduta. Secara rinci, tren persentase baduta (0-23 bulan) yang pernah diberi ASI tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 7.3.

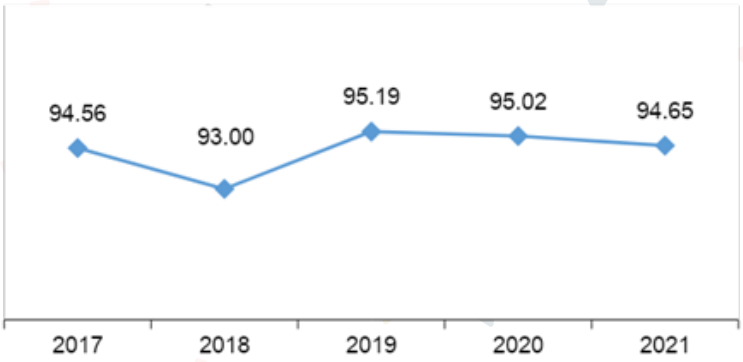

Gambar 7.3 Tren Persentase Baduta (0-23 Bulan) yang Pernah Diberi ASI Tahun 2017-2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017-2021, BPS

7.2.2 Persentase Baduta (0-23 Bulan) yang Pernah Diberi ASI Menurut Rata-Rata Lama Pemberian ASI (Bulan)

Baduta adalah kelompok usia bayi yang masuk dalam golden period atau masa emas. Pada periode Baduta, anak mengalami proses pembentukan jaringan otak kompleks yang sangat pesat yaitu sebesar ±80 persen sehingga pada masa ini anak akan mengalami percepatan proses penyerapan informasi (Ara et al., 2018). Hasil analisis terhadap persentase Baduta (0-23 bulan) yang pernah diberi ASI menurut rata-rata lama pemberian ASI (bulan)

pada tahun 2021 disajikan pada Gambar 7.4.

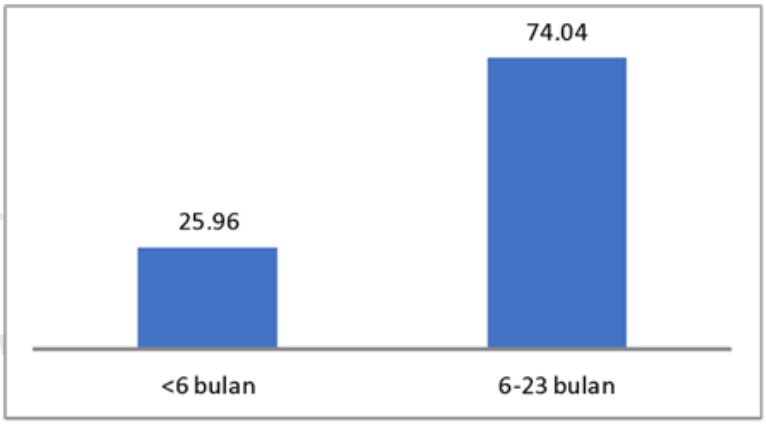

Gambar 7.4 Persentase Baduta (0-23 Bulan) yang Pernah Diberi ASI Menurut Rata-Rata Lama Pemberian ASI (Bulan) Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

Hasil survei sosial ekonomi nasional pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sebanyak 74,04 persen baduta Indonesia diberikan ASI selama enam hingga 23 bulan. Sementara itu, sisanya sebesar 25,96 persen baduta di Indonesia diberikan ASI kurang dari enam bulan (Gambar 7.4). Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan orang tua Indonesia, khususnya Ibu tentang pentingnya pemberian ASI pada awal kehidupan bayi sudah baik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemberian ASI secara eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan akan mampu mencukupi kebutuhan zat-zat gizi untuk perkembangan dan pertumbuhan bayi (IDAI, 2008). Oleh karena itu, sosialisasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama harus terus digalakkan untuk meningkatkan persentase bayi yang mendapatkan ASI ekslusif di awal kehidupannya bagi kesehatan anak yang optimal.

7.2.3 Persentase Baduta (0-23 Bulan) yang Pernah Diberi ASI Menurut Provinsi

Persentase Baduta (0-23 bulan) yang pernah diberi ASI menurut provinsi pada tahun 2021 disajikan pada Gambar 7.5. Hasil analisis menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi dengan persentase baduta yang pernah diberi ASI tertinggi di

Indonesia yaitu sebesar 97,75 persen. Posisi ini diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar 97,70 persen, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 97,34 persen.

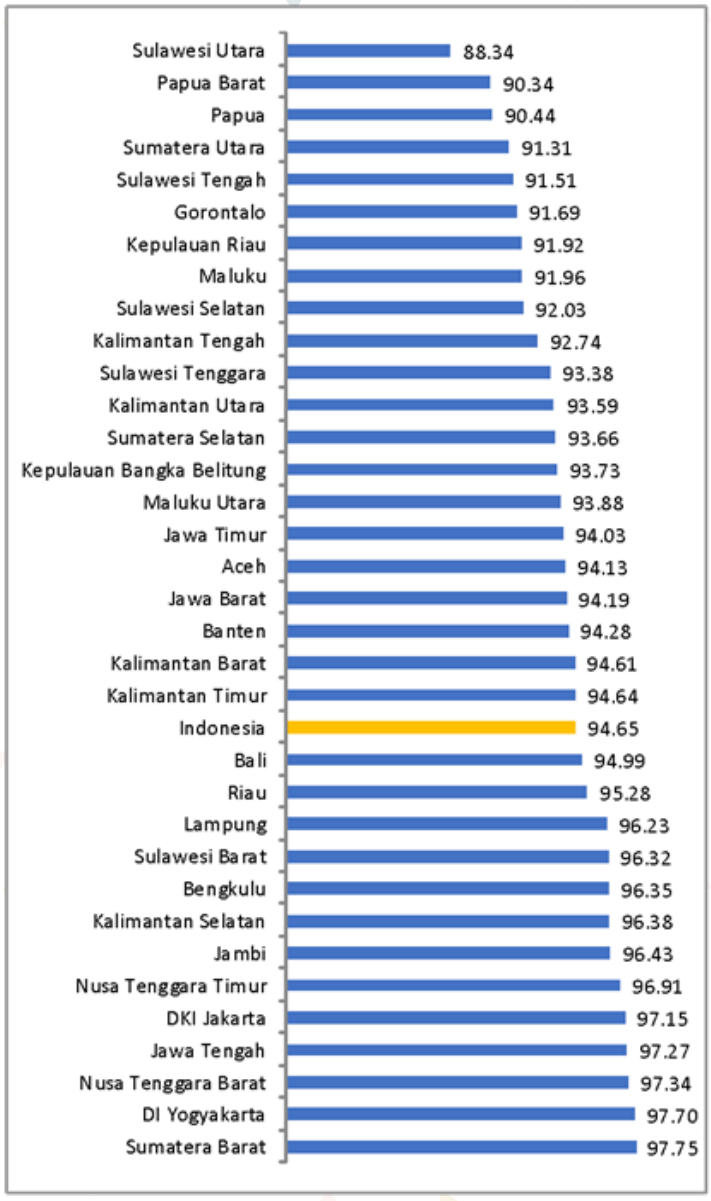

Gambar 7.5 Persentase Baduta (0-23 Bulan) yang Pernah Diberi ASI Menurut Provinsi Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

Sementara itu Provinsi Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan persentase pemberian ASI terendah sebanyak 88,34 persen. Meskipun menjadi provinsi terendah, namun berdasarkan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir sembilan dari sepuluh anak di Provinsi Sulawesi Utara sudah diberikan ASI pada usia

baduta. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pemberian ASI di Indonesia pada tiap provinsi sudah tergolong cukup tinggi dengan rata-rata 94,65 persen.

7.2.4 Persentase Bayi Umur Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif Menurut Provinsi dan Tipe Daerah

Data survei sosial ekonomi nasional pada tahun 2021 mengelompokkan persentase bayi berumur kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif berdasarkan provinsi dan tipe daerah yaitu perkotaan dan perdesaan yang disajikan pada Gambar 7.6. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebanyak 69,64 persen bayi berumur kurang dari enam bulan di daerah perkotaan dan 74,05 persen di daerah perdesaan Indonesia sudah mendapatkan ASI eksklusif. Hal ini menunjukkan bahwa persentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif di perdesaan lebih besar daripada di perkotaan dengan perbedaan 4,41 persen.

Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah adanya perbedaan latar belakang pada ibu di daerah perkotaan dan perdesaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tsalats (2017) yang menyimpulkan bahwa masyarakat di wilayah perdesaan lebih banyak mendapatkan dukungan dari petugas kesehatan daripada masyarakat di perkotaan sehingga masyarakat di daerah perdesaan memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk memberikan ASI eksklusif pada bayinya.

Selain itu, Gambar 7.6 juga menunjukkan bahwa hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki persentase pemberian ASI ekslusif yang lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan di daerah perkotaan kecuali Provinsi Sulawesi Barat dengan perbedaan sebesar 6,04 persen, Kalimantan Utara sebesar 6,76 persen, Kalimantan Timur sebesar 19,38 persen, Nusa Tenggara Barat sebesar 1,7 persen, Jawa Barat sebesar 2,59 persen, Kepulauan Riau sebesar 25,87 persen, dan Aceh sebesar 9,17 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa Ibu yang berada di perkotaan pada umumnya memiliki keterbatasan dalam memberikan ASI ekskusif pada bayi mereka. Selain karena dukungan petugas kesehatan, rendahnya persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi di wilayah perkotaan dapat disebabkan oleh status Ibu yang bekerja di luar rumah sehingga Ibu memiliki tantangan dalam memberikan ASI eksklusif bagi bayi.

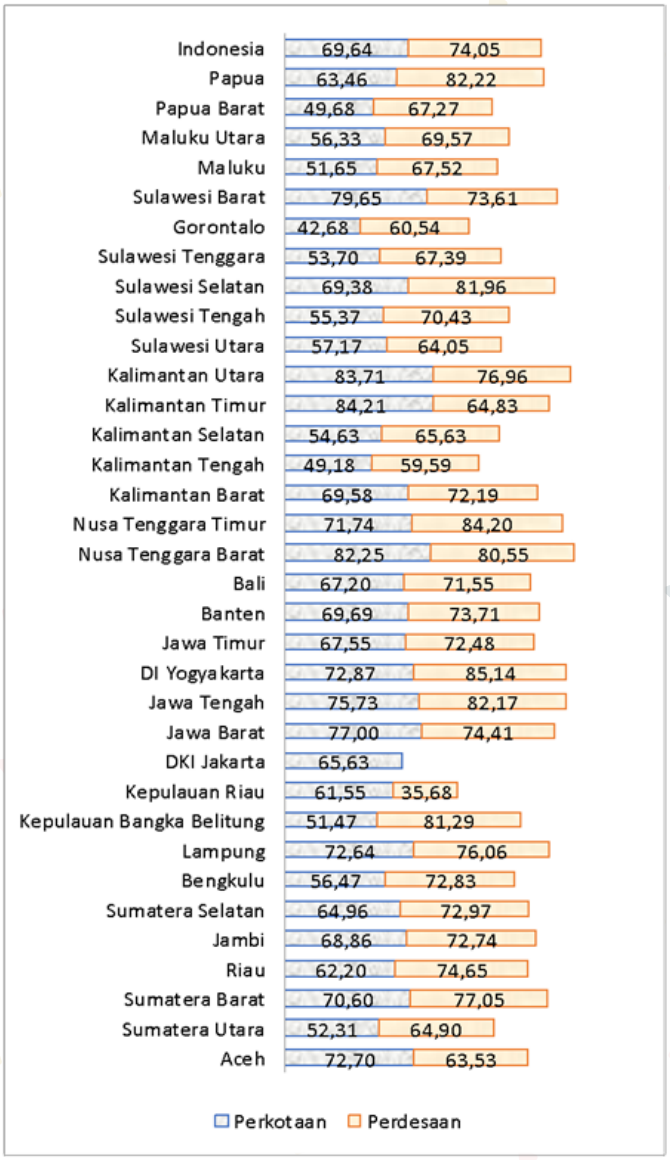

Gambar 7.5 Persentase Bayi Umur Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapatkan ASI Eksklusif Menurut Provinsi Dan Tipe Daerah Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

7.3. Cakupan Imunisasi

Imunisasi adalah sebuah upaya untuk memberikan stimulasi terhadap sistem kekebalan tubuh balita dengan memasukkan vaksin kedalam tubuh yang akan membentuk zat antibodi untuk melawan penyakit tertentu (Hadinegoro, 2011). Pemberian imunisasi pada balita bertujuan untuk membuat balita menjadi kebal terhadap penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi sehingga angka morbiditas serta mortalitas dan kecacatan akibat penyakit tertentu pada balita dapat menurun (Ismoedijanto, 2003).

7.3.1 Persentase Balita yang pernah Diberi Imunisasi Menurut Tipe Daerah, dan Jenis Imunisasi

Hasil analisis persentase balita yang pernah diberi imunisasi menurut tipe daerah, dan jenis imunisasi pada tahun 2021 disajikan pada Gambar 7.7. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1059/MENKES/SK/IX/2004 tentang Pedoman Penyelenggaran Imunisasi, terdapat lima jenis imunisasi rutin yang diberikan kepada balita yaitu Hepatitis B, BCG, Polio, DPT, dan Campak. Data menunjukkan bahwa delapan dari sepuluh balita di Indonesia baik di daerah perkotaan maupun perdesaan sudah diberikan imunisasi BCG, DPT, Polio, dan Hepatitis B (Gambar 7.7). Sementara hanya enam diantara sepuluh balita di Indonesia yang diberikan imunisasi Campak/Morbili.

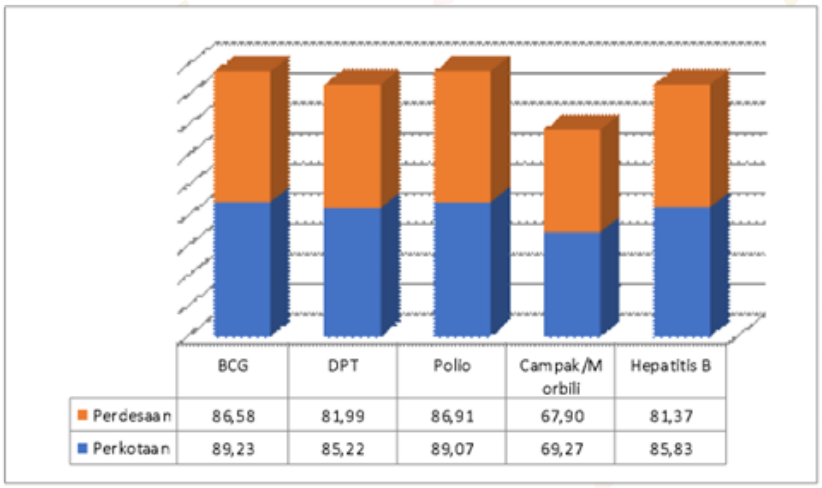

Gambar 7.7 Persentase Bayi Umur Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapatkan ASI Eksklusif Menurut Provinsi Dan Tipe Daerah Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

Meskipun persentase balita yang pernah diberi imunisasi menurut tipe daerah dan jenis imunisasi pada tahun 2021 sudah cukup baik, hal ini tetap harus ditingkatkan hingga 100 persen. Mengingat pentingnya peran imunisasi dalam mendukung pencapaian proses tumbuh kembang anak, utamanya menyediakan status kesehatan anak secara optimal.

7.3.2 Persentase Anak Berumur 12-23 Bulan yang Mendapat Imunisasi Lengkap Menurut Tipe Daerah

Persentase anak berumur 12-23 bulan yang mendapat imunisasi lengkap menurut tipe daerah disajikan pada Gambar 7.8. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2021, sebayak 62,01 persen anak di Indonesia yang berumur 12-23 bulan di daerah perkotaan sudah mendapatkan imunisasi secara lengkap. Sementara itu, di daerah perdesaan hanya sebesar 59,89 persen anak berumur 12-23 bulan yang mendapat imunisasi lengkap.

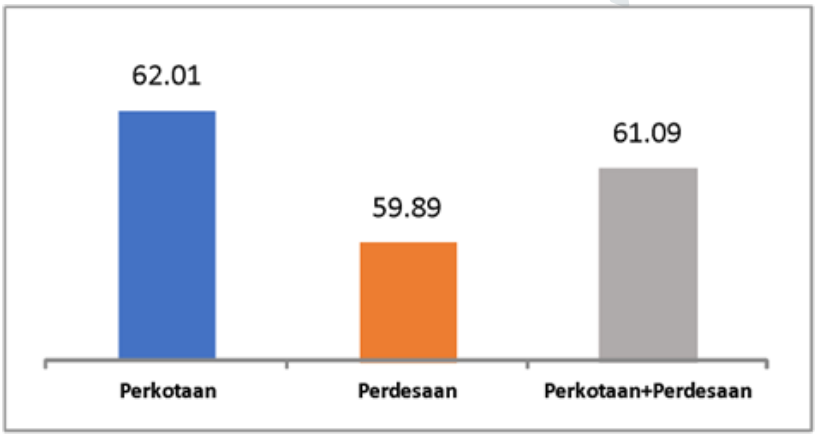

Gambar 7.8 Persentase Anak Berumur 12-23 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap Menurut Tipe Daerah Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

Adanya perbedaan persentase dimana daerah perkotaan memiliki jumlah persentase yang lebih besar dibandingkan daerah perdesaan adalah karena perbedaan jumlah tenaga kesehatan di daerah perkotaan dan perdesaan. Untuk mengatasi hal tersebut serta meningkatkan jangkauan imunisasi bagi seluruh anak di Indonesia, Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 telah menyusun tiga strategi untuk menggalakkan imunisasi rutin pada anak melalui Bulan Imunisasasi Anak Nasional (BIAN) selama satu bulan di seluruh provinsi di Indonesia. Salah satu strategi yang dilakukan untuk meningkatkan jangkauan imunisasi ini adalah dengan melakukan digitalisasi data imunisasi dimana adanya satu aplikasi pencatatan imunisasi secara digital yaitu Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) yang terintegrasi dengan Aplikasi PeduliLindungi. Dengan adanya hal tersebut, pemerintah berharap bahwa pendataan dapat dilakukan secara efektif dan efisien sehingga jangkauan imunisasi menjadi tepat sasaran.

7.3.3 Persentase Anak Berumur 12-23 Bulan yang Mendapat Imunisasi Lengkap Menurut Provinsi

Persentase anak berumur 12-23 bulan yang sudah mendapatkan imunisasi lengkap berdasarkan provinsi di Indonesia cukup bervariasi (Gambar 7.9). Hasil analisis menunjukkan bahwa Provinsi Bali adalah provinsi dengan persentase tertinggi anak berumur 12-23 bulan yang mendapat imunisasi lengkap dengan persentase sebesar 82,82 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa sebanyak delapan dari sepuluh anak di Provinsi Bali sudah mendapatkan imunisasi lengkap.

Sebaliknya Provinsi Aceh menjadi provinsi dengan tingkat persentase anak beumur 12-23 bulan yang sudah mendapatkan imunisasi lengkap terendah di Indonesia dengan persentase sebesar 22,73 persen. Hal ini berarti hanya dua dari sepuluh anak di Provinsi Aceh yang sudah mendapatkan imunisasi lengkap. Dinas Kesehatan Provinsi Aceh pada tahun 2022 menyebutkan bahwa salah satu faktor utama penyebab sedikitnya anak-anak di Provinsi Aceh yang mendapatkan imunisasi lengkap adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya imunisasi. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh juga menyebutkan bahwa orang tua di Provinsi Aceh masih memiliki ketakutan terutama adanya efek pasca imunisasi seperti demam pada anak yang membuat orang tua menjadi enggan membawa anaknya untuk melakukan imunisasi. Dengan demikian, diperlukan terobosan dan inovasi untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat akan efek samping dari pemberian imunisasi ini. Hal ini penting untuk meningkatkan persentase anak usia 12-23 bulan mendapatkan imunisasi lengkap. Pemberian imunisasi di awal kehidupan adalah hal yang penting dalam menyediakan hak kesehatan dasar bagi anak di seluruh wilayah Indonesia.

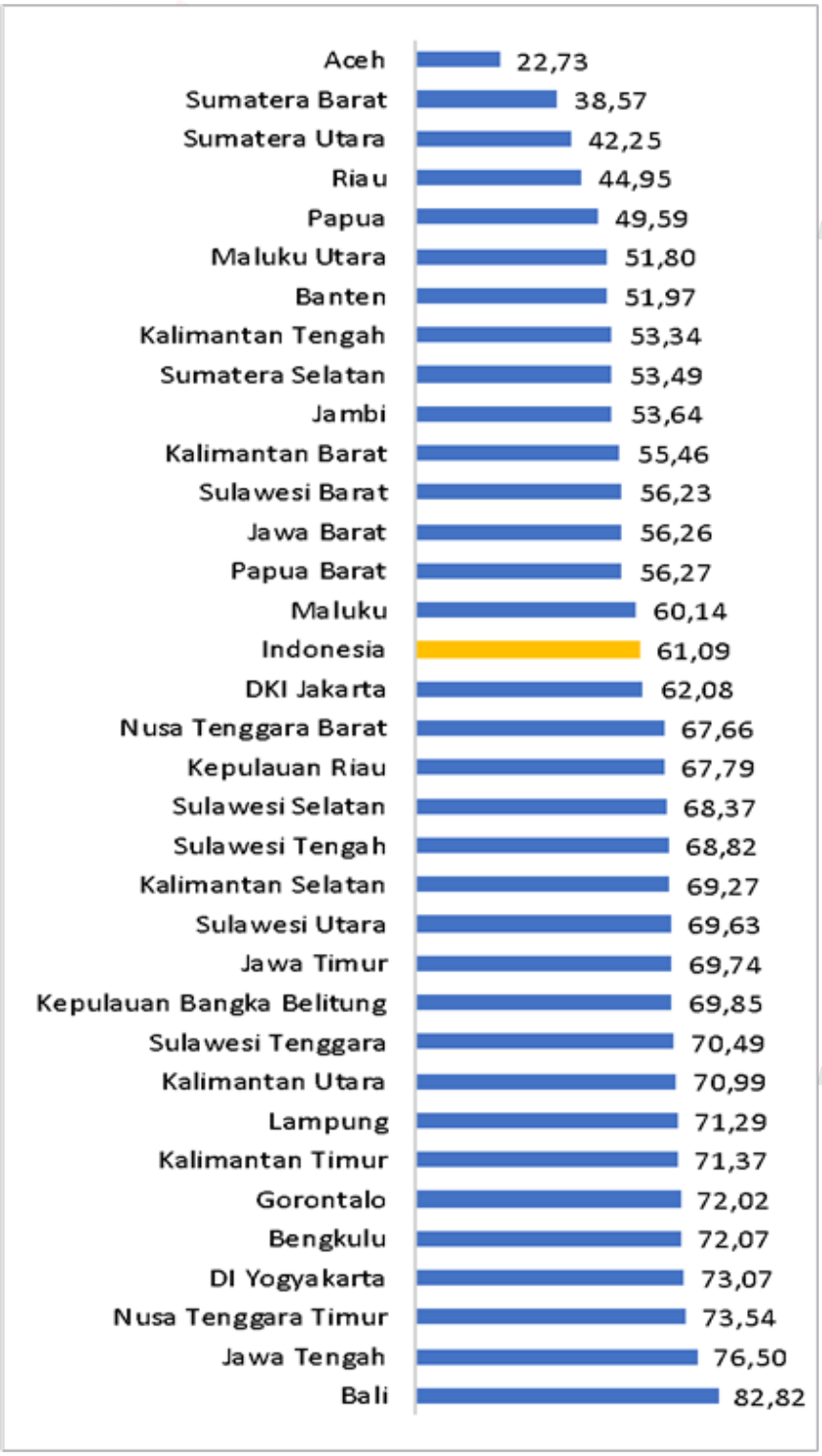

Gambar 7.9 Persentase Anak Berumur 12-23 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap Menurut Provinsi Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

7.4. Keluhan Kesehatan pada Anak

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia bahkan hak dasar seorang anak yang harus dipenuhi dan dijaga dengan baik (UNICEF dan Bappenas, 2017). Hal ini disebabkan karena seorang anak yang memiliki status kesehatan yang baik dapat melakukan kegiatan produktif yang nantinya akan menjadi modal investasi manusia dengan kualitas baik di masa depan. Badan Pusat Statistik (sirusa.bps.go.id, 2022) menjelaskan bahwa keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal-hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari.

7.4.1 Persentase Anak yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin

Persentase anak yang mengalami keluhan kesehatan menurut tipe daerah dan jenis kelamin disajikan pada Gambar 7.10. Hasil analisis berdasarkan data Susenas pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sebanyak 27,79 persen anak laki-laki di daerah perkotaan mengalami keluhan kesehatan. Angka ini sedikit di atas persentase anak perempuan di wilayah perkotaan yang mengalami keluhan kesehatan yakni sebesar 27,20 persen.

Jika dibandingkan dengan jumlah anak yang mengalami keluhan kesehatan di wilayah perdesaan, persentase anak di perkotaan baik laki-laki maupun perempuan lebih tinggi dari persentase anak di perdesaan. Anak laki-laki di perdesaan yang mengalami keluhan kesehatan adalah sebesar 21,02 persen. Sedangkan anak perempuan yang mengalami keluhan kesehatan di perdesaan adalah sebesar 21,29 persen.

Rendahnya angka keluhan kesehatan anak-anak di perdesaan diprediksi akibat lingkungan alam tempat tinggal anak di perdesaan yang relatif lebih sedikit tercemar polusi dibandingkan dengan lingkungan di perkotaan. Hal lainnya adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang masih kurang di beberapa wilayah khususnya perdesaan (Mujiati & Yuniar, 2016). Hal ini menyebabkan banyaknya beban kerja yang diberikan kepada tenaga kesehatan dan mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan.

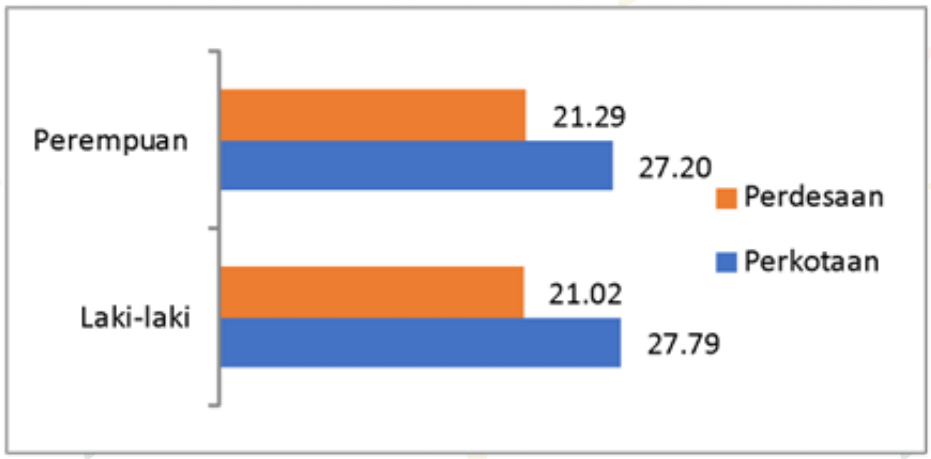

Gambar 7.10 Persentase Anak yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

7.4.2 Persentase Anak yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi

Persentase anak yang mengalami keluhan kesehatan menurut provinsi pada tahun 2021 disajikan pada Gambar 7.11. Hasil analisis menunjukkan bahwa persentase keluhan kesehatan yang dialami oleh anak tertinggi berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 39,41 persen. Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Papua dengan persentase sebesar 12,78 persen.

Salah satu hal yang dapat mempengaruhi persentase anak yang mengalami keluhan kesehatan di Provinsi Papua menjadi yang paling rendah adalah dengan adanya program dokter masuk kampung dan pengobatan gratis bagi orang asli papua (OAP). Berdasarkan publikasi Kajian Peningkatan Pelayanan Kesehatan Berkualitas pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Papua dan Papua Barat (2022), adanya kegiatan dokter masuk kampung ini dilakukan untuk melakukan pelayanan kesehatan secara promotif dan preventif. Kegiatan dokter masuk kampung yang langsung berinteraksi dengan masyarakat bahkan sampai ke wilayah terpencil ini menjadi salah satu kegiatan yang dapat menurunkan keluhan kesehatan masyarakat khususnya pada anak-anak.

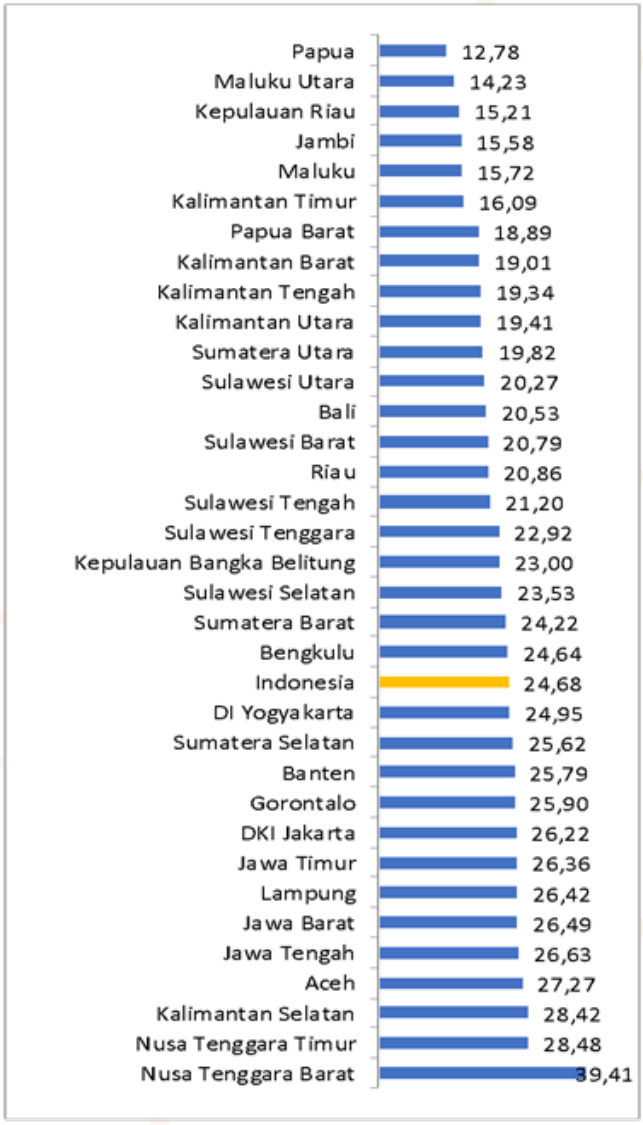

Gambar 7.11 Persentase Anak yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

7.4.3 Persentase Anak yang Sakit (Terganggu Pekerjaan, Sekolah, atau Kegiatan Sehari-Hari) Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin

Persentase anak yang sakit (terganggu pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari) menurut tipe daerah dan jenis kelamin pada tahun 2021 dipresentasikan pada Gambar 7.12. Hasil analisis data Susenas pada tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat 15,17 persen anak laki-laki dan 11,22 persen anak perempuan di daerah perkotaan yang mengalami sakit (terganggu pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari).

Selain itu, persentase anak yang mengalami sakit di daerah

perdesaan pada anak laki-laki (9,84 persen) dan perempuan (9,89 persen) menunjukkan angka yang tidak jauh berbeda dan lebih kecil daripada anak-anak di daerah perkotaan. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan anak laki-laki khususnya di daerah perkotaan mengalami persentase sakit yang lebih tinggi daripada anak-anak yang lainnya adalah karena sistem kekebalan tubuhnya yang lebih rendah.

Penelitian tentang MicroRNA yang dilakukan oleh Ghent University, Belgia menyebutkan bahwa kelebihan kromosom X pada perempuan menjadi alasan sistem kekebalan tubuh pada perempuan lebih besar daripada laki-laki (Sumiyati, 2015). Hal ini disebabkan karena kromosom X pada manusia memiliki kandungan sebesar 10 persen dari seluruh microRNA yang memiliki fungsi penting dalam hal kekebalan. Selain itu, penelitian yang dilakukan Sumiyati (2015) juga menjelaskan bahwa anak laki-laki memiliki risiko yang lebih besar untuk sakit karena memiliki aktivitas yang lebih banyak di lingkungan luar dan lingkungan yang kotor dibandingkan dengan anak perempuan.

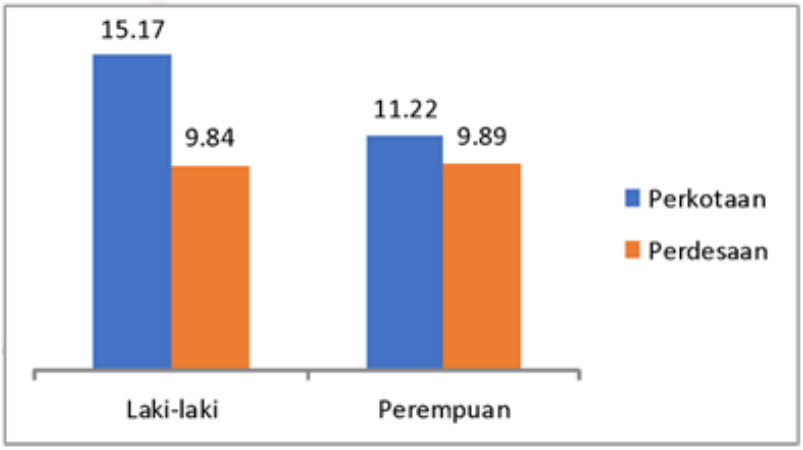

Gambar 7.12 Persentase Anak yang Sakit (Terganggu Pekerjaan, Sekolah, Atau Kegiatan Sehari-Hari) Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

7.4.1 Persentase Anak yang Sakit (Terganggu Pekerjaan, Sekolah, atau Kegiatan Sehari-Hari) Menurut Provinsi

Hasil analisis atas persentase anak yang sakit (terganggu pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari) menurut provinsi disajikan pada Gambar 7.13. Berdasarkan data hasil Susenas pada tahun 2021 yang ditunjukkan oleh Gambar 7.13, Provinsi Nusa

Tenggara Barat merupakan provinsi yang memiliki persentase jumlah anak yang sakit tertinggi yaitu sebanyak 20,74 persen.

Angka ini berbeda dengan persentase anak yang sakit di Provinsi Kepulauan Riau dengan persentase sebesar 4,16 persen dan menjadikan provinsi tersebut sebagai provinsi terendah dalam hal persentase jumlah anak yang sakit. Salah satu hal yang dapat menyebabkan adanya perbedaan ini adalah adanya faktor endogen dan eksogen yang mempengaruhi status kesehatan anak. Penelitian yang dilakukan oleh Cicih (2011), meyebutkan bahwa faktor-faktor eksogen seperti perilaku ibu, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, serta geografi menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan seorang anak. Oleh karena itu, perlu upaya yang lebih komprehensif baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk bersama-sama menurunkan angka kesakitan pada anak, sehingga jumlah anak dengan masalah kesehatan di tingkat nasional maupun daerah dapat diturunkan pada level serendah mungkin.

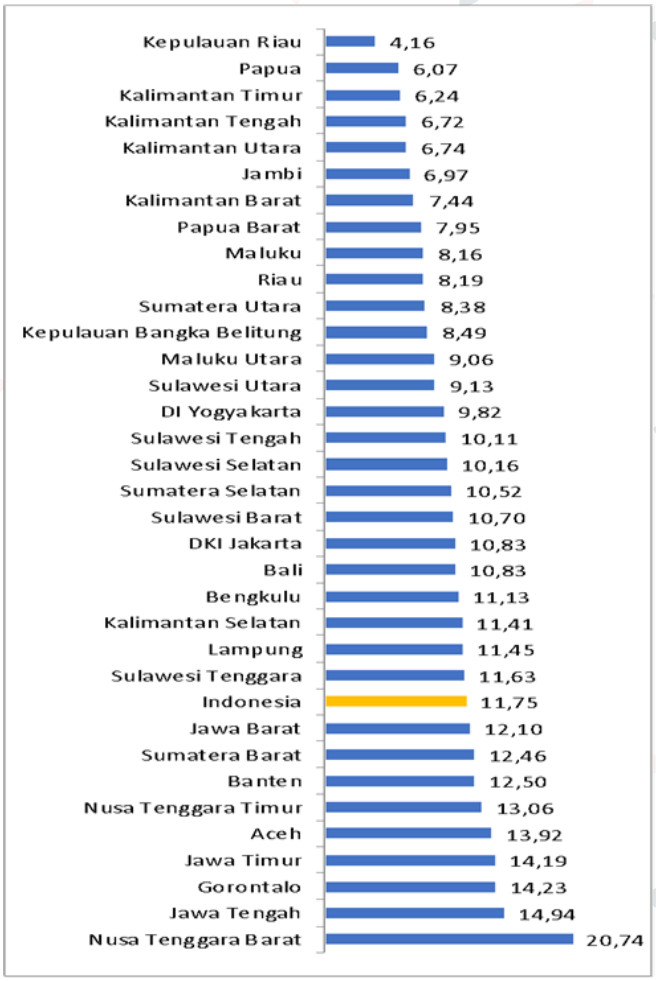

Gambar 7.13 Persentase Anak yang Sakit (Terganggu Pekerjaan, Sekolah, Atau Kegiatan Sehari-Hari) Menurut Provinsi Tahun 2021

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

7.4.5 Persentase Anak yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin

Indikator kesehatan anak selanjutnya adalah persentase anak yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan dalam sebulan terakhir menurut tipe daerah dan jenis kelamin yang disajikan pada Gambar 7.14. Hasil analisis data menunjukkan persentase anak laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan dalam sebulan terakhir di daerah perkotaan adalah sebesar 12,79 persen. Jumlah ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase anak perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan di daerah perkotaan yaitu 10,83 persen.

Kondisi di wilayah perdesaan lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase anak yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan di wilayah perkotaan. Anak laki-laki di daerah perdesaan yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan pada tahun 2021 adalah sebanyak 7,90 persen. Angka ini sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase anak perempuan di daerah perdesaan yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan, yakni sebesar 8,47 persen.

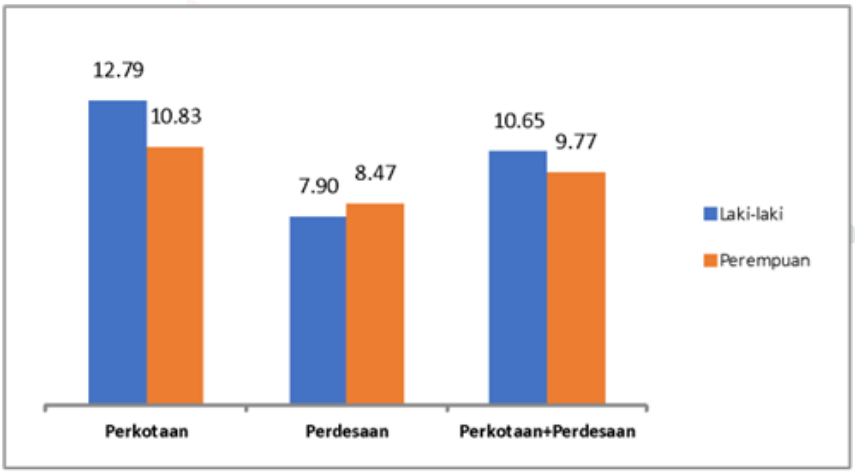

Gambar 7.14 Persentase Anak yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

Salah satu hal yang menyebabkan lebih rendahnya persentase keluhan kesehatan dan berobat jalan pada anak-anak di daerah perdesaan dibandingkan perkotaan adalah adanya tradisi di masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh (Jennifer

& Saptutyningsih, 2016) menunjukkan bahwa masyarakat di daerah perdesaan umumnya masih memiliki kepercayaan yang kuat terhadap obat-obatan tradisional dan memilih melakukan pengobatan sendiri dibandingkan memanfaatkan layanan kesehatan di daerah tempat tinggalnya. Hal ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan upaya sosialisasi atas pentingnya mengakses layanan medis bagi kesehatan anak. Upaya ini khususnya harus diberikan kepada masyarakat di wilayah perdesaan sehingga masyarakat dapat mendapatkan pemahaman komprehensif mengapa mereka tidak cukup mengantarkan anak mereka yang sedang sakit pada pengobatan tradisional.

7.4.6 Persentase Anak yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi

Hasil analisis atas persentase anak yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan dalam sebulan terakhir menurut provinsi pada tahun 2021 dipresentasikan pada Gambar 7.15. Sama halnya dengan persentase anak yang sakit (terganggu pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari) menurut provinsi, Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan persentase anak yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat berjalan tertinggi dalam sebulan terakhir menurut provinsi.

Hal ini dapat dilihat pada Gambar 7.15 yang menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki jumlah persentase 17,42 persen dan Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi dengan persentase terendah yaitu sebesar 4,47 persen. Rendahnya persentase anak yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan di Provinsi Kepulauan Riau dapat diartikan bahwa anak-anak di provinsi tersebut memiliki kualitas kesehatan yang baik. Kualitas kesehatan anak-anak di provinsi Kepulauan Riau yang baik ini tentunya merupakan hasil kerja keras pemerintah daerah untuk selalu menjaga kualitas kesehatan anak-anak di provinsi tersebut. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kepulauan Riau yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kepulauan Riau tahun 2021-2026. Pemerintah Kepulauan Riau memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan aspek kesehatan masyarakatnya dengan rencana program yang menyasar pada kesehatan individu dan masyarakat serta didukung dengan digalakkannya pembudayaan perilaku hidup sehat.

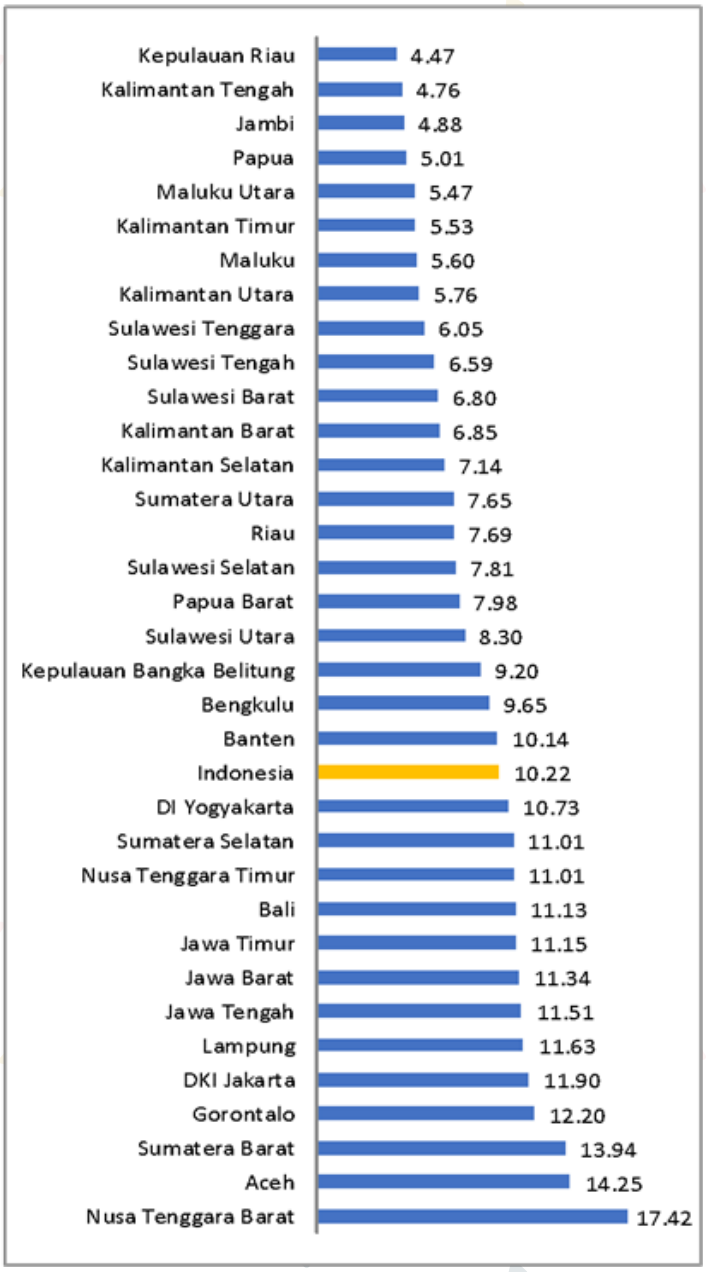

Gambar 7.15 Persentase Anak yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

7.4.7 Persentase Anak yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Berdasarkan Tempat Rawat Inap

Hasil analisis atas persentase anak yang pernah dirawat inap dalam setahun terakhir berdasarkan tempat rawat inap di sajikan pada Gambar 7.16. Berdasarkan hasil analisis data Susenas pada tahun 2021, tempat rawat inap dikelompokkan menjadi tujuh kelompok yaitu rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, praktik dokter/bidan, klinik/praktik dokter bersama, puskesmas/

pustu, pengobatan tradisional/alternatif, dan tempat lainnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rumah sakit swasta memiliki persentase tertinggi sebagai tempat anak dirawat dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Kemudian diikuti oleh rumah sakit pemerintah, puskesmas/pustu, klinik/praktik dokter bersama, praktik dokter/bidan, tempat lainnya, dan yang terakhir adalah pengobatan tradisional/alternatif. Hal ini mengindikasikan bahwa RS swasta adalah tempat rawat inap yang menjadi preferensi masyarakat. Kondisi ini cukup beralasan mengingat RS swasta pada umumnya menyediakan perawatan dan pelayanan yang lebih berkualitas dibandingkan dengan RS negeri dan tempat rawat inap lainnya (Fitria & Shaluhiyah, 2016).

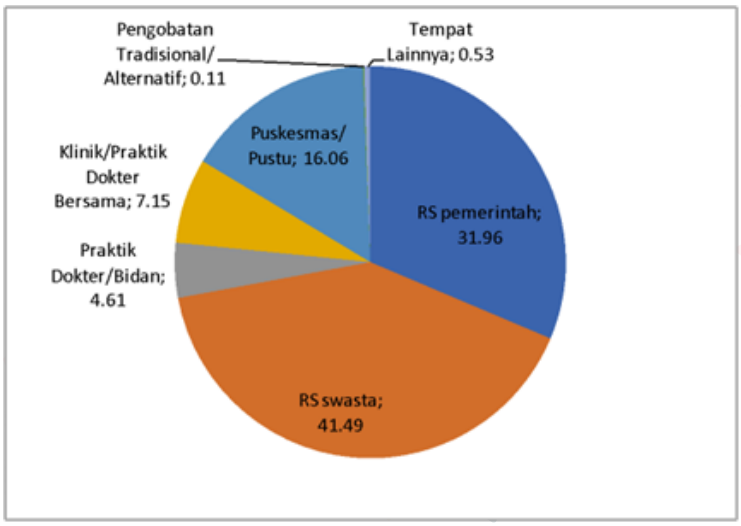

Gambar 7.16 Persentase Anak yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Berdasarkan Tempat Rawat Inap Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

7.5. Anak yang Merokok

Kasus merokok pada anak menjadi permasalahan yang harus menjadi perhatian bagi seluruh pihak. Hal ini didasarkan oleh laporan Department of Health and Human Services Amerika Serikat (2000) yang menyatakan bahwa merokok pada anak akan membawa dampak yang kompleks terutama dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Laporan tersebut menyebutkan bahwa anak yang merokok akan mengalami permasalahan pada sistem organ vitalnya seperti jantung, paru-paru, syaraf sensorik dan motorik, serta kecerdasan. Selain dampak fisik, merokok pada anak baik secara pasif maupun aktif juga dapat mengakibatkan dampak

psikis seperti rasa cemas, perilaku asertif, dan agresif (khusus pada perokok aktif).

7.5.1 Tren Persentase Anak Umur 5-17 Tahun yang Merokok Tiga Tahun Terakhir

Tren persentase anak umur 5-17 tahun yang merokok tiga tahun terakhir disajikan pada Gambar 7.17. Hasil analisis data Survei sosial ekonomi nasional (Susenas) selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya fluktuasi pada persentase anak umur 5-17 tahun yang merokok. Pada tahun 2019, sebanyak 1,55 persen anak umur 5-17 tahun merokok dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 0,03 persen. Selanjutnya persentase tersebut mengalami penurunan dari 1,58 persen pada tahun 2020 menjadi 1,51 persen pada tahun 2021.

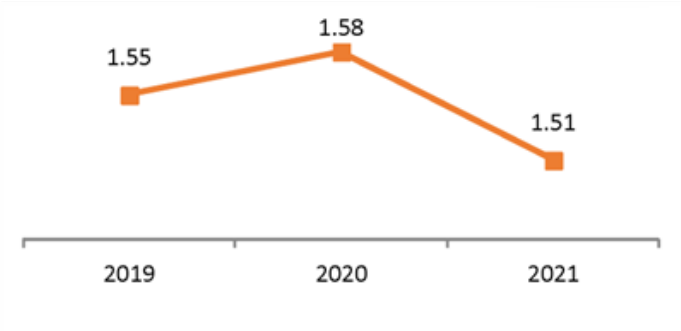

Gambar 7.17 Tren Persentase Anak Umur 5-17 Tahun yang Merokok pada Tahun 2019-2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019-2021, BPS

Penelitian yang dilakukan oleh Green dan Kreuter (2005) dalam Lestary (2007) menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perilaku berisiko dan menjadi penyebab seorang anak merokok. Faktor yang pertama adalah faktor yang melekat atau memotivasi. Faktor ini berasal dari dalam diri anak tersebut seperti pengetahuan, keyakinan, nilai, sikap, kepercayaan, jenis kelamin, dan pendidikan. Selanjutnya adalah faktor pemungkin yang mendorong perilaku merokok pada anak. Faktor ini terdiri dari akses dan jangkauan sumber daya, tempat tinggal, status ekonomi, dan akses terhadap media informasi. Faktor yang ketiga adalah faktor penguat atau faktor yang dapat memperkuat perilaku merokok pada anak. Faktor ini ditentukan oleh lingkungan anak meliputi keluarga, teman sebaya, guru, dan lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Mirnawati et al. (2018) menunjukkan bahwa perilaku merokok pada anak dapat disebabkan oleh pengaruh yang didapat dari teman sebaya. Selain itu, penelitian tersebut juga menyatakan bahwa semakin muda usia seorang anak dalam mulai merokok, maka semakin tinggi kebiasaan merokok dan semakin sulit untuk berhenti merokok. Adapun penurunan pada persentase anak yang merokok di tahun 2021 dapat dilihat dari adanya pandemi COVID-19. Pernyataan Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa kebiasaan merokok dapat meningkatkan risiko serta kerentanan terjangkit virus COVID-19 dapat menjadi salah satu penyebab menurunnya persentase anak yang merokok. Meskipun tren anak merokok cenderung menurun secara nasional, angka ini masih perlu ditingkatkan hingga mencapai target nasional nol persen.

7.5.2 Persentase Anak Umur 5-17 yang Merokok Menurut Jumlah Batang Rokok yang Dihisap Per Minggu

Data hasil Susenas tahun 2021 memberikan gambaran mengenai kondisi anak dengan umur 5-17 tahun yang merokok berdasarkan jumlah batang rokok yang dihisap per minggu dan disajikan pada Gambar 7.18. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebanyak 34,88 persen anak menghisap lebih dari 60 batang rokok per minggu, diikuti dengan 29,64 persen yang menghisap 30-59 batang per minggu. Sementara itu, sebanyak 18,84 persen anak menghisap sebanyak 15-29 batang per minggu dan sebanyak 13,23 persen anak menghisap 7-14 batang per minggu. Sisanya sebesar 3,40 persen anak menghisap 1-6 batang dalam kurun waktu seminggu.

Angka ini menunjukkan bahwa anak yang merokok secara intensif setiap minggunya masih sangat tinggi. Padahal berdasarkan hasil penelitian bahwa aktivitas merokok yang intensif dapat mengakibatkan kerusakan paru-paru, jantung, penggumpalan darah, depresi, rasa cemas berlebihan, rusaknya sistem reproduksi, dan menopause dini pada perempuan (Hasanah, 2014). Oleh karena itu, perlu peran tegas dari berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara untuk berperan aktif menanggulangi permasalahan ini. Persentase anak yang merokok harus ditekan pada level minimal untuk menyediakan hak kesehatan dasar anak terbebas dari segala penyakit yang diakibatkan oleh rokok.

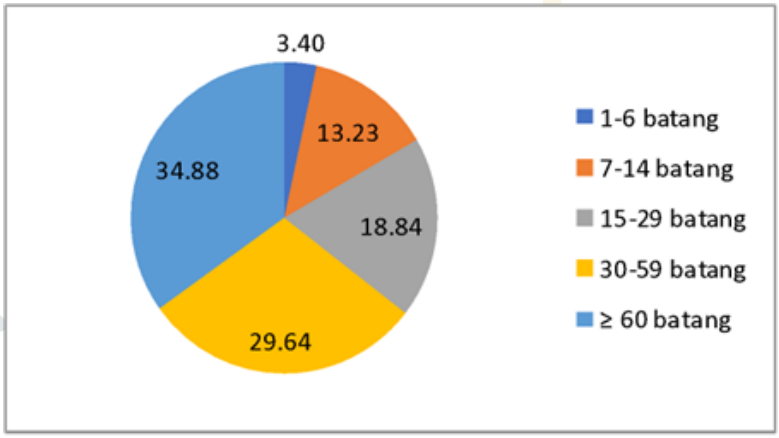

Gambar 7.18 Persentase Anak Umur 5-17 yang Merokok Menurut Jumlah Batang Rokok yang Dihisap Per Minggu Pada Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019-2021, BPS

7.6. Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan didefinisikan sebagai sebuah program jaminan sosial di Indonesia yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip-prinsip asuransi sosial dan ekuitas yang bertujuan agar setiap peserta mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan kebutuhan dasar kesehatannya (Dewan Jaminan Sosial Nasional-DJSN, 2021). Adapun prinsip asuransi sosial terdiri atas kegotongroyongan, kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif, iuran berdasarkan persentase penghasilan/upah, dan memiliki sifat nirlaba. Sementara prinsip ekuitas merupakan kesamaan dalam mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan medis peserta dan tidak berkaitan dengan besaran iuran yang dibayarkannya.

7.6.1 Persentase Anak yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki

Hasil analisis data Susenas 2021 yang ditunjukkan oleh Gambar 7.19 menunjukkan bahwa persentase anak yang memiliki jaminan kesehatan menurut jenis jaminan kesehatan tertinggi adalah BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar 53,27 persen. Sementara itu, persentase terendah adalah asuransi swasta, yaitu sebesar 1,19 persen. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat sebagian besar telah memanfaatkan jaminan kesehatan BPJS. Partisipasi aktif masyarakat dalam keikutsertaan dalam jaminan kesehatan ini hendaknya diikuti dengan pelayanan kesehatan yang mumpuni dari pemerintah. Sehingga harapannya layanan

kesehatan bagi masyarakat Indonesia, khususnya anak dapat disediakan dengan seoptimal mungkin.

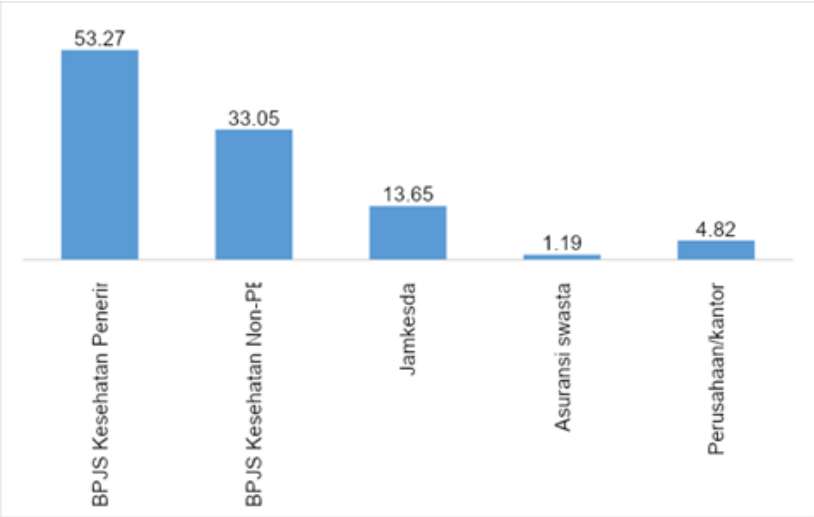

Gambar 7.19 Persentase Anak yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Tipe Daerah dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki Pada Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019-2021, BPS

7.6.2 Persentase Anak yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi

Persentase anak yang memiliki jaminan kesehatan menurut provinsi pada tahun 2021 disajikan pada Gambar 7.20. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada persentase kepemilikan jaminan kesehatan pada anak di Provinsi Aceh dan Jambi. Berdasarkan hasil data Susenas tahun 2021, Provinsi Aceh menempati posisi tertinggi sebagai provinsi dengan kepemilikan jaminan kesehatan anak dengan persentase sebesar 93,21 persen. Sementara itu Provinsi Jambi menempati posisi terendah dengan persentase sebesar 46,06 persen. Adanya perbedaan persentase sebesar 47,15 persen atau hampir 50 persen ini dapat diartikan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan khususnya pada anak di Indonesia belum merata. Dengan demikian, perlu peran pemerintah baik di level nasional maupun daerah untuk berupaya memaksimalkan layanan jaminan kesehatan bagi anak Indonesia di seluruh wilayah Indonesia sehingga ketidakmerataan jaminan kesehatan dapat diminimalisasi dan pemenuhan hak kesehatan anak dapat terlaksana dengan baik.

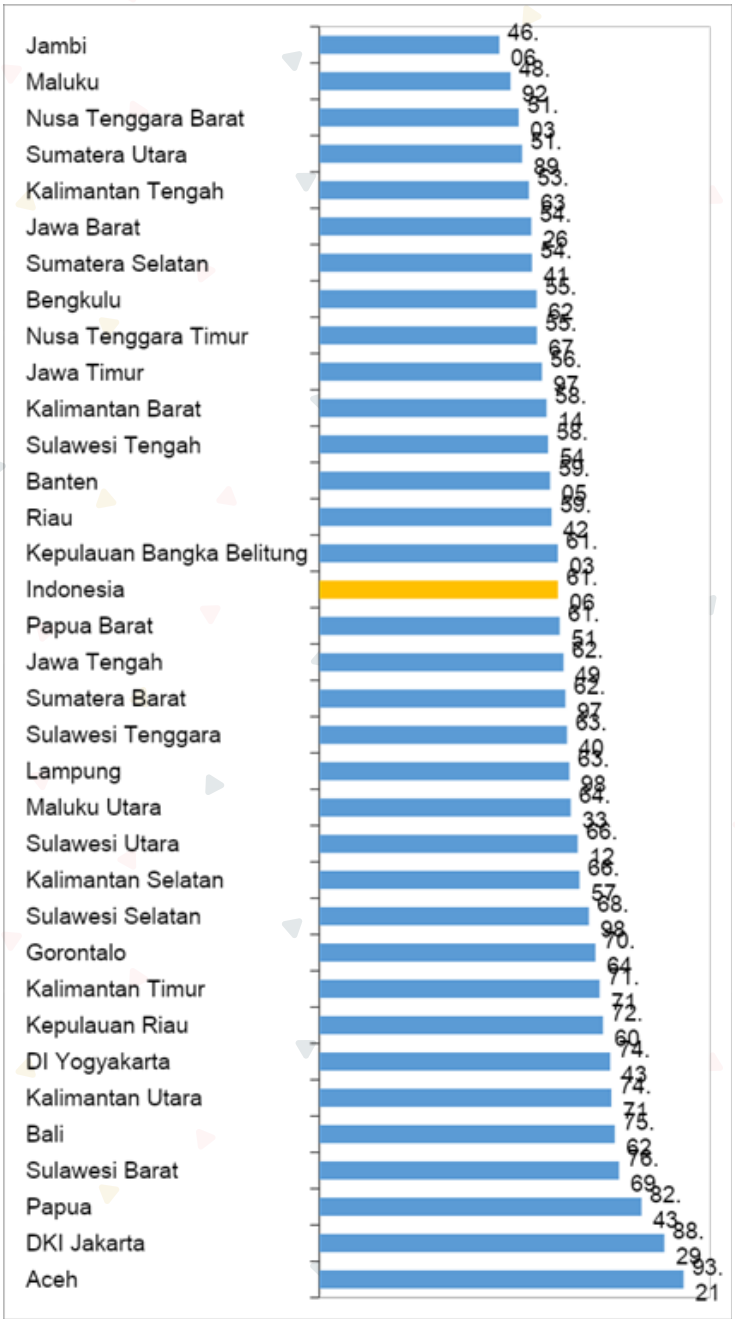

Gambar 7.20 Persentase Anak yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi pada Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019-2021, BPS

7.6.3 Persentase Anak yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Menurut Tipe Daerah dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan

Persentase anak yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan menurut tipe daerah dan jenis jaminan kesehatan yang digunakan pada tahun 2021 disajikan pada Gambar 7.21. Hasil analisis data Susenas tahun 2021 yang menunjukkan bahwa sebanyak 54,13 persen anak di perkotaan dan 76,77 persen anak

di perdesaan mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan tidak menggunakan jaminan kesehatan. Hal ini dapat diartikan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan saja tidak menjamin dapat dimanfaatkan secara maksimal selama anak-anak tersebut berobat. Untuk itu, evaluasi serta sosialisasi dan jaminan dari pemerintah harus digalakkan dan dilakukan secara menyeluruh baik kepada masyarakat maupun kepada pihak penyedia layanan kesehatan.

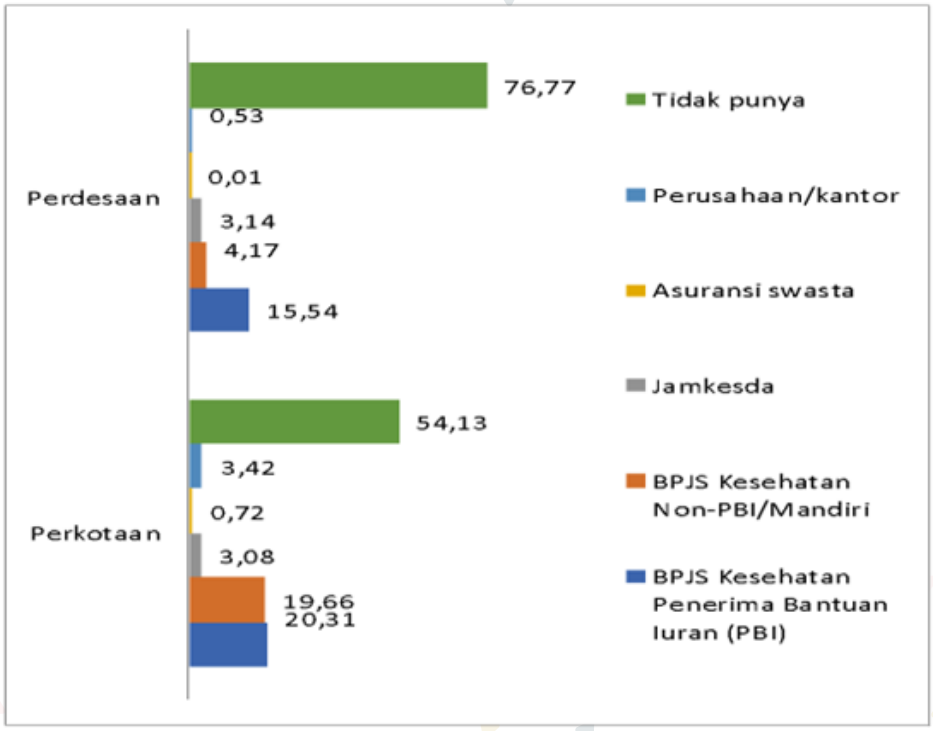

Gambar 7.21 Persentase Anak yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Menurut Tipe Daerah dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan pada Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019-2021, BPS

7.6.4 Persentase Anak yang Pernah Dirawat Inap dalam Satu Tahun Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan

Sama halnya dengan persentase anak berobat jalan yang menggunakan jaminan kesehatan berdasarkan tipe daerah, persentase anak yang dirawat inap dalam satu tahun terakhir dengan menggunakan jaminan kesehatan berdasar tipe daerah juga rendah. Hal ini sesuai dengan hasil Susenas 2021 terkait persentase anak yang pernah dirawat inap dalam satu tahun terakhir menurut tipe daerah dan jenis jaminan kesehatan yang digunakan (Gambar 7.22). Hasil analisis menunjukkan bahwa sebanyak 35,74 persen anak di perkotaan dan 49,00 persen anak di perdesaan dirawat

inap tanpa menggunakan jaminan kesehatan. Namun hal ini lebih baik dibandingkan dengan persentase anak yang berobat jalan. Selain itu, penggunaan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan PBI dan Non-PBI bagi anak yang dirawat inap juga lebih baik dengan persentase sebesar 23,41 persen PBI dan 31,98 persen Non-PBI di daerah perkotaan serta 32,32 persen PBI dan 13,72 persen NON-PBI di daerah perdesaan. Meskipun secara kepemilikan jaminan kesehatan sudah cukup baik secara nasional, kondisi ini tidak sejalan dengan banyaknya anak yang dirawat inap dan menggunakan jaminan kesehatan. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat adalah hal yang mutlak dalam menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas, sehat fisik maupun psikologis. Ketika masyarakat belum mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai, hal ini berarti upaya pemerintah untuk menjamin kehidupan yang layak bagi setiap warga negara masih belum berhasil.

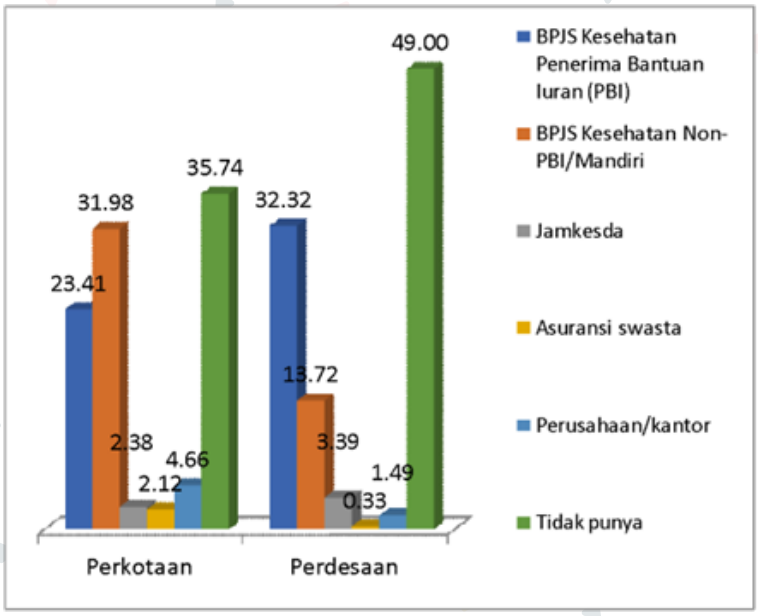

Gambar 7.22 Persentase Anak yang Pernah Dirawat Inap dalam Satu Tahun Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan pada Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019-2021, BPS

Lampiran 7.1

Persentase Baduta (Bayi 0-23 bulan) yang pernah diberi Air Susu Ibu menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
Aceh	94,09	94,72	94,38	93,60	94,42	94,00	93,77	94,52	94,13
Sumatera Utara	89,07	89,75	89,40	92,87	94,54	93,65	90,80	91,86	91,31
Sumatera Barat	97,65	99,77	98,78	96,58	96,88	96,74	97,11	98,33	97,75
Riau	93,49	96,11	94,74	95,65	95,62	95,63	94,77	95,81	95,28
Jambi	94,63	96,91	95,77	97,84	95,68	96,76	96,77	96,09	96,43
Sumatera Selatan	93,10	90,23	91,79	95,85	93,50	94,75	94,82	92,31	93,66
Bengkulu	95,86	99,01	97,38	94,89	96,73	95,83	95,22	97,47	96,35
Lampung	97,18	97,13	97,16	95,27	96,33	95,79	95,90	96,58	96,23
Kepulauan Bangka Belitung	94,70	92,83	93,76	94,24	93,12	93,69	94,51	92,95	93,73
Kepulauan Riau	94,25	89,97	92,22	85,55	90,29	88,14	93,69	89,99	91,92
DKI Jakarta	96,70	97,57	97,15				96,70	97,57	97,15
Jawa Barat	93,07	95,14	94,08	93,33	95,76	94,61	93,12	95,28	94,19
Jawa Tengah	97,44	96,67	97,07	96,74	98,24	97,48	97,10	97,44	97,27
DI Yogyakarta	95,95	99,56	97,86	94,32	100,00	97,21	95,52	99,67	97,70
Jawa Timur	93,33	92,97	93,16	93,74	96,37	95,07	93,51	94,56	94,03
Banten	94,34	93,82	94,07	93,32	95,99	94,78	94,05	94,49	94,28
Bali	96,24	93,42	94,80	94,04	96,97	95,49	95,63	94,36	94,99
Nusa Tenggara Barat	99,11	94,50	96,81	96,88	98,81	97,83	97,94	96,74	97,34
Nusa Tenggara Timur	96,38	97,19	96,81	96,73	97,17	96,94	96,66	97,17	96,91
Kalimantan Barat	87,11	92,76	89,77	98,13	96,76	97,45	93,94	95,33	94,61
Kalimantan Tengah	91,65	94,19	92,90	91,99	93,25	92,63	91,85	93,63	92,74
Kalimantan Selatan	94,55	95,87	95,14	98,04	96,92	97,47	96,31	96,46	96,38
Kalimantan Timur	95,44	93,07	94,28	93,05	97,98	95,38	94,64	94,64	94,64
Kalimantan Utara	97,93	93,35	95,76	89,50	90,27	89,88	94,88	92,19	93,59
Sulawesi Utara	82,91	93,04	88,08	87,87	89,60	88,64	85,40	91,53	88,34
Sulawesi Tengah	87,60	93,13	90,29	91,07	93,03	92,06	89,95	93,06	91,51
Sulawesi Selatan	86,16	95,29	90,53	93,28	93,19	93,23	90,06	94,11	92,03
Sulawesi Tenggara	90,26	93,11	91,69	95,60	93,00	94,27	93,73	93,04	93,38
Gorontalo	87,71	90,57	88,99	94,90	92,77	93,84	91,54	91,86	91,69
Sulawesi Barat	99,00	95,37	97,19	96,83	95,25	96,09	97,27	95,28	96,32
Maluku	89,64	86,45	88,09	94,46	94,43	94,45	92,52	91,40	91,96
Maluku Utara	90,70	93,54	91,94	95,06	94,19	94,62	93,73	94,03	93,88
Papua Barat	89,32	90,22	89,79	92,60	89,01	90,77	91,18	89,54	90,34
Papua	82,55	89,68	85,87	93,00	93,60	93,29	88,95	92,12	90,44
Indonesia	**93,67**	**94,62**	**94,14**	**94,80**	**95,81**	**95,30**	**94,16**	**95,14**	**94,65**

Catatan: L (Laki-Laki), P (Perempuan), L+P (Laki-Laki + Perempuan)

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 7.2

Persentase Baduta (0-23 Bulan) yang Pernah Diberi ASI menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan), 2021

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	<6	6-23	Total	<6	6-23	Total	<6	6-23	Total
Aceh	26,82	73,18	100,00	26,01	73,99	100,00	26,28	73,72	100,00
Sumatera Utara	28,72	71,28	100,00	28,12	71,88	100,00	28,45	71,55	100,00
Sumatera Barat	22,16	77,84	100,00	26,45	73,55	100,00	24,29	75,71	100,00
Riau	22,05	77,95	100,00	25,83	74,17	100,00	24,34	75,66	100,00
Jambi	23,41	76,59	100,00	23,21	76,79	100,00	23,28	76,72	100,00
Sumatera Selatan	26,23	73,77	100,00	25,79	74,21	100,00	25,95	74,05	100,00
Bengkulu	23,68	76,32	100,00	23,60	76,40	100,00	23,62	76,38	100,00
Lampung	21,71	78,29	100,00	21,33	78,67	100,00	21,45	78,55	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	28,98	71,02	100,00	24,84	75,16	100,00	27,26	72,74	100,00
Kepulauan Riau	25,76	74,24	100,00	28,78	71,22	100,00	25,97	74,03	100,00
DKI Jakarta	27,84	72,16	100,00				27,84	72,16	100,00
Jawa Barat	24,83	75,17	100,00	23,96	76,04	100,00	24,65	75,35	100,00
Jawa Tengah	26,39	73,61	100,00	25,86	74,14	100,00	26,13	73,87	100,00
DI Yogyakarta	19,19	80,81	100,00	24,76	75,24	100,00	20,59	79,41	100,00
Jawa Timur	29,68	70,32	100,00	24,54	75,46	100,00	27,32	72,68	100,00
Banten	25,88	74,12	100,00	27,30	72,70	100,00	26,31	73,69	100,00
Bali	26,53	73,47	100,00	28,40	71,60	100,00	27,04	72,96	100,00
Nusa Tenggara Barat	26,82	73,18	100,00	23,09	76,91	100,00	24,86	75,14	100,00
Nusa Tenggara Timur	32,95	67,05	100,00	22,28	77,72	100,00	24,61	75,39	100,00
Kalimantan Barat	33,88	66,12	100,00	27,67	72,33	100,00	29,85	70,15	100,00
Kalimantan Tengah	22,88	77,12	100,00	26,35	73,65	100,00	24,90	75,10	100,00
Kalimantan Selatan	30,87	69,13	100,00	29,13	70,87	100,00	29,93	70,07	100,00
Kalimantan Timur	23,55	76,45	100,00	31,97	68,03	100,00	26,33	73,67	100,00
Kalimantan Utara	25,49	74,51	100,00	27,72	72,28	100,00	26,28	73,72	100,00
Sulawesi Utara	28,27	71,73	100,00	31,31	68,69	100,00	29,71	70,29	100,00
Sulawesi Tengah	27,27	72,73	100,00	26,49	73,51	100,00	26,73	73,27	100,00
Sulawesi Selatan	26,42	73,58	100,00	25,86	74,14	100,00	26,11	73,89	100,00
Sulawesi Tenggara	27,45	72,55	100,00	25,32	74,68	100,00	26,04	73,96	100,00
Gorontalo	33,05	66,95	100,00	28,32	71,68	100,00	30,35	69,65	100,00
Sulawesi Barat	27,17	72,83	100,00	29,50	70,50	100,00	29,00	71,00	100,00
Maluku	32,16	67,84	100,00	27,24	72,76	100,00	29,08	70,92	100,00
Maluku Utara	28,77	71,23	100,00	28,29	71,71	100,00	28,42	71,58	100,00
Papua Barat	22,32	77,68	100,00	21,69	78,31	100,00	21,96	78,04	100,00
Papua	24,52	75,48	100,00	19,62	80,38	100,00	21,40	78,60	100,00
Indonesia	**26,39**	**73,61**	**26,39**	**25,41**	**74,59**	**100,00**	**25,96**	**74,04**	**100,00**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 7.3

Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan Asi Eksklusif menurut Provinsi, tipe daerah dan jenis kelamin, 2021

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
Aceh	66,47	78,46	72,70	62,17	64,85	63,53	63,61	69,58	66,66
Sumatera Utara	53,63	50,81	52,31	60,66	69,89	64,90	56,73	59,09	57,83
Sumatera Barat	60,95	79,55	70,60	77,53	76,54	77,05	70,38	77,94	74,16
Riau	57,53	68,40	62,20	78,83	71,01	74,65	70,36	70,22	70,29
Jambi	74,42	63,54	68,86	72,70	72,77	72,74	73,33	69,61	71,37
Sumatera Selatan	74,06	58,09	64,96	75,34	69,33	72,97	74,96	64,07	69,93
Bengkulu	50,04	62,22	56,47	77,17	67,81	72,83	68,41	65,68	67,08
Lampung	68,77	75,56	72,64	79,21	72,93	76,06	76,10	73,87	74,93
Kepulauan Bangka Belitung	54,20	48,90	51,47	74,52	85,57	81,29	60,97	64,53	62,94
Kepulauan Riau	61,62	61,48	61,55	37,94	32,55	35,68	58,93	58,74	58,84
DKI Jakarta	55,49	77,54	65,63				55,49	77,54	65,63
Jawa Barat	69,17	84,93	77,00	70,96	77,42	74,41	69,53	83,26	76,46
Jawa Tengah	73,30	78,80	75,73	83,23	81,01	82,17	78,07	79,94	78,93
DI Yogyakarta	79,53	64,89	72,87	85,94	84,70	85,14	81,12	73,20	77,00
Jawa Timur	67,89	67,15	67,55	66,74	78,40	72,48	67,43	72,03	69,61
Banten	67,60	71,93	69,69	68,32	78,40	73,71	67,85	74,46	71,17
Bali	72,73	61,37	67,20	68,10	76,27	71,55	71,22	65,42	68,51
Nusa Tenggara Barat	78,52	85,75	82,25	80,95	80,14	80,55	79,67	83,18	81,46
Nusa Tenggara Timur	65,96	75,88	71,74	85,41	82,69	84,20	81,63	80,70	81,18
Kalimantan Barat	64,49	75,85	69,58	69,94	74,62	72,19	67,81	75,07	71,21
Kalimantan Tengah	42,71	58,27	49,18	59,73	59,41	59,59	53,73	59,02	55,98
Kalimantan Selatan	60,01	45,71	54,63	65,80	65,40	65,63	62,88	56,32	60,27
Kalimantan Timur	81,83	86,55	84,21	59,58	73,06	64,83	71,11	81,58	75,87
Kalimantan Utara	91,12	78,62	83,71	71,41	82,13	76,96	82,39	79,92	81,00
Sulawesi Utara	58,90	55,48	57,17	58,47	70,46	64,05	58,64	63,70	61,09
Sulawesi Tengah	45,46	62,61	55,37	65,87	74,91	70,43	60,43	70,87	65,93
Sulawesi Selatan	67,77	70,76	69,38	81,94	81,98	81,96	75,96	76,87	76,43
Sulawesi Tenggara	45,65	61,88	53,70	66,00	68,76	67,39	58,76	66,34	62,54
Gorontalo	49,65	35,74	42,68	56,73	63,35	60,54	53,35	52,25	52,75
Sulawesi Barat	78,19	84,74	79,65	74,08	73,05	73,61	75,12	74,23	74,75
Maluku	48,83	54,00	51,65	72,08	62,63	67,52	63,70	59,00	61,32
Maluku Utara	65,28	46,07	56,33	68,65	70,44	69,57	67,68	64,34	66,00
Papua Barat	57,57	42,72	49,68	52,61	78,51	67,27	55,10	61,79	58,77
Papua	63,84	63,15	63,46	82,78	81,58	82,22	75,42	72,77	74,08
Indonesia	**66,32**	**73,20**	**69,64**	**72,76**	**75,42**	**74,05**	**69,13**	**74,18**	**71,58**

Catatan: L (Laki-Laki), P (Perempuan), L+P (Laki-Laki + Perempuan)

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 7.4

Sampling error Persentase Penduduk Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan Asi Eksklusif di Perkotaan menurut Provinsi dan jenis kelamin, 2021

Provinsi	Perkotaan				
	Laki-Laki				
	estimasi	standar error	Relative standard error	selang kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	66,47	7,42	11,16	50,80	79,19
Sumatera Utara	53,63	5,67	10,57	42,52	64,39
Sumatera Barat	60,95	8,83	14,49	43,00	76,36
Riau	57,53	9,22	16,03	39,27	73,95
Jambi	74,42	9,59	12,88	52,02	88,65
Sumatera Selatan	74,06	7,27	9,81	57,63	85,70
Bengkulu	50,04	13,96	27,89	25,11	74,94
Lampung	68,77	12,80	18,61	40,65	87,62
Kepulauan Bangka Belitung	54,20	10,67	19,69	33,76	73,32
Kepulauan Riau	61,62	12,32	19,99	36,65	81,67
DKI Jakarta	55,49	7,24	13,04	41,25	68,89
Jawa Barat	69,17	4,07	5,88	60,69	76,54
Jawa Tengah	73,30	3,66	5,00	65,54	79,85
DI Yogyakarta	79,53	11,84	14,89	48,30	94,17
Jawa Timur	67,89	4,07	5,99	59,45	75,30
Banten	67,60	7,27	10,76	52,11	80,00
Bali	72,73	8,29	11,39	54,05	85,81
Nusa Tenggara Barat	78,52	6,65	8,47	62,80	88,78
Nusa Tenggara Timur	65,96	11,05	16,76	42,47	83,57
Kalimantan Barat	64,49	8,07	12,51	47,66	78,37
Kalimantan Tengah	42,71	11,07	25,92	23,50	64,41
Kalimantan Selatan	60,01	7,94	13,24	43,96	74,17
Kalimantan Timur	81,83	6,13	7,49	66,75	90,99
Kalimantan Utara	91,12	5,16	5,66	74,62	97,28
Sulawesi Utara	58,90	10,00	16,98	38,94	76,31
Sulawesi Tengah	45,46	12,42	27,32	23,79	69,00
Sulawesi Selatan	67,77	7,65	11,28	51,43	80,68
Sulawesi Tenggara	45,65	10,48	22,95	26,85	65,78
Gorontalo	49,65	13,90	27,99	24,91	74,57
Sulawesi Barat	78,19	13,95	17,84	41,91	94,69
Maluku	48,83	10,28	21,06	29,87	68,13
Maluku Utara	65,28	12,04	18,44	39,90	84,19
Papua Barat	57,57	12,13	21,07	33,89	78,22
Papua	63,84	10,58	16,58	41,83	81,26
Indonesia	**66,32**	**1,60**	**2,41**	**63,13**	**69,37**

Sumber: Susenas MSBP, 2021

Lampiran 7.4 (Lanjutan)

Sampling error Persentase Penduduk Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan Asi Eksklusif di Perkotaan menurut Provinsi dan jenis kelamin, 2021

Provinsi	Perkotaan				
	Perempuan				
	estimasi	standar error	Relative standard error	selang kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	78,46	5,62	7,16	65,50	87,48
Sumatera Utara	50,81	6,03	11,87	39,16	62,37
Sumatera Barat	79,55	7,47	9,39	61,26	90,53
Riau	68,40	9,00	13,16	48,89	83,04
Jambi	63,54	11,30	17,79	40,11	81,93
Sumatera Selatan	58,09	8,55	14,71	41,06	73,39
Bengkulu	62,22	11,53	18,53	38,65	81,16
Lampung	75,56	10,35	13,69	50,77	90,27
Kepulauan Bangka Belitung	48,90	10,55	21,57	29,49	68,64
Kepulauan Riau	61,48	13,64	22,18	34,05	83,15
DKI Jakarta	77,54	5,76	7,43	64,35	86,84
Jawa Barat	84,93	2,92	3,44	78,26	89,81
Jawa Tengah	78,80	3,82	4,85	70,35	85,33
DI Yogyakarta	64,89	15,70	24,19	32,38	87,70
Jawa Timur	67,15	4,29	6,39	58,27	74,96
Banten	71,93	7,85	10,91	54,47	84,59
Bali	61,37	9,32	15,19	42,37	77,44
Nusa Tenggara Barat	85,75	5,75	6,70	70,53	93,80
Nusa Tenggara Timur	75,88	8,76	11,55	55,17	88,94
Kalimantan Barat	75,85	8,78	11,57	55,11	88,93
Kalimantan Tengah	58,27	13,14	22,55	32,62	80,11
Kalimantan Selatan	45,71	9,72	21,27	28,09	64,47
Kalimantan Timur	86,55	6,78	7,83	67,27	95,27
Kalimantan Utara	78,62	8,88	11,29	56,64	91,19
Sulawesi Utara	55,48	11,03	19,89	34,18	74,95
Sulawesi Tengah	62,61	12,16	19,42	37,69	82,25
Sulawesi Selatan	70,76	6,78	9,59	56,00	82,15
Sulawesi Tenggara	61,88	10,69	17,28	40,03	79,78
Gorontalo	35,74	15,06	42,15	13,33	66,79
Sulawesi Barat	84,74	14,33	16,91	38,76	97,99
Maluku	54,00	11,18	20,71	32,70	73,93
Maluku Utara	46,07	15,16	32,91	20,53	73,86
Papua Barat	42,72	12,45	29,15	21,57	66,90
Papua	63,15	11,57	18,33	39,27	81,96
Indonesia	**73,20**	**1,46**	**1,99**	**70,24**	**75,96**

Sumber: Susenas MSBP, 2021

Lampiran 7.5

Sampling error persentase Penduduk Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan Asi Eksklusif di Perdesaan menurut Provinsi dan jenis kelamin, 2021

Provinsi	Perdesaan				
	Laki-Laki				
	estimasi	standar error	Relative standard error	selang kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	62,17	4,50	7,24	53,04	70,51
Sumatera Utara	60,66	4,61	7,59	51,37	69,25
Sumatera Barat	77,53	4,47	5,76	67,61	85,08
Riau	78,83	5,77	7,32	65,39	88,00
Jambi	72,70	6,52	8,97	58,32	83,53
Sumatera Selatan	75,34	4,69	6,23	65,06	83,37
Bengkulu	77,17	6,80	8,82	61,33	87,81
Lampung	79,21	5,07	6,41	67,56	87,46
Kepulauan Bangka Belitung	74,52	9,80	13,15	51,55	88,94
Kepulauan Riau	37,94	14,57	38,41	15,38	67,27
DKI Jakarta					
Jawa Barat	70,96	5,73	8,07	58,63	80,81
Jawa Tengah	83,23	3,11	3,74	76,23	88,48
DI Yogyakarta	85,94	12,92	15,03	42,91	98,03
Jawa Timur	66,74	4,30	6,44	57,86	74,58
Banten	68,32	8,47	12,40	50,03	82,28
Bali	68,10	9,15	13,43	48,33	82,97
Nusa Tenggara Barat	80,95	5,55	6,85	67,75	89,59
Nusa Tenggara Timur	85,41	2,76	3,24	79,13	90,05
Kalimantan Barat	69,94	5,12	7,33	59,07	78,95
Kalimantan Tengah	59,73	6,99	11,71	45,62	72,39
Kalimantan Selatan	65,80	5,75	8,74	53,84	76,05
Kalimantan Timur	59,58	10,31	17,30	38,92	77,32
Kalimantan Utara	71,41	12,45	17,44	43,04	89,19
Sulawesi Utara	58,47	6,73	11,52	44,98	70,79
Sulawesi Tengah	65,87	5,59	8,48	54,25	75,86
Sulawesi Selatan	81,94	3,72	4,53	73,50	88,12
Sulawesi Tenggara	66,00	5,25	7,95	55,10	75,44
Gorontalo	56,73	10,70	18,86	35,81	75,49
Sulawesi Barat	74,08	6,68	9,02	59,10	84,97
Maluku	72,08	6,17	8,56	58,60	82,48
Maluku Utara	68,65	6,60	9,62	54,56	79,98
Papua Barat	52,61	6,84	12,99	39,34	65,52
Papua	82,78	4,92	5,94	70,97	90,43
Indonesia	**66,32**	**1,60**	**2,41**	**63,13**	**69,37**

Sumber: Susenas MSBP, 2021

Lampiran 7.5 (Lanjutan)

Sampling error persentase Penduduk Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan Asi Eksklusif di Perdesaan menurut Provinsi dan jenis kelamin, 2021

Provinsi	Perdesaan				
	Perempuan				
	estimasi	standar error	Relative standard error	selang kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	64,85	4,91	7,57	54,74	73,78
Sumatera Utara	69,89	4,79	6,85	59,78	78,37
Sumatera Barat	76,54	4,66	6,09	66,24	84,44
Riau	71,01	5,92	8,34	58,22	81,15
Jambi	72,77	6,74	9,26	57,86	83,88
Sumatera Selatan	69,33	6,04	8,71	56,45	79,77
Bengkulu	67,81	8,49	12,52	49,57	81,86
Lampung	72,93	5,49	7,53	60,96	82,29
Kepulauan Bangka Belitung	85,57	8,01	9,37	62,43	95,48
Kepulauan Riau	32,55	13,83	42,50	12,31	62,40
DKI Jakarta					
Jawa Barat	77,42	4,52	5,84	67,39	85,06
Jawa Tengah	81,01	3,62	4,47	72,89	87,13
DI Yogyakarta	84,70	9,10	10,74	58,29	95,64
Jawa Timur	78,40	3,87	4,93	69,88	85,03
Banten	78,40	8,06	10,28	58,81	90,22
Bali	76,27	8,62	11,30	55,83	89,10
Nusa Tenggara Barat	80,14	6,53	8,15	64,35	90,02
Nusa Tenggara Timur	82,69	3,66	4,43	74,32	88,75
Kalimantan Barat	74,62	5,18	6,95	63,23	83,41
Kalimantan Tengah	59,41	7,56	12,73	44,18	73,01
Kalimantan Selatan	65,40	6,94	10,61	50,89	77,52
Kalimantan Timur	73,06	10,74	14,70	48,20	88,77
Kalimantan Utara	82,13	11,84	14,42	48,60	95,72
Sulawesi Utara	70,46	6,65	9,44	56,04	81,69
Sulawesi Tengah	74,91	5,26	7,02	63,30	83,79
Sulawesi Selatan	81,98	3,95	4,81	72,94	88,48
Sulawesi Tenggara	68,76	5,23	7,60	57,74	78,01
Gorontalo	63,35	9,55	15,08	43,56	79,47
Sulawesi Barat	73,05	6,98	9,56	57,49	84,46
Maluku	62,63	7,23	11,55	47,77	75,43
Maluku Utara	70,44	7,16	10,16	54,85	82,38
Papua Barat	78,51	5,16	6,57	66,74	86,92
Papua	81,58	6,63	8,13	65,10	91,32
Indonesia	**73,20**	**1,46**	**1,99**	**70,24**	**75,96**

Sumber: Susenas MSBP, 2021

Lampiran 7.5 (Lanjutan)

Sampling error persentase Penduduk Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan Asi Eksklusif di Perdesaan menurut Provinsi dan jenis kelamin, 2021

Provinsi	Perdesaan				
	Laki-Laki + Perempuan				
	estimasi	standar error	Relative standard error	selang kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	63,53	3,33	5,24	56,79	69,77
Sumatera Utara	64,90	3,34	5,14	58,11	71,13
Sumatera Barat	77,05	3,22	4,18	70,14	82,75
Riau	74,65	4,18	5,59	65,65	81,95
Jambi	72,74	4,71	6,48	62,62	80,96
Sumatera Selatan	72,97	3,74	5,12	65,06	79,65
Bengkulu	72,83	5,42	7,44	61,04	82,10
Lampung	76,06	3,75	4,93	67,97	82,63
Kepulauan Bangka Belitung	81,29	6,21	7,64	66,11	90,64
Kepulauan Riau	35,68	10,34	28,97	18,66	57,29
DKI Jakarta					
Jawa Barat	74,41	3,63	4,88	66,68	80,87
Jawa Tengah	82,17	2,38	2,89	77,02	86,36
DI Yogyakarta	85,14	7,43	8,73	64,43	94,77
Jawa Timur	72,48	2,93	4,04	66,39	77,83
Banten	73,71	6,75	9,15	58,63	84,73
Bali	71,55	6,45	9,02	57,47	82,39
Nusa Tenggara Barat	80,55	4,29	5,32	70,77	87,62
Nusa Tenggara Timur	84,20	2,23	2,65	79,33	88,09
Kalimantan Barat	72,19	3,65	5,05	64,51	78,75
Kalimantan Tengah	59,59	5,14	8,63	49,24	69,14
Kalimantan Selatan	65,63	4,43	6,75	56,51	73,73
Kalimantan Timur	64,83	7,67	11,84	48,80	78,09
Kalimantan Utara	76,96	8,72	11,32	56,04	89,74
Sulawesi Utara	64,05	4,83	7,54	54,14	72,88
Sulawesi Tengah	70,43	3,81	5,40	62,48	77,32
Sulawesi Selatan	81,96	2,70	3,29	76,06	86,66
Sulawesi Tenggara	67,39	3,71	5,50	59,75	74,20
Gorontalo	60,54	7,21	11,92	45,92	73,50
Sulawesi Barat	73,61	4,72	6,41	63,40	81,78
Maluku	67,52	4,82	7,14	57,47	76,18
Maluku Utara	69,57	4,88	7,01	59,28	78,22
Papua Barat	67,27	4,55	6,77	57,81	75,51
Papua	82,22	4,05	4,92	72,89	88,83
Indonesia	**69,64**	**1,09**	**1,57**	**67,46**	**71,74**

Sumber: Susenas MSBP, 2021

Lampiran 7.6

Persentase Balita yang Pernah Diberi Imunisasi menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
Aceh	61,43	60,77	61,11	63,48	61,87	62,68	62,78	61,51	62,15
Sumatera Utara	86,16	84,04	85,14	85,49	85,16	85,33	85,85	84,57	85,23
Sumatera Barat	83,57	83,07	83,32	83,88	85,34	84,61	83,73	84,26	84,00
Riau	82,97	86,48	84,60	83,76	86,00	84,86	83,44	86,18	84,76
Jambi	90,09	89,92	90,01	87,36	90,69	88,98	88,24	90,44	89,31
Sumatera Selatan	93,28	94,90	94,05	92,65	91,07	91,88	92,88	92,44	92,67
Bengkulu	93,15	95,51	94,28	96,41	96,84	96,62	95,34	96,41	95,86
Lampung	95,07	96,73	95,88	96,57	96,10	96,34	96,09	96,30	96,19
Kepulauan Bangka Belitung	97,78	94,64	96,24	93,94	95,37	94,66	96,07	94,97	95,52
Kepulauan Riau	95,11	97,89	96,46	88,79	88,75	88,77	94,75	97,27	95,98
DKI Jakarta	94,61	93,06	93,84				94,61	93,06	93,84
Jawa Barat	91,37	91,85	91,60	90,42	90,70	90,56	91,19	91,59	91,38
Jawa Tengah	96,75	97,85	97,28	98,21	98,27	98,24	97,44	98,06	97,75
DI Yogyakarta	99,48	99,59	99,54	99,32	98,80	99,06	99,44	99,40	99,42
Jawa Timur	93,32	93,47	93,39	91,54	90,35	90,94	92,54	92,06	92,30
Banten	90,78	90,88	90,83	82,01	81,61	81,81	88,28	88,20	88,24
Bali	98,51	98,13	98,32	96,62	97,20	96,91	97,99	97,86	97,92
Nusa Tenggara Barat	98,44	97,12	97,80	95,68	95,03	95,36	97,04	96,03	96,54
Nusa Tenggara Timur	98,93	98,20	98,57	95,36	95,96	95,66	96,20	96,47	96,33
Kalimantan Barat	86,01	90,17	88,03	91,21	89,23	90,24	89,32	89,57	89,44
Kalimantan Tengah	91,35	89,02	90,23	86,76	87,94	87,35	88,65	88,37	88,51
Kalimantan Selatan	93,86	93,56	93,71	94,42	94,52	94,47	94,14	94,06	94,10
Kalimantan Timur	95,20	95,18	95,19	86,64	93,68	90,11	92,39	94,69	93,53
Kalimantan Utara	94,00	96,56	95,28	90,21	90,70	90,44	92,48	94,34	93,39
Sulawesi Utara	95,92	96,34	96,12	93,82	95,93	94,82	94,94	96,14	95,51
Sulawesi Tengah	91,20	87,65	89,47	91,71	92,34	92,02	91,55	90,95	91,25
Sulawesi Selatan	96,01	95,08	95,56	93,89	95,57	94,72	94,85	95,35	95,10
Sulawesi Tenggara	90,04	89,70	89,87	93,97	94,19	94,08	92,61	92,70	92,65
Gorontalo	95,32	95,95	95,63	97,54	93,80	95,66	96,56	94,72	95,65
Sulawesi Barat	84,14	82,74	83,48	92,63	90,79	91,74	90,87	89,21	90,07
Maluku	91,86	90,41	91,15	86,15	85,94	86,04	88,39	87,69	88,04
Maluku Utara	91,22	94,02	92,59	88,41	88,57	88,49	89,18	89,99	89,59
Papua Barat	90,19	95,37	92,70	87,45	82,06	84,74	88,61	87,47	88,05
Papua	85,52	87,81	86,62	69,25	69,58	69,41	74,13	74,90	74,51
Indonesia	**92,14**	**92,34**	**92,23**	**90,29**	**90,30**	**90,30**	**91,34**	**91,43**	**91,38**

Catatan: L (Laki-Laki), P (Perempuan), L+P (Laki-Laki + Perempuan)

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 7.7

Persentase Balita yang Pernah Diberi Imunisasi menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Imunisasi, 2021

Provinsi	Perkotaan				
	BCG	DPT	Polio	Campak/Morbili	Hepatitis B
Aceh	55,99	49,33	54,94	39,00	50,66
Sumatera Utara	82,93	76,93	82,42	61,65	74,73
Sumatera Barat	78,01	71,27	77,07	55,72	71,84
Riau	80,33	76,76	81,22	63,00	76,24
Jambi	88,44	83,50	86,13	64,82	81,89
Sumatera Selatan	90,53	84,31	91,43	68,55	81,92
Bengkulu	92,64	88,51	92,53	74,65	88,94
Lampung	93,11	89,69	93,52	74,34	88,60
Kepulauan Bangka Belitung	91,72	88,11	91,69	70,33	92,43
Kepulauan Riau	91,22	88,36	91,97	72,10	91,22
DKI Jakarta	92,21	89,77	92,34	72,31	89,41
Jawa Barat	87,97	84,32	87,96	66,79	83,70
Jawa Tengah	94,30	90,41	93,73	74,02	94,35
DI Yogyakarta	98,17	96,77	95,52	77,85	97,58
Jawa Timur	91,05	87,04	90,87	71,50	89,36
Banten	88,18	82,25	87,73	69,18	81,52
Bali	96,54	94,61	97,15	78,44	97,64
Nusa Tenggara Barat	94,53	91,72	94,59	75,06	93,78
Nusa Tenggara Timur	95,25	92,12	95,18	79,02	94,83
Kalimantan Barat	83,57	77,32	82,12	58,86	80,92
Kalimantan Tengah	86,22	82,67	87,38	69,34	83,32
Kalimantan Selatan	90,55	87,59	91,04	68,81	89,83
Kalimantan Timur	92,56	88,05	92,56	74,64	90,49
Kalimantan Utara	93,10	90,38	93,23	73,90	89,84
Sulawesi Utara	94,08	89,50	93,27	75,81	90,09
Sulawesi Tengah	86,47	83,00	87,12	72,63	84,24
Sulawesi Selatan	92,60	90,01	92,72	74,58	90,19
Sulawesi Tenggara	87,44	85,82	87,43	72,07	82,70
Gorontalo	93,06	89,33	93,39	77,88	91,57
Sulawesi Barat	79,97	74,64	80,24	63,18	77,03
Maluku	88,86	86,00	89,96	75,08	85,04
Maluku Utara	90,09	82,79	88,84	72,52	80,91
Papua Barat	88,46	84,79	89,81	72,74	85,76
Papua	85,09	79,39	84,58	70,61	78,78
Indonesia	89,23	85,22	89,07	69,27	85,83

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 7.7 (Lanjutan)

Persentase Balita yang Pernah Diberi Imunisasi menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Imunisasi, 2021

Provinsi	Perdesaan				
	BCG	DPT	Polio	Campak/Morbili	Hepatitis B
Aceh	54,29	46,92	57,25	37,66	46,49
Sumatera Utara	81,40	75,35	82,26	63,09	71,54
Sumatera Barat	79,76	72,16	78,57	56,31	72,06
Riau	78,71	75,43	80,94	63,62	72,96
Jambi	85,70	80,82	85,93	66,01	76,52
Sumatera Selatan	88,43	85,19	89,11	71,65	82,42
Bengkulu	94,49	91,60	94,21	78,03	91,26
Lampung	93,55	90,59	93,63	76,52	89,15
Kepulauan Bangka Belitung	90,00	87,27	90,45	72,96	92,49
Kepulauan Riau	83,76	81,44	86,15	67,09	79,80
DKI Jakarta					
Jawa Barat	85,90	80,82	86,22	64,13	76,46
Jawa Tengah	95,81	92,16	95,08	76,67	93,87
DI Yogyakarta	97,20	94,29	92,89	76,40	94,56
Jawa Timur	87,44	82,59	87,53	68,55	84,44
Banten	76,69	67,29	76,93	50,52	64,09
Bali	95,43	89,68	96,13	78,19	92,09
Nusa Tenggara Barat	91,89	87,40	92,46	73,13	87,94
Nusa Tenggara Timur	93,36	90,39	93,66	75,69	90,85
Kalimantan Barat	86,81	81,98	87,28	68,51	81,14
Kalimantan Tengah	82,75	78,70	84,61	64,72	78,86
Kalimantan Selatan	89,57	85,25	89,84	68,47	88,51
Kalimantan Timur	86,96	79,84	86,84	69,67	82,86
Kalimantan Utara	87,76	84,26	87,67	70,64	81,95
Sulawesi Utara	92,17	89,11	91,93	74,92	89,00
Sulawesi Tengah	89,00	85,48	88,78	70,59	84,65
Sulawesi Selatan	91,25	87,07	91,05	72,10	87,81
Sulawesi Tenggara	91,60	88,62	92,01	74,66	87,90
Gorontalo	92,77	88,08	92,48	75,33	87,79
Sulawesi Barat	88,25	81,84	87,65	69,51	82,82
Maluku	80,83	78,13	83,98	65,97	76,32
Maluku Utara	85,62	79,86	86,05	68,01	77,85
Papua Barat	81,69	76,52	82,17	64,55	72,21
Papua	67,18	64,39	68,64	56,60	63,91
Indonesia	86,58	81,99	86,91	67,90	81,37

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 7.7 (Lanjutan)

Persentase Balita yang Pernah Diberi Imunisasi menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Imunisasi, 2021

Provinsi	Perkotaan dan Perdesaan				
	BCG	DPT	Polio	Campak/Morbili	Hepatitis B
Aceh	54,86	47,73	56,47	38,11	47,89
Sumatera Utara	82,21	76,19	82,34	62,32	73,24
Sumatera Barat	78,93	71,74	77,86	56,03	71,96
Riau	79,34	75,95	81,05	63,38	74,24
Jambi	86,58	81,68	85,99	65,63	78,24
Sumatera Selatan	89,20	84,87	89,95	70,52	82,24
Bengkulu	93,89	90,60	93,67	76,94	90,51
Lampung	93,41	90,30	93,59	75,83	88,97
Kepulauan Bangka Belitung	90,94	87,73	91,13	71,52	92,46
Kepulauan Riau	90,75	87,93	91,61	71,78	90,51
DKI Jakarta	92,21	89,77	92,34	72,31	89,41
Jawa Barat	87,54	83,59	87,59	66,23	82,19
Jawa Tengah	95,03	91,26	94,38	75,30	94,12
DI Yogyakarta	97,93	96,16	94,87	77,50	96,84
Jawa Timur	89,44	85,06	89,38	70,18	87,17
Banten	84,88	77,95	84,62	63,81	76,51
Bali	96,23	93,22	96,86	78,37	96,08
Nusa Tenggara Barat	93,17	89,49	93,49	74,07	90,77
Nusa Tenggara Timur	93,80	90,79	94,01	76,46	91,77
Kalimantan Barat	85,64	80,29	85,41	65,02	81,06
Kalimantan Tengah	84,14	80,30	85,72	66,58	80,66
Kalimantan Selatan	90,05	86,39	90,42	68,63	89,15
Kalimantan Timur	90,72	85,37	90,69	73,01	87,99
Kalimantan Utara	91,02	88,00	91,06	72,63	86,77
Sulawesi Utara	93,18	89,32	92,64	75,39	89,58
Sulawesi Tengah	88,23	84,73	88,28	71,21	84,53
Sulawesi Selatan	91,86	88,39	91,80	73,21	88,88
Sulawesi Tenggara	90,19	87,67	90,46	73,78	86,14
Gorontalo	92,90	88,62	92,88	76,43	89,43
Sulawesi Barat	86,58	80,39	86,16	68,23	81,65
Maluku	83,98	81,21	86,32	69,54	79,74
Maluku Utara	86,82	80,65	86,79	69,22	78,67
Papua Barat	84,50	79,95	85,34	67,95	77,84
Papua	72,48	68,83	73,36	60,75	68,31
Indonesia	88,07	83,81	88,12	68,67	83,87

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 7.8

Persentase Anak Berumur 12-23 Bulan yang Mendapat Imunisasi Lengkap menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
Aceh	23,21	28,87	25,73	19,84	22,69	21,24	21,02	24,60	22,73
Sumatera Utara	44,88	46,31	45,59	34,12	42,13	38,15	40,10	44,42	42,25
Sumatera Barat	28,35	49,99	39,77	31,89	41,64	37,25	30,00	45,92	38,57
Riau	43,23	51,55	47,22	41,54	45,52	43,41	42,21	47,99	44,95
Jambi	56,71	62,29	59,71	48,72	53,24	51,01	51,03	56,08	53,64
Sumatera Selatan	65,78	38,67	54,48	53,88	51,84	52,87	58,87	47,28	53,49
Bengkulu	77,11	67,96	73,03	69,13	73,91	71,57	72,07	72,07	72,07
Lampung	66,35	79,72	72,10	70,11	71,66	70,89	68,73	74,10	71,29
Kepulauan Bangka Belitung	64,83	69,49	66,98	75,57	70,16	73,13	69,89	69,80	69,85
Kepulauan Riau	54,22	79,81	67,30	72,89	74,14	73,67	55,35	79,29	67,79
DKI Jakarta	63,89	60,51	62,08				63,89	60,51	62,08
Jawa Barat	59,09	53,57	56,42	59,52	52,12	55,65	59,17	53,25	56,26
Jawa Tengah	73,59	73,44	73,51	79,47	80,08	79,78	76,37	76,64	76,50
DI Yogyakarta	77,14	65,44	71,21	78,25	78,80	78,48	77,46	68,43	73,07
Jawa Timur	71,39	72,70	72,03	66,14	68,32	67,21	68,90	70,62	69,74
Banten	58,40	60,88	59,66	42,06	22,75	31,48	54,21	49,90	51,97
Bali	84,24	78,41	81,42	80,85	92,06	86,34	83,29	82,32	82,82
Nusa Tenggara Barat	65,32	74,40	69,98	65,20	66,24	65,72	65,25	69,98	67,66
Nusa Tenggara Timur	71,67	90,44	81,11	71,87	70,93	71,43	71,83	75,41	73,54
Kalimantan Barat	54,10	43,89	49,66	57,16	60,61	58,88	55,94	54,93	55,46
Kalimantan Tengah	45,14	62,26	54,01	49,45	55,82	52,79	47,49	58,71	53,34
Kalimantan Selatan	73,50	68,35	71,08	73,65	62,77	67,90	73,58	65,02	69,27
Kalimantan Timur	73,82	73,79	73,80	62,37	67,54	65,00	70,70	72,04	71,37
Kalimantan Utara	77,52	79,82	78,46	51,89	67,93	59,31	68,12	74,82	70,99
Sulawesi Utara	69,08	68,23	68,64	71,30	70,52	70,95	70,10	69,14	69,63
Sulawesi Tengah	72,18	65,92	69,22	70,81	66,35	68,61	71,30	66,20	68,82
Sulawesi Selatan	65,32	74,39	69,64	62,36	72,22	67,32	63,75	73,18	68,37
Sulawesi Tenggara	71,37	64,43	67,78	69,94	73,72	71,95	70,45	70,53	70,49
Gorontalo	69,60	70,64	70,11	68,91	78,21	73,64	69,23	74,82	72,02
Sulawesi Barat	52,88	59,50	57,20	56,74	55,04	55,93	56,08	56,38	56,23
Maluku	70,04	73,86	72,01	43,91	61,63	52,51	53,77	66,58	60,14
Maluku Utara	56,51	41,53	50,06	45,01	59,23	52,45	48,53	55,09	51,80
Papua Barat	57,66	72,37	65,08	42,63	56,83	49,67	49,00	63,55	56,27
Papua	58,04	57,53	57,83	46,38	44,26	45,39	50,54	48,42	49,59
Indonesia	**62,11**	**61,91**	**62,01**	**59,46**	**60,31**	**59,89**	**60,97**	**61,21**	**61,09**

Catatan: L (Laki-Laki), P (Perempuan), L+P (Laki-Laki + Perempuan)

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 7.9

Persentase Anak Berumur 12-23 Bulan yang Mendapat Imunisasi Lengkap menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
Aceh	95,85	95,36	95,61	91,87	92,23	92,05	93,19	93,23	93,21
Sumatera Utara	58,73	57,66	58,21	44,28	45,60	44,93	51,94	51,84	51,89
Sumatera Barat	68,24	69,02	68,62	57,18	58,54	57,86	62,52	63,45	62,97
Riau	71,16	70,60	70,89	52,22	51,64	51,94	59,84	58,99	59,42
Jambi	58,35	58,22	58,29	40,32	40,28	40,30	46,20	45,92	46,06
Sumatera Selatan	61,92	62,14	62,03	50,10	49,86	49,98	54,51	54,32	54,41
Bengkulu	60,69	61,30	60,98	52,62	53,43	53,02	55,29	55,95	55,62
Lampung	84,85	82,71	83,81	54,10	55,62	54,85	63,90	64,06	63,98
Kepulauan Bangka Belitung	68,57	65,43	67,05	53,41	53,91	53,66	61,89	60,14	61,03
Kepulauan Riau	74,07	70,26	72,22	76,84	78,07	77,47	74,27	70,86	72,60
DKI Jakarta	89,02	87,55	88,29	0,00	0,00	0,00	89,02	87,55	88,29
Jawa Barat	58,20	58,39	58,29	39,32	39,98	39,65	54,28	54,24	54,26
Jawa Tengah	66,74	66,35	66,55	57,98	58,33	58,16	62,58	62,38	62,49
DI Yogyakarta	73,58	74,94	74,24	76,29	73,63	74,99	74,27	74,60	74,43
Jawa Timur	61,60	61,86	61,73	51,57	50,70	51,13	57,16	56,77	56,97
Banten	68,97	65,98	67,50	40,40	38,98	39,69	60,36	57,71	59,05
Bali	76,57	75,42	76,02	75,02	74,32	74,67	76,13	75,09	75,62
Nusa Tenggara Barat	59,24	58,93	59,09	44,49	42,44	43,47	51,73	50,31	51,03
Nusa Tenggara Timur	61,22	62,06	61,62	54,07	53,71	53,89	55,77	55,58	55,67
Kalimantan Barat	72,10	73,59	72,82	51,17	49,28	50,24	58,61	57,66	58,14
Kalimantan Tengah	62,39	59,62	61,04	48,86	48,41	48,64	54,37	52,87	53,63
Kalimantan Selatan	75,41	77,32	76,33	58,20	57,08	57,64	66,57	66,57	66,57
Kalimantan Timur	75,01	76,35	75,67	58,86	68,26	63,58	69,83	73,65	71,71
Kalimantan Utara	78,01	75,18	76,65	73,35	69,90	71,63	76,25	73,10	74,71
Sulawesi Utara	70,31	72,93	71,59	59,75	59,98	59,86	65,40	66,87	66,12
Sulawesi Tengah	68,61	68,72	68,66	54,68	53,67	54,18	58,89	58,19	58,54
Sulawesi Selatan	73,20	73,89	73,54	64,99	65,65	65,32	68,66	69,31	68,98
Sulawesi Tenggara	65,00	62,07	63,60	63,92	62,64	63,29	64,31	62,44	63,40
Gorontalo	75,59	75,50	75,55	68,49	65,76	67,12	71,50	69,77	70,64
Sulawesi Barat	84,79	82,98	83,92	74,58	75,17	74,87	76,68	76,70	76,69
Maluku	55,86	51,15	53,60	46,09	45,36	45,73	50,10	47,68	48,92
Maluku Utara	63,05	61,16	62,15	66,40	63,74	65,09	65,51	63,09	64,33
Papua Barat	59,83	60,79	60,29	63,46	61,18	62,34	61,98	61,02	61,51
Papua	64,71	67,40	66,01	88,46	88,07	88,27	82,25	82,63	82,43
Indonesia	**66,30**	**66,02**	**66,16**	**54,75**	**54,61**	**54,68**	**61,24**	**60,88**	**61,06**

Catatan: L (Laki-Laki), P (Perempuan), L+P (Laki-Laki + Perempuan)

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 7.10

Persentase Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Berumur 0-17 Tahun yang memiliki Jaminan Kesehatan menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2021

Provinsi	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	BPJS Kesehatan Non-PBI/Mandiri	Jamkesda	Asuransi swasta	Perusahaan/ kantor
Aceh	86,13	11,94	9,92	0,16	0,56
Sumatera Utara	51,47	36,21	8,34	1,07	7,74
Sumatera Barat	51,24	34,91	18,04	0,70	2,60
Riau	38,73	36,82	31,22	0,81	6,38
Jambi	46,07	45,85	1,07	0,97	6,89
Sumatera Selatan	44,03	28,31	26,24	0,91	4,35
Bengkulu	54,12	42,10	1,03	0,58	3,25
Lampung	61,03	21,70	19,33	0,79	2,29
Kepulauan Bangka Belitung	47,02	50,78	0,49	0,73	1,73
Kepulauan Riau	25,74	65,65	2,84	1,21	6,49
DKI Jakarta	62,27	33,02	0,01	3,28	3,96
Jawa Barat	47,94	40,11	6,27	2,07	8,82
Jawa Tengah	58,03	28,82	18,02	0,60	2,69
DI Yogyakarta	61,31	33,96	0,00	1,59	4,53
Jawa Timur	49,73	30,87	20,42	1,06	4,84
Banten	41,44	43,40	14,06	2,26	9,92
Bali	47,32	40,66	13,90	1,80	2,38
Nusa Tenggara Barat	71,29	19,00	23,58	0,46	1,53
Nusa Tenggara Timur	68,41	20,51	12,35	0,15	0,53
Kalimantan Barat	45,25	32,88	30,63	1,08	4,26
Kalimantan Tengah	54,77	38,26	3,75	0,66	5,04
Kalimantan Selatan	56,42	37,70	1,79	0,34	4,60
Kalimantan Timur	27,45	63,04	0,80	2,49	10,51
Kalimantan Utara	46,68	51,92	0,00	0,55	1,47
Sulawesi Utara	56,22	37,24	2,85	0,44	4,07
Sulawesi Tengah	67,06	30,42	1,37	0,30	1,02
Sulawesi Selatan	66,46	29,52	2,01	0,51	2,47
Sulawesi Tenggara	62,62	28,41	8,58	0,16	0,73
Gorontalo	75,99	21,37	1,58	0,12	1,48
Sulawesi Barat	65,30	18,12	19,44	0,85	0,80
Maluku	55,61	32,11	12,84	0,38	0,58
Maluku Utara	38,15	21,86	43,62	0,11	1,52
Papua Barat	57,95	24,61	18,26	0,25	1,97
Papua	31,41	10,11	68,81	0,15	0,68
Indonesia	53,27	33,05	13,65	1,19	4,82

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 7.11

Sampling error Persentase Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Berumur 0-17 Tahun di Perkotaan dan Perdesaan yang memiliki Jaminan Kesehatan menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2021

Provinsi	Jamkesda				
	Estimasi	Standar Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	9,92	0,31	3,10	9,33	10,54
Sumatera Utara	8,34	0,56	6,65	7,32	9,50
Sumatera Barat	18,04	0,60	3,35	16,89	19,26
Riau	31,22	0,96	3,06	29,38	33,12
Jambi	1,07	0,24	22,61	0,69	1,66
Sumatera Selatan	26,24	0,76	2,91	24,77	27,77
Bengkulu	1,03	0,26	24,96	0,63	1,68
Lampung	19,33	0,71	3,69	17,98	20,77
Kepulauan Bangka Belitung	0,49	0,19	38,17	0,23	1,03
Kepulauan Riau	2,84	0,41	14,58	2,13	3,77
DKI Jakarta	0,01	0,00	36,97	0,00	0,02
Jawa Barat	6,27	0,33	5,29	5,65	6,96
Jawa Tengah	18,02	0,40	2,23	17,25	18,83
DI Yogyakarta					
Jawa Timur	20,42	0,39	1,89	19,67	21,18
Banten	14,06	0,61	4,36	12,90	15,30
Bali	13,90	0,80	5,79	12,39	15,55
Nusa Tenggara Barat	23,58	0,75	3,19	22,14	25,09
Nusa Tenggara Timur	12,35	0,52	4,24	11,36	13,41
Kalimantan Barat	30,63	0,87	2,86	28,94	32,37
Kalimantan Tengah	3,75	0,47	12,48	2,93	4,78
Kalimantan Selatan	1,79	0,27	14,99	1,33	2,40
Kalimantan Timur	0,80	0,17	21,38	0,53	1,21
Kalimantan Utara					
Sulawesi Utara	2,85	0,32	11,16	2,29	3,54
Sulawesi Tengah	1,37	0,22	16,38	0,99	1,88
Sulawesi Selatan	2,01	0,18	9,17	1,68	2,41
Sulawesi Tenggara	8,58	0,50	5,86	7,65	9,62
Gorontalo	1,58	0,42	26,65	0,93	2,65
Sulawesi Barat	19,44	1,07	5,49	17,43	21,61
Maluku	12,84	0,63	4,94	11,64	14,13
Maluku Utara	43,62	1,08	2,48	41,52	45,75
Papua Barat	18,26	0,80	4,38	16,74	19,88
Papua	68,81	0,70	1,01	67,43	70,16
Indonesia	**13,65**	**0,12**	**0,85**	**13,43**	**13,88**

Sumber: Susenas MSBP, 2021

Lampiran 7.11 (Lanjutan)

Sampling error Persentase Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Berumur 0-17 Tahun di Perkotaan dan Perdesaan yang memiliki Jaminan Kesehatan menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2021

Provinsi	Asuransi Swasta				
	Estimasi	Standar Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	0,16	0,06	34,24	0,08	0,32
Sumatera Utara	1,07	0,23	21,61	0,70	1,64
Sumatera Barat	0,70	0,18	26,26	0,42	1,17
Riau	0,81	0,17	21,42	0,53	1,23
Jambi	0,97	0,27	28,28	0,55	1,68
Sumatera Selatan	0,91	0,22	24,58	0,56	1,48
Bengkulu	0,58	0,20	35,10	0,29	1,15
Lampung	0,79	0,24	30,42	0,43	1,43
Kepulauan Bangka Belitung	0,73	0,28	38,13	0,34	1,54
Kepulauan Riau	1,21	0,40	32,67	0,64	2,30
DKI Jakarta	3,28	0,38	11,68	2,61	4,12
Jawa Barat	2,07	0,20	9,48	1,72	2,50
Jawa Tengah	0,60	0,09	14,32	0,45	0,79
DI Yogyakarta	1,59	0,45	28,03	0,92	2,75
Jawa Timur	1,06	0,13	12,06	0,84	1,34
Banten	2,26	0,32	14,33	1,71	2,99
Bali	1,80	0,39	21,64	1,18	2,75
Nusa Tenggara Barat	0,46	0,13	27,84	0,26	0,79
Nusa Tenggara Timur	0,15	0,10	64,85	0,04	0,53
Kalimantan Barat	1,08	0,27	25,12	0,66	1,76
Kalimantan Tengah	0,66	0,19	29,46	0,37	1,17
Kalimantan Selatan	0,34	0,15	42,47	0,15	0,79
Kalimantan Timur	2,49	0,40	16,21	1,81	3,41
Kalimantan Utara	0,55	0,25	44,74	0,23	1,33
Sulawesi Utara	0,44	0,21	48,32	0,17	1,13
Sulawesi Tengah	0,30	0,12	41,04	0,13	0,66
Sulawesi Selatan	0,51	0,14	27,94	0,29	0,87
Sulawesi Tenggara	0,16	0,08	48,97	0,06	0,41
Gorontalo	0,12	0,07	58,45	0,04	0,39
Sulawesi Barat	0,85	0,36	42,31	0,37	1,94
Maluku	0,38	0,28	75,10	0,09	1,63
Maluku Utara	0,11	0,07	66,41	0,03	0,41
Papua Barat	0,25	0,18	71,03	0,06	1,01
Papua	0,15	0,07	49,16	0,06	0,40
Indonesia	**1,19**	**0,05**	**4,28**	**1,09**	**1,29**

Sumber: Susenas MSBP, 2021

Lampiran 7.11 (Lanjutan)

Sampling error Persentase Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Berumur 0-17 Tahun di Perkotaan dan Perdesaan yang memiliki Jaminan Kesehatan menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2021

Provinsi	Perusahaan/Kantor				
	Estimasi	Standar Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	0,56	0,10	17,41	0,40	0,78
Sumatera Utara	7,74	0,51	6,56	6,80	8,80
Sumatera Barat	2,60	0,35	13,32	2,00	3,38
Riau	6,38	0,49	7,67	5,49	7,41
Jambi	6,89	0,77	11,15	5,53	8,56
Sumatera Selatan	4,35	0,48	11,10	3,50	5,40
Bengkulu	3,25	0,45	13,72	2,48	4,25
Lampung	2,29	0,33	14,25	1,73	3,03
Kepulauan Bangka Belitung	1,73	0,35	20,23	1,16	2,57
Kepulauan Riau	6,49	1,02	15,76	4,75	8,80
DKI Jakarta	3,96	0,43	10,87	3,20	4,89
Jawa Barat	8,82	0,43	4,84	8,02	9,69
Jawa Tengah	2,69	0,18	6,56	2,37	3,06
DI Yogyakarta	4,53	0,73	16,00	3,30	6,18
Jawa Timur	4,84	0,27	5,53	4,34	5,40
Banten	9,92	0,64	6,50	8,72	11,26
Bali	2,38	0,42	17,54	1,69	3,36
Nusa Tenggara Barat	1,53	0,23	15,25	1,14	2,07
Nusa Tenggara Timur	0,53	0,18	33,41	0,27	1,01
Kalimantan Barat	4,26	0,42	9,81	3,52	5,16
Kalimantan Tengah	5,04	0,52	10,24	4,12	6,16
Kalimantan Selatan	4,60	0,42	9,06	3,85	5,49
Kalimantan Timur	10,51	0,74	7,06	9,14	12,05
Kalimantan Utara	1,47	0,42	28,78	0,84	2,58
Sulawesi Utara	4,07	0,49	12,00	3,22	5,15
Sulawesi Tengah	1,02	0,19	18,67	0,71	1,47
Sulawesi Selatan	2,47	0,27	11,09	1,99	3,07
Sulawesi Tenggara	0,73	0,16	22,14	0,47	1,12
Gorontalo	1,48	0,39	26,34	0,88	2,47
Sulawesi Barat	0,80	0,22	28,05	0,46	1,38
Maluku	0,58	0,21	36,26	0,28	1,18
Maluku Utara	1,52	0,31	20,35	1,02	2,25
Papua Barat	1,97	0,49	24,97	1,20	3,20
Papua	0,68	0,11	16,02	0,49	0,93
Indonesia	**4,82**	**0,10**	**2,09**	**4,63**	**5,02**

Sumber: Susenas MSBP, 2021

Lampiran 7.12

Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Provinsi, tipe daerah, dan jenis kelamin, 2021

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
Aceh	32,50	31,25	31,90	25,38	24,73	25,06	27,74	26,80	27,27
Sumatera Utara	20,31	19,39	19,87	19,75	19,80	19,78	20,05	19,58	19,82
Sumatera Barat	26,80	28,65	27,69	20,78	21,37	21,07	23,68	24,78	24,22
Riau	29,10	29,28	29,19	15,04	15,82	15,43	20,70	21,03	20,86
Jambi	12,33	12,06	12,20	16,56	17,79	17,17	15,18	15,99	15,58
Sumatera Selatan	33,25	33,84	33,54	21,63	20,38	21,01	25,97	25,27	25,62
Bengkulu	33,13	30,55	31,89	20,98	21,27	21,13	25,01	24,25	24,64
Lampung	38,71	35,85	37,32	20,90	21,92	21,40	26,57	26,26	26,42
Kepulauan Bangka Belitung	29,07	24,44	26,83	17,88	18,75	18,31	24,14	21,83	23,00
Kepulauan Riau	16,03	15,27	15,66	8,77	10,38	9,59	15,52	14,90	15,21
DKI Jakarta	26,20	26,25	26,22				26,20	26,25	26,22
Jawa Barat	28,50	27,43	27,99	19,52	22,56	21,06	26,63	26,33	26,49
Jawa Tengah	30,12	28,90	29,54	23,69	23,37	23,53	27,07	26,17	26,63
DI Yogyakarta	26,94	26,10	26,53	19,17	21,53	20,32	24,97	24,92	24,95
Jawa Timur	29,27	29,31	29,29	22,83	22,72	22,78	26,42	26,30	26,36
Banten	30,03	29,11	29,57	18,54	15,66	17,11	26,57	24,99	25,79
Bali	23,15	22,05	22,62	16,06	15,13	15,59	21,11	19,93	20,53
Nusa Tenggara Barat	38,31	37,50	37,92	39,20	42,43	40,82	38,76	40,08	39,41
Nusa Tenggara Timur	28,78	26,44	27,66	28,56	28,91	28,73	28,61	28,36	28,48
Kalimantan Barat	19,39	20,37	19,86	18,18	18,92	18,55	18,61	19,42	19,01
Kalimantan Tengah	22,69	24,38	23,52	17,93	15,10	16,52	19,87	18,80	19,34
Kalimantan Selatan	30,65	30,64	30,65	26,89	25,86	26,37	28,72	28,10	28,42
Kalimantan Timur	19,10	18,45	18,78	10,31	10,80	10,56	16,28	15,90	16,09
Kalimantan Utara	22,49	24,38	23,40	15,12	10,99	13,06	19,71	19,10	19,41
Sulawesi Utara	23,10	26,35	24,69	15,55	14,88	15,22	19,59	20,99	20,27
Sulawesi Tengah	32,00	26,34	29,21	17,38	18,11	17,74	21,80	20,58	21,20
Sulawesi Selatan	30,48	29,92	30,21	18,28	18,05	18,17	23,73	23,31	23,53
Sulawesi Tenggara	29,02	30,99	29,96	18,85	19,29	19,07	22,53	23,34	22,92
Gorontalo	30,18	29,33	29,77	23,32	22,91	23,11	26,24	25,55	25,90
Sulawesi Barat	24,34	26,08	25,18	19,55	19,84	19,69	20,53	21,06	20,79
Maluku	15,19	20,08	17,54	13,97	15,01	14,48	14,47	17,04	15,72
Maluku Utara	12,06	14,82	13,38	15,27	13,79	14,54	14,41	14,05	14,23
Papua Barat	21,32	22,84	22,04	16,63	16,91	16,77	18,55	19,26	18,89
Papua	12,23	13,86	13,02	12,73	12,67	12,70	12,60	12,99	12,78
Indonesia	**27,79**	**27,20**	**27,51**	**21,02**	**21,29**	**21,15**	**24,82**	**24,53**	**24,68**

Catatan: L (Laki-Laki), P (Perempuan), L+P (Laki-Laki + Perempuan)

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 7.13

Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Sakit (Terganggu Pekerjaan, Sekolah, atau Kegiatan Sehari-hari) menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan jenis kelamin, 2021

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
Aceh	14,86	14,71	14,79	13,91	13,09	13,50	14,22	13,60	13,92
Sumatera Utara	8,14	8,04	8,09	8,45	8,98	8,71	8,28	8,49	8,38
Sumatera Barat	14,56	13,99	14,29	10,36	11,23	10,79	12,39	12,52	12,46
Riau	19,19	6,00	12,88	5,26	5,00	5,13	10,86	5,38	8,19
Jambi	4,09	4,23	4,16	7,59	8,99	8,29	6,45	7,50	6,97
Sumatera Selatan	16,52	16,53	16,52	7,14	6,90	7,02	10,64	10,40	10,52
Bengkulu	20,52	6,74	13,87	9,25	10,36	9,80	12,98	9,20	11,13
Lampung	26,91	6,72	17,11	8,49	9,20	8,84	14,36	8,43	11,45
Kepulauan Bangka Belitung	17,17	4,38	10,98	5,38	5,52	5,45	11,98	4,90	8,49
Kepulauan Riau	4,25	4,02	4,14	3,57	5,41	4,50	4,20	4,12	4,16
DKI Jakarta	14,76	6,86	10,83				14,76	6,86	10,83
Jawa Barat	18,77	6,49	12,85	8,96	9,82	9,39	16,73	7,24	12,10
Jawa Tengah	17,44	17,57	17,50	12,17	12,25	12,21	14,94	14,94	14,94
DI Yogyakarta	16,90	5,08	11,16	8,16	3,56	5,91	14,68	4,69	9,82
Jawa Timur	17,07	17,14	17,11	10,62	10,63	10,63	14,21	14,17	14,19
Banten	9,98	18,39	14,12	9,99	7,61	8,80	9,98	15,09	12,50
Bali	15,92	6,74	11,49	9,52	9,05	9,28	14,08	7,45	10,83
Nusa Tenggara Barat	18,08	19,00	18,53	21,25	24,40	22,82	19,69	21,83	20,74
Nusa Tenggara Timur	9,52	9,23	9,38	13,96	14,38	14,17	12,90	13,23	13,06
Kalimantan Barat	6,30	6,66	6,47	8,19	7,71	7,95	7,52	7,35	7,44
Kalimantan Tengah	3,81	10,92	7,28	7,45	5,22	6,34	5,97	7,49	6,72
Kalimantan Selatan	16,47	6,97	11,89	11,35	10,59	10,97	13,84	8,89	11,41
Kalimantan Timur	4,73	10,29	7,44	3,50	4,01	3,76	4,34	8,19	6,24
Kalimantan Utara	5,05	11,21	8,02	5,82	3,62	4,72	5,34	8,22	6,74
Sulawesi Utara	6,15	14,61	10,27	8,20	7,44	7,83	7,10	11,26	9,13
Sulawesi Tengah	8,24	18,21	13,15	8,60	9,00	8,80	8,49	11,77	10,11
Sulawesi Selatan	7,45	19,60	13,39	8,11	7,02	7,57	7,82	12,60	10,16
Sulawesi Tenggara	21,19	5,74	13,81	10,87	9,99	10,44	14,60	8,52	11,63
Gorontalo	13,92	18,01	15,91	12,87	13,16	13,02	13,32	15,16	14,23
Sulawesi Barat	14,94	18,51	16,67	9,32	9,07	9,20	10,48	10,92	10,70
Maluku	7,32	7,71	7,50	8,44	8,77	8,60	7,98	8,34	8,16
Maluku Utara	7,89	9,92	8,86	9,87	8,38	9,14	9,34	8,77	9,06
Papua Barat	13,45	4,19	9,04	6,61	7,86	7,22	9,41	6,40	7,95
Papua	7,34	7,16	7,25	5,90	5,37	5,65	6,28	5,84	6,07
Indonesia	**15,17**	**11,22**	**13,26**	**9,84**	**9,89**	**9,87**	**12,84**	**10,62**	**11,75**

Catatan: L (Laki-Laki), P (Perempuan), L+P (Laki-Laki + Perempuan)

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 7.14

Sampling error Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun di perdesaan yang Sakit (Terganggu Pekerjaan, Sekolah, atau Kegiatan Sehari-hari) menurut Provinsi dan jenis kelamin, 2021

Provinsi	Laki-Laki				
	Estimasi	Standar Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	13,91	0,58	4,14	12,82	15,08
Sumatera Utara	8,45	0,42	5,03	7,65	9,32
Sumatera Barat	10,36	0,58	5,59	9,28	11,55
Riau	5,26	0,46	8,74	4,43	6,24
Jambi	7,59	0,55	7,24	6,58	8,74
Sumatera Selatan	7,14	0,46	6,40	6,29	8,09
Bengkulu	9,25	0,68	7,31	8,00	10,66
Lampung	8,49	0,51	5,97	7,55	9,53
Kepulauan Bangka Belitung	5,38	0,72	13,46	4,12	6,98
Kepulauan Riau	3,57	0,99	27,83	2,06	6,12
DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jawa Barat	8,96	0,51	5,73	8,00	10,01
Jawa Tengah	12,17	0,53	4,33	11,17	13,24
DI Yogyakarta	8,16	1,98	24,29	5,02	12,98
Jawa Timur	10,62	0,44	4,18	9,78	11,52
Banten	9,99	0,93	9,28	8,31	11,96
Bali	9,52	0,97	10,15	7,79	11,59
Nusa Tenggara Barat	21,25	1,09	5,13	19,19	23,46
Nusa Tenggara Timur	13,96	0,49	3,51	13,02	14,94
Kalimantan Barat	8,19	0,52	6,34	7,23	9,27
Kalimantan Tengah	7,45	0,65	8,79	6,26	8,84
Kalimantan Selatan	11,35	0,72	6,35	10,01	12,84
Kalimantan Timur	3,50	0,65	18,55	2,43	5,02
Kalimantan Utara	5,82	1,22	21,03	3,83	8,73
Sulawesi Utara	8,20	0,63	7,67	7,05	9,52
Sulawesi Tengah	8,60	0,53	6,18	7,62	9,70
Sulawesi Selatan	8,11	0,44	5,43	7,29	9,02
Sulawesi Tenggara	10,87	0,76	7,00	9,46	12,45
Gorontalo	12,87	1,15	8,90	10,79	15,29
Sulawesi Barat	9,32	0,83	8,85	7,83	11,07
Maluku	8,44	0,68	8,04	7,20	9,87
Maluku Utara	9,87	0,73	7,39	8,53	11,39
Papua Barat	6,61	0,57	8,61	5,58	7,82
Papua	5,90	0,36	6,04	5,24	6,64
Indonesia	**9,84**	**0,13**	**1,33**	**9,59**	**10,10**

Sumber: Susenas MSBP, 2021

Lampiran 7.14 (Lanjutan)

Sampling error Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun di perdesaan yang Sakit (Terganggu Pekerjaan, Sekolah, atau Kegiatan Sehari-hari) menurut Provinsi dan jenis kelamin, 2021

Provinsi	Perempuan				
	Estimasi	Standar Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	13,09	0,56	4,29	12,02	14,23
Sumatera Utara	8,98	0,45	5,06	8,13	9,91
Sumatera Barat	11,23	0,63	5,56	10,07	12,52
Riau	5,00	0,46	9,19	4,17	5,98
Jambi	8,99	0,61	6,83	7,86	10,27
Sumatera Selatan	6,90	0,46	6,72	6,05	7,87
Bengkulu	10,36	0,75	7,24	8,98	11,92
Lampung	9,20	0,55	6,00	8,17	10,34
Kepulauan Bangka Belitung	5,52	0,84	15,14	4,09	7,40
Kepulauan Riau	5,41	1,38	25,60	3,25	8,86
DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jawa Barat	9,82	0,56	5,66	8,78	10,96
Jawa Tengah	12,25	0,54	4,41	11,23	13,35
DI Yogyakarta	3,56	0,91	25,45	2,16	5,84
Jawa Timur	10,63	0,45	4,27	9,78	11,56
Banten	7,61	0,74	9,68	6,28	9,18
Bali	9,05	1,09	12,08	7,12	11,43
Nusa Tenggara Barat	24,40	1,21	4,97	22,11	26,85
Nusa Tenggara Timur	14,38	0,52	3,60	13,40	15,42
Kalimantan Barat	7,71	0,52	6,73	6,76	8,79
Kalimantan Tengah	5,22	0,51	9,84	4,30	6,32
Kalimantan Selatan	10,59	0,73	6,94	9,23	12,11
Kalimantan Timur	4,01	0,75	18,60	2,78	5,76
Kalimantan Utara	3,62	0,89	24,46	2,23	5,82
Sulawesi Utara	7,44	0,63	8,52	6,29	8,78
Sulawesi Tengah	9,00	0,60	6,71	7,89	10,26
Sulawesi Selatan	7,02	0,43	6,11	6,22	7,91
Sulawesi Tenggara	9,99	0,61	6,11	8,86	11,25
Gorontalo	13,16	1,12	8,54	11,11	15,53
Sulawesi Barat	9,07	0,85	9,33	7,54	10,87
Maluku	8,77	0,73	8,30	7,44	10,31
Maluku Utara	8,38	0,64	7,68	7,21	9,73
Papua Barat	7,86	0,73	9,29	6,54	9,41
Papua	5,37	0,35	6,47	4,73	6,10
Indonesia	**9,89**	**0,13**	**1,36**	**9,63**	**10,15**

Sumber: Susenas MSBP, 2021

Lampiran 7.15

Persentase Penduduk Berumur 0-17 tahun yang mengalami keluhan kesehatan dan Berobat Jalan menurut provinsi, tipe daerah dan jenis kelamin, 2021

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
Aceh	15,53	14,49	15,03	14,38	13,35	13,87	14,76	13,71	14,25
Sumatera Utara	7,92	7,86	7,89	7,07	7,71	7,39	7,52	7,79	7,65
Sumatera Barat	16,11	17,48	16,77	11,61	11,14	11,38	13,78	14,11	13,94
Riau	20,23	4,76	12,83	4,65	4,02	4,34	10,92	4,30	7,69
Jambi	3,91	3,92	3,92	4,67	6,02	5,34	4,42	5,36	4,88
Sumatera Selatan	18,44	18,33	18,38	7,11	6,29	6,70	11,34	10,66	11,01
Bengkulu	19,25	5,26	12,50	8,19	8,35	8,27	11,86	7,36	9,65
Lampung	26,73	7,07	17,19	8,69	9,45	9,07	14,44	8,71	11,63
Kepulauan Bangka Belitung	16,73	4,51	10,82	6,40	8,02	7,21	12,18	6,12	9,20
Kepulauan Riau	4,65	4,28	4,47	3,45	5,46	4,47	4,57	4,37	4,47
DKI Jakarta	16,30	7,44	11,90				16,30	7,44	11,90
Jawa Barat	18,34	6,01	12,39	6,96	8,10	7,54	15,98	6,48	11,34
Jawa Tengah	8,16	18,02	12,89	7,89	12,20	10,04	8,03	15,14	11,51
DI Yogyakarta	16,68	5,25	11,13	10,49	8,64	9,58	15,11	6,12	10,73
Jawa Timur	8,53	16,29	12,29	10,15	9,36	9,76	9,24	13,13	11,15
Banten	8,29	16,83	12,49	5,29	4,18	4,74	7,39	12,96	10,14
Bali	16,71	7,46	12,25	9,17	7,84	8,50	14,54	7,58	11,13
Nusa Tenggara Barat	18,40	16,98	17,71	15,50	18,82	17,16	16,92	17,94	17,42
Nusa Tenggara Timur	7,43	7,72	7,57	11,79	12,30	12,04	10,75	11,28	11,01
Kalimantan Barat	8,56	8,81	8,68	5,72	6,01	5,86	6,73	6,97	6,85
Kalimantan Tengah	3,01	9,61	6,23	3,83	3,70	3,77	3,50	6,06	4,76
Kalimantan Selatan	12,85	3,87	8,52	5,95	5,81	5,88	9,30	4,90	7,14
Kalimantan Timur	3,54	9,48	6,44	3,40	3,93	3,67	3,50	7,63	5,53
Kalimantan Utara	4,32	9,08	6,61	5,58	3,20	4,39	4,79	6,76	5,76
Sulawesi Utara	6,26	14,09	10,08	6,46	6,04	6,26	6,35	10,33	8,30
Sulawesi Tengah	4,52	15,96	10,16	5,08	5,01	5,05	4,91	8,30	6,59
Sulawesi Selatan	4,60	16,56	10,45	5,81	5,55	5,68	5,27	10,44	7,81
Sulawesi Tenggara	11,65	3,91	7,95	4,99	5,02	5,00	7,39	4,63	6,05
Gorontalo	13,07	17,77	15,36	10,53	9,32	9,92	11,61	12,80	12,20
Sulawesi Barat	9,71	16,23	12,87	5,32	5,23	5,28	6,23	7,39	6,80
Maluku	5,90	7,45	6,64	4,40	5,39	4,89	5,02	6,21	5,60
Maluku Utara	4,94	5,52	5,22	6,33	4,76	5,56	5,96	4,95	5,47
Papua Barat	12,62	4,75	8,87	7,54	7,22	7,38	9,62	6,24	7,98
Papua	6,15	6,42	6,28	4,96	4,13	4,56	5,27	4,73	5,01
Indonesia	**12,79**	**10,83**	**11,84**	**7,90**	**8,47**	**8,18**	**10,65**	**9,77**	**10,22**

Catatan: L (Laki-Laki), P (Perempuan), L+P (Laki-Laki + Perempuan)

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 7.16

Sampling error Persentase Penduduk Berumur 0-17 tahun di perdesaan yang mengalami keluhan kesehatan dan Berobat Jalan menurut provinsi dan jenis kelamin, 2021

Provinsi	Perempuan				
	Estimasi	Standar Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	13,35	0,59	4,43	12,23	14,55
Sumatera Utara	7,71	0,44	5,73	6,89	8,62
Sumatera Barat	11,14	0,62	5,60	9,98	12,42
Riau	4,02	0,47	11,64	3,19	5,04
Jambi	6,02	0,50	8,29	5,11	7,08
Sumatera Selatan	6,29	0,43	6,84	5,50	7,19
Bengkulu	8,35	0,70	8,33	7,09	9,82
Lampung	9,45	0,55	5,79	8,43	10,58
Kepulauan Bangka Belitung	8,02	0,95	11,85	6,35	10,09
Kepulauan Riau	5,46	1,41	25,88	3,26	8,98
DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jawa Barat	8,10	0,51	6,28	7,15	9,15
Jawa Tengah	12,20	0,53	4,38	11,19	13,29
DI Yogyakarta	8,64	1,53	17,76	6,07	12,16
Jawa Timur	9,36	0,43	4,64	8,54	10,25
Banten	4,18	0,54	13,00	3,24	5,39
Bali	7,84	1,01	12,88	6,08	10,07
Nusa Tenggara Barat	18,82	1,12	5,98	16,71	21,12
Nusa Tenggara Timur	12,30	0,47	3,85	11,40	13,26
Kalimantan Barat	6,01	0,46	7,69	5,16	6,98
Kalimantan Tengah	3,70	0,47	12,68	2,89	4,74
Kalimantan Selatan	5,81	0,56	9,70	4,79	7,01
Kalimantan Timur	3,93	0,71	17,95	2,76	5,57
Kalimantan Utara	3,20	0,92	28,73	1,82	5,59
Sulawesi Utara	6,04	0,60	9,86	4,98	7,32
Sulawesi Tengah	5,01	0,43	8,64	4,23	5,93
Sulawesi Selatan	5,55	0,38	6,90	4,85	6,35
Sulawesi Tenggara	5,02	0,47	9,35	4,17	6,02
Gorontalo	9,32	1,00	10,71	7,54	11,47
Sulawesi Barat	5,23	0,61	11,75	4,15	6,57
Maluku	5,39	0,60	11,09	4,33	6,69
Maluku Utara	4,76	0,50	10,45	3,87	5,83
Papua Barat	7,22	0,69	9,61	5,97	8,70
Papua	4,13	0,29	6,98	3,60	4,73
Indonesia	**8,47**	**0,13**	**1,93**	**8,22**	**8,72**

Sumber: Susenas MSBP, 2021

Lampiran 7.17

Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Tipe Daerah/Jenis Kelamin dan Tempat Berobat, 2021

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	RS pemerintah	RS swasta	praktik dokter/ bidan	klinik/ praktik dokter bersama	puskesmas/ pustu	UKBM	pengobatan tradisional/ alternatif	lainnya
Tipe Daerah								
Perkotaan	2,21	3,72	28,14	51,71	14,28	1,11	0,46	0,57
Perdesaan	2,29	1,44	54,53	11,48	25,01	7,18	1,61	0,93
Jenis Kelamin								
Laki-laki	2,41	2,90	35,80	40,31	17,17	3,02	0,81	0,69
Perempuan	2,04	2,91	39,50	34,08	19,16	3,55	0,94	0,70
Total	**2,23**	**2,91**	**37,54**	**37,39**	**18,10**	**3,27**	**0,87**	**0,69**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 7.18

Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan menurut Tipe Daerah dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2021

Tipe Daerah	Jaminan Kesehatan					
	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	BPJS Kesehatan Non-PBI/ Mandiri	Jamkesda	Asuransi swasta	Perusahaan/ kantor	Tidak punya
Perkotaan	20,31	19,66	3,08	0,72	3,42	54,13
Perdesaan	15,54	4,17	3,14	0,01	0,53	76,77
Perkotaan dan Perdesaan	**18,61**	**14,14**	**3,10**	**0,46**	**2,39**	**62,20**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 7.19

Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
Aceh	2,88	2,17	2,54	1,67	1,86	1,77	2,07	1,96	2,02
Sumatera Utara	1,40	1,08	1,25	1,04	0,76	0,90	1,23	0,93	1,08
Sumatera Barat	1,09	1,76	1,41	1,37	1,15	1,26	1,23	1,43	1,33
Riau	1,48	1,32	1,40	1,23	1,02	1,13	1,33	1,14	1,24
Jambi	1,45	1,16	1,31	0,84	1,19	1,02	1,04	1,18	1,11
Sumatera Selatan	1,85	2,00	1,92	0,93	0,80	0,87	1,27	1,24	1,25
Bengkulu	1,14	2,15	1,63	1,54	1,01	1,27	1,41	1,37	1,39
Lampung	2,48	2,57	2,52	1,46	1,61	1,53	1,79	1,91	1,85
Kepulauan Bangka Belitung	2,43	2,49	2,46	1,74	1,28	1,51	2,13	1,94	2,03
Kepulauan Riau	2,36	1,59	1,98	1,70	1,16	1,42	2,31	1,55	1,94
DKI Jakarta	2,84	2,28	2,56				2,84	2,28	2,56
Jawa Barat	2,33	2,01	2,17	1,53	2,20	1,87	2,16	2,05	2,11
Jawa Tengah	3,22	2,62	2,93	2,33	2,30	2,32	2,80	2,46	2,63
DI Yogyakarta	2,67	3,33	2,99	3,56	2,06	2,83	2,90	3,01	2,95
Jawa Timur	3,04	2,75	2,90	2,29	2,28	2,29	2,71	2,53	2,62
Banten	1,51	2,32	1,91	0,89	0,81	0,85	1,32	1,86	1,59
Bali	2,12	2,75	2,42	1,96	1,57	1,76	2,07	2,39	2,23
Nusa Tenggara Barat	3,24	3,56	3,39	3,33	3,19	3,26	3,29	3,37	3,33
Nusa Tenggara Timur	3,21	3,55	3,38	2,12	1,77	1,94	2,38	2,17	2,27
Kalimantan Barat	1,99	1,97	1,98	0,95	1,13	1,04	1,32	1,42	1,37
Kalimantan Tengah	1,26	1,47	1,36	1,25	1,23	1,24	1,25	1,32	1,29
Kalimantan Selatan	2,02	1,88	1,95	1,50	1,72	1,61	1,75	1,79	1,77
Kalimantan Timur	3,15	2,30	2,73	2,24	1,35	1,79	2,85	1,98	2,43
Kalimantan Utara	2,82	2,56	2,69	1,65	1,65	1,65	2,38	2,20	2,29
Sulawesi Utara	3,05	2,84	2,95	1,52	1,82	1,66	2,34	2,36	2,35
Sulawesi Tengah	1,86	1,94	1,90	1,63	1,98	1,80	1,70	1,97	1,83
Sulawesi Selatan	2,35	2,11	2,23	2,08	2,57	2,32	2,20	2,36	2,28
Sulawesi Tenggara	2,25	1,59	1,94	1,45	1,08	1,27	1,74	1,26	1,51
Gorontalo	2,90	2,23	2,58	2,09	2,06	2,08	2,44	2,13	2,29
Sulawesi Barat	1,28	0,37	0,84	1,77	1,26	1,52	1,67	1,09	1,38
Maluku	0,79	0,97	0,88	0,58	0,36	0,47	0,67	0,61	0,64
Maluku Utara	2,48	1,19	1,86	0,81	0,93	0,87	1,26	1,00	1,13
Papua Barat	1,92	1,53	1,74	0,78	0,65	0,72	1,25	1,00	1,13
Papua	1,81	1,76	1,78	0,63	0,64	0,63	0,94	0,93	0,93
Indonesia	**2,40**	**2,20**	**2,30**	**1,67**	**1,69**	**1,68**	**2,08**	**1,97**	**2,03**

Catatan: L (Laki-Laki), P (Perempuan), L+P (Laki-Laki + Perempuan)

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 7.20

Sampling error Persentase Berumur Penduduk 0-17 Tahun di Perkotaan yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Laki-Laki				
	Estimasi	Standar Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	2,88	0,42	14,74	2,16	3,84
Sumatera Utara	1,40	0,21	15,39	1,03	1,89
Sumatera Barat	1,09	0,24	22,48	0,70	1,69
Riau	1,48	0,30	20,36	0,99	2,20
Jambi	1,45	0,41	28,38	0,83	2,53
Sumatera Selatan	1,85	0,40	21,53	1,21	2,81
Bengkulu	1,14	0,37	32,06	0,61	2,13
Lampung	2,48	0,51	20,46	1,66	3,69
Kepulauan Bangka Belitung	2,43	0,50	20,79	1,61	3,64
Kepulauan Riau	2,36	0,56	23,95	1,47	3,76
DKI Jakarta	2,84	0,42	14,73	2,13	3,79
Jawa Barat	2,33	0,19	8,06	1,99	2,72
Jawa Tengah	3,22	0,24	7,31	2,79	3,71
DI Yogyakarta	2,67	0,57	21,16	1,76	4,04
Jawa Timur	3,04	0,25	8,16	2,59	3,56
Banten	1,51	0,28	18,33	1,05	2,16
Bali	2,12	0,40	18,85	1,46	3,06
Nusa Tenggara Barat	3,24	0,49	15,23	2,40	4,36
Nusa Tenggara Timur	3,21	0,59	18,25	2,24	4,58
Kalimantan Barat	1,99	0,41	20,48	1,33	2,97
Kalimantan Tengah	1,26	0,35	27,74	0,73	2,16
Kalimantan Selatan	2,02	0,38	18,80	1,40	2,92
Kalimantan Timur	3,15	0,50	15,96	2,30	4,29
Kalimantan Utara	2,82	0,67	23,88	1,76	4,49
Sulawesi Utara	3,05	0,51	16,80	2,19	4,24
Sulawesi Tengah	1,86	0,49	26,07	1,12	3,10
Sulawesi Selatan	2,35	0,36	15,40	1,73	3,17
Sulawesi Tenggara	2,25	0,46	20,36	1,51	3,35
Gorontalo	2,90	0,71	24,57	1,79	4,68
Sulawesi Barat	1,28	0,78	61,03	0,38	4,16
Maluku	0,79	0,25	31,26	0,43	1,46
Maluku Utara	2,48	0,65	26,20	1,48	4,12
Papua Barat	1,92	0,47	24,36	1,19	3,09
Papua	1,81	0,39	21,82	1,18	2,76
Indonesia	**2,40**	**0,08**	**3,25**	**2,25**	**2,56**

Sumber: Susenas MSBP, 2021

Lampiran 7.20 (Lanjutan)

Sampling error Persentase Berumur Penduduk 0-17 Tahun di Perkotaan yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Perempuan				
	Estimasi	Standar Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	2,17	0,35	16,33	1,58	2,99
Sumatera Utara	1,08	0,19	17,88	0,76	1,54
Sumatera Barat	1,76	0,35	19,82	1,19	2,59
Riau	1,32	0,28	21,49	0,87	2,01
Jambi	1,16	0,35	30,10	0,64	2,09
Sumatera Selatan	2,00	0,45	22,34	1,29	3,09
Bengkulu	2,15	0,60	27,62	1,25	3,69
Lampung	2,57	0,53	20,74	1,71	3,84
Kepulauan Bangka Belitung	2,49	0,58	23,35	1,57	3,93
Kepulauan Riau	1,59	0,41	25,88	0,95	2,63
DKI Jakarta	2,28	0,34	14,83	1,70	3,04
Jawa Barat	2,01	0,18	9,16	1,68	2,40
Jawa Tengah	2,62	0,22	8,42	2,22	3,09
DI Yogyakarta	3,33	0,69	20,61	2,22	4,98
Jawa Timur	2,75	0,24	8,84	2,31	3,26
Banten	2,32	0,45	19,24	1,59	3,38
Bali	2,75	0,51	18,42	1,92	3,94
Nusa Tenggara Barat	3,56	0,53	14,98	2,65	4,76
Nusa Tenggara Timur	3,55	0,70	19,57	2,42	5,20
Kalimantan Barat	1,97	0,42	21,11	1,30	2,97
Kalimantan Tengah	1,47	0,39	26,58	0,87	2,47
Kalimantan Selatan	1,88	0,39	20,62	1,25	2,80
Kalimantan Timur	2,30	0,40	17,25	1,64	3,22
Kalimantan Utara	2,56	0,64	25,06	1,56	4,16
Sulawesi Utara	2,84	0,56	19,60	1,93	4,16
Sulawesi Tengah	1,94	0,48	24,55	1,20	3,14
Sulawesi Selatan	2,11	0,31	14,69	1,58	2,81
Sulawesi Tenggara	1,59	0,34	21,13	1,05	2,40
Gorontalo	2,23	0,66	29,45	1,25	3,96
Sulawesi Barat	0,37	0,26	68,95	0,10	1,44
Maluku	0,97	0,39	39,93	0,44	2,12
Maluku Utara	1,19	0,47	39,30	0,55	2,55
Papua Barat	1,53	0,40	26,34	0,91	2,56
Papua	1,76	0,44	25,21	1,07	2,87
Indonesia	**2,20**	**0,08**	**3,56**	**2,05**	**2,36**

Sumber: Susenas MSBP, 2021

Lampiran 7.20 (Lanjutan)

Sampling error Persentase Berumur Penduduk 0-17 Tahun di Perkotaan yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Laki-Laki + Perempuan				
	Estimasi	Standar Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	2,54	0,29	11,35	2,03	3,17
Sumatera Utara	1,25	0,14	11,62	0,99	1,56
Sumatera Barat	1,41	0,21	15,24	1,05	1,90
Riau	1,40	0,22	15,46	1,04	1,90
Jambi	1,31	0,27	20,71	0,87	1,97
Sumatera Selatan	1,92	0,30	15,44	1,42	2,60
Bengkulu	1,63	0,34	21,09	1,08	2,46
Lampung	2,52	0,36	14,46	1,90	3,34
Kepulauan Bangka Belitung	2,46	0,39	15,97	1,80	3,36
Kepulauan Riau	1,98	0,35	17,73	1,40	2,80
DKI Jakarta	2,56	0,28	10,77	2,07	3,16
Jawa Barat	2,17	0,13	6,18	1,92	2,45
Jawa Tengah	2,93	0,16	5,59	2,63	3,27
DI Yogyakarta	2,99	0,44	14,77	2,24	3,99
Jawa Timur	2,90	0,18	6,12	2,57	3,26
Banten	1,91	0,26	13,70	1,46	2,49
Bali	2,42	0,34	13,90	1,84	3,18
Nusa Tenggara Barat	3,39	0,38	11,16	2,73	4,22
Nusa Tenggara Timur	3,38	0,45	13,37	2,59	4,38
Kalimantan Barat	1,98	0,30	15,31	1,46	2,67
Kalimantan Tengah	1,36	0,26	19,14	0,94	1,98
Kalimantan Selatan	1,95	0,27	13,81	1,49	2,56
Kalimantan Timur	2,73	0,32	11,83	2,17	3,45
Kalimantan Utara	2,69	0,47	17,29	1,92	3,77
Sulawesi Utara	2,95	0,39	13,38	2,27	3,83
Sulawesi Tengah	1,90	0,34	18,02	1,34	2,71
Sulawesi Selatan	2,23	0,25	11,17	1,79	2,78
Sulawesi Tenggara	1,94	0,29	15,18	1,44	2,61
Gorontalo	2,58	0,49	18,89	1,78	3,72
Sulawesi Barat	0,84	0,42	49,71	0,32	2,21
Maluku	0,88	0,23	25,80	0,53	1,45
Maluku Utara	1,86	0,41	21,90	1,21	2,85
Papua Barat	1,74	0,31	17,93	1,22	2,47
Papua	1,78	0,30	16,57	1,29	2,46
Indonesia	**2,30**	**0,06**	**2,44**	**2,20**	**2,42**

Sumber: Susenas MSBP, 2021

Lampiran 7.21

Sampling error Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun di Perdesaan yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Laki-Laki				
	Estimasi	Standar Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	1,67	0,18	11,01	1,34	2,07
Sumatera Utara	1,04	0,14	13,86	0,79	1,36
Sumatera Barat	1,37	0,21	15,33	1,01	1,85
Riau	1,23	0,22	17,68	0,87	1,73
Jambi	0,84	0,18	21,52	0,55	1,28
Sumatera Selatan	0,93	0,17	17,92	0,65	1,32
Bengkulu	1,54	0,28	17,90	1,08	2,18
Lampung	1,46	0,22	15,19	1,09	1,97
Kepulauan Bangka Belitung	1,74	0,40	23,25	1,10	2,74
Kepulauan Riau	1,70	0,71	41,96	0,74	3,84
DKI Jakarta					
Jawa Barat	1,53	0,20	12,97	1,18	1,97
Jawa Tengah	2,33	0,20	8,77	1,97	2,77
DI Yogyakarta	3,56	0,94	26,41	2,11	5,94
Jawa Timur	2,29	0,21	9,00	1,92	2,74
Banten	0,89	0,28	31,26	0,48	1,64
Bali	1,96	0,44	22,41	1,26	3,03
Nusa Tenggara Barat	3,33	0,47	14,09	2,53	4,39
Nusa Tenggara Timur	2,12	0,18	8,65	1,79	2,51
Kalimantan Barat	0,95	0,16	16,34	0,69	1,31
Kalimantan Tengah	1,25	0,26	20,70	0,83	1,87
Kalimantan Selatan	1,50	0,27	17,89	1,05	2,12
Kalimantan Timur	2,24	0,59	26,60	1,32	3,75
Kalimantan Utara	1,65	0,39	23,54	1,04	2,61
Sulawesi Utara	1,52	0,27	17,52	1,07	2,13
Sulawesi Tengah	1,63	0,23	13,84	1,24	2,13
Sulawesi Selatan	2,08	0,22	10,41	1,69	2,55
Sulawesi Tenggara	1,45	0,21	14,24	1,10	1,92
Gorontalo	2,09	0,49	23,60	1,31	3,31
Sulawesi Barat	1,77	0,32	18,38	1,23	2,53
Maluku	0,58	0,14	24,58	0,36	0,94
Maluku Utara	0,81	0,18	22,40	0,52	1,26
Papua Barat	0,78	0,19	24,46	0,48	1,26
Papua	0,63	0,11	17,14	0,45	0,88
Indonesia	**1,67**	**0,05**	**3,13**	**1,58**	**1,78**

Sumber: Susenas MSBP, 2021

Lampiran 7.21 (Lanjutan)

Sampling error Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun di Perdesaan yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Perempuan				
	Estimasi	Standar Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	1,86	0,20	10,97	1,50	2,31
Sumatera Utara	0,76	0,13	16,69	0,55	1,05
Sumatera Barat	1,15	0,19	16,93	0,82	1,59
Riau	1,02	0,20	19,17	0,70	1,49
Jambi	1,19	0,22	18,58	0,83	1,72
Sumatera Selatan	0,80	0,15	19,09	0,55	1,16
Bengkulu	1,01	0,25	24,64	0,62	1,63
Lampung	1,61	0,24	14,79	1,20	2,15
Kepulauan Bangka Belitung	1,28	0,37	28,71	0,73	2,24
Kepulauan Riau	1,16	0,56	48,37	0,45	2,96
DKI Jakarta					
Jawa Barat	2,20	0,26	11,67	1,75	2,76
Jawa Tengah	2,30	0,21	9,22	1,92	2,75
DI Yogyakarta	2,06	0,71	34,43	1,04	4,02
Jawa Timur	2,28	0,22	9,62	1,89	2,75
Banten	0,81	0,26	31,61	0,44	1,51
Bali	1,57	0,43	27,33	0,92	2,67
Nusa Tenggara Barat	3,19	0,47	14,59	2,40	4,24
Nusa Tenggara Timur	1,77	0,16	9,23	1,47	2,12
Kalimantan Barat	1,13	0,19	16,60	0,82	1,56
Kalimantan Tengah	1,23	0,23	18,45	0,85	1,76
Kalimantan Selatan	1,72	0,30	17,36	1,22	2,41
Kalimantan Timur	1,35	0,47	34,91	0,68	2,67
Kalimantan Utara	1,65	0,67	40,48	0,74	3,62
Sulawesi Utara	1,82	0,33	18,23	1,27	2,59
Sulawesi Tengah	1,98	0,28	14,13	1,50	2,61
Sulawesi Selatan	2,57	0,25	9,76	2,12	3,11
Sulawesi Tenggara	1,08	0,19	17,53	0,77	1,52
Gorontalo	2,06	0,43	21,05	1,36	3,11
Sulawesi Barat	1,26	0,31	24,72	0,78	2,04
Maluku	0,36	0,10	27,90	0,21	0,63
Maluku Utara	0,93	0,21	22,21	0,60	1,44
Papua Barat	0,65	0,15	23,04	0,41	1,02
Papua	0,64	0,12	18,48	0,44	0,92
Indonesia	**1,69**	**0,06**	**3,30**	**1,58**	**1,80**

Sumber: Susenas MSBP, 2021

Lampiran 7.21 (Lanjutan)

Sampling error Persentase Berumur Penduduk 0-17 Tahun di Perkotaan yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Laki-Laki + Perempuan				
	Estimasi	Standar Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	1,77	0,14	7,83	1,51	2,06
Sumatera Utara	0,90	0,10	11,45	0,72	1,13
Sumatera Barat	1,26	0,15	11,74	1,00	1,58
Riau	1,13	0,15	13,25	0,87	1,46
Jambi	1,02	0,14	14,00	0,77	1,34
Sumatera Selatan	0,87	0,11	13,27	0,67	1,12
Bengkulu	1,27	0,18	14,50	0,96	1,69
Lampung	1,53	0,16	10,55	1,25	1,89
Kepulauan Bangka Belitung	1,51	0,28	18,26	1,05	2,16
Kepulauan Riau	1,42	0,45	31,73	0,76	2,64
DKI Jakarta					
Jawa Barat	1,87	0,16	8,74	1,58	2,22
Jawa Tengah	2,32	0,15	6,49	2,04	2,63
DI Yogyakarta	2,83	0,59	20,87	1,87	4,24
Jawa Timur	2,29	0,15	6,58	2,01	2,60
Banten	0,85	0,19	22,24	0,55	1,31
Bali	1,76	0,31	17,43	1,25	2,48
Nusa Tenggara Barat	3,26	0,35	10,74	2,64	4,02
Nusa Tenggara Timur	1,94	0,12	6,36	1,71	2,20
Kalimantan Barat	1,04	0,12	11,99	0,82	1,32
Kalimantan Tengah	1,24	0,17	13,93	0,94	1,62
Kalimantan Selatan	1,61	0,20	12,41	1,26	2,05
Kalimantan Timur	1,79	0,38	20,96	1,19	2,70
Kalimantan Utara	1,65	0,39	23,46	1,04	2,61
Sulawesi Utara	1,66	0,21	12,71	1,30	2,13
Sulawesi Tengah	1,80	0,18	10,23	1,47	2,20
Sulawesi Selatan	2,32	0,17	7,27	2,01	2,67
Sulawesi Tenggara	1,27	0,14	11,26	1,02	1,58
Gorontalo	2,08	0,33	15,95	1,52	2,83
Sulawesi Barat	1,52	0,23	15,03	1,13	2,03
Maluku	0,47	0,09	19,58	0,32	0,70
Maluku Utara	0,87	0,14	15,98	0,64	1,19
Papua Barat	0,72	0,12	16,98	0,51	1,00
Papua	0,63	0,08	12,56	0,49	0,81
Indonesia	**1,68**	**0,04**	**2,30**	**1,61**	**1,76**

Sumber: Susenas MSBP, 2021

Lampiran 7.22

Sampling error Persentase Penduduk Perempuan Berumur 0-17 Tahun di Perkotaan dan Perdesaan yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Perempuan				
	Estimasi	Standar Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	1,96	0,18	9,14	1,64	2,35
Sumatera Utara	0,93	0,12	12,67	0,72	1,19
Sumatera Barat	1,43	0,19	13,49	1,10	1,86
Riau	1,14	0,16	14,30	0,86	1,51
Jambi	1,18	0,19	15,85	0,87	1,61
Sumatera Selatan	1,24	0,19	15,36	0,91	1,67
Bengkulu	1,37	0,26	18,57	0,95	1,97
Lampung	1,91	0,23	12,23	1,50	2,42
Kepulauan Bangka Belitung	1,94	0,36	18,48	1,35	2,78
Kepulauan Riau	1,55	0,38	24,57	0,96	2,51
DKI Jakarta	2,28	0,34	14,83	1,70	3,04
Jawa Barat	2,05	0,15	7,50	1,77	2,37
Jawa Tengah	2,46	0,15	6,21	2,18	2,78
DI Yogyakarta	3,01	0,54	18,04	2,11	4,27
Jawa Timur	2,53	0,17	6,54	2,23	2,88
Banten	1,86	0,32	17,25	1,32	2,60
Bali	2,39	0,38	15,71	1,76	3,25
Nusa Tenggara Barat	3,37	0,35	10,46	2,74	4,13
Nusa Tenggara Timur	2,17	0,20	9,28	1,81	2,60
Kalimantan Barat	1,42	0,19	13,29	1,09	1,84
Kalimantan Tengah	1,32	0,21	15,62	0,97	1,80
Kalimantan Selatan	1,79	0,24	13,44	1,38	2,33
Kalimantan Timur	1,98	0,31	15,51	1,46	2,69
Kalimantan Utara	2,20	0,47	21,34	1,45	3,33
Sulawesi Utara	2,36	0,33	14,16	1,79	3,11
Sulawesi Tengah	1,97	0,24	12,32	1,55	2,51
Sulawesi Selatan	2,36	0,20	8,28	2,01	2,78
Sulawesi Tenggara	1,26	0,17	13,50	0,97	1,64
Gorontalo	2,13	0,37	17,45	1,51	3,00
Sulawesi Barat	1,09	0,26	23,56	0,68	1,72
Maluku	0,61	0,17	27,54	0,35	1,04
Maluku Utara	1,00	0,19	19,51	0,68	1,46
Papua Barat	1,00	0,18	18,42	0,70	1,43
Papua	0,93	0,15	15,61	0,69	1,27
Indonesia	**1,97**	**0,05**	**2,53**	**1,87**	**2,07**

Sumber: Susenas MSBP, 2021

Lampiran 7.23

Persentase Penduduk 0-17 Tahun yang Pernah Dirawat Inap dalam Satu Tahun Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2021

Provinsi	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	BPJS Kesehatan Non-PBI/ Mandiri	Jamkesda	Asuransi swasta	Perusahaan/ kantor	Tidak punya
Perkotaan	23,41	31,98	2,38	2,12	4,66	35,74
Perdesaan	32,32	13,72	3,39	0,33	1,49	49,00
Perkotaan dan Perdesaan	26,69	25,25	2,75	1,46	3,49	40,63

Sumber: Susenas MSBP, 2021

Lampiran 7.24

Persentase Anak Usia 5-17 Tahun yang Merokok Menurut provinsi, 2021

Provinsi	Persentase
Aceh	0,65
Sumatera Utara	0,63
Sumatera Barat	1,19
Riau	0,90
Jambi	1,09
Sumatera Selatan	1,79
Bengkulu	1,93
Lampung	1,64
Kepulauan Bangka Belitung	1,36
Kepulauan Riau	0,71
DKI Jakarta	0,89
Jawa Barat	2,08
Jawa Tengah	1,91
DI Yogyakarta	1,81
Jawa Timur	1,82
Banten	1,52
Bali	0,81
Nusa Tenggara Barat	2,28
Nusa Tenggara Timur	1,33
Kalimantan Barat	1,18
Kalimantan Tengah	1,12
Kalimantan Selatan	1,20
Kalimantan Timur	0,39
Kalimantan Utara	0,60
Sulawesi Utara	0,88
Sulawesi Tengah	1,35
Sulawesi Selatan	1,07
Sulawesi Tenggara	1,06
Gorontalo	1,67
Sulawesi Barat	1,54
Maluku	0,59
Maluku Utara	0,90
Papua Barat	0,87
Papua	1,01
Indonesia	**1,51**

Sumber: Susenas MSBP, 2021

Lampiran 7.25

Persentase Anak Usia 5-17 Tahun yang Merokok Menurut provinsi, Tipe Daerah dan Batang Rokok yang Dihisap per Minggu, 2021

Provinsi	1-6 batang	7-14 batang	15-29 batang	30-59 batang	≥ 60 batang
Perkotaan	4,36	14,93	21,31	32,06	27,34
Perdesaan	2,52	11,68	16,58	27,42	41,81
Perkotaan dan Perdesaan	3,40	13,23	18,84	29,64	34,88

Sumber: Susenas MSBP, 2021

PENDIDIKAN ANAK

APM penduduk umur 7–18 tahun menurut tipe daerah/ jenis kelamin dan jenjang Pendidikan tahun 2021

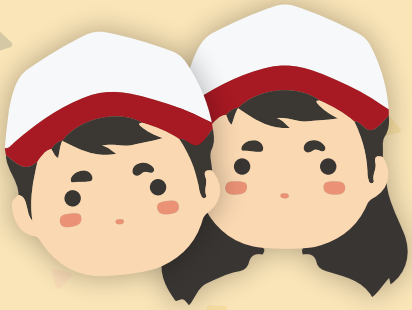

Perkotaan
98.16%

Perdesaan
97.35%

Laki-Laki
97.81%

Perempuan
97.78%

TOTAL
97.80%

TOTAL
80.59%

Laki-Laki
80.45%

Perempuan
80.73%

Perkotaan
82.46%

Perdesaan
78.28%

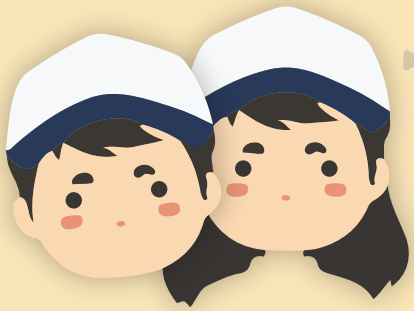

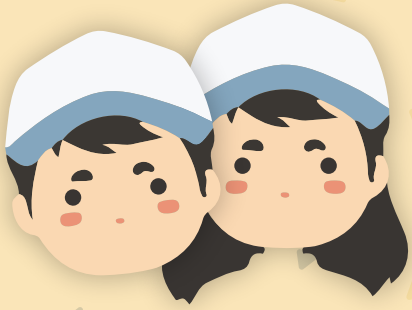

Perkotaan
64.64%

Perdesaan
57.66%

Laki-Laki
61.02%

Perempuan
62.30%

TOTAL
61.65%

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2021

Overview

Pendidikan merupakan satu dari tiga dimensi untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada dimensi pendidikan atau pengetahuan sebagai penyusun IPM, terdapat dua indikator utama, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia tujuh tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Selama periode tahun 2010 sampai dengan 2021, HLS Indonesia rata-rata meningkat 1,35 persen per tahun dan RLS meningkat 1,24 persen per tahun (Badan Pusat Statistik, 2021).

Untuk mendukung pembangunan pendidikan di Indonesia, pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mendefinisikan pendidikan sebagai sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Lebih lanjut peraturan tersebut menjelaskan dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sedangkan pendidikan nonformal adalah jalur Pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), sebuah organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfokus pada semua hal terkait dengan pendidikan, sains, serta kebudayaan, dalam salah satu laporannya menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia dalam dunia internasional berada pada peringkat ke-64 dari 120 negara (Safitri, Yunianti, & Rostika, 2022). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan Indonesia memerlukan strategi dan penanganan yang serius untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan negara lain. Pada bab ini, pembahasan akan berfokus pada kondisi pendidikan di Indonesia, kaitannya dengan pendidikan formal. Pokok bahasan meliputi Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Melek Huruf, serta Program Indonesia Pintar.

8.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan/proporsi antara jumlah penduduk Indonesia pada kelompok usia tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai.

8.1.1. Tren APS Penduduk Umur 7-18 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk umur 7-18 tahun dapat didefinisikan sebagai proporsi dari penduduk kelompok usia 7-18 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi), terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Di mana sejak tahun 2007, Pendidikan Non-Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

- Ditinjau dari tiga kelompok umur, tren APS periode 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan hasil:
- Pada kelompok umur 7-12 tahun, APS meningkat sejak tahun 2017 hingga 2020, dan mengalami penurunan sebesar 0,07 poin di tahun 2021.
- Pada kelompok umur 13-15 tahun, APS meningkat sejak tahun 2017 hingga 2021.
- Pada kelompok umur 16-18 tahun, APS meningkat sejak tahun 2017 hingga 2018 saja. Lalu mengalami penurununan pada pada tahun 2019, dan meningkat kembali pada tahun 2020 sampai dengan 2021.

Tren APS penduduk umur 7-18 tahun sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 dipresentasikan pada Gambar 8.1. Secara umum, telah terjadi peningkatan APS selama lima tahun terakhir. Hal ini dapat dimaknai bahwa terjadi peningkatan jumlah masyarakat Indonesia yang bersekolah. Penelitian Ruchiyani, Suriadi, Nainita, Cahaya, & Al-Ridho, 2022 menemukan bahwa, peningkatan APS juga perlu ditunjang dengan peningkatan kompetensi penduduk guna mendukung kondisi sumber daya manusia yang berkualitas.

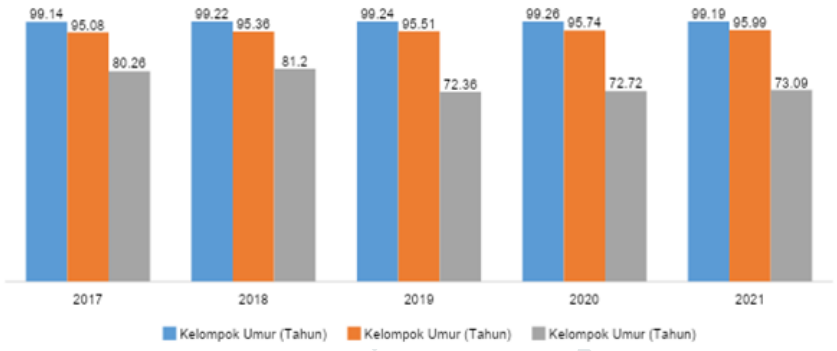

Gambar 8.1 Tren APS Penduduk Umur 7-18 Tahun (2017-2021)
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

8.1.2. APS Penduduk Umur 7-18 Tahun Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Hasil analisis APS penduduk umur 7-18 tahun menurut tipe daerah, jenis kelamin dan kelompok umur pada tahun 2021 disajikan pada Tabel 8.1. Berdasarkan tipe daerah, anak-anak yang tinggal di perkotaan memiliki APS lebih tinggi jika dibandingkan anak-anak yang tinggal di perdesaan, untuk tiga kelompok umur berbeda (7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun). Sementara berdasarkan jenis kelamin, APS anak perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki. Di sisi lain, apabila ditinjau secara keseluruhan, terjadi penurunan APS dari anak usia 7-12 tahun (99,19) ke APS anak usia 13-15 tahun (95,99), serta menurun 22,9 poin pada kelompok umur 16-18 tahun (73,09). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin bertambah usia anak, APS semakin menurun. Dengan demikian perlu strategi pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah anak hingga ke jenjang sekolah menengah atas sehingga penyediaan hak pendidikan bagi anak dapat dilakukan secara komprehensif.

Kelompok Umur	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
7-12 tahun	99.53	98.78	99.11	99.28	99.19
13-15 tahun	97.30	94.38	95.31	96.69	95.99
16-18 tahun	76.11	69.08	72.44	73.78	73.09

Tabel 8.1 APS Penduduk Umur 7-18 Tahun Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

8.1.3. APS Penduduk Umur 7-18 Tahun Menurut Provinsi dan Kelompok Umur

Hasil analisis APS penduduk umur 7-18 tahun menurut provinsi dan kelompok umur dipresentasikan pada Lampiran 8.5. Ditinjau berdasarkan provinsi, APS mengalami penurunan seiring meningkatnya usia anak. Pada kelompok umur 7-12 tahun, APS tertinggi terdapat di Provinsi Bengkulu (99,76). Provinsi Kalimantan Timur memiliki APS tertinggi untuk kelompok umur 13-15 tahun (98,90). Serta Provinsi D.I Yogyakarta memiliki APS tertinggi untuk kelompok umur 16-18 tahun (89,63).

Sementara itu, Provinsi Papua menjadi provinsi dengan APS terendah, untuk semua kelompok umur, yaitu (7-12 tahun), (13-15 tahun), dan (16-18 tahun). Penelitian (Lake & Utami, 2022) menemukan bahwa hal ini tidak terlepas dari kondisi infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan yang masih rendah di Provinsi Papua, yang juga didukung dengan kondisi banyaknya daerah yang terpencil dan sulit dijangkau. Selain itu terdapat faktor lain berupa kondisi ekonomi dan kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, sehingga lebih memilih untuk tidak menyekolahkan anak-anaknya.

8.2. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Selain Angka Partisipasi Sekolah (APS), pembahasan mengenai pendidikan juga dapat ditinjau dengan menggunakan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APM didefinisikan sebagai perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan pendudukan usia yang sesuai, serta dinyatakan dalam persentase (Sistem Informasi Kemendikbud, 2022). Sementara itu, APK adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama.

8.2.1. Tren APM dan APK Penduduk Umur 7-18 Tahun

APM anak umur 7-18 tahun memiliki arti sebagai proporsi dari penduduk kelompok usia 7-18 tahun yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur

penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Tren APM dan APK Penduduk Umur 7-18 Tahun tahun 2017 hingga 2021 dipresentasikan pada Tabel 8.2.

Tahun	APM			APK		
	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat
2017	97.19	78.40	69.31	108.50	90.23	82.84
2018	97.58	78.84	60.67	108.61	91.52	80.68
2019	97.64	79.40	60.84	107.46	90.57	83.98
2020	97.69	80.12	61.25	106.32	92.06	84.53
2021	97.80	80.59	61.65	106.20	92.80	85.23

Tabel 8.2 Tren APM dan APK penduduk umur 7-18 tahun (2017-2021)
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2017-2021

Selama periode lima tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2017 sampai dengan 2021, terjadi fluktuasi pada APM dan APK untuk penduduk umur 7-18 tahun berdasarkan jenjang pendidikan.

a. Angka Partisipasi Murni (APM)

- Pada jenjang SD/sederajat, terjadi peningkatan APM sebesar 0,61 persen dari tahun 2017 sampai dengan 2021.
- Pada jenjang SMP/sederajat, terjadi peningkatan APM sebesar 2,19 persen dari tahun 2017 sampai dengan 2021.
- Pada jenjang SMA/sederajat, terjadi penurunan APM sebesar 8,64 persen dari tahun 2017 ke 2018. Setelah itu, APM kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 61,65 di tahun 2021.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

- Pada jenjang SD/sederajat, terjadi penurunan APK sebesar 2,30 persen sejak tahun 2017 sampai dengan 2021.
- Pada jenjang SMP/sederajat, terjadi peningkatan APK sebesar 1,29 persen dari tahun 2017 ke 2018. Setelah itu, APK mengalami penurunan sebesar 0,95 persen di tahun 2019. APM kemudian kembali meningkat di tahun 2020 dan 2021, hingga mencapai 92,80 di tahun 2021.
- Pada jenjang SMA/sederajat, terjadi penurunan APK pada tahun 2018 sebesar 2,16 persen. Lalu kembali meningkat di

tahun 2019 sampai dengan 2021.

APM bermanfaat untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Sehingga, semakin tinggi APM, mengindikasikan semakin banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Sementara itu, APK digunakan untuk mengetahui jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Sehingga, semakin tinggi APK, maka semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah (Sistem Informasi Kemendikbud, 2022).

Tren APM dan APK yang fluktuatif pada tahun 2017 hingga 2021 diprediksi disebabkan oleh tingkat partisipasi masyarakat, khususnya orang tua dalam konteks pendidikan atau dalam hal ini adalah menjalankan kewajibannya untuk menyekolahkan anak. Orang tua akan memiliki tingkat partisipasi yang tinggi terhadap pendidikan anak apabila memiliki perasaan dan/atau pemahaman bahwa pendidikan tersebut penting bagi anak (Ife, 2008); (Amaliah, 2015).

Selain itu, data yang tercantum pada Tabel 8.2 menunjukkan bahwa, seiring meningkatnya jenjang pendidikan (dari SD ke SMA), maka terjadi penurunan APM dan APK pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa terjadi penurunan jumlah anak yang melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya atau semakin bertambahnya jumlah anak yang mengalami putus sekolah. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seorang anak tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah, baik SMP maupun SMA, di antaranya: (1) Kurangnya kemauan dan minat anak untuk bersekolah; (2) Anak merasa kesulitan untuk mengikuti pelajaran di sekolah; (3) Tekanan ekonomi keluarga; serta (4) Kurangnya perhatian dari orang tua dan lingkungan sekitar (Cahyani, Suciptawati, & Sukarsa, 2019); (Hakim, 2020).

8.2.2. APM Penduduk Umur 7-18 Tahun Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan tipe daerah, APM anak usia 7-18 tahun di perkotaan lebih tinggi dibandingkan anak di perdesaan, untuk seluruh jenjang pendidikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa

kemudahan dalam mengakses pendidikan lebih dirasakan oleh penduduk di perkotaan, dibandingkan di perdesaan. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, anak laki-laki memiliki APM lebih tinggi pada jenjang SD/sederajat (97,81) dibandingkan anak perempuan (97,78). Sementara itu, untuk jenjang SMP/sederajat dan SMA/sederajat, APM anak perempuan (80,73) dan (62,30) lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki (80,45) dan (61,02). Hasil analisis APM Penduduk Umur 7-18 tahun menurut tipe daerah, jenis kelamin dan jenjang pendidikan secara lengkap disajikan pada Tabel 8.3.

Jenjang Pendidikan	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
SD/Sederajat	98.16	97.35	97.81	97.78	97.80
SMP/Sederajat	82.46	78.28	80.45	80.73	80.59
SMA/Sederajat	64.64	57.66	61.02	62.30	61.65

Tabel 8.3 APM Penduduk Umur 7-18 Tahun Menurut Jenjang Pendidikan dan Tipe Daerah/ Jenis Kelamin Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

8.2.3. APM Penduduk Umur 7-18 Tahun Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan

Secara nasional, APM SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat, berturut-turut sebesar (97,80); (80,59); dan (61,65). Ditinjau berdasarkan provinsi, belum terdapat APM yang mencapai 100 persen, yang berarti bahwa anak usia 7-18 tahun di semua provinsi belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya. APM tertinggi pada jenjang SD/sederajat berada di Provinsi DIY (99,44).

Sementara itu untuk jenjang SMP/sederajat dan SMA/sederajat, masing-masing APM tertinggi berada di Provinsi Aceh (86,95) dan Provinsi Bali (74,82). Hal tersebut menunjukkan bahwa anak yang bersekolah SD/sederajat di Provinsi DIY, SMP/sederajat di Provinsi Aceh, dan SMA/sederajat di Provinsi Bali hampir seluruhnya telah sesuai dengan kelompok umur yang seharusnya. Lebih rinci berdasarkan jenjang pendidikan, SD/sederajat memiliki APM tertinggi di antara ketiga jenjang, dengan nilai APM >90 persen. Terdapat satu provinsi dengan APM terendah pada jenjang SMA/sederajat, yaitu Provinsi Papua (44,41). Hal tersebut mengindikasikan bahwa belum optimalnya sarana pendidikan yang dapat diakses oleh anak. Hasil analisis APM penduduk umur 7-18 tahun menurut provinsi dan jenjang pendidikan pada tahun 2021 secara lengkap dipresentasikan pada Lampiran 8.10.

8.2.4. APK Penduduk Umur 7-18 Tahun Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan

Sama halnya dengan APM, APK menunjukkan pola yang sama, di mana seiring meningkatnya jenjang pendidikan, maka APK semakin menurun. APK Indonesia SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat, berturut-turut sebesar (106,20); (92,80); dan (85,23). Berdasarkan tipe daerah, APM jenjang SD/sederajat di perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Sedangkan untuk jenjang SMP/sederajat dan SMA/sederajat, APM perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa masyarakat perdesaan cenderung fokus pada pendidikan dasar saja, sedangkan masyarakat perkotaan juga memperhatikan pendidikan menengah. Tingginya APK menggambarkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa melihat "ketepatan umur sekolah" pada jenjang pendidikannya.

Sementara, apabila ditunjau berdasarkan jenis kelamin, perempuan memiliki APK yang lebih tinggi pada jenjang SD/sederajat (106,21) dan SMA/sederajat (87,05). Sedangkan laki-laki memiliki APK lebih tinggi untuk jenjang SMP/sederajat (93,27). Hasil analisis APK penduduk umur 7-18 tahun menurut tipe daerah, jenis kelamin dan jenjang pendidikan pada tahun 2021 disajikan pada Tabel 8.4.

Jenjang Pendidikan	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
SD/Sederajat	105.47	107.08	106.18	106.21	106.20
SMP/Sederajat	93.95	91.38	93.27	92.30	92.80
SMA/Sederajat	88.73	80.57	83.48	87.05	85.23

Tabel 8.4 APK penduduk umur 7-18 tahun menurut tipe daerah, jenis kelamin dan jenjang pendidikan tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

8.3. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Melek Huruf berfungsi untuk melihat pencapaian indikator dasar

yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Angka Melek Huruf juga merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan (Badan Pusat Statistik, 2022).

8.3.1. Persentase Anak Umur 5-17 tahun yang Melek Huruf Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin

Angka melek huruf menunjukkan besarnya persentase anak umur 5-17 tahun yang dapat membaca dan menulis. Hasil analisis atas persentase anak umur 5-17 tahun yang melek huruf menurut tipe daerah dan jenis kelamin dipresentasikan pada Gambar 8.2. Data menunjukkan bahwa angka melek huruf di Indonesia belum sampai pada angka 100 persen, yang berarti meskipun lahir dan tumbuh di era digital, masih terdapat anak usia 5-17 tahun yang belum dapat membaca dan menulis.

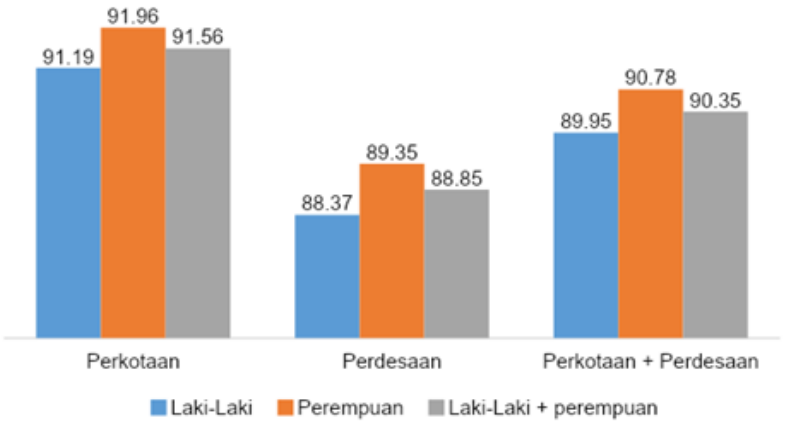

Gambar 8.2 Persentase Anak Umur 5-17 Tahun yang Melek Huruf Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

Berdasarkan tipe daerah, Angka Melek Huruf anak di perkotaan lebih tinggi (91,56 persen) dibandingkan anak di perdesaan (88,85 persen). Sementara berdasarkan jenis kelamin, Angka Melek Huruf anak perempuan (90,78 persen) lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki (89,95 persen). Terdapat beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya kondisi buta huruf pada anak, yaitu: (1) Orang tua yang acuh terhadap pendiidkan anak; (2) Tidak adanya bimbingan dari pihak guru; (3) Lingkungan tempat tinggal yang tidak peduli

terhadap pendidikan; serta (4) Kondisi ekonomi keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan gizi anak untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik anak, termasuk otak (Lubis, Hasibuan, Angreiny, & Tanjung, 2022). Dengan demikian, meskipun angka melek huruf secara nasional di Indonesia sudah mencapai 90 persen, namun masih diperlukan upaya untuk mencapai angka melek huruf hingga 100 persen. Pencapaian angka melek huruf pada anak adalah salah satu kunci keberhasilan sistem pendidikan nasional bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara holistik.

8.3.2. Persentase Anak Umur 5-17 tahun yang Melek Huruf Menurut Provinsi

Secara nasional, persentase anak umur 5-17 tahun yang melek huruf adalah sebesar 90,35 persen. Hasil analisis persentase anak umur 5-17 tahun yang melek huruf menurut provinsi disajikan pada Gambar 8.3. Data menunjukkan bahwa provinsi dengan Angka Melek Huruf tertinggi adalah Provinsi Kepulauan Riau (92,66 persen) dan Jawa Timur (92,65), sementara Provinsi Papua menjadi provinsi dengan Angka Melek Huruf terendah (76,24 persen).

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kualitas dan ketersediaan sarana pendidikan di Indonesia belum merata seluruhnya. Hasil penelitian mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu terjadinya ketidakmerataan kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu: (1) Rendahnya sarana fisik; (2) Rendahnya kualitas guru; (3) Rendahnya kesejahteraan guru; (4) Rendahnya prestasi siswa; (5) Kurangnya dalam pemerataan akses dan/atau sarana pendidikan ke seluruh pelosok desa; (6) Rendahnya kecocokan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja; serta (7) Mahalnya biaya pendidikan (Zulkarnaen & Handoyo, 2019). Oleh karena itu, perlu strategi yang lebih komprehensif baik bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk meminimalisasi ketidakmerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dengan mengimplementasikan strategi dalam menanggulangi beragam tantangan yang ada. Tingginya Angka Melek Huruf (atau rendahnya Angka Buta Huruf) mengindikasikan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar masyarakat memiliki kemampuan untuk menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-

hari, serta dapat melanjutkan pembelajarannya (Badan Pusat Statistik, 2022).

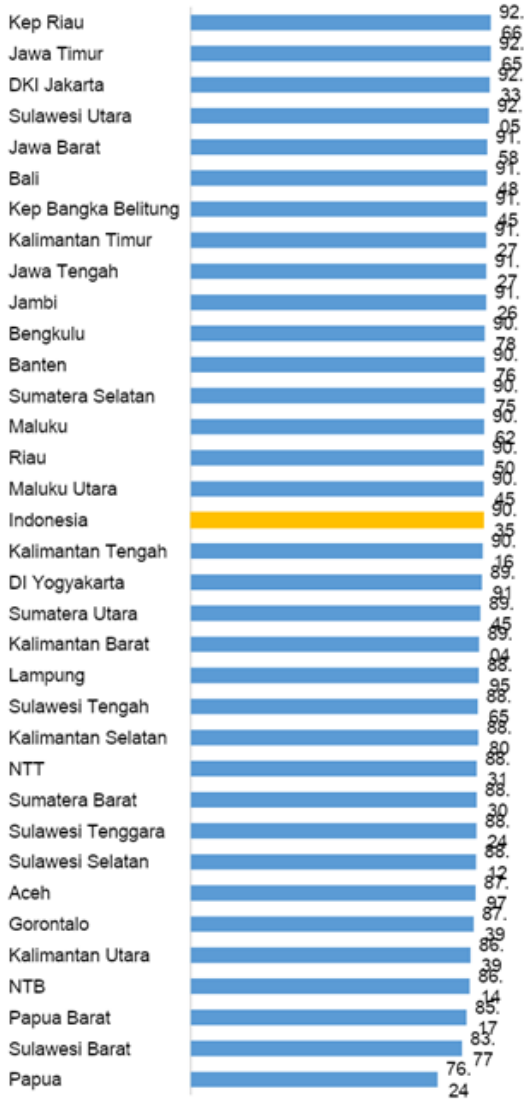

Gambar 8.3 Persentase Anak Umur 5-17 Tahun yang Melek Huruf Menurut Provinsi Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

8.4. Program Indonesia Pintar

Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Indonesia, pemerintah melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, meluncurkan sebuah kebijakan dalam bentuk Program Indonesia Pintar (PIP). Program Indonesia Pintar adalah sebuah program yang ditujukan bagi anak umur 6-21 tahun

untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah. Layanan pendidikan yang disediakan oleh bantuan dana PIP dapat digunakan untuk membantu biaya personal pendidikan anak, seperti membeli perlengkapan sekolah, uang saku, biaya transportasi, biaya praktik, serta biaya uji kompetensi.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menjelaskan, bahwa PIP adalah salah satu program nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang bertujuan untuk (Retnaningsih, 2019):

1. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah.
2. Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan, yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah.
3. Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, salah satunya penduduk di wilayah perdesaan dan perkotaan.
4. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki dunia kerja dan/atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

8.4.1. Persentase Anak Umur 7-17 tahun yang Memperoleh Program Indonesia Pintar (PIP) Menurut Tipe Daerah

Hasil analisis atas persentase anak umur 7-17 tahun yang memperoleh Program Indonesia Pintar (PIP) menurut tipe daerah tahun 2021 dipresentasikan pada Gambar 8.4. Berdasarkan tipe daerah, jumlah anak di perdesaan yang memperoleh PIP adalah sebesar 21,32 persen. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan persentase anak yang memperoleh PIP di perkotaan, yaitu sebesar 14,15 persen. Hal ini sejalan dengan kondisi bahwa angka partisipasi sekolah anak di perdesaan lebih rendah dibandingkan anak di perkotaan.

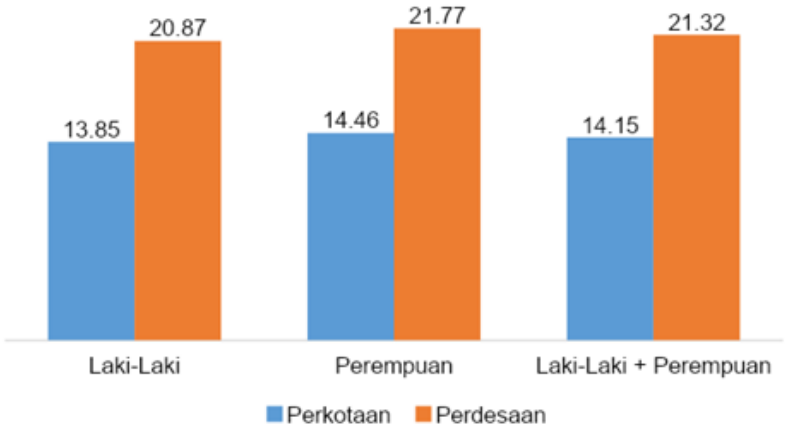

Gambar 8.4 Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Memperoleh PIP Menurut Tipe Daerah Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

8.4.2. Persentase Anak Umur 7-17 tahun yang Memperoleh Program Indonesia Pintar (PIP) Menurut Provinsi

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat anak tidak sekolah atau putus sekolah (Herlinawati & Susanto, 2019), diantaranya adalah:

1. Kondisi ekonomi keluarga yang membuat orang tidak mampu membayar biaya sekolah. Sehingga dianggap lebih baik jika anak bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.
2. Geografis, yaitu berkaitan dengan jauhnya jarak tempuh dari rumah ke sekolah, sehingga membuat anak tidak mau pergi ke sekolah.
3. Pengaruh lingkungan sosial, khususnya dari teman sekitar.
4. Tidak adanya motivasi diri pada siswa, baik karena rendahnya kemampuan akademis, serta karena kurangnya apresiasi dan perhatian dari guru dan/atau orang tua.

Program Indonesia Pintar (PIP) hadir sebagai upaya mengatasi permasalahan ekonomi, yang menjadi faktor utama penyebab anak tidak sekolah. Hasil analisis persentase anak umur 7-17 tahun yang memperoleh Program Indonesia Pintar (PIP) menurut provinsi pada tahun 2021 dipresentasikan pada Gambar 8.5. Data menunjukkan bahwa terdapat 11 provinsi dengan persentase anak umur 7-17 tahun memperoleh PIP lebih dari 20 persen, yaitu: (1) D.I Yogyakarta (34,20 persen); (2) Nusa Tenggara Barat (NTB) (29,20 persen); (3) Jawa Tengah (27,17 persen); (4) Aceh (26,48 persen): (5) Sulawesi Tenggara

(24,18 persen); (6) Gorontalo (23,55 persen); (7) Sulawesi Barat (22,30 persen); (8) Lampung (22,20 persen); (9) Jawa Timur (20,72 persen); (10) Sulawesi Selatan (20,28 persen); dan (11) Nusa Tenggara Timur (NTT) (20,05 persen). Secara nasional, persentase anak memperoleh PIP mencapai 17,35 persen.

Sementara Itu, terdapat lima provinsi dengan persentase anak memperoleh PIP kurang dari 10 persen, yaitu: (1) Kepulauan Bangka Belitung (9,16 persen); (2) DKI Jakarta (9,15 persen); (3) Banten (8,90 persen); (4) Maluku Utara (7,90 persen); dan (5) Kalimantan Tengah (7,64 persen). Apabila dikaitkan dengan tujuan PIP, yaitu guna mengatasi permasalahan tidak adanya biaya yang dimiliki orang tua untuk menyekolahkan anak, kelima provinsi tersebut termasuk dalam 10 provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah di Indonesia pada tahun 2021 (Badan Pusat Statistik, 2022). Sehingga diprediksi bahwa PIP difokuskan pada wilayah dengan tingkat penduduk miskin yang tinggi.

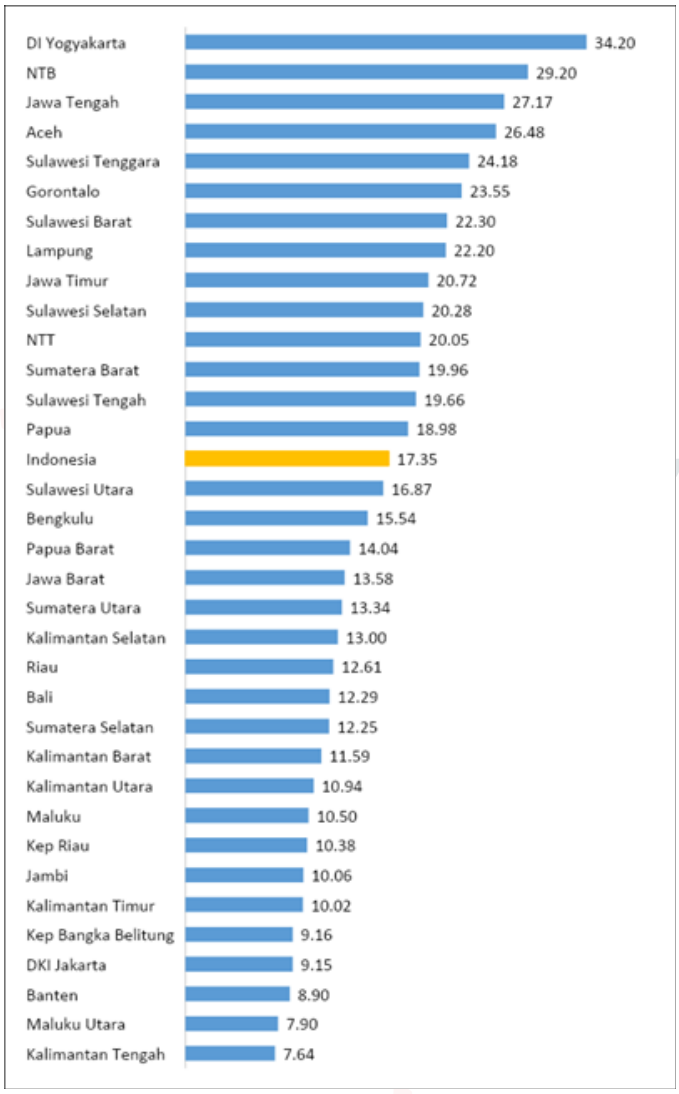

Gambar 8.5 Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Memperoleh PIP Menurut Provinsi Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, BPS

8.4.3. Persentase Anak Umur 7-17 tahun yang Memperoleh Program Indonesia Pintar (PIP) dan Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Anak yang memproleh manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) akan diberikan penanda berupa kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) (Gambar 8.6), yang juga difungsikan sebagai identitas untuk mendapatkan PIP (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud, 2022). Sejalan dengan persentase anak yang memperoleh PIP dan memiliki KIP di perdesaan (13,92 persen), lebih besar dibandingkan dengan anak yang tinggal di perkotaan (8,90 persen). Penelitian menemukan bahwa KIP dapat memberikan kemudahan bagi anak dalam memenuhi kebutuhan terkait pendidikannya (Nikmah, Wardani, & Matsani, 2020). Meski demikian, diperlukan adanya dukungan guna mendorong optimalnya program tersebut, salah satunya melalui kemudahan akses layanan informasi dari pihak dinas terkait ke sekolah. Hasil analisis persentase anak umur 7-17 tahun yang memperoleh Program Indonesia Pintar (PIP) dan memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada tahun 2021 dipresentasikan pada Gambar 8.7.

Gambar 8.6 Ilustrasi Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Sumber: Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud, 2022

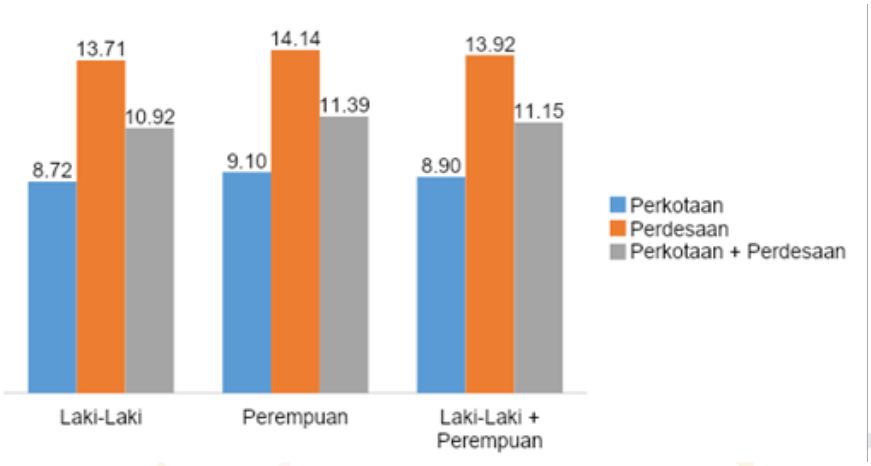

Gambar 8.7 Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Memperoleh PIP dan Memiliki KIP Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

Lampiran 8.1

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-18 tahun di Perkotaan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)		
	7-12	13-15	16-18
Aceh	99,66	98,75	87,32
Sumatera Utara	99,44	97,60	79,62
Sumatera Barat	99,86	97,33	89,63
Riau	99,99	97,19	85,88
Jambi	99,71	98,85	81,20
Sumatera Selatan	99,99	97,86	80,31
Bengkulu	99,76	99,43	86,65
Lampung	99,56	96,97	76,11
Bangka Belitung	99,35	95,05	71,53
Kepulauan Riau	99,66	98,98	85,36
DKI Jakarta	99,53	98,68	72,32
Jawa Barat	99,51	95,99	70,01
Jawa Tengah	99,65	98,10	73,23
DI Yogyakarta	99,73	99,29	91,74
Jawa Timur	99,53	98,56	79,27
Banten	99,68	97,83	72,43
Bali	99,87	98,80	84,40
Nusa Tenggara Barat	99,59	99,03	83,77
Nusa Tenggara Timur	98,98	96,71	81,92
Kalimantan Barat	99,13	95,15	73,48
Kalimantan Tengah	99,92	96,93	73,36
Kalimantan Selatan	99,21	94,60	73,48
Kalimantan Timur	99,57	99,24	83,12
Kalimantan Utara	99,05	97,43	81,76
Sulawesi Utara	99,27	95,80	77,08
Sulawesi Tengah	98,30	92,44	87,33
Sulawesi Selatan	99,59	94,87	74,13
Sulawesi Tenggara	99,20	96,92	81,40
Gorontalo	99,98	92,93	78,75
Sulawesi Barat	97,30	88,45	73,29
Maluku	99,69	98,75	82,07
Maluku Utara	98,44	99,33	81,73
Papua Barat	99,28	98,09	83,67
Papua	95,42	96,65	91,35
Indonesia	**99,53**	**97,30**	**76,11**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 8.2

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-18 tahun di Perdesaan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)		
	7-12	13-15	16-18
Aceh	99,67	98,27	81,26
Sumatera Utara	99,20	96,33	77,54
Sumatera Barat	99,39	95,97	78,31
Riau	99,43	94,64	72,51
Jambi	99,64	95,13	68,33
Sumatera Selatan	99,46	93,00	66,24
Bengkulu	99,76	96,57	76,02
Lampung	99,52	94,92	69,45
Bangka Belitung	99,61	90,92	63,97
Kepulauan Riau	99,04	97,50	73,56
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	99,44	92,07	59,51
Jawa Tengah	99,68	95,52	68,02
DI Yogyakarta	99,63	99,82	83,72
Jawa Timur	99,25	96,74	67,73
Banten	98,94	94,44	60,48
Bali	99,32	96,84	82,96
Nusa Tenggara Barat	99,46	97,71	71,03
Nusa Tenggara Timur	98,25	94,92	73,56
Kalimantan Barat	98,40	92,10	66,91
Kalimantan Tengah	99,31	94,09	61,82
Kalimantan Selatan	99,53	92,52	65,62
Kalimantan Timur	99,68	98,21	79,41
Kalimantan Utara	98,06	95,02	68,59
Sulawesi Utara	99,48	95,00	69,98
Sulawesi Tengah	98,58	93,75	71,30
Sulawesi Selatan	99,05	92,55	68,53
Sulawesi Tenggara	99,14	94,09	70,91
Gorontalo	98,31	91,40	66,55
Sulawesi Barat	98,42	90,64	70,74
Maluku	99,41	96,84	77,73
Maluku Utara	98,97	96,15	75,03
Papua Barat	97,31	95,96	79,46
Papua	79,45	74,69	53,13
Indonesia	**98,78**	**94,38**	**69,08**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 8.3

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Laki-laki Berumur 7-18 Tahun menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)		
	7-12	13-15	16-18
Aceh	99,49	97,71	81,52
Sumatera Utara	99,28	96,23	76,62
Sumatera Barat	99,60	95,51	81,08
Riau	99,58	94,89	73,82
Jambi	99,35	95,92	72,82
Sumatera Selatan	99,75	94,47	68,34
Bengkulu	99,67	96,22	76,15
Lampung	99,25	94,65	71,50
Kep Bangka Belitung	99,13	92,45	66,87
Kep Riau	99,42	98,10	80,83
DKI Jakarta	99,43	98,45	72,81
Jawa Barat	99,42	95,05	68,67
Jawa Tengah	99,55	95,97	70,43
DI Yogyakarta	99,53	99,64	88,04
Jawa Timur	99,46	96,81	73,84
Banten	99,70	96,73	70,09
Bali	99,67	98,15	83,55
NTB	99,36	97,86	80,20
NTT	98,22	93,96	70,70
Kalimantan Barat	98,52	92,10	68,09
Kalimantan Tengah	99,51	95,43	68,93
Kalimantan Selatan	99,16	92,67	69,56
Kalimantan Timur	99,77	98,89	83,72
Kalimantan Utara	98,83	95,21	72,75
Sulawesi Utara	99,22	93,24	70,58
Sulawesi Tengah	98,47	90,51	72,40
Sulawesi Selatan	99,03	92,10	69,26
Sulawesi Tenggara	99,11	93,57	73,15
Gorontalo	98,59	86,27	65,07
Sulawesi Barat	98,17	86,10	68,74
Maluku	99,24	97,42	78,66
Maluku Utara	98,90	96,35	75,84
Papua Barat	98,32	95,85	81,41
Papua	82,27	80,74	64,08
Indonesia	**99,11**	**95,31**	**72,44**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 8.4

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Perempuan Berumur 7-18 tahun Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)		
	7-12	13-15	16-18
Aceh	99,85	99,16	85,02
Sumatera Utara	99,37	97,74	80,77
Sumatera Barat	99,62	97,79	87,30
Riau	99,72	96,45	81,98
Jambi	99,97	96,89	72,18
Sumatera Selatan	99,54	95,25	74,87
Bengkulu	99,85	98,81	83,41
Lampung	99,83	96,46	71,97
Kep Bangka Belitung	99,82	93,93	69,38
Kep Riau	99,83	99,67	87,84
DKI Jakarta	99,62	98,90	71,84
Jawa Barat	99,58	95,13	66,89
Jawa Tengah	99,79	97,76	71,18
DI Yogyakarta	99,89	99,21	91,43
Jawa Timur	99,34	98,76	74,44
Banten	99,21	96,81	67,77
Bali	99,73	98,30	84,39
NTB	99,69	98,81	74,79
NTT	98,63	96,84	81,05
Kalimantan Barat	98,76	94,16	70,70
Kalimantan Tengah	99,60	94,99	64,51
Kalimantan Selatan	99,61	94,40	69,03
Kalimantan Timur	99,42	98,91	80,21
Kalimantan Utara	98,49	97,97	80,57
Sulawesi Utara	99,52	97,68	77,40
Sulawesi Tengah	98,54	96,50	80,01
Sulawesi Selatan	99,56	95,02	73,12
Sulawesi Tenggara	99,21	96,63	76,98
Gorontalo	99,46	97,94	78,09
Sulawesi Barat	98,22	93,99	73,63
Maluku	99,80	97,88	80,85
Maluku Utara	98,78	97,68	78,16
Papua Barat	97,83	97,97	80,99
Papua	84,71	79,27	63,88
Indonesia	**99,28**	**96,69**	**73,78**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 8.5

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-18 tahun menurut provinsi dan kelompok umur, 2021

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)		
	7-12	13-15	16-18
Aceh	99,67	98,42	83,28
Sumatera Utara	99,32	96,99	78,66
Sumatera Barat	99,61	96,63	84,07
Riau	99,65	95,66	77,81
Jambi	99,66	96,39	72,50
Sumatera Selatan	99,65	94,85	71,53
Bengkulu	99,76	97,49	79,75
Lampung	99,53	95,58	71,72
Kep Bangka Belitung	99,47	93,17	68,15
Kep Riau	99,62	98,85	84,40
DKI Jakarta	99,53	98,68	72,32
Jawa Barat	99,50	95,09	67,80
Jawa Tengah	99,66	96,84	70,79
DI Yogyakarta	99,70	99,43	89,63
Jawa Timur	99,40	97,76	74,14
Banten	99,45	96,77	68,94
Bali	99,70	98,22	83,96
NTB	99,52	98,34	77,49
NTT	98,42	95,32	75,77
Kalimantan Barat	98,64	93,14	69,38
Kalimantan Tengah	99,55	95,21	66,70
Kalimantan Selatan	99,38	93,50	69,31
Kalimantan Timur	99,60	98,90	82,01
Kalimantan Utara	98,67	96,51	76,50
Sulawesi Utara	99,37	95,41	73,86
Sulawesi Tengah	98,50	93,32	76,32
Sulawesi Selatan	99,29	93,55	71,21
Sulawesi Tenggara	99,16	95,06	75,02
Gorontalo	99,02	92,05	71,30
Sulawesi Barat	98,19	90,12	71,22
Maluku	99,52	97,65	79,68
Maluku Utara	98,84	97,00	77,01
Papua Barat	98,08	96,85	81,21
Papua	83,43	80,02	63,98
Indonesia	**99,19**	**95,99**	**73,09**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 8.6

Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Berumur 7-18 Tahun di Perkotaan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan,2021

Provinsi	Jenjang Pendidikan		
	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat
Aceh	99,66	86,61	72,98
Sumatera Utara	96,92	79,75	67,86
Sumatera Barat	98,75	79,96	73,61
Riau	97,28	79,17	73,07
Jambi	99,71	82,27	67,33
Sumatera Selatan	96,49	75,57	64,38
Bengkulu	99,38	84,84	69,57
Lampung	99,14	86,95	64,31
Kep Bangka Belitung	98,02	75,19	61,36
Kep Riau	99,36	87,43	73,93
DKI Jakarta	98,22	83,01	60,53
Jawa Barat	98,39	83,16	60,99
Jawa Tengah	98,75	82,91	62,35
DI Yogyakarta	99,50	80,73	72,55
Jawa Timur	98,32	86,03	67,02
Banten	98,52	85,96	63,65
Bali	98,01	86,80	75,56
NTB	98,71	89,41	70,80
NTT	94,04	72,84	64,16
Kalimantan Barat	97,64	72,27	56,44
Kalimantan Tengah	99,62	78,38	59,69
Kalimantan Selatan	98,77	78,65	62,86
Kalimantan Timur	98,57	80,89	68,29
Kalimantan Utara	94,44	80,66	72,47
Sulawesi Utara	94,18	73,77	67,55
Sulawesi Tengah	93,31	73,20	74,39
Sulawesi Selatan	98,46	79,81	62,36
Sulawesi Tenggara	98,51	78,27	68,52
Gorontalo	99,98	72,26	59,77
Sulawesi Barat	96,36	61,34	65,14
Maluku	95,50	74,80	67,83
Maluku Utara	95,80	80,00	65,68
Papua Barat	93,15	75,29	69,69
Papua	92,63	73,72	67,98
Indonesia	**98,16**	**82,46**	**64,64**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 8.7

Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Berumur 7-18 Tahun di Perdesaan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2021

Provinsi	Jenjang Pendidikan		
	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat
Aceh	98,60	87,10	69,71
Sumatera Utara	98,53	82,62	68,14
Sumatera Barat	98,88	77,59	64,21
Riau	98,21	81,41	58,06
Jambi	99,29	78,66	58,79
Sumatera Selatan	98,84	80,00	58,21
Bengkulu	98,24	78,07	64,19
Lampung	99,08	79,68	58,23
Kep Bangka Belitung	97,71	73,90	55,61
Kep Riau	98,07	78,05	66,88
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	98,28	81,94	49,55
Jawa Tengah	97,65	78,97	58,31
DI Yogyakarta	99,29	92,14	68,26
Jawa Timur	97,40	80,97	57,15
Banten	97,34	80,55	50,09
Bali	95,38	87,82	73,19
NTB	98,90	81,52	63,27
NTT	96,66	69,18	50,73
Kalimantan Barat	97,32	65,94	48,96
Kalimantan Tengah	98,61	79,08	50,27
Kalimantan Selatan	99,09	73,39	54,39
Kalimantan Timur	97,92	82,12	71,63
Kalimantan Utara	91,66	76,89	54,65
Sulawesi Utara	96,86	76,18	58,25
Sulawesi Tengah	93,34	75,87	61,37
Sulawesi Selatan	98,11	74,92	58,51
Sulawesi Tenggara	97,95	77,65	60,59
Gorontalo	97,68	70,32	57,21
Sulawesi Barat	95,51	72,75	58,53
Maluku	97,84	76,06	62,15
Maluku Utara	97,66	75,95	63,46
Papua Barat	94,70	67,12	59,10
Papua	76,32	52,87	35,06
Indonesia	**97,35**	**78,28**	**57,66**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 8.8

Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Laki-laki Berumur 7-18 Tahun menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2021

Provinsi	Jenjang Pendidikan		
	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat
Aceh	98,71	86,92	69,41
Sumatera Utara	97,87	81,97	66,41
Sumatera Barat	98,81	76,64	68,46
Riau	98,36	79,68	61,54
Jambi	99,14	79,52	62,16
Sumatera Selatan	98,16	77,60	57,47
Bengkulu	98,33	80,81	62,69
Lampung	98,92	81,40	59,25
Kep Bangka Belitung	97,79	72,70	58,29
Kep Riau	98,87	85,72	71,53
DKI Jakarta	97,86	85,55	61,25
Jawa Barat	98,42	83,79	58,62
Jawa Tengah	98,12	80,64	59,89
DI Yogyakarta	99,43	82,50	70,76
Jawa Timur	98,04	82,56	61,77
Banten	98,11	86,17	60,39
Bali	97,38	87,21	74,01
NTB	99,08	86,16	70,08
NTT	96,31	67,37	48,63
Kalimantan Barat	97,74	65,89	50,28
Kalimantan Tengah	99,00	78,08	55,31
Kalimantan Selatan	98,63	76,47	57,46
Kalimantan Timur	98,24	82,16	73,10
Kalimantan Utara	94,42	78,63	63,12
Sulawesi Utara	95,22	73,28	60,56
Sulawesi Tengah	93,86	72,55	61,61
Sulawesi Selatan	98,18	76,25	61,27
Sulawesi Tenggara	98,51	77,69	62,55
Gorontalo	98,06	68,87	53,53
Sulawesi Barat	96,09	65,66	57,52
Maluku	96,75	76,03	66,81
Maluku Utara	96,97	77,29	64,54
Papua Barat	94,04	69,93	61,72
Papua	79,15	58,63	46,63
Indonesia	**97,81**	**80,45**	**61,02**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 8.9

Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Perempuan Berumur 7-18 Tahun menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2021

Provinsi	Jenjang Pendidikan		
	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat
Aceh	99,20	86,98	72,18
Sumatera Utara	97,50	80,31	69,62
Sumatera Barat	98,82	80,91	69,56
Riau	97,30	81,38	66,57
Jambi	99,69	80,26	60,97
Sumatera Selatan	97,83	79,04	63,73
Bengkulu	98,89	79,67	69,53
Lampung	99,28	82,62	61,50
Kep Bangka Belitung	97,98	76,60	59,27
Kep Riau	99,68	87,58	75,12
DKI Jakarta	98,61	80,54	59,82
Jawa Barat	98,31	81,93	58,55
Jawa Tengah	98,32	81,36	61,08
DI Yogyakarta	99,45	84,74	72,18
Jawa Timur	97,76	85,11	63,52
Banten	98,20	82,41	58,98
Bali	97,01	86,99	75,69
NTB	98,53	84,42	64,11
NTT	95,77	72,92	60,18
Kalimantan Barat	97,08	70,26	53,30
Kalimantan Tengah	99,02	79,53	53,22
Kalimantan Selatan	99,26	75,24	59,39
Kalimantan Timur	98,48	80,44	65,26
Kalimantan Utara	92,25	79,88	67,81
Sulawesi Utara	95,56	76,68	66,31
Sulawesi Tengah	92,81	77,75	69,05
Sulawesi Selatan	98,36	77,80	59,45
Sulawesi Tenggara	97,76	78,05	64,90
Gorontalo	99,26	73,47	63,30
Sulawesi Barat	95,26	74,23	61,95
Maluku	97,09	75,01	62,33
Maluku Utara	97,44	76,75	63,69
Papua Barat	94,14	71,19	65,48
Papua	81,74	57,20	42,13
Indonesia	**97,78**	**80,73**	**62,30**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 8.10

Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Berumur 7-18 tahun Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2021

Provinsi	Jenjang Pendidikan		
	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat
Aceh	98,95	86,95	70,80
Sumatera Utara	97,69	81,13	67,99
Sumatera Barat	98,82	78,75	68,99
Riau	97,85	80,52	64,00
Jambi	99,41	79,88	61,56
Sumatera Selatan	98,00	78,31	60,53
Bengkulu	98,61	80,25	66,08
Lampung	99,10	82,03	60,31
Kep Bangka Belitung	97,89	74,60	58,79
Kep Riau	99,26	86,60	73,36
DKI Jakarta	98,22	83,01	60,53
Jawa Barat	98,37	82,88	58,58
Jawa Tengah	98,22	80,99	60,46
DI Yogyakarta	99,44	83,62	71,42
Jawa Timur	97,90	83,80	62,63
Banten	98,15	84,28	59,69
Bali	97,20	87,11	74,82
NTB	98,81	85,28	67,09
NTT	96,04	69,99	54,29
Kalimantan Barat	97,42	68,11	51,77
Kalimantan Tengah	99,01	78,80	54,25
Kalimantan Selatan	98,94	75,88	58,37
Kalimantan Timur	98,36	81,30	69,29
Kalimantan Utara	93,38	79,21	65,37
Sulawesi Utara	95,39	74,94	63,33
Sulawesi Tengah	93,33	74,99	65,44
Sulawesi Selatan	98,26	77,02	60,35
Sulawesi Tenggara	98,15	77,86	63,70
Gorontalo	98,65	71,15	58,21
Sulawesi Barat	95,68	70,03	59,77
Maluku	96,92	75,53	64,71
Maluku Utara	97,20	77,03	64,11
Papua Barat	94,09	70,52	63,51
Papua	80,38	57,93	44,41
Indonesia	**97,80**	**80,59**	**61,65**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 8.11

Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Berumur 7-18 Tahun di Perkotaan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2021

Provinsi	Jenjang Pendidikan		
	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat
Aceh	107,57	94,55	95,72
Sumatera Utara	105,82	93,13	99,00
Sumatera Barat	108,09	94,87	94,57
Riau	105,01	95,30	95,50
Jambi	109,19	91,06	100,27
Sumatera Selatan	110,52	89,35	96,11
Bengkulu	109,14	95,87	101,77
Lampung	104,67	97,66	94,36
Kep Bangka Belitung	107,01	90,39	90,73
Kep Riau	106,25	94,71	86,97
DKI Jakarta	103,17	91,56	77,08
Jawa Barat	104,80	93,63	81,10
Jawa Tengah	106,72	95,06	88,79
DI Yogyakarta	105,64	91,98	95,01
Jawa Timur	104,37	98,21	95,08
Banten	105,86	95,34	79,20
Bali	103,75	96,60	91,40
NTB	105,85	96,56	96,20
NTT	107,19	92,63	104,89
Kalimantan Barat	109,84	88,67	85,73
Kalimantan Tengah	106,75	87,00	90,67
Kalimantan Selatan	105,41	87,25	84,27
Kalimantan Timur	105,30	92,50	94,49
Kalimantan Utara	99,36	98,74	107,37
Sulawesi Utara	104,17	91,40	89,42
Sulawesi Tengah	103,52	89,70	101,92
Sulawesi Selatan	105,17	91,12	92,17
Sulawesi Tenggara	107,29	91,29	101,50
Gorontalo	110,51	78,67	95,02
Sulawesi Barat	107,28	67,59	104,26
Maluku	108,77	90,94	99,54
Maluku Utara	102,37	91,93	92,58
Papua Barat	104,94	93,62	109,93
Papua	104,66	96,38	115,26
Indonesia	**105,47**	**93,95**	**88,73**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 8.12

Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Berumur 7-18 Tahun di Perdesaan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2021

Provinsi	Jenjang Pendidikan		
	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat
Aceh	108,36	99,19	91,09
Sumatera Utara	110,05	90,53	94,10
Sumatera Barat	109,14	91,68	86,04
Riau	105,84	95,21	76,64
Jambi	109,61	87,88	76,90
Sumatera Selatan	111,87	89,49	73,98
Bengkulu	109,40	90,33	89,47
Lampung	106,05	90,95	85,28
Kep Bangka Belitung	107,34	86,10	81,25
Kep Riau	111,05	88,08	78,75
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	103,75	92,32	66,87
Jawa Tengah	106,07	92,89	84,21
DI Yogyakarta	103,78	106,05	77,90
Jawa Timur	104,71	95,86	78,13
Banten	109,25	93,85	67,09
Bali	101,60	103,58	86,45
NTB	108,48	91,14	91,22
NTT	115,52	90,25	79,67
Kalimantan Barat	111,59	83,77	84,89
Kalimantan Tengah	109,17	93,75	77,50
Kalimantan Selatan	108,72	84,96	77,67
Kalimantan Timur	105,17	91,10	97,93
Kalimantan Utara	100,44	104,37	80,22
Sulawesi Utara	109,47	89,43	82,27
Sulawesi Tengah	103,74	94,87	81,74
Sulawesi Selatan	108,16	83,58	82,41
Sulawesi Tenggara	108,73	85,59	81,75
Gorontalo	106,94	79,89	83,48
Sulawesi Barat	104,54	90,79	84,02
Maluku	112,10	90,30	92,64
Maluku Utara	109,92	86,55	96,08
Papua Barat	114,94	88,37	88,19
Papua	89,22	76,96	59,10
Indonesia	**107,08**	**91,38**	**80,57**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 8.13

Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Laki-laki Berumur 7-18 Tahun menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2021

Provinsi	Jenjang Pendidikan		
	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat
Aceh	107,23	98,67	90,17
Sumatera Utara	107,74	93,05	93,38
Sumatera Barat	109,96	90,41	86,95
Riau	105,13	94,20	82,43
Jambi	110,40	87,98	85,14
Sumatera Selatan	110,66	90,21	79,24
Bengkulu	110,12	94,13	86,79
Lampung	104,97	93,62	83,69
Kep Bangka Belitung	107,19	86,57	89,64
Kep Riau	105,95	92,69	85,66
DKI Jakarta	102,84	94,66	75,05
Jawa Barat	104,33	95,00	76,44
Jawa Tengah	106,42	94,95	84,48
DI Yogyakarta	103,08	97,23	91,52
Jawa Timur	105,02	96,36	87,24
Banten	107,29	98,29	75,06
Bali	101,96	99,56	88,25
NTB	107,10	93,04	96,20
NTT	115,09	87,83	79,90
Kalimantan Barat	112,24	82,11	82,28
Kalimantan Tengah	108,64	91,66	86,38
Kalimantan Selatan	107,62	88,81	76,04
Kalimantan Timur	105,40	95,55	97,88
Kalimantan Utara	101,22	97,38	87,32
Sulawesi Utara	106,33	88,64	82,53
Sulawesi Tengah	105,78	88,72	84,35
Sulawesi Selatan	106,47	85,37	87,22
Sulawesi Tenggara	108,23	87,64	86,14
Gorontalo	105,56	76,74	80,20
Sulawesi Barat	106,10	82,06	85,25
Maluku	111,77	90,19	94,71
Maluku Utara	107,65	87,74	93,98
Papua Barat	111,04	91,78	92,11
Papua	91,59	84,38	78,34
Indonesia	**106,18**	**93,27**	**83,48**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 8.14

Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Perempuan Berumur 7-18 Tahun menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2021

Provinsi	Jenjang Pendidikan		
	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat
Aceh	109,00	96,77	95,09
Sumatera Utara	107,98	90,71	100,23
Sumatera Barat	107,36	96,14	94,08
Riau	105,93	96,32	85,86
Jambi	108,55	90,00	83,82
Sumatera Selatan	112,14	88,65	85,50
Bengkulu	108,49	90,04	100,92
Lampung	106,32	92,65	93,64
Kep Bangka Belitung	107,13	90,41	83,45
Kep Riau	107,30	95,71	86,93
DKI Jakarta	103,52	88,53	79,08
Jawa Barat	104,83	91,60	79,84
Jawa Tengah	106,39	92,99	89,00
DI Yogyakarta	107,38	93,87	89,34
Jawa Timur	104,01	98,03	87,87
Banten	106,53	91,51	76,27
Bali	104,28	97,69	91,58
NTB	107,37	94,39	91,29
NTT	112,02	94,09	93,07
Kalimantan Barat	109,70	88,69	88,18
Kalimantan Tengah	107,78	90,47	79,82
Kalimantan Selatan	106,65	83,09	86,04
Kalimantan Timur	105,11	88,56	93,02
Kalimantan Utara	98,21	104,88	106,56
Sulawesi Utara	106,78	92,35	90,11
Sulawesi Tengah	101,60	98,21	91,55
Sulawesi Selatan	107,26	88,29	86,94
Sulawesi Tenggara	108,22	87,44	93,00
Gorontalo	111,44	82,04	96,44
Sulawesi Barat	104,05	88,36	90,29
Maluku	109,81	90,96	96,91
Maluku Utara	108,51	88,26	96,09
Papua Barat	110,99	89,16	102,87
Papua	94,71	78,87	71,66
Indonesia	**106,21**	**92,30**	**87,05**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 8.15

Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Berumur 7-18 Tahun menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2021

Provinsi	Jenjang Pendidikan		
	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat
Aceh	108,10	97,74	92,63
Sumatera Utara	107,85	91,87	96,75
Sumatera Barat	108,66	93,24	90,38
Riau	105,52	95,25	84,11
Jambi	109,48	88,96	84,47
Sumatera Selatan	111,39	89,44	82,30
Bengkulu	109,31	92,11	93,79
Lampung	105,63	93,12	88,38
Kep Bangka Belitung	107,16	88,44	86,49
Kep Riau	106,60	94,12	86,31
DKI Jakarta	103,17	91,56	77,08
Jawa Barat	104,57	93,33	78,10
Jawa Tengah	106,40	94,00	86,65
DI Yogyakarta	105,15	95,54	90,50
Jawa Timur	104,52	97,17	87,55
Banten	106,91	94,88	75,66
Bali	103,09	98,68	89,87
NTB	107,23	93,72	93,75
NTT	113,55	90,78	86,36
Kalimantan Barat	111,01	85,45	85,21
Kalimantan Tengah	108,21	91,07	83,07
Kalimantan Selatan	107,14	86,04	80,77
Kalimantan Timur	105,26	92,03	95,52
Kalimantan Utara	99,78	100,90	96,55
Sulawesi Utara	106,56	90,45	86,17
Sulawesi Tengah	103,68	93,17	88,06
Sulawesi Selatan	106,85	86,82	87,07
Sulawesi Tenggara	108,22	87,54	89,50
Gorontalo	108,44	79,37	87,97
Sulawesi Barat	105,09	85,27	87,81
Maluku	110,79	90,57	95,74
Maluku Utara	108,07	87,99	95,04
Papua Barat	111,02	90,55	97,25
Papua	93,07	81,68	75,05
Indonesia	**106,20**	**92,80**	**85,23**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 8.16

Persentase Penduduk Berumur 5-17 Tahun yang Melek Huruf menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
Aceh	89,26	89,34	89,30	87,37	87,33	87,35	87,98	87,96	87,97
Sumatera Utara	90,71	90,06	90,40	87,63	89,20	88,41	89,26	89,64	89,45
Sumatera Barat	87,11	89,73	88,36	87,09	89,43	88,25	87,10	89,57	88,30
Riau	91,02	91,74	91,37	90,12	89,74	89,93	90,48	90,53	90,50
Jambi	91,04	91,17	91,10	91,54	91,12	91,33	91,38	91,13	91,26
Sumatera Selatan	91,59	91,42	91,50	89,94	90,67	90,31	90,56	90,94	90,75
Bengkulu	90,38	92,20	91,26	89,89	91,20	90,54	90,05	91,52	90,78
Lampung	89,80	92,67	91,19	86,86	89,03	87,92	87,79	90,16	88,95
Kepulauan Bangka Belitung	92,11	92,13	92,12	90,73	90,54	90,63	91,51	91,40	91,45
Kepulauan Riau	92,83	93,02	92,92	86,82	92,16	89,51	92,38	92,95	92,66
DKI Jakarta	91,88	92,79	92,33				91,88	92,79	92,33
Jawa Barat	91,60	92,39	91,98	89,71	90,60	90,16	91,20	91,98	91,58
Jawa Tengah	91,38	91,88	91,62	90,62	91,17	90,89	91,02	91,53	91,27
DI Yogyakarta	89,90	89,93	89,91	88,61	91,25	89,89	89,57	90,27	89,91
Jawa Timur	92,76	94,23	93,47	91,41	91,89	91,65	92,16	93,16	92,65
Banten	91,81	92,51	92,15	86,60	88,72	87,66	90,21	91,33	90,76
Bali	91,98	93,21	92,57	88,05	89,92	88,99	90,83	92,17	91,48
Nusa Tenggara Barat	85,92	87,96	86,91	84,38	86,44	85,41	85,14	87,16	86,14
Nusa Tenggara Timur	89,43	93,40	91,31	86,95	87,86	87,40	87,55	89,09	88,31
Kalimantan Barat	90,93	89,85	90,41	86,79	89,86	88,32	88,25	89,85	89,04
Kalimantan Tengah	90,92	90,62	90,77	88,62	90,91	89,75	89,55	90,79	90,16
Kalimantan Selatan	88,94	89,50	89,21	88,96	87,89	88,43	88,95	88,64	88,80
Kalimantan Timur	92,02	90,73	91,39	90,44	91,57	91,01	91,52	91,01	91,27
Kalimantan Utara	86,95	87,65	87,29	86,42	83,52	84,95	86,75	86,00	86,39
Sulawesi Utara	91,98	92,68	92,32	91,41	92,07	91,74	91,71	92,40	92,05
Sulawesi Tengah	86,73	90,62	88,66	88,34	88,96	88,65	87,86	89,46	88,65
Sulawesi Selatan	89,24	89,70	89,47	86,40	87,72	87,05	87,66	88,59	88,12
Sulawesi Tenggara	90,39	88,33	89,41	87,43	87,72	87,57	88,52	87,93	88,24
Gorontalo	89,52	86,65	88,12	86,27	87,49	86,88	87,63	87,15	87,39
Sulawesi Barat	84,87	88,33	86,56	82,60	83,53	83,07	83,06	84,48	83,77
Maluku	91,66	93,67	92,62	89,38	89,07	89,23	90,33	90,92	90,62
Maluku Utara	89,45	92,78	91,03	89,97	90,55	90,26	89,83	91,11	90,45
Papua Barat	88,96	89,29	89,12	82,47	82,63	82,55	85,09	85,24	85,17
Papua	90,20	91,87	91,00	71,08	71,46	71,26	75,86	76,65	76,24
Indonesia	**91,19**	**91,96**	**91,56**	**88,37**	**89,35**	**88,85**	**89,95**	**90,78**	**90,35**

Catatan: L (Laki-Laki), P (Perempuan), L+P (Laki-Laki + Perempuan)

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 8.17

Persentase Penduduk Berumur 7-17 Tahun yang Memperoleh Program Indonesia Pintar (PIP) menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
Aceh	19,26	19,32	19,29	29,19	30,52	29,85	25,93	27,04	26,48
Sumatera Utara	9,11	10,93	9,98	16,82	17,18	17,00	12,73	13,98	13,34
Sumatera Barat	18,09	17,76	17,93	21,14	22,41	21,77	19,67	20,25	19,96
Riau	8,16	8,80	8,47	15,00	15,62	15,31	12,26	12,98	12,61
Jambi	12,43	13,24	12,82	8,13	9,43	8,78	9,53	10,60	10,06
Sumatera Selatan	9,31	7,58	8,48	13,65	15,25	14,44	12,02	12,49	12,25
Bengkulu	8,89	12,20	10,49	17,13	18,78	17,96	14,41	16,70	15,54
Lampung	19,99	20,15	20,07	23,21	23,13	23,17	22,19	22,20	22,20
Kepulauan Bangka Belitung	6,61	10,31	8,38	10,88	9,38	10,13	8,46	9,89	9,16
Kepulauan Riau	9,59	9,96	9,77	16,21	18,82	17,53	10,09	10,69	10,38
DKI Jakarta	9,43	8,87	9,15	-	-	-	9,43	8,87	9,15
Jawa Barat	11,87	12,88	12,35	16,93	18,87	17,91	12,95	14,25	13,58
Jawa Tengah	23,41	23,91	23,65	30,18	31,65	30,91	26,63	27,73	27,17
DI Yogyakarta	30,05	30,69	30,35	42,67	47,45	45,02	33,28	35,18	34,20
Jawa Timur	16,95	17,46	17,20	24,94	25,14	25,04	20,49	20,96	20,72
Banten	5,85	7,28	6,57	13,49	14,81	14,16	8,18	9,62	8,90
Bali	8,99	10,60	9,75	17,82	18,27	18,05	11,59	13,05	12,29
Nusa Tenggara Barat	31,30	28,10	29,73	28,11	29,31	28,71	29,65	28,74	29,20
Nusa Tenggara Timur	12,75	13,46	13,09	21,59	22,79	22,19	19,46	20,66	20,05
Kalimantan Barat	11,15	9,32	10,28	12,56	11,98	12,27	12,06	11,10	11,59
Kalimantan Tengah	5,69	6,91	6,29	7,15	9,95	8,54	6,56	8,74	7,64
Kalimantan Selatan	8,39	10,05	9,19	15,67	17,20	16,42	12,19	13,84	13,00
Kalimantan Timur	9,62	7,87	8,78	13,36	11,80	12,57	10,80	9,21	10,02
Kalimantan Utara	12,52	12,09	12,32	9,41	7,94	8,70	11,36	10,49	10,94
Sulawesi Utara	14,94	13,83	14,39	18,24	21,39	19,80	16,44	17,31	16,87
Sulawesi Tengah	15,63	17,18	16,41	20,85	21,27	21,06	19,30	20,02	19,66
Sulawesi Selatan	13,55	16,89	15,18	23,95	24,74	24,34	19,32	21,28	20,28
Sulawesi Tenggara	15,74	19,16	17,36	26,84	29,20	27,99	22,78	25,68	24,18
Gorontalo	20,71	14,83	17,92	25,25	29,79	27,51	23,32	23,79	23,55
Sulawesi Barat	18,92	25,87	22,31	22,97	21,64	22,30	22,12	22,48	22,30
Maluku	6,66	7,32	6,98	12,52	13,41	12,96	10,10	10,92	10,50
Maluku Utara	3,78	5,44	4,57	9,67	8,44	9,06	8,11	7,69	7,90
Papua Barat	11,26	13,67	12,41	15,02	15,19	15,10	13,52	14,59	14,04
Papua	13,73	14,55	14,13	20,96	20,29	20,64	19,14	18,81	18,98
Indonesia	**13,85**	**14,46**	**14,15**	**20,87**	**21,77**	**21,32**	**16,94**	**17,78**	**17,35**

Catatan: L (Laki-Laki), P (Perempuan), L+P (Laki-Laki + Perempuan)

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 8.18

Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 7-17 tahun di Perkotaan yang Memperoleh Program Indonesia Pintar (PIP) menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Jamkesda				
	Estimasi	Standar Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	19,26	1,54	8,02	16,23	22,29
Sumatera Utara	9,11	0,67	7,35	7,79	10,42
Sumatera Barat	18,09	1,57	8,69	15,01	21,18
Riau	8,16	0,96	11,80	6,28	10,05
Jambi	12,43	1,59	12,77	9,32	15,54
Sumatera Selatan	9,31	1,04	11,20	7,27	11,35
Bengkulu	8,89	1,54	17,34	5,87	11,91
Lampung	19,99	1,68	8,40	16,70	23,28
Kepulauan Bangka Belitung	6,61	1,11	16,78	4,43	8,78
Kepulauan Riau	9,59	1,33	13,90	6,98	12,20
DKI Jakarta	9,43	0,92	9,79	7,62	11,25
Jawa Barat	11,87	0,55	4,65	10,78	12,95
Jawa Tengah	23,41	0,74	3,17	21,95	24,86
DI Yogyakarta	30,05	2,06	6,85	26,02	34,09
Jawa Timur	16,95	0,67	3,95	15,64	18,26
Banten	5,85	0,72	12,33	4,44	7,27
Bali	8,99	1,04	11,61	6,94	11,03
Nusa Tenggara Barat	31,30	1,82	5,82	27,73	34,87
Nusa Tenggara Timur	12,75	1,48	11,61	9,85	15,65
Kalimantan Barat	11,15	1,35	12,11	8,51	13,80
Kalimantan Tengah	5,69	1,08	19,06	3,56	7,82
Kalimantan Selatan	8,39	1,00	11,89	6,43	10,34
Kalimantan Timur	9,62	1,15	12,01	7,35	11,88
Kalimantan Utara	12,52	1,85	14,78	8,89	16,15
Sulawesi Utara	14,94	1,46	9,81	12,07	17,81
Sulawesi Tengah	15,63	1,89	12,11	11,92	19,34
Sulawesi Selatan	13,55	1,04	7,67	11,52	15,59
Sulawesi Tenggara	15,74	1,77	11,24	12,27	19,21
Gorontalo	20,71	2,48	11,97	15,85	25,57
Sulawesi Barat	18,92	2,97	15,69	13,10	24,74
Maluku	6,66	1,20	17,98	4,31	9,01
Maluku Utara	3,78	1,04	27,54	1,74	5,82
Papua Barat	11,26	1,58	14,02	8,16	14,35
Papua	13,73	1,44	10,51	10,90	16,56
Indonesia	**13,85**	**0,23**	**1,64**	**13,40**	**14,29**

Lampiran 8.19

Persentase Penduduk Berumur 7-17 Tahun yang Memperoleh Program Indonesia Pintar (PIP) dan Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
Aceh	11,36	9,86	10,64	18,30	18,53	18,42	16,02	15,84	15,93
Sumatera Utara	5,97	6,62	6,28	11,70	12,07	11,88	8,66	9,28	8,96
Sumatera Barat	10,60	10,62	10,61	13,30	15,07	14,19	12,00	13,00	12,49
Riau	5,69	6,44	6,05	11,85	12,20	12,02	9,38	9,97	9,67
Jambi	7,68	9,24	8,43	4,89	5,73	5,31	5,80	6,81	6,30
Sumatera Selatan	5,60	4,10	4,88	9,46	10,32	9,89	8,02	8,08	8,05
Bengkulu	4,74	8,31	6,46	10,99	12,54	11,76	8,92	11,21	10,05
Lampung	15,35	15,55	15,45	16,11	15,75	15,94	15,87	15,69	15,78
Kepulauan Bangka Belitung	5,36	7,94	6,60	8,75	7,52	8,14	6,83	7,75	7,28
Kepulauan Riau	7,81	6,92	7,38	10,58	12,83	11,72	8,01	7,40	7,72
DKI Jakarta	4,62	4,33	4,47	-	-	-	4,62	4,33	4,47
Jawa Barat	7,60	8,08	7,83	10,95	12,50	11,73	8,31	9,09	8,69
Jawa Tengah	15,50	16,09	15,78	20,71	21,12	20,91	17,98	18,58	18,27
DI Yogyakarta	18,23	17,75	18,00	25,58	31,07	28,29	20,11	21,32	20,69
Jawa Timur	9,49	10,68	10,07	15,38	14,65	15,02	12,10	12,49	12,29
Banten	4,07	4,59	4,33	7,04	8,03	7,54	4,98	5,66	5,32
Bali	6,84	7,14	6,98	13,71	11,87	12,79	8,86	8,65	8,76
Nusa Tenggara Barat	21,01	18,26	19,67	16,65	18,51	17,57	18,75	18,39	18,58
Nusa Tenggara Timur	6,37	7,37	6,85	15,39	15,73	15,56	13,22	13,82	13,52
Kalimantan Barat	6,54	4,70	5,66	8,29	7,61	7,95	7,67	6,65	7,17
Kalimantan Tengah	4,29	5,04	4,66	4,51	6,17	5,33	4,42	5,72	5,06
Kalimantan Selatan	6,46	7,65	7,04	10,99	12,03	11,51	8,83	9,97	9,39
Kalimantan Timur	5,11	3,93	4,54	10,41	9,58	9,99	6,78	5,86	6,33
Kalimantan Utara	7,87	8,85	8,33	5,89	2,93	4,45	7,13	6,56	6,86
Sulawesi Utara	8,87	8,57	8,72	10,73	12,85	11,78	9,72	10,54	10,12
Sulawesi Tengah	9,69	10,92	10,31	12,27	12,34	12,30	11,51	11,90	11,71
Sulawesi Selatan	8,43	10,82	9,59	16,01	16,85	16,42	12,63	14,19	13,40
Sulawesi Tenggara	11,00	13,73	12,29	19,76	20,98	20,36	16,55	18,44	17,46
Gorontalo	15,54	10,22	13,02	18,32	21,93	20,12	17,14	17,23	17,18
Sulawesi Barat	12,17	19,47	15,73	14,69	14,70	14,69	14,16	15,65	14,90
Maluku	3,16	3,75	3,45	7,83	7,50	7,66	5,89	5,97	5,93
Maluku Utara	3,38	3,01	3,20	5,13	4,61	4,87	4,66	4,21	4,44
Papua Barat	4,97	7,16	6,01	11,19	9,78	10,51	8,72	8,75	8,74
Papua	7,63	7,14	7,39	9,78	9,54	9,67	9,24	8,92	9,09
Indonesia	**8,72**	**9,10**	**8,90**	**13,71**	**14,14**	**13,92**	**10,92**	**11,39**	**11,15**

Catatan: L (Laki-Laki), P (Perempuan), L+P (Laki-Laki + Perempuan)

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 8.20

Sampling Error Persentase Penduduk Perkotaan Berumur 7-17 tahun di Perkotaan yang memperoleh Program Indonesia Pintar (PIP) dan Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Laki-Laki				
	Estimasi	Standar Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	11,36	1,32	11,61	8,77	13,94
Sumatera Utara	5,97	0,56	9,41	4,87	7,08
Sumatera Barat	10,60	1,25	11,83	8,14	13,06
Riau	5,69	0,80	14,08	4,12	7,25
Jambi	7,68	1,30	16,87	5,14	10,21
Sumatera Selatan	5,60	0,82	14,60	4,00	7,20
Bengkulu	4,74	1,19	25,15	2,40	7,07
Lampung	15,35	1,54	10,06	12,32	18,38
Kepulauan Bangka Belitung	5,36	1,04	19,45	3,32	7,40
Kepulauan Riau	7,81	1,24	15,92	5,37	10,24
DKI Jakarta	4,62	0,67	14,42	3,31	5,92
Jawa Barat	7,60	0,46	5,99	6,70	8,49
Jawa Tengah	15,50	0,64	4,16	14,23	16,76
DI Yogyakarta	18,23	1,74	9,57	14,81	21,64
Jawa Timur	9,49	0,52	5,43	8,48	10,51
Banten	4,07	0,55	13,58	2,99	5,16
Bali	6,84	0,95	13,90	4,98	8,70
Nusa Tenggara Barat	21,01	1,59	7,58	17,89	24,13
Nusa Tenggara Timur	6,37	1,05	16,43	4,32	8,43
Kalimantan Barat	6,54	1,12	17,14	4,34	8,73
Kalimantan Tengah	4,29	0,98	22,94	2,36	6,22
Kalimantan Selatan	6,46	0,91	14,13	4,67	8,26
Kalimantan Timur	5,11	0,90	17,62	3,35	6,88
Kalimantan Utara	7,87	1,49	18,90	4,96	10,79
Sulawesi Utara	8,87	1,23	13,91	6,45	11,29
Sulawesi Tengah	9,69	1,48	15,27	6,79	12,59
Sulawesi Selatan	8,43	0,82	9,77	6,82	10,05
Sulawesi Tenggara	11,00	1,55	14,06	7,97	14,03
Gorontalo	15,54	2,19	14,08	11,25	19,84
Sulawesi Barat	12,17	2,64	21,73	6,98	17,35
Maluku	3,16	0,77	24,36	1,65	4,67
Maluku Utara	3,38	1,01	30,06	1,39	5,36
Papua Barat	4,97	0,95	19,20	3,10	6,84
Papua	7,63	1,09	14,31	5,49	9,77
Indonesia	**8,72**	**0,19**	**2,13**	**8,35**	**9,08**

Lampiran 8.20 (Lanjutan)

Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 7-17 tahun di Perkotaan yang memperoleh Program Indonesia Pintar (PIP) dan Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Perempuan				
	Estimasi	Standar Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	9,86	1,12	11,34	7,67	12,05
Sumatera Utara	6,62	0,61	9,22	5,42	7,82
Sumatera Barat	10,62	1,13	10,60	8,41	12,82
Riau	6,44	0,93	14,42	4,62	8,26
Jambi	9,24	1,55	16,77	6,20	12,28
Sumatera Selatan	4,10	0,63	15,45	2,86	5,34
Bengkulu	8,31	1,50	17,99	5,38	11,24
Lampung	15,55	1,64	10,56	12,33	18,77
Kepulauan Bangka Belitung	7,94	1,37	17,23	5,26	10,63
Kepulauan Riau	6,92	1,36	19,61	4,26	9,58
DKI Jakarta	4,33	0,62	14,44	3,10	5,55
Jawa Barat	8,08	0,48	5,92	7,15	9,02
Jawa Tengah	16,09	0,68	4,25	14,75	17,43
DI Yogyakarta	17,75	1,73	9,76	14,36	21,15
Jawa Timur	10,68	0,57	5,37	9,56	11,80
Banten	4,59	0,71	15,45	3,20	5,98
Bali	7,14	1,00	13,98	5,18	9,09
Nusa Tenggara Barat	18,26	1,51	8,28	15,30	21,23
Nusa Tenggara Timur	7,37	1,54	20,90	4,35	10,39
Kalimantan Barat	4,70	0,80	16,95	3,14	6,26
Kalimantan Tengah	5,04	0,97	19,28	3,14	6,95
Kalimantan Selatan	7,65	1,08	14,12	5,53	9,77
Kalimantan Timur	3,93	0,75	19,03	2,46	5,39
Kalimantan Utara	8,85	1,75	19,79	5,42	12,28
Sulawesi Utara	8,57	1,21	14,10	6,20	10,93
Sulawesi Tengah	10,92	1,64	15,00	7,71	14,13
Sulawesi Selatan	10,82	1,06	9,78	8,75	12,89
Sulawesi Tenggara	13,73	1,88	13,66	10,06	17,41
Gorontalo	10,22	1,79	17,55	6,70	13,73
Sulawesi Barat	19,47	4,02	20,66	11,59	27,36
Maluku	3,75	0,94	24,93	1,92	5,59
Maluku Utara	3,01	0,95	31,64	1,14	4,88
Papua Barat	7,16	1,49	20,82	4,24	10,08
Papua	7,14	1,13	15,86	4,92	9,36
Indonesia	**9,10**	**0,20**	**2,16**	**8,72**	**9,49**

Lampiran 8.21

Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 7-17 tahun di Perdesaan yang Memperoleh Program Indonesia Pintar (PIP) dan Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Laki-Laki				
	Estimasi	Standar Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	18,30	0,81	4,44	16,71	19,90
Sumatera Utara	11,70	0,57	4,83	10,59	12,81
Sumatera Barat	13,30	0,81	6,07	11,72	14,89
Riau	11,85	0,88	7,44	10,13	13,58
Jambi	4,89	0,58	11,79	3,76	6,02
Sumatera Selatan	9,46	0,63	6,61	8,24	10,69
Bengkulu	10,99	0,92	8,41	9,18	12,80
Lampung	16,11	0,86	5,35	14,42	17,80
Kepulauan Bangka Belitung	8,75	1,36	15,56	6,08	11,42
Kepulauan Riau	10,58	2,13	20,11	6,41	14,75
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	10,95	0,72	6,60	9,53	12,36
Jawa Tengah	20,71	0,73	3,53	19,28	22,14
DI Yogyakarta	25,58	2,73	10,67	20,23	30,93
Jawa Timur	15,38	0,64	4,16	14,13	16,63
Banten	7,04	1,01	14,28	5,07	9,02
Bali	13,71	1,44	10,52	10,88	16,53
Nusa Tenggara Barat	16,65	1,23	7,40	14,23	19,06
Nusa Tenggara Timur	15,39	0,59	3,84	14,24	16,55
Kalimantan Barat	8,29	0,66	7,98	6,99	9,59
Kalimantan Tengah	4,51	0,62	13,76	3,29	5,73
Kalimantan Selatan	10,99	0,92	8,37	9,19	12,80
Kalimantan Timur	10,41	1,46	14,00	7,56	13,27
Kalimantan Utara	5,89	1,86	31,54	2,25	9,53
Sulawesi Utara	10,73	0,93	8,71	8,89	12,56
Sulawesi Tengah	12,27	0,79	6,47	10,72	13,83
Sulawesi Selatan	16,01	0,75	4,70	14,53	17,48
Sulawesi Tenggara	19,76	0,96	4,85	17,88	21,63
Gorontalo	18,32	1,51	8,26	15,35	21,28
Sulawesi Barat	14,69	1,25	8,49	12,24	17,13
Maluku	7,83	0,84	10,72	6,18	9,47
Maluku Utara	5,13	0,62	12,03	3,92	6,34
Papua Barat	11,19	1,06	9,45	9,12	13,26
Papua	9,78	0,61	6,27	8,58	10,99
Indonesia	**13,71**	**0,18**	**1,34**	**13,35**	**14,07**

Lampiran 8.21 (Lanjutan)

Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 7-17 tahun di Perdesaan yang Memperoleh Program Indonesia Pintar (PIP) dan Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Perempuan				
	Estimasi	Standar Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	18,53	0,89	4,82	16,78	20,28
Sumatera Utara	12,07	0,58	4,78	10,94	13,20
Sumatera Barat	15,07	0,87	5,78	13,36	16,78
Riau	12,20	0,89	7,31	10,45	13,95
Jambi	5,73	0,68	11,81	4,40	7,05
Sumatera Selatan	10,32	0,68	6,56	8,99	11,64
Bengkulu	12,54	1,05	8,38	10,48	14,60
Lampung	15,75	0,84	5,31	14,11	17,39
Kepulauan Bangka Belitung	7,52	1,20	15,90	5,18	9,87
Kepulauan Riau	12,83	2,48	19,29	7,98	17,68
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	12,50	0,79	6,33	10,95	14,05
Jawa Tengah	21,12	0,78	3,69	19,59	22,65
DI Yogyakarta	31,07	3,03	9,76	25,13	37,01
Jawa Timur	14,65	0,67	4,54	13,34	15,95
Banten	8,03	1,09	13,59	5,89	10,17
Bali	11,87	1,45	12,23	9,03	14,72
Nusa Tenggara Barat	18,51	1,34	7,23	15,89	21,13
Nusa Tenggara Timur	15,73	0,62	3,96	14,51	16,95
Kalimantan Barat	7,61	0,61	8,03	6,41	8,81
Kalimantan Tengah	6,17	0,78	12,60	4,64	7,69
Kalimantan Selatan	12,03	0,96	7,95	10,16	13,91
Kalimantan Timur	9,58	1,52	15,90	6,60	12,57
Kalimantan Utara	2,93	1,10	37,48	0,78	5,09
Sulawesi Utara	12,85	1,05	8,15	10,80	14,91
Sulawesi Tengah	12,34	0,82	6,67	10,72	13,95
Sulawesi Selatan	16,85	0,78	4,65	15,32	18,39
Sulawesi Tenggara	20,98	1,04	4,95	18,95	23,02
Gorontalo	21,93	1,87	8,52	18,27	25,59
Sulawesi Barat	14,70	1,32	8,95	12,12	17,28
Maluku	7,50	0,85	11,35	5,83	9,16
Maluku Utara	4,61	0,52	11,38	3,58	5,63
Papua Barat	9,78	0,88	8,98	8,06	11,51
Papua	9,54	0,63	6,64	8,29	10,78
Indonesia	**14,14**	**0,19**	**1,37**	**13,76**	**14,52**

PERUMAHAN DAN SANITASI

AKSES AIR MINUM

Indonesia (90,03%)

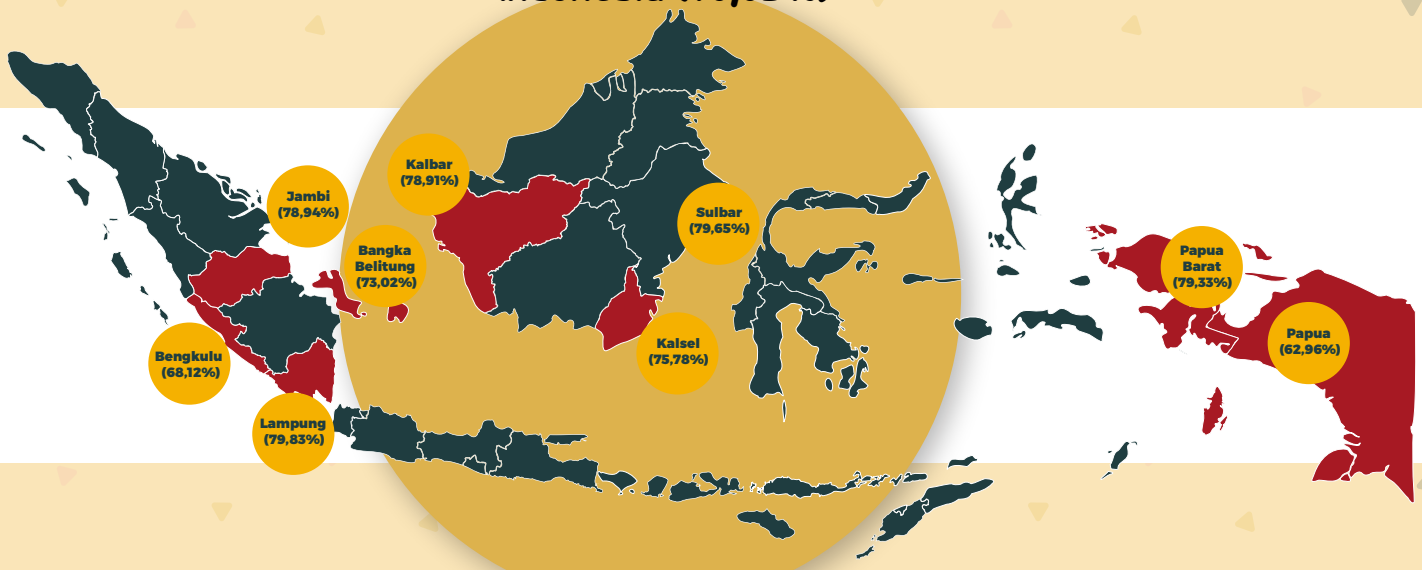

Provinsi dengan akses air minum layak kurang dari 80%

SANITASI LAYAK

Indonesia (79,71%)

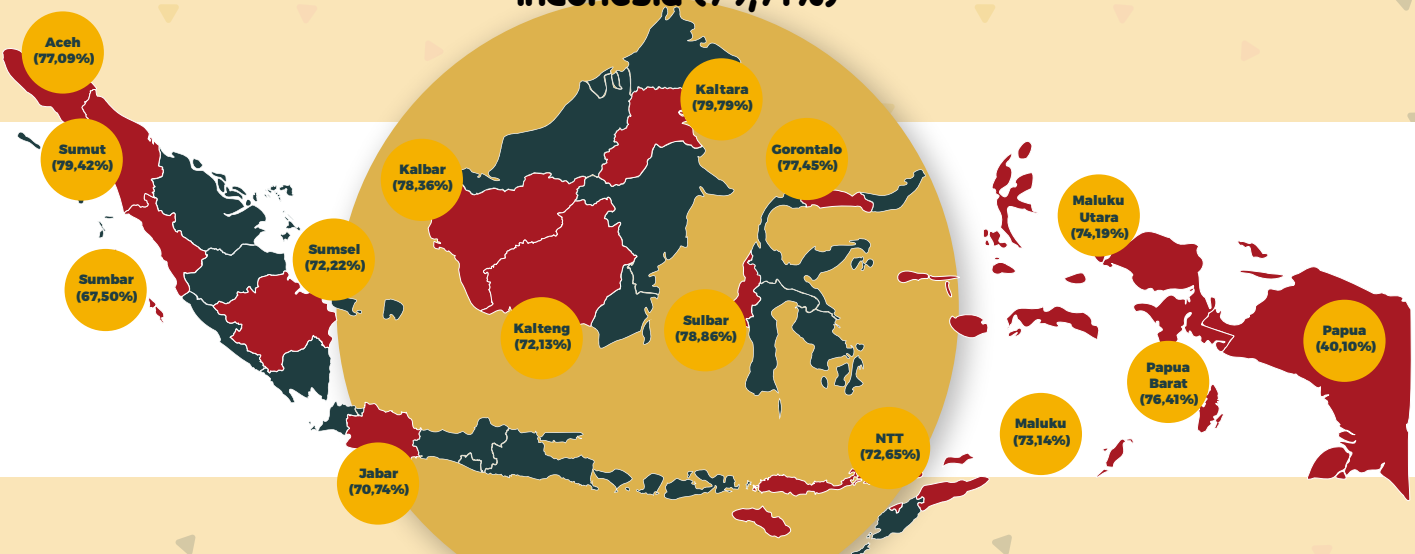

Provinsi dengan akses sanitasi layak kurang dari 80%

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2021

Overview

Bangunan tempat tinggal adalah salah satu tolok ukur kemampuan masyarakat dalam aspek perekonomian. Hasil Susenas menunjukkan bahwa status kepemilikan bangunan tertinggi adalah "milik sendiri" baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP, 2004), air bersih dan sanitasi yang sehat merupakan dua komponen yang sangat esensial bagi kelangsungan kehidupan manusia. Namun, masih terdapat kesenjangan yang terjadi dalam hal akses air bersih dan sanitasi layak di daerah perkotaan dan perdesaan. Kesenjangan juga terlihat pada akses air dan sanitasi layak antara provinsi di Pulau Jawa dan provinsi luar Pulau Jawa.

9.1. Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal

Bangunan tempat tinggal (perumahan) adalah salah satu komponen penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat secara umum (Syahrial dan Nazara 2006). Status kepemilikan bangunan tempat tinggal juga menjadi penting karena dapat menjadi salah satu tolak ukur kemampuan masyarakat dalam aspek perekonomian. Penelitian menunjukkan bahwa adanya kepemilikan rumah dapat meningkatkan kualitas komunitas serta masyarakat dengan lebih baik (Green, 2001). Hal ini disebabkan karena masyarakat yang telah memiliki bangunan tempat tinggal akan merasa "aman" dan mendapatkan keuntungan dalam aspek sosial. Bahkan, penelitian yang dilakukan oleh Green dan White (1997) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan bagi anak-anak yang tinggal di rumah sendiri untuk tetap bersekolah dengan anak-anak yang tinggal di rumah sewa. Anak-anak yang tinggal di rumah sewa memiliki kecenderungan untuk sering berpindah tempat tinggal dan sekolah. Hal ini nantinya akan membuat anak-anak tersebut mengalami permasalahan dalam hal akademik serta sosial apabila tidak memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dengan lingkungan baru.

9.1.1. Persentase Anak Menurut Tipe Daerah dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal

Hasil analisis atas persentase anak menurut tipe daerah dan status kepemilikan bangunan tempat tinggal pada tahun 2021

dipresentasikan pada Gambar 9.1. Data menunjukkan bahwa persentase status kepemilikan bangunan tempat tinggal tertinggi adalah milik sendiri baik di daerah perkotaan maupun perdesaan (Susenas, 2021). Persentase anak di daerah perdesaan yang tinggal di bangunan tempat tinggal milik sendiri (89,33 persen) lebih besar dibandingkan dengan persentase anak di perkotaan yang tinggal di bangunan tempat tinggal milik sendiri (73,04 persen).

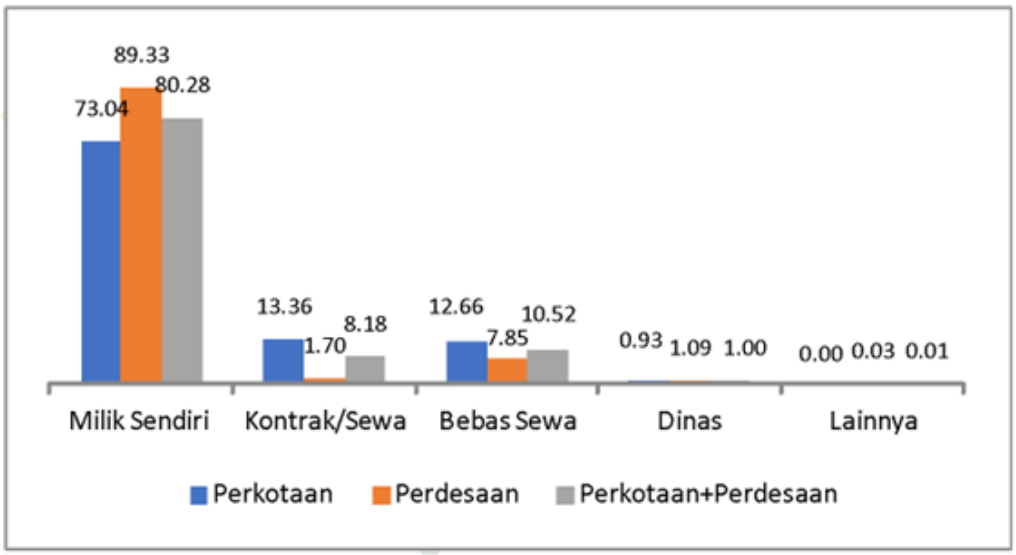

Gambar 9.1 Persentase Anak Menurut Tipe Daerah dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

Rendahnya kepemilikan rumah milik sendiri di daerah perkotaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya karena adanya beberapa pertimbangan yang dilakukan keluarga dalam memutuskan untuk memiliki atau menyewa rumah, seperti pendapatan, biaya penggunaan, dan jumlah anggota keluarga (Robst et al. 1999). Jumlah pendapatan yang sama namun dengan biaya penggunaan tempat tinggal yang lebih tinggi di masyarakat perkotaan dibandingkan masyarakat perdesaan tentu akan menjadi alasan bagi keluarga dalam menentukan untuk tinggal di bangunan milik sendiri atau menyewa. Selain itu, jumlah anggota keluarga yang cenderung lebih besar di masyarakat perdesaan menjadi salah satu alasan bagi masyarakat tersebut untuk tinggal di bangunan milik sendiri. Jumlah anggota rumah tangga memiliki pengaruh positif terhadap probabilitas rumah tangga tersebut untuk menempati rumah milik sendiri atau non kontrak/sewa (Syahrial & Nazara, 2006).

9.2.Akses Terhadap Air Minum Layak dan Sanitasi Layak

Air adalah kebutuhan dasar yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup manusia. Seseorang membutuhkan setidaknya empat (4) liter air untuk dikonsumsi dari total 20-liter air yang diperlukan berdasarkan perbandingan kebutuhan air secara internasional (Fogden dan Wood, 2009). Selain itu, akses terhadap air minum yang layak menjadi penting untuk menopang segala kebutuhan harian masyarakat. Adanya ketimpangan akses terhadap air bersih diduga menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia (UNDP, 2004). Selain akses terhadap air minum yang layak, akses terhadap sanitasi juga merupakan suatu hal yang esensial. Berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/ SDGs) yang dicanangkan oleh 193 negara anggota PBB di seluruh dunia, sanitasi menjadi salah satu hal yang harus dituntaskan pada tahun 2030. Sanitasi yang buruk dapat menyebabkan berbagai dampak buruk, seperti penularan virus dan bakteri penyakit, stunting, dampak negatif bagi pendidikan anak-anak, bahkan dapat berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga serta negara (Bappenas & UNICEF, 2017). Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), air bersih dan sanitasi yang sehat merupakan dua komponen yang saling berhubungan satu sama lain dan sangat penting bagi kelangsungan kehidupan manusia. Air bersih adalah input atau konsumsi dari kegiatan atau aktivitas manusia sedangkan sanitasi adalah output atau dampak dari kegiatan atau aktivitas tersebut.

9.2.1. Persentase Anak yang Tinggal di Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak Menurut Tipe Daerah

Hasil analisis persentase anak yang tinggal di rumah tangga yang memiliki akses air minum layak menurut tipe daerah pada tahun 2021 disajikan pada Gambar 9.2. Data Susenas pada tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan akses air layak di daerah perkotaan dan perdesaan di Indonesia. Akses air layak di perkotaan lebih tinggi (95,75 persen) dibandingkan dengan di perdesaan (82,87 persen). Hal ini dapat disebabkan karena adanya perbedaan pada kondisi geografis, sosial ekonomi, dan perbedaan kelembagaan antara perkotaan dan perdesaan (UNICEF, 1997; Chaudhuri dan Roy, 2017). Perbedaan atas kondisi akses air bersih

yang sangat jauh antara perdesaan dan perkotaan harus menjadi perhatian serius, khususnya bagi pemerintah daerah untuk dapat menyediakan air minum layak bagi seluruh masyarakatnya. Akses air minum yang layak adalah kebutuhan dasar manusia, khususnya anak untuk mendapatkan hak kesehatan dasar yang optimal.

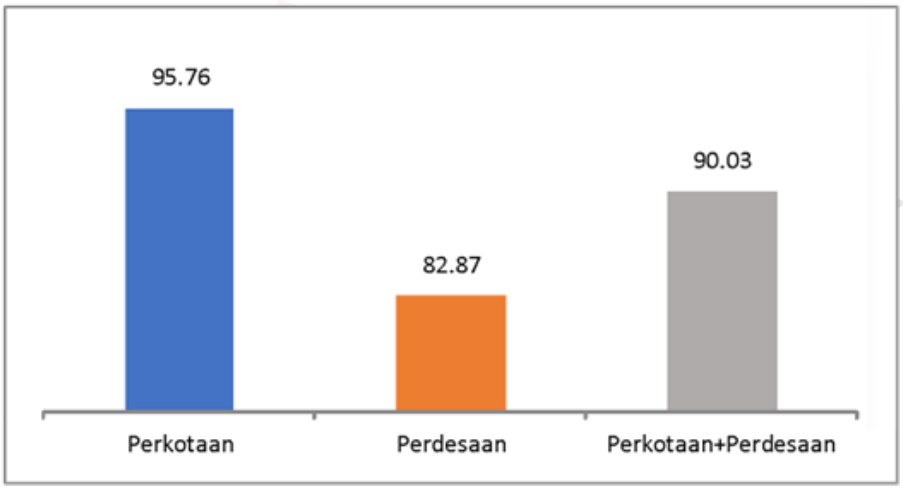

Gambar 9.2 Persentase Anak yang Tinggal di Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak Menurut Tipe Daerah Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

9.2.2. Persentase Anak yang Tinggal di Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air minum Layak Menurut Provinsi

Hasil analisis persentase anak yang tinggal di rumah tangga yang memiliki akses air minum layak menurut provinsi pada tahun 2021 dipresentasikan pada Gambar 9.3. Data menunjukkan bahwa Provinsi Papua dan Bengkulu menjadi dua provinsi dengan persentase akses air layak terendah di Indonesia pada tahun 2021. Penelitian yang dilakukan oleh Nurzanah et al. pada tahun 2020 menyebutkan bahwa masyarakat di Provinsi Bengkulu, khususnya di wilayah perdesaan masih membuang sampah dan kotoran ke dalam tanah ataupun di sungai. Hal ini menyebabkan tercemarnya sumber-sumber air yang dapat dikonsumsi.

Selain itu, berdasarkan laporan Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua pada tahun 2015 menyebutkan beberapa hal yang menjadi alasan permasalahan akses air layak di Papua. BPLH Provinsi Papua menyebutkan bahwa rendahnya kualitas air di beberapa bagian Provinsi Papua terjadi karena adanya ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap sumber air baku sungai dan rawa namun sumber-sumber air baku ini mengalami

penurunan karena adanya pencemaran akibat instalasi sanitasi yang tidak sehat maupun adanya resapan dari lahan gambut. Selain itu, kondisi geografis wilayah Papua yang terdiri dari dataran rendah, pantai, hingga pegunungan serta kondisi penyebaran penduduk yang tinggal di daerah-daerah yang sulit untuk dilakukan pipanisasi menjadi alasan lain rendahnya akses masyarakat terhadap air minum layak di Papua. Dengan demikian dibutuhkan perhatian serius dari pemerintah, khususnya pemerintah kedua provinsi tersebut untuk dapat berupaya menyediakan akses air minum layak bagi masyarakatnya sebagai kebutuhan esensial demi mendapatkan kesehatan yang optimal.

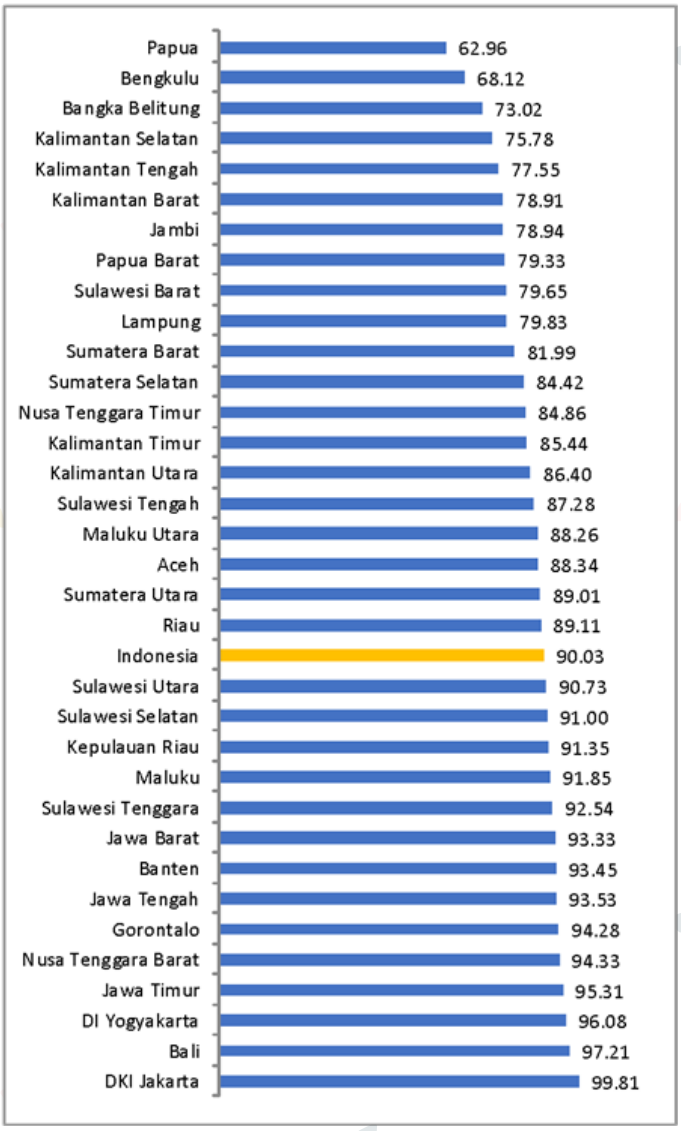

Gambar 9.3 Persentase Anak yang Tinggal di Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Layak Menurut Provinsi Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

9.2.3. Persentase Anak yang Tinggal di Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Tipe Daerah

Hasil analisis data persentase anak yang tinggal di rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menurut tipe daerah pada tahun 2021 dipresentasikan pada Gambar 9.4. Serupa dengan hasil analisis atas akses air minum layak, data menunjukkan bahwa daerah perkotaan memiliki akses sanitasi layak yang lebih tinggi yaitu 83,08 persen dibandingkan dengan daerah perdesaan sebesae 75,71 persen.

Beberapa faktor yang dapat menjelaskan hal ini adalah adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi antara daerah perkotaan dan perdesaan (Tarigan, 2003). Adanya pemberdayaan masyarakat, ketersediaan dana sektoral, dan ketersediaan sarana pendidikan semua jenjang menjadi alasan wilayah perkotaan memiliki akses sanitasi yang layak lebih besar dibandingkan daerah perdesaan.

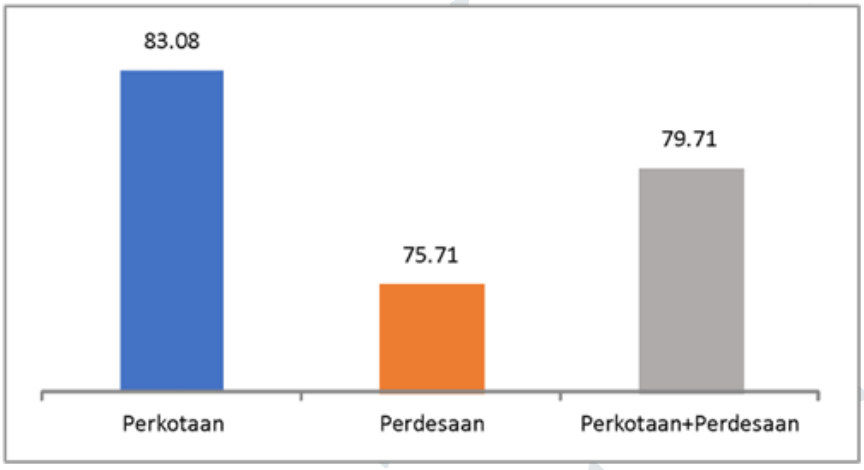

Gambar 9.4 Persentase Anak yang Tinggal di Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Tipe Daerah Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

9.2.4. Persentase Anak yang Tinggal di Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Provinsi

Hasil analisis persentase anak yang tinggal di rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menurut provinsi pada tahun 2021 disajikan pada Gambar 9.5. Data Susenas tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat celah sebesar 56,69 persen antara provinsi dengan persentase akses sanitasi layak tertinggi dan terendah. Provinsi DI

Yogyakarta memiliki persentase akses sanitasi layak sebesar 96,79 persen sedangkan Provinsi Papua memiliki persentase sebesar 40,10 persen, yaitu 39,61 persen di bawah persentase akses sanitasi layak nasional.

Berdasarkan data Bappenas pada tahun 2013, hanya 28,04 persen rumah tangga di Provinsi Papua yang memiliki jamban. Bahkan sebanyak 80,00 persen masyarakat di Jayapura, Papua tidak memiliki kebiasaan mencuci tangan sebelum makan. Selain itu, Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua (2015) juga menyebutkan bahwa salah satu alasan rendahnya akses sanitasi layak di provinsi tersebut akibat adanya political will yang lemah dalam pengalokasian anggaran dan prioritas pembangunan di wilayah Papua yang masih cenderung memprioritaskan bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan publik dibandingkan sistem sanitasi yang layak.

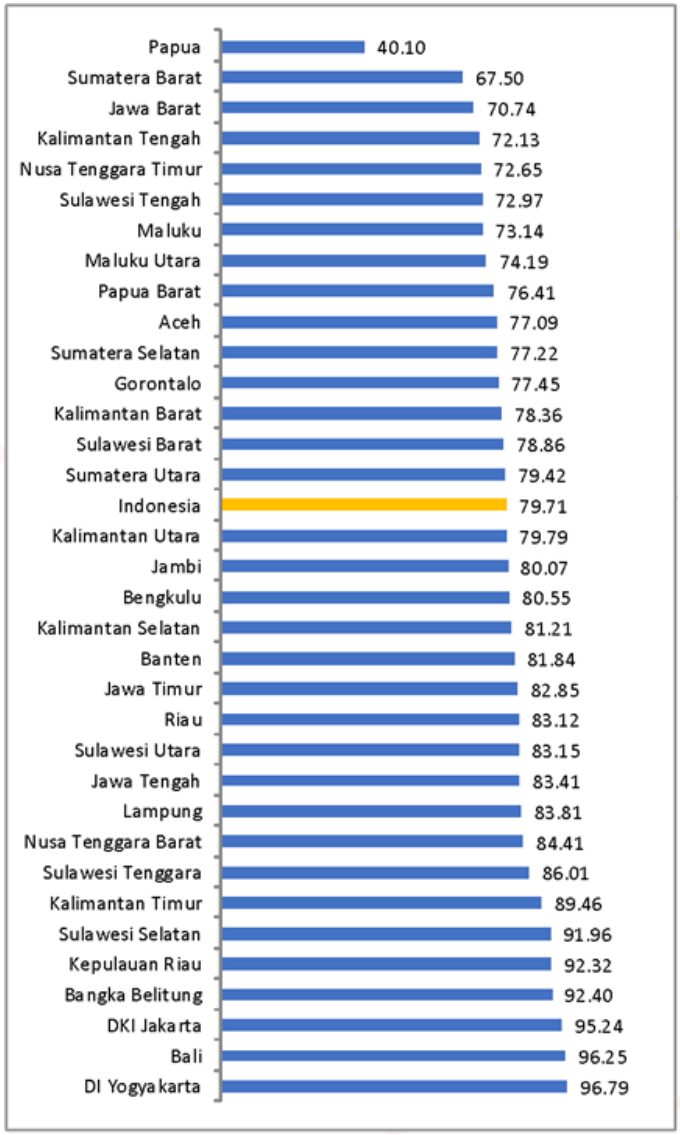

Gambar 9.5 Persentase Anak yang Tinggal di Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Provinsi Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, BPS

Lampiran 9.1

Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun menurut Tipe Daerah dan Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal, 2021

Tipe Daerah	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas Sewa	Dinas	Lainnya	Total
Perkotaan	73,04	13,36	12,66	0,93	0,00	100
Perdesaan	89,33	1,70	7,85	1,09	0,03	100
Perkotaan dan Perdesaan	80,28	8,18	10,52	1,00	0,01	100

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 9.2

Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Tinggal di Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Layak menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2021

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
Aceh	93,81	85,72	88,34
Sumatera Utara	95,48	81,88	89,01
Sumatera Barat	91,04	73,77	81,99
Riau	95,90	84,68	89,11
Jambi	90,45	73,51	78,94
Sumatera Selatan	92,74	79,57	84,42
Bengkulu	82,22	61,29	68,12
Lampung	87,38	76,35	79,83
Bangka Belitung	76,80	68,39	73,02
Kepulauan Riau	93,61	62,59	91,35
DKI Jakarta	99,81		99,81
Jawa Barat	96,01	83,65	93,33
Jawa Tengah	97,18	89,65	93,53
DI Yogyakarta	96,59	94,59	96,08
Jawa Timur	97,45	92,69	95,31
Banten	97,91	83,24	93,45
Bali	98,66	93,78	97,21
Nusa Tenggara Barat	96,63	92,17	94,33
Nusa Tenggara Timur	94,57	81,94	84,86
Kalimantan Barat	89,01	73,47	78,91
Kalimantan Tengah	88,29	70,32	77,55
Kalimantan Selatan	88,30	64,33	75,78
Kalimantan Timur	94,02	67,81	85,44
Kalimantan Utara	95,51	71,88	86,40
Sulawesi Utara	93,96	87,03	90,73
Sulawesi Tengah	94,75	84,05	87,28
Sulawesi Selatan	96,92	86,24	91,00
Sulawesi Tenggara	97,80	89,66	92,54
Gorontalo	98,50	91,24	94,28
Sulawesi Barat	94,26	75,97	79,65
Maluku	95,58	89,32	91,85
Maluku Utara	96,42	85,39	88,26
Papua Barat	92,63	70,35	79,33
Papua	89,98	53,36	62,96
Indonesia	95,76	82,87	90,03

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 9.3

Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Tinggal di Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2021

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
Aceh	87,87	71,92	77,09
Sumatera Utara	88,48	69,43	79,42
Sumatera Barat	74,94	60,75	67,50
Riau	92,20	77,19	83,12
Jambi	81,79	79,27	80,07
Sumatera Selatan	90,74	69,35	77,22
Bengkulu	77,23	82,16	80,55
Lampung	77,61	86,66	83,81
Bangka Belitung	94,10	90,32	92,40
Kepulauan Riau	94,71	61,98	92,32
DKI Jakarta	95,24		95,24
Jawa Barat	70,39	72,01	70,74
Jawa Tengah	82,86	83,99	83,41
DI Yogyakarta	96,56	97,45	96,79
Jawa Timur	85,59	79,49	82,85
Banten	87,58	68,69	81,84
Bali	97,94	92,23	96,25
Nusa Tenggara Barat	88,46	80,62	84,41
Nusa Tenggara Timur	89,66	67,54	72,65
Kalimantan Barat	84,62	75,00	78,36
Kalimantan Tengah	79,35	67,27	72,13
Kalimantan Selatan	84,86	77,87	81,21
Kalimantan Timur	93,35	81,47	89,46
Kalimantan Utara	78,77	81,42	79,79
Sulawesi Utara	86,81	78,96	83,15
Sulawesi Tengah	84,29	68,09	72,97
Sulawesi Selatan	92,30	91,69	91,96
Sulawesi Tenggara	91,59	82,95	86,01
Gorontalo	88,94	69,20	77,45
Sulawesi Barat	84,26	77,50	78,86
Maluku	84,45	65,43	73,14
Maluku Utara	93,60	67,35	74,19
Papua Barat	86,41	69,66	76,41
Papua	82,10	25,17	40,10
Indonesia	83,08	75,51	79,71

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS

14.517 KASUS KEKERASAN

15.971 KORBAN KEKERASAN

TERHADAP ANAK TAHUN 2021

INDONESIA (12,64%)

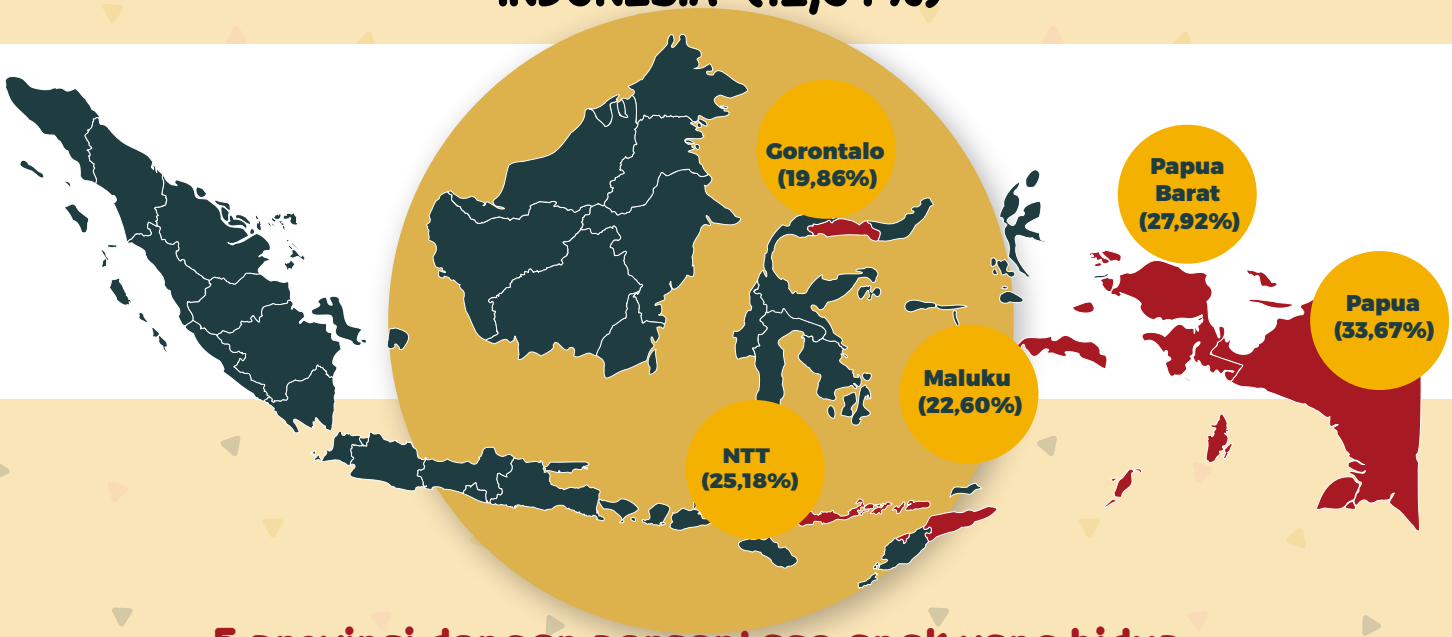

5 provinsi dengan persentase anak yang hidup di bawah garis kemiskinan tertinggi di Indonesia:

Overview

Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak mendefinisikan perlindungan khusus sebagai suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Pada peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa terdapat 15 kategori anak yang perlu diberikan perlindungan khusus, yaitu:

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
6. Anak yang menjadi korban pornografi;
7. Anak dengan HIV dan AIDS;
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
9. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.
10. Anak korban kejahatan seksual;
11. Anak korban jaringan terorisme;
12. Anak penyandang disabilitas;
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pada bab ini, pembahasan mengenai perlindungan khusus terhadap anak akan difokuskan pada tiga bagian utama, yaitu anak yang hidup di bawah garis kemiskinan, anak bekerja, serta kekerasan terhadap anak.

10.1. Anak yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan

Kemiskinan menggambarkan ketidakmampuan keluarga untuk memenuhi standar hidup tertentu. Salah satu ukuran kemiskinan yang banyak digunakan adalah kemiskinan absolut yang membandingkan antara pendapatan atau pengeluaran rumah tangga dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan didefinisikan sebagai sebuah batas yang didasarkan pada pengeluaran

atau pendapatan minimum untuk memperoleh makanan dan pengeluaran bukan makanan dengan tujuan untuk dapat hidup secara layak (Adji, Hidayat, Tuhiman, Kurniawati, & Maulana, 2020).

Kemiskinan adalah faktor pertama dan utama yang menjadi penyebab tingginya angka anak yang terlantar. Keberadaan anak terlantar menjadi salah satu fenomena sosial yang terjadi dan menjadi indikator rendahnya penyedaiaan perlindungan khusus anak di Indonesia (Setiyoko, Basri, Sa'adiyyah, Mahmud, & Asmawi, 2022). Anak terlantar didefinisikan sebagai anak yang karena suatu sebab, orang tuanya lalai dan/atau tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak menjadi tidak terpenuhi, baik dalam aspek jasmani, sosial, hingga rohani (Permana & Wijayanti, 2022). Selain itu, hadirnya anak terlantar dapat terjadi karena adanya beberapa faktor berikut, yaitu: (1) Kemiskinan; (2) Menjadi korban kekerasan orang tua; serta (3) Adanya ajakan dari teman atau orang yang dijenal (Mugiantri, Winarni, & Pangestuti, 2018).

10.1.1. Persentase Anak yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Menurut Provinsi

Data menunjukkan bahwa pada September 2021, garis kemiskinan Indonesia sebesar Rp. 486.168 per kapita per bulan (BPS, 2021). Hasil analisis persentase anak yang hidup di bawah garis kemiskinan menurut provinsi pada tahun 2021 disajikan pada Gambar 10.1. Terdapat empat provinsi di wilayah Indonesia Timur dengan persentase anak yang hidup di bawah garis kemiskinan tertinggi di Indonesia dengan persentase lebih dari 20 persen, yaitu Papua (33,67 persen), Papua Barat (27,92 persen), Nusa Tenggara Timur (25,18 persen), dan Maluku (22,60 persen). Anak-anak sebagai kelompok umur yang paling rentan mengalami kemiskinan. Apabila anak telah berada pada kondisi kemiskinan, dapat memicu terjadinya kerusakan jangka panjang dalam hal tumbuh kembangnya, baik dalam hal fisik maupun psikis. Kondisi tersebut akan terus berulang pada generasi setelahnya, yang menyebabkan keluarga terjebak dalam mata rantai kemiskinan (Kertayana, 2017). Dengan demikian, diperlukan perhatian khusus baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat untuk bersama-sama mengatasi permasalahan kemiskinan masyarakat di wilayahnya. Sehingga persentase anak yang hidup di bawah garis kemiskinan dapat diminimalisasi sebaik mungkin.

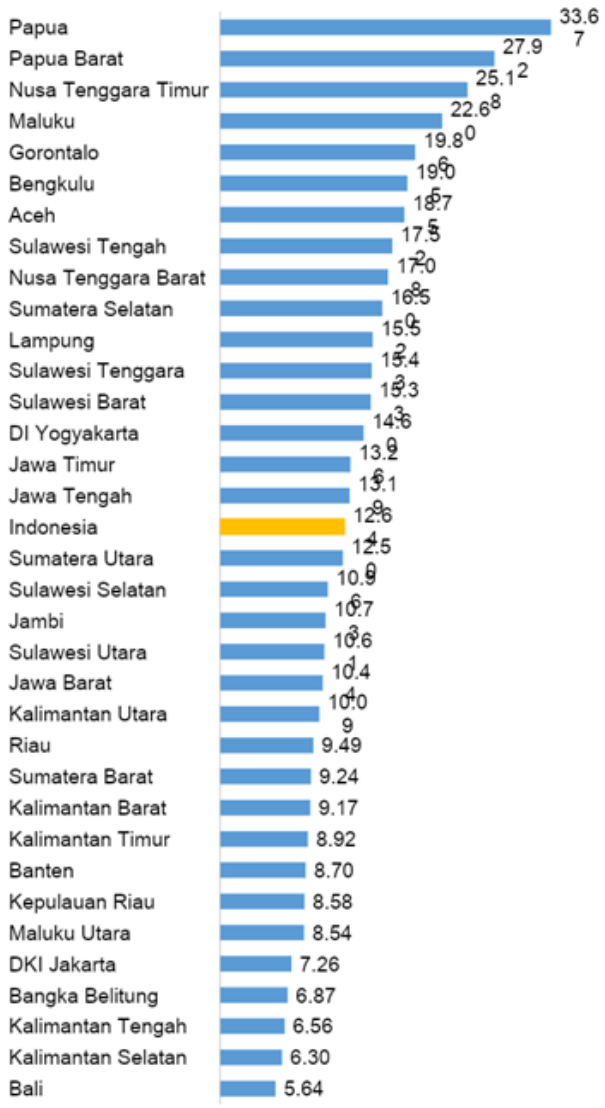

Gambar 10.1 Persentase Anak yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Menurut Provinsi Tahun 2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2021

10.2. Anak yang Bekerja

Sejatinya, anak tidak diperkenankan untuk dipekerjakan, baik dalam sektor formal maupun informal. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 yang menyebutkan pada Pasal 68, bahwa:

> *"Pengusaha dilarang memperkerjakan anak."*

Pasal tersebut menjelaskan bahwa bagaimanapun kondisinya, anak tidak diperbolehkan untuk bekerja dan/atau dipekerjakan.

Anak yang terpaksa bekerja, khususnya akibat desakan ekonomi akan mengalami gangguan terhadap pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, serta mental spiritualnya (Endrawati, 2011). Namun, pada Pasal 69 disebutkan bahwa, kondisi sebagaimana tercantum pada Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur 13 sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak.

10.2.1. Tren Anak yang Bekerja

Tren anak yang bekerja di Indonesia mengalami fluktuasi seperti terlihat pada periode tahun 2017 sampai dengan 2021. Sejak tahun 2017 hingga 2019, persentase anak bekerja mengalami penurunan. Setelah itu, pada tahun 2020 terjadi peningkatan dan kembali menurun pada tahun 2021.

Untuk menurunkan tren anak yang bekerja di Indonesia, pemerintah terus berupaya dalam menurunkan jumlah anak yang bekerja. Salah satu upaya adalah bekerja sama dengan *International Labour Organization* (ILO), sebuah organisasi perburuhan internasional di bawah PBB. Kerja sama tersebut ialah program *International Program Eliminate of Child Labour* (IPEC) atau penghapusan pekerja anak.

10.2.1.1. Persentase Anak Umur 10-17 Tahun yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin

Hasil analisis persentase anak umur 10-17 tahun yang termasuk angkatan kerja menurut provinsi, tipe daerah, dan jenis kelamin pada tahun 2021 disajikan pada Lampiran 10.2. Berdasarkan tipe daerah, persentase anak umur 10-17 tahun yang masuk angkatan kerja di perdesaan lebih tinggi (11,26 persen) dibandingkan di perkotaan (6,99 persen). Sementara itu, provinsi dengan persentase tertinggi anak masuk angkatan kerja di perkotaan dan di perdesaan, berturut-turut berada di Provinsi Sulawesi Barat (14,80 persen) dan di Provinsi Sumatera Utara (20,33 persen).

Jika ditinjau dari jenis kelamin pada lingkup nasional, baik di perkotaan maupun di perdesaan, anak laki-laki memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan anak perempuan.

Persentase tertinggi anak laki-laki yang termasuk angkatan kerja untuk daerah perkotaan dan perdesaan, berturut-turut yaitu Provinsi Sulawesi Barat (16,67 persen) dan Sulawesi Tenggara (25,35 persen). Sedangkan persentase anak perempuan tertinggi untuk daerah perkotaan dan perdesaan, berturut-turut yaitu Provinsi Kalimantan Utara (14,50 persen) dan Provinsi Bali (23,53 persen). Hal tersebut dapat dianalisis dalam beberapa aspek, yaitu:

1. **Kaitan dengan persentase penduduk miskin dan anak yang hidup di bawah garis kemiskinan.**

   Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik, 2022), Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara memiliki persentase penduduk miskin pada tahun 2021 masing-masing sebesar 11,85 persen dan 11,74 persen. Persentase keduanya lebih tinggi dibandingkan persentase Indonesia (9,71 persen). Sementara itu, Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Bali memiliki persentase penduduk miskin masing-masing sebesar 6,83 persen dan 4,72 persen.
   Ditinjau berdasarkan anak yang hidup di bawah garis kemiskinan (Lampiran 10.1), sebanyak 14,65 persen anak di perkotaan Provinsi Sulawesi Barat, dan 8,15 persen anak di perkotaan Provinsi Kalimantan Utara hidup di bawah garis kemiskinan. Adapun persentase secara nasional adalah sebesar 10,00 persen.
   Di sisi lain, terdapat 17,88 persen anak di perdesaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang hidup di bawah garis kemiskinan (lebih besar 1,93 persen dari persentase Indonesia). Sedangkan di perdesaan Provinsi Bali besarnya kurang dari 10 persen, tepatnya sebesar 7,27 persen.

2. **Kaitan dengan pendidikan.**

   Berdasarkan Statistik Pendidikan Tahun 2021 (Badan Pusat Statistik, 2021), diperoleh informasi Angka Tidak Bersekolah:
   - Provinsi Sulawesi Barat: memiliki Angka Tidak Bersekolah sebesar 23,33 pada jenjang 16-18 tahun untuk penduduk di perkotaan. Adapun nilai tersebut sebagai angka tertinggi berdasarkan provinsi.
   - Provinsi Kalimantan Utara: memiliki Angka Tidak Bersekolah sebesar 14,13 persen pada jenjang 16-18 tahun untuk penduduk di perkotaan.

- Provinsi Sulawesi Tenggara: memiliki Angka Tidak Bersekolah sebesar 24,60 persen pada jenjang 16-18 tahun untuk penduduk di perdesaan.
- Provinsi Bali: memiliki Angka Tidak Bersekolah kurang dari 20 persen untuk daerah perdesaan, yaitu sebesar 16,23 persen.

Sementara itu, apabila dikaitkan dengan persentase Angka Melek Huruf (Gambar 8.3), Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Utara memiliki persentase Angka Melek Huruf masing-masing sebesar (83,77 persen), (88,24 persen), dan (86,39 persen). Ketiganya memiliki persentase yang lebih rendah dibandingkan persentase Indonesia (90,35 persen). Sedangkan Provinsi Bali memiliki persentase Angka Melek Huruf sebesar 91,48 persen.

Berdasarkan uraian di atas, tingginya persentase anak bekerja di Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Utara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi perekonomian keluarga, yaitu adanya tekanan ekonomi yang memicu keputusan anak tidak bersekolah dan lebih memilih untuk bekerja. Sementara itu, terntunya masih terdapat faktor lain yang membuat tingginya persentase anak perempuan di perdesaan Provinsi Bali yang bekerja, salah satunya adalah berkaitan dengan tugas dalam membantu orang tua.

10.2.1.2. Tren Persentase Anak yang Bekerja

Selama periode 2017 sampai dengan 2021, terjadi fluktuasi dalam banyaknya anak yang bekerja. Tren presentase anak yang bekerja pada tahun 2017 hingga 2021 disajikan pada Gambar 10.2. Sejak tahun 2017 hingga 2019, persentase anak bekerja menurun dari 7,23 persen menjadi 6,35 persen. Setelah itu, pada tahun 2020 terjadi peningkatan persentase hingga mencapai 9,34 persen. Tren ini kembali mengalami penurunan hingga mencapai 7,90 persen pada tahun 2021. Peningkatan jumlah pekerja anak pada tahun 2020 tidak terlepas dari kondisi pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 yang berdampak pada kondisi ekonomi rumah tangga. Akibat kondisi pandemi COVID-19, banyak keluarga mengalami mengalami penurunan pendapatan dan kemiskinan (Riany & Morawska, 2021). Hal inilah yang diprediksi menjadi pemicu anak bekerja untuk membantu perekonomian keluarga (Hasyim, Puspitasari, & Veriyanto, 2022).

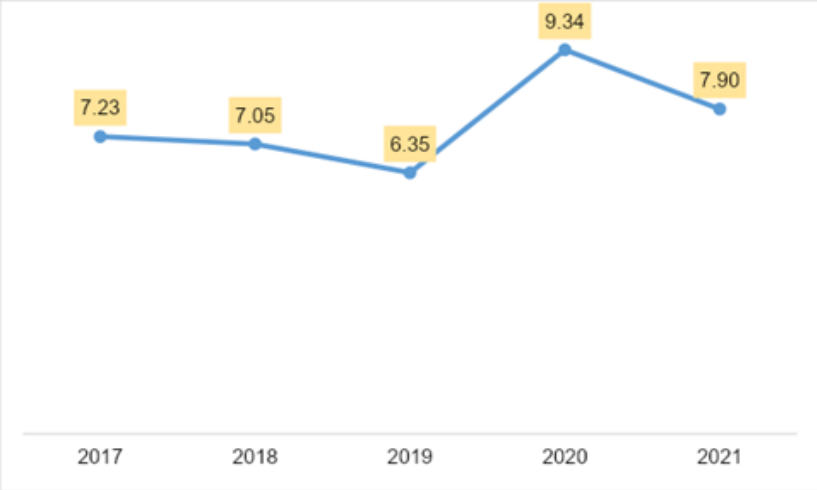

Gambar 10.2 Tren persentase anak yang bekerja Tahun 2017-2021
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional 2017-2021, BPS

Namun, ILO juga mengarahkan agar adanya sudut pandang yang lebih objektif dan bijak, bahwa tidak semua pekerjaan yang dilakukan oleh anak harus diklasifikasikan sebagai pekerjaan anak yang harus ditargetkan untuk dihapuskan. Partisipasi anak dalam aktivitas pekerjaan yang tidak mempengaruhi kesehatan dan perkembangan pribadi atau mengganggu sekolah, misalnya seperti membantu orang tua, membantu bisnis keluarga atau mendapatkan uang saku di selama liburan, maka aktivitas tersebut dalam dikategorikan sebagai kegiatan bermanfaat dan sarana belajar bagi anak. Anak akan memiliki keterampilan dan pengalaman berkaitan dengan dunia kerja, serta terbiasa untuk melakukan hal produktif (ILO, 2022).

10.2.1.3. Persentase Anak Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin

Hasil analisis persentase anak umur 10-17 tahun yang bekerja menurut tipe daerah dan jenis kelamin pada tahun 2021 disajikan pada Gambar 10.3. Jika Ditinjau dari tipe daerah, persentase anak di perdesaan umur 10-17 tahun yang bekerja lebih tinggi (10,41 persen) dibandingkan dengan anak di perkotaan (5,88 persen). Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, persentase anak perempuan di perkotaan yang bekerja lebih tinggi (5,96 persen) dibandingkan anak laki-laki di perkotaan (5,81 persen).

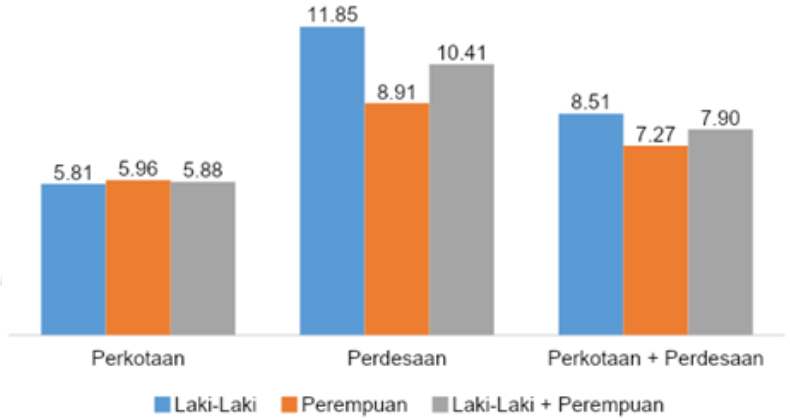

Gambar 10.3 Tren persentase anak yang bekerja Tahun 2017-2021
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional 2017-2021, BPS

Sementara itu, persentase anak laki-laki di perdesaan lebih tinggi (11,85 persen) dibandingkan anak perempuan (8,91 persen). Perbedaan persentase anak laki-laki yang bekerja di wilayah perdesaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan tersebut tidak dapat dipisahkan dari beberapa faktor yang mempengaruhi anak untuk bekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setidaknya terdapat tiga faktor utama penyebab anak bekerja (Lubis & Saleh, 2020), yaitu: (1) Faktor ekonomi; (2) Faktor pendidikan: serta (3) Faktor kebiasaan, karena telah dilakukan secara turun-temurun dalam lingkungan keluarga.

10.2.1.4. Persentase Anak Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi

Dalam lingkup nasional, sebanyak 7,90 persen anak umur 10-17 tahun yang bekerja di Indonesia pada tahun 2021. Sementara hasil analisis persentase anak umur 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi pada tahun 2021 disajikan pada Gambar 10.4. Data menunjukkan bahwa terdapat lima provinsi dengan persentase tertinggi anak yang bekerja, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur (17,41 persen), Sulawesi Tenggara (17,23 persen), Nusa Tenggara Barat (15,47 persen), Sulawesi Barat (14,68 persen), dan Papua (14,41 persen). Terdapat pola yang sama antara kondisi anak yang berada di bawah garis kemiskinan dengan persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja, di mana persentase tertinggi berada pada Indonesia wilayah Timur, khususnya Nusa Tenggara dan Papua.

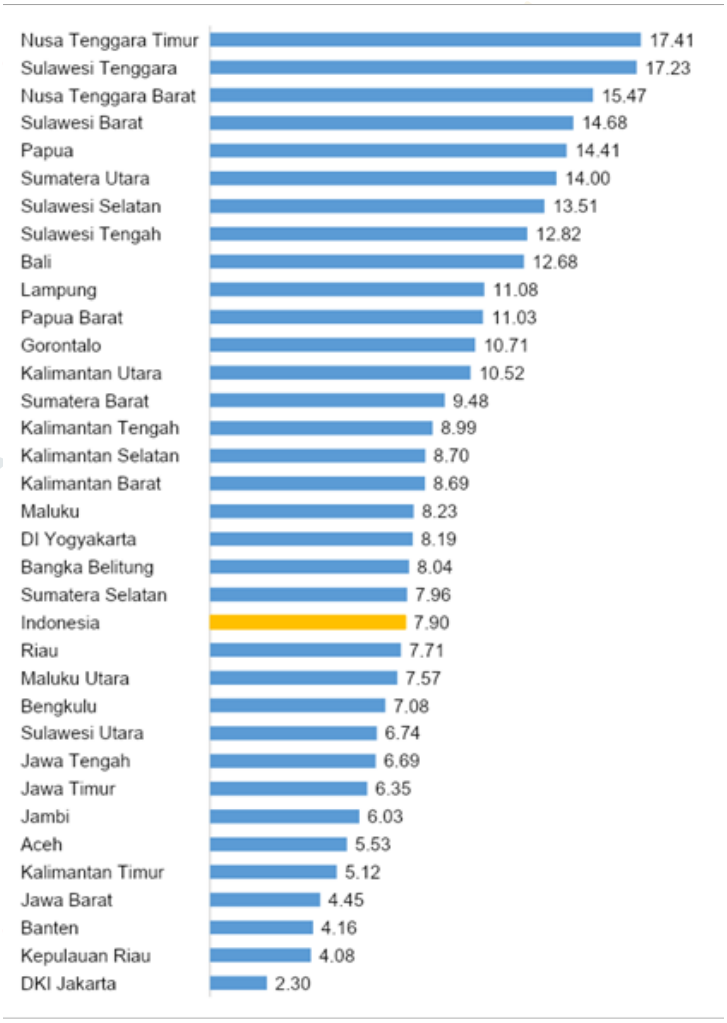

Gambar 10.4 Persentase Anak Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi Tahun 2021
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional 2017-2021, BPS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya jumlah anak bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah karena anak tersebut berada pada rumah tangga berstatus miskin, tingkat pendidikan kepala keluarga SMP ke bawah, kepala keluarga perempuan, kepala keluarga tidak bekerja/ bekerja di sektor informal, tidak terdapat sekolah di lingkungan tempat tinggalnya, serta tinggal di daerah perdesaan dengan kondisi anak laki-laki yang bekerja lebih banyak dibandingkan anak perempuan (Ardana, Arjana, & Ramang, 2016). Hasil tersebut juga didukung dengan temuan lain yang mengidentifikasi bahwa persepsi anak sebagai pekerja adalah karena mereka merasa dapat memenuhi kebutuhannya dan bisa membantu ekonomi keluarga, meski di sisi lain anak merasa telah mengabaikan tugas utamanya untuk belajar dan/atau sekolah (Kamangi, Therik, & Suwartiningsih, 2022). Untuk menanggulangi

permasalahan ini tentunya memerlukan kehadiran negara, terutama di level pemerintah daerah sehingga hak anak untuk mendapat perlindungan khusus dari berbagai bentuk eksploitasi termasuk pekerja anak dapat dihapuskan.

10.2.2. Lapangan Pekerjaan Utama

Lapangan pekerjaan utama didefinisikan sebagai bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha tempat seseorang bekerja. Dalam pembahasan ini, bidang pekerjaan yang menjadi fokus kajian adalah pertanian, manufaktur dan jasa.

10.2.2.1. Persentase Anak Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin, Tipe Daerah dan Lapangan Pekerjaan Utama

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2021, diperoleh hasil bahwa terdapat tiga lapangan pekerjaan utama, yaitu pertanian, manufaktur dan jasa. Di perkotaan, secara keseluruhan anak usia 10-17 tahun yang bekerja, memiliki persentase tertinggi pada lapangan pekerjaan jenis jasa (71,19 persen). Sementara anak-anak di perdesaan menunjukkan hasil berbeda, yaitu bekerja pada lapangan pekerjaan jenis pertanian (50,97 persen). Hal yang sama ditunjukkan dengan anak laki-laki di perdesaan yang memiliki presentasi tertinggi pada sektor pertanian (61,41 persen), di mana perdesaan erat kaitannya dengan sektor pertanian (Nandi, 2006). Penelitian (Nugraha & Supriatna, 2020) menemukan bahwa, salah satu faktor penting dalam mendorong anak laki-laki perdesaan bekerja di sektor pertanian adalah adanya interaksi yang kuat dengan teman sepermainan di bidang pertanian.

Di sisi lain, anak perempuan di perdesaan memiliki pola yang sama dengan anak perempuan di perkotaan, yaitu paling banyak bekerja di sektor jasa (52,08 persen). Anggapan bahwa laki-laki cenderung memiliki tenaga yang lebih besar daripada perempuan, membuat orang tua di perdesaan juga cenderung melibatkan anak laki-lakinya dalam membantu pekerjaan di ladang dan/atau untuk menggembalakan dan mencari pakan ternak. Lain halnya dengan kondisi wilayah di daerah perkotaan, yang menjadikan sektor jasa menjadi pekerjaan yang lebih dominan, di mana pekerja anak cenderung bekerja pada bidang perdagangan, hotel dan

rumah makan (Gunawan, 2019). Hasil analisis persentase anak umur 10-17 tahun yang bekerja menurut jenis kelamin, tipe daerah dan lapangan pekerjaan utama dipresentasikan pada Tabel 10.1.

Jenis Kelamin	Perkotaan			Perdesaan		
	Pertanian	Manufaktur	Jasa	Pertanian	Manufaktur	Jasa
Laki-Laki	20.38	17.45	62.17	61.41	12.92	25.67
Perempuan	5.28	14.46	80.26	36.55	11.38	52.08
Laki-Laki + Perempuan	12.85	15.96	71.19	50.97	12.27	36.76

Tabel 10.1 Persentase Penduduk Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin, Tipe Daerah dan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2021
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional 2017-2021, BPS

10.2.3. Sektor Pekerjaan Utama

Dalam membahas mengenai sektor pekerjaan utama, terdapat dua istilah yang sering digunakan, yaitu sektor formal dan informal. Pekerjaan sektor formal dapat didefinisikan sebagai pekerjaan yang sesuai dengan peraturan yang sah. Maksudnya adalah pekerja formal akan memeperoleh perlindungan hukum kontrak kerja resmi, serta berada dalam organisasi berbadan hukum, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Sehingga pekerja formal ialah seorang tenaga kerja terlatih. Sementara itu, *International Labour Organization* (ILO) mendeskripsikan pekerja informal sebagai tenaga kerja yang rentan, karena tidak mendapatkan hak layak sebagaimana pekerja formal. Beberapa contoh dari pekerjaan informal adalah petani, pedagang, tukang bangunan, tukang jahit, dan sebagainya.

10.2.3.1. Persentase Penduduk Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin, Tipe Daerah dan Sektor Pekerjaan Utama

Hasil analisis persentase penduduk umur 10-17 tahun yang bekerja menurut jenis kelamin, tipe daerah dan sektor pekerjaan utama disajikan pada Tabel 10.2. Berdasarkan jenis kelamin, baik anak laki-laki maupun perempuan, mayoritas bekerja pada pekerjaan informal dengan persentase masing-masing sebesar (87,18 persen) dan (89,47 persen). Pola yang sama juga ditunjukkan untuk tinjauan dalam konteks tipe daerah, yaitu baik anak-anak

perkotaan maupun perdesaan, mayoritas bekerja pada pekerjaan informal dengan persentase masing-masing sebesar (82,83 persen) dan (91,99 persen).

Sektor Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin			Tipe Daerah		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Sektor Formal	12,82	10,53	11,78	17,17	8,01	11,78
Sektor Informal	87,18	89,47	88,22	82,83	91,99	88,22

Tabel 10.1 Persentase Penduduk Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin, Tipe Daerah dan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2021
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional 2017-2021, BPS

Tenaga kerja formal didefinisikan sebagai penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/karyawan/ pegawai (Sistem Informasi Rujukan Statistik BPS, 2022). Pada sektor formal, pekerja memiliki jabatan dengan struktur organisasi yang jelas, dan memiliki sistem pemberian upah yang jelas, misalnya pekerja di perusahaan, lembaga pemerintah atau non pemerintah, dan pabrik. Sehingga, dalam pelaksanaannya, pekerjaan formal memiliki kualifikasi khusus, seperti batas usia, pendidikan, dan keterampilan tertentu yang harus dimiliki oleh tenaga kerja (Dewi, Listyowati, & Napitupulu, 2020). Hal tersebut mengakibatkan penduduk anak sulit untuk bekerja pada sektor formal, sehingga pekerja anak lebih banyak bekerja pada sektor informal. Hal ini juga sejalan dengan kondisi penduduk Indonesia, bahwa sebesar 59,97 persen warga Indonesia, bekerja pada sektor informal (Badan Pusat Statistik, 2022).

Selain itu, tingginya tekanan ekonomi menyebabkan anak-anak yang hidup di wilayah perkotaan pada akhirnya harus bekerja sebagai pengamen, kernet angkot, jasa payung saat hujan, serta beberapa pekerjaan lainnya yang tidak memerlukan keahlian secara khusus (Perdana, 2018). Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak yang terlibat, baik keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Upaya perlindungan khusus anak dari berbagai eksploitasi pekerjaan harus dilaksanakan dengan menjamin perlindungan sosial bagi anak-anak tersebut.

10.2.3.2. Persentase Penduduk Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi dan Sektor Pekerjaan Utama

Hasil analisis persentase penduduk umur 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi dan sektor pekerjaan utama pada tahun 2021 dipresentasikan pada Gambar 10.5. Secara nasional, 88,22 persen anak usia 10-17 tahun pada tahun 2021 bekerja pada sektor informal, sementara sisanya (11,78 persen) pada sektor formal. Data menunjukkan bahwa Provinsi Papua menjadi provinsi dengan persentase tertinggi anak yang bekerja pada sektor informal (99,02 persen).

Sementara itu, Provinsi Bangka Belitung menjadi provinsi dengan persentase tertinggi anak yang bekerja di sektor formal (26,89 persen). Hasil tersebut mendukung temuan sebelumnya, bahwa pekerjaan utama masyarakat Papua, termasuk penduduk anak, adalah dalam sektor pertanian yang merupakan sektor informal. Serta Provinsi Bangka Belitung yang merupakan satu dari lima provinsi di Pulau Sumatera yang mengutamakan usaha sektor manufaktur.

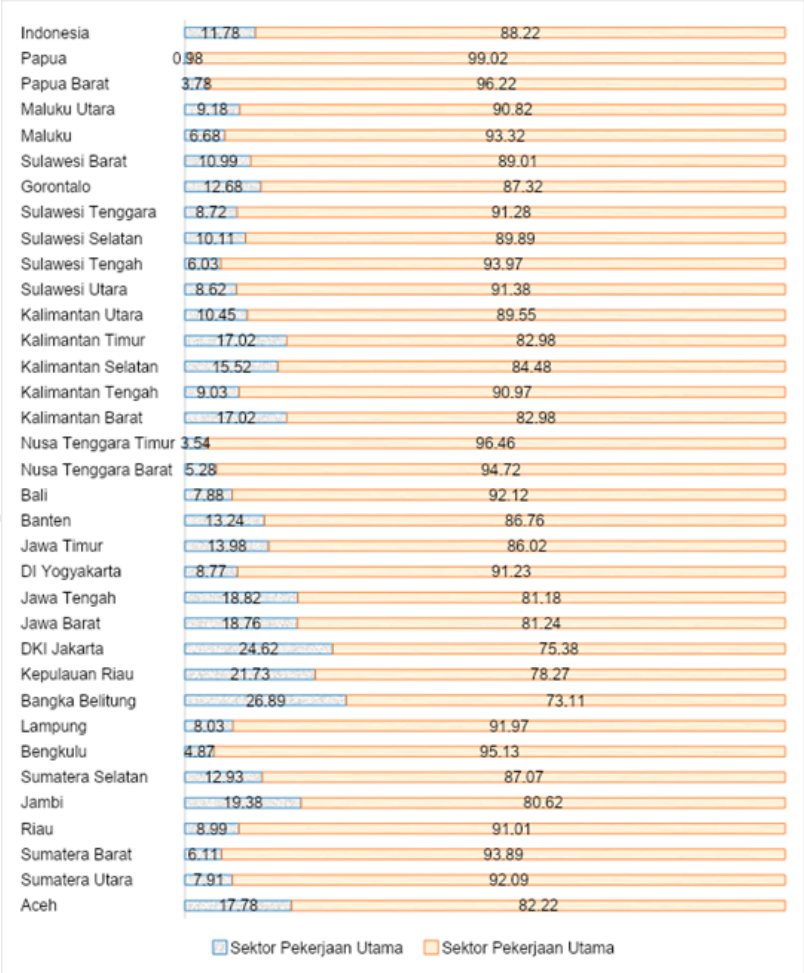

Gambar 10.5
Persentase Penduduk Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi dan Sektor Pekerjaan Utama Tahun 2021
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional 2017-2021, BPS

10.2.4. Jam Kerja

Jam kerja menggambarkan lamanya durasi waktu yang digunakan oleh anak usia 10-17 tahun untuk bekerja dari seluruh pekerjaan, tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan selama seminggu. Lamanya waktu yang dicurahkan anak untuk bekerja berkaitan dengan tingkat upah yang akan diperoleh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat upah memiliki pengaruh yang kuat terhadap meningkatnya curahan jam kerja (Fahlevi & Muhammad, 2017). Meningkatnnya tingkat upah akan mendorong anak untuk bekerja lebih lama, agar mendapatkan upah yang lebih besar.

Padahal dalam Pasal 69 dan 71 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan dipersyaratkan untuk memberlakukan waktu kerja selama maksimum tiga jam dalam satu hari.

10.2.4.1. Persentase Penduduk Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Jam Kerja pada Pekerjaan Utama

Hasil analisis persentase penduduk umur 10-17 tahun yang bekerja menurut jenis kelamin dan jam kerja pada pekerjaan utama pada tahun 2021 dipresentasikan pada Tabel 10.3. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2021, ditinjau dari jenis kelamin, baik anak laki-laki maupun perempuan, paling banyak melakukan pekerjaan selama 14 jam dalam sepekan, atau rata-rata dua jam per hari, dengan persentase berturut-turut sebesar 47,80 persen (anak laki-laki) dan 51,12 persen (anak perempuan).

Jenis Kelamin	Kelompok Jam Kerja			
	0 jam	14 jam	15-40 jam	> 40 jam
Laki-Laki	0.79	47.80	36.88	14.53
Perempuan	0.39	51.12	36.10	12.38
Laki-Laki + Perempuan	0.61	49.30	36.53	13.56
Sektor Informal	87,18	89,47	88,22	82,83

Tabel 10.3 Persentase penduduk umur 10-17 tahun yang bekerja menurut jenis kelamin dan jam kerja pada pekerjaan utama tahun 2021
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional 2017-2021, BPS

Namun, apabila melihat persentase jumlah anak menurut jam kerja pada pekerjaan utama dari tertinggi hingga terendah, maka secara berturut-turut anak bekerja selama 14 jam (49,30 persen); 15-40 jam (36,53 persen); lebih dari 40 jam (13,56 persen); dan 0 jam (0,61 persen). Adanya jumlah anak yang bekerja selama 15-40 jam per minggu (lebih dari dua jam sampai dengan mencapai enam jam per hari), serta lebih dari enam jam per hari (> 40 jam per minggu), mengindikasikan bahwa terdapat anak-anak di Indonesia yang bekerja dengan durasi waktu melebihi batas maksimum yang diperkenankan. Durasi jam kerja merupakan salah satu hal yang dapat membahayakan bagi perkembangan fisik, mental, dan moral pekerja anak, meski pekerjaan tersebut aman (Putri, Malihah, & Nurbayani, 2014).

10.2.4.2. Persentase Penduduk Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Tipe Daerah dan Jam Kerja pada Pekerjaan Utama

Berdasarkan tipe daerah, baik secara keseluruhan, maupun di perkotaan dan perdesaan, anak usia 10-17 tahun paling banyak bekerja dengan durasi 14 jam dalam satu pekan. Data menunjukkan bahwa persentase anak yang bekerja di perdesaan lebih tinggi (50,14 persen) dibandingkan anak yang bekerja di perkotaan (48,10 persen).

Tingginya presentase anak yang bekerja di perdesaan diprediksi disebabkan oleh banyaknya anak di wilayah desa yang bekerja pada sektor pertanian sebagai sektor informal. Sektor pekerjaan pertanian adalah sektor pekerjaan yang tidak memiliki aturan yang jelas dan mengikat. Hasil penelitian menemukan bahwa anak laki-laki yang bekerja dan tinggal di perkotaan, memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk tereksploitasi dalam hal jam kerja dibandingkan kategori lainnya (Wahyuni & Sari, 2022). Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi keluarga dengan kepala keluarga cenderung berusia tua dan pendidikan kepala keluarga rata-rata SMP/sederajat. Hasil analisis persentase penduduk umur 10-17 tahun yang bekerja menurut tipe daerah dan jam kerja pada pekerjaan utama pada tahun 2021 disajikan pada Tabel 10.4.

Jenis Kelamin	Kelompok Jam Kerja			
	0 jam	14 jam	15-40 jam	> 40 jam
Perkotaan	0,67	48,10	33,87	17,36
Perdesaan	0,57	50,14	38,39	10,89
Perkotaan + Perdesaan	0,61	49,30	36,53	13,56
Sektor Informal	87,18	89,47	88,22	82,83

Tabel 10.4 Persentase penduduk umur 10-17 tahun yang bekerja menurut tipe daerah dan jam kerja pada pekerjaan utama tahun 2021
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional 2017-2021, BPS

10.2.5. Status Pekerjaan Utama

10.2.5.1. Persentase Penduduk Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Tipe Daerah dan Status Pekerjaan Utama

Hasil analisis persentase penduduk umur 10-17 tahun yang bekerja menurut tipe daerah dan status pekerjaan utama pada tahun 2021 disajikan pada Lampiran 10.15. Secara keseluruhan, persentase tertinggi untuk status pekerjaan utama pada tahun 2021 ditunjukkan oleh jenis pekerja keluarga/tidak dibayar (77,63 persen). Hal tersebut mengindikasikan bahwa anak-anak menjalankan tugas untuk membantu pekerjaan orang tua dan/atau pengasuhnya. Berdasarkan tipe daerah, persentase anak di perkotaan yang bekerja, lebih tinggi dibandingkan anak di perdesaan dengan status pekerjaan antara lain: (1) berusaha sendiri (4,34 persen); (2) berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar (0,21 persen); (3) buruh/karyawan/pegawai (16,96 persen); serta (4) pekerja bebas di non pertanian (3,28 persen).

Hal ini mengindikasikan bahwa anak-anak di perkotaan sudah terlibat pada jenis pekerjaan yang membantu orang tua atau pengasuhnya dalam melaksanakan roda perekonomian keluarga. Ketika hal ini dlakukan pada porsi yang tepat dapat menstimulasi perkembangan kemandirian pada anak. Sebaliknya jika anak terlibat dalam pekerjaan termasuk sektor informal yang menyita waktu dan kesempatannya untuk menempuh pendidikan, kegiatan tersebut telah merampas hak perlindungan khusus anak dan mengarah pada eksploitasi. Oleh karena itu penting dilakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua untuk dapat memahami secara komprehensif batasan untuk melibatkan anak dalam berbagai pekerjaan dalam perekonomian rumah tangga.

10.2.5.2. Persentase Penduduk Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Status Pekerjaan Utama

Hasil analisis persentase penduduk umur 10-17 tahun yang bekerja menurut jenis kelamin dan status pekerjaan utama tahun 2021 disajikan pada Lampiran 10.14. Berdasarkan jenis kelamin, persentase anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan anak perempuan yang bekerja dengan status pekerjaan berupa (1) Berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar (1,05 persen); (2) Buruh/karyawan/ pegawai (12,72 persen): (3) Pekerja bebas di pertanian (3,68 persen); serta (4) Pekerja bebas di non pertanian (4,65 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa anak laki-laki lebih banyak terlibat dalam pekerjaan, terutama pada pekerjaan informal.

10.2.5.3. Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Penduduk Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin

Hasil analisis rata-rata upah/gaji/pendapatan penduduk umur 10-17 tahun yang bekerja menurut tipe daerah dan jenis kelamin pada tahun 2021 disajikan pada Gambar 10.6. Secara keseluruhan, besarnya rata-rata pendapatan anak umur 10-17 tahun yang bekerja adalah sebesar Rp. 1.117.532. Apabila dibandingkan, anak laki-laki memiliki pendapatan lebih tinggi daripada anak perempuan. Terdapat selisih sebesar Rp. 220.957 antara pendapatan per bulan anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa penghargaan terhadap pekerjaan anak perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan penghargaan pada anak laki-laki. Dapat diprediksi bahwa perbedaan ini disebabkan oleh sektor pekerjaan yang diampu oleh anak laki-laki yang dapat menghasilkan upah lebih tinggi dibandingkan sektor pekerjaan yang diampu oleh anak perempuan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa anak laki-laki lebih banyak bekerja pada lapangan pekerjaan utama jenis pertanian dan manufaktur serta lebih banyak bekerja di sektor formal. Sementara anak perempuan lebih banyak bekerja pada bidang jasa dan sektor informal.

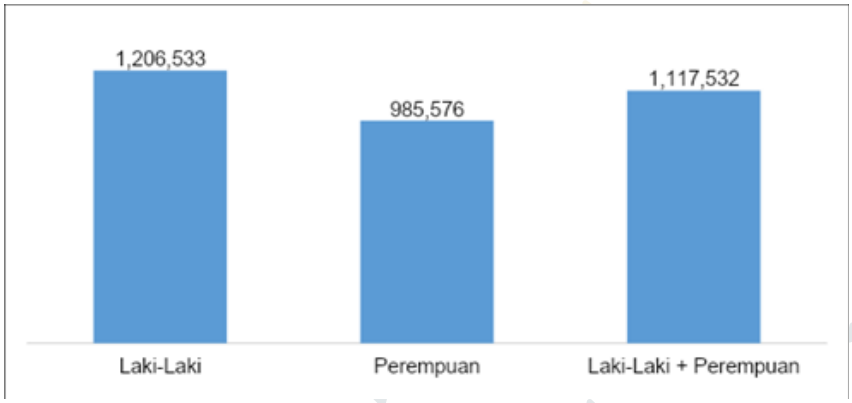

Gambar 10.6 Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Penduduk Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, BPS 2021

10.3. Kekerasan terhadap Anak (KtA)

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang dilakukan kepada anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, serta ancaman yang digunakan untuk melakukan suatu perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014). Kekerasan terhadap anak sangat berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak karena hal ini dapat mempengaruhi perkembangan fisik serta psikis anak. Kekerasan pada anak dapat memunculkan sikap tidak percaya diri, kesulitan dalam berteman, perilaku merusak, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat serta konsumsi alkohol, bahkan dapat menimbulkan kecenderungan bunuh diri (Suteja & Ulum, 2019).

Sejak tahun 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, telah mengembangkan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak melalui SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), yang dapat di akses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat nasional, provinsi, dan kab/kota secara up to date, riil time dan akurat, untuk menuju SATU DATA KEKERASAN NASIONAL. Sistem ini dibangun sebagai media pendataan, monitoring dan evaluasi kasus kekerasan perempuan dan anak di Indonesia, dan telah dijadikan rujukan bagi mekanisme penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam melakukan inovasi, serta dijadikan acuan untuk

mengembangkan beberapa aplikasi manajemen penanganan kasus kekerasan. Namun masih dibutuhkan komitmen dan rasa memiliki dalam penyempurnaan SIMFONI PPA.

Kekerasan terhadap anak dalam analisis ini adalah kekerasan yang terjadi pada penduduk berusia 0-17 tahun yang dilaporkan dan dicatatkan dalam SIMFONI PPA. Beberapa indikator yang bisa didapatkan melalui SIMFONI PPA adalah karakteristik korban meliputi umur, pendidikan, status perkawinan, dan pekerjaan; karakteristik pelaku dilihat berdasarkan hubungan dengan korban; jenis kekerasan yang dialami (kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang/TPPO, penelantaran, dan kekerasan lainnya); serta jenis layanan yang didapatkan, mulai dari pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan pendampingan tokoh agama. Data yang terinput dalam SIMFONI PPA sangat tergantung pada semua unit layanan penanganan kekerasan terhadap anak yang berkontribusi dalam Simfoni PPA. Jumlah unit layanan yang menginput datanya dalam SIMFONI PPA berfluktuasi sesuai dengan dinamika di daerah pada setiap periodenya, sehingga menjadi salah satu indikator yang harus dipertimbangkan saat melakukan analisis datanya. Konsep dan definisi yang digunakan pada aplikasi SIMFONI PPA dan digunakan dalam analisis lebih lanjut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. **Basis data**

   Basis data yang digunakan dalam analisis ini adalah tanggal penginputan yaitu tanggal pada saat operator menginputkan kasus pada aplikasi Simfoni PPA.

2. **Kasus kekerasan**

   Kasus kekerasan merupakan jumlah Kasus yang dilaporkan terkait kekerasan terhadap anak (0-17 tahun).

3. **Korban kekerasan**

   Korban kekerasan merupakan jumlah anak (0-17 tahun) yang menjadi korban kekerasan. Satu korban bisa mengalami beberapa jenis kekerasan, bisa mendapatkan beberapa layanan. dan bisa mengalami kekerasan dari beberapa pelaku.

4. Pelaku

Pelaku digambarkan melalui hubungan pelaku dan korban antara lain orang tua, keluarga, suami/istri, pacar/teman, guru, majikan, lainnya. Satu pelaku bisa melakukan kekerasan terhadap beberapa korban.

5. Lokasi Kasus

Lokasi kasus merupakan termpat terjadinya kasus kekerasan yang dialami oleh korban. kategori lokasi kasus adalah sebagai berikut:

a. Rumah Tangga: kejadian tindak kekerasan yang dialami korban terjadi di dalam rumah.
b. Tempat Kerja: kejadian tindak kekerasan yang dialami korban terjadi di tempat kerja.
c. Sekolah: kejadian tindak kekerasan yang dialami korban terjadi di area tempat pendidikan.
d. Fasilitas umum: kejadian tindak kekerasan yang dialami korban terjadi di tempat fasilitas umum/public.
e. Lembaga Pendidikan kilat: kejadian tindak kekerasan yang dialami korban terjadi di tempat pendidikan kilat.
f. Lainnya: kejadian tindak kekerasan yang dialami korban terjadi di tempat laiannya.

6. Jenis Kekerasan

Satu korban bisa mengalami beberapa jenis kekerasan. Jenis kekerasan yang dialami korban dikategorikan sebagai berikut:

a. Fisik: Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT Jo. Pasal 89 KUHP, Pasal 80 ayat (1) huruf d, UU PA).
b. Psikis: Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7, UU PKDRT).
c. Seksual: Meliputi, tapi tidak terbatas pada:
   - pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan/atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain, untuk tujuan komersial

dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8, UU PKDRT).

- dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia (KUHP Pasal 285).
- dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (KUHP Pasal 289).
- dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan (Pasal 81 UU PA).
- dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa,melakukantipumuslihat,serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Pasal 82 UU PA).

d. Eksploitasi: Meliputi, tapi tidak terbatas pada:

- tindakan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Pasal 88 UU PA).
- tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidakterbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril (Pasal 1 butir 7 UU PTPPO).
- eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan (Pasal 1 butir 8 UU PTPPO, Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi).

e. Penelantaran: Meliputi, tapi tidak terbatas pada:

- tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (Pasal 1 butir 6, UU PA).
- tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT).
- tindakan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara,

merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya (Pasal 13 ayat (1) huruf c, UU PA).

- tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT).
- tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut (Pasal 9 ayat (2) UU PKDRT).
- Lainnya: jenis kekerasan selain fisik, psikis, seksual, penelantaran dan eksploitasi.

7. Jenis layanan Pemberian layanan pada korban dapat diberikan berulang.

Jenis layanan Pemberian layanan pada korban dapat diberikan berulang. Dalam satu tanggal dapat berisi berbagai layanan dari berbagai instansi. Layanan yang diberikan kepada korban sesuai kebutuhan korban dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender (Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2010).
b. Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative (Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2010).
c. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daeah asal (Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2010).
d. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan (Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2010).
e. Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan

terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat (Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2010).

f. Rehabilitas sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2010).
g. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban (Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2010).

10.3.1 Tren Kasus KtA

10.3.1.1 Tren Jumlah Kasus KtA

Tren jumlah kasus KtA sejak tahun 2019 hingga 2021 disajikan pada Gambar 10.7. Tren kekerasan terhadap anak di Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 2019 hingga tahun 2021. Bahkan, jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia sudah mencapai angka 6.519 kasus hingga pertengahan tahun 2022. Menurut data Simfoni PPA pada tahun 2021, terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak sebesar 14.517 kasus dari tahun sebelumnya yaitu 11.278 kasus.

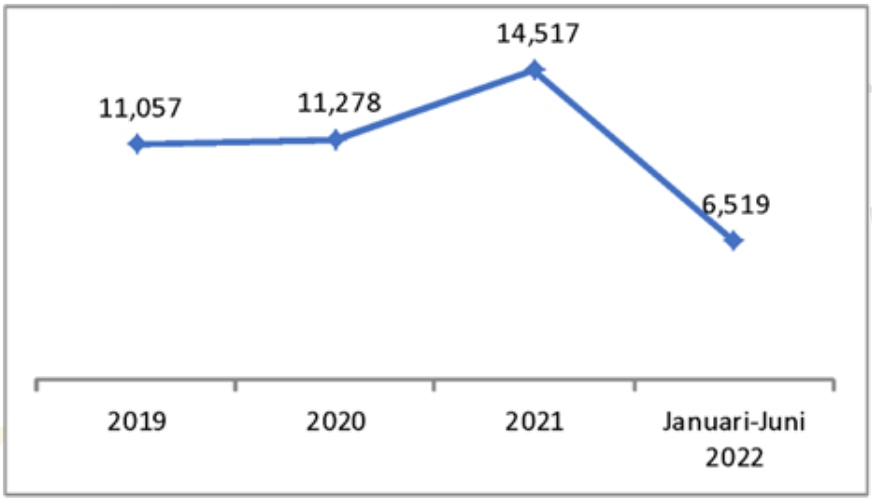

Gambar 10.7 Tren Kasus KtA Tahun 2019-Juni 2022
Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

Adanya peningkatan ini dapat disebabkan karena kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020. World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor risiko yang dapat memperburuk situasi selama pandemi. Selanjutnya, WHO (2020) menjelaskan bahwa faktor-faktor pemicu stres, seperti ketidakpastian ekonomi akibat hilangnya pekerjaan serta kondisi tempat tinggal yang terlalu padat sehingga tidak adanya batasan fisik maupun privasi menjadi alasan meningkatnya jumlah kasus kekerasan. Dengan semakin membaiknya kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia ditambah dengan peran aktif pemerintah pusat, daerah dan masyarakat, diharapkan kasus kekerasan terhadap anak dapat diturunkan pada level yang seminimal mungkin demi menjamin hak perlindungan khusus anak di seluruh wilayah Indonesia.

10.3.1.2 Kasus KtA Menurut Provinsi

Hasil analisis kasus KtA menurut provinsi pada tahun 2021 disajikan pada Gambar 10.8. Data Simfoni PPA pada tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dan dicatatkan tertinggi berada di Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 1.190 kasus. Menurut Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Jawa Timur (2022), kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat sejak tahun 2020. LPAI Jawa Timur menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 mengalami kenaikan lebih dari 100 persen dibandingkan dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di tahun 2020. Pada tahun 2020, LPAI Jawa Timur mencatat sebanyak 163 kasus kekerasan terhadap anak dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 362 kasus (detikJatim, 2022).

Laporan UNICEF pada tahun 2020 menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan terjadinya kekerasan pada anak. Salah satunya adalah kepercayaan atau budaya turun temurun yang menganggap bahwa kekerasan dapat diterima bahkan dianggap normal dalam proses pengasuhan terhadap anak untuk menerapkan perilaku disiplin. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah yang menemukan bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan adanya kekerasan terhadap anak khususnya di dalam keluarga, yaitu pewarisan kekerasan antar generasi, kekerasan terhadap anak di keluarga yang sulit diungkapkan ke publik, serta latar belakang budaya

dimana posisi anak berada di posisi terbawah dalam kedudukan di masyarakat (Praditama, 2015).

Untuk menanggulangi hal ini, berbagai bentuk sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat bahwa segala bentuk kekerasan dalam pengasuhan sehari-hari adalah termasuk dalam bentuk kekerasan anak perlu untuk terus digalakkan. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat untuk ikut andil jika kekerasan terhadap anak terjadi dalam rangka mengimplementasikan perlindungan terhadap anak secara menyeluruh.

Gambar 10.8 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Provinsi Tahun 2021
Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

10.3.1.3 Tren Jumlah Korban KtA

Jumlah korban kekerasan pada anak di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Tren jumlah korban KtA secara nasional pada tahun 2021 disajikan pada Gambar 10.9. Data hasil Simfoni PPPA, Kemen PPPA menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 7.169 jumlah korban kekerasan anak dalam kurun waktu Januari hingga Juni tahun 2022. Jumlah ini menunjukkan hampir 50 persen dari total jumlah korban sepanjang tahun 2021. Hal ini sesuai dengan tren jumlah kasus kekerasan anak yang juga meningkat pada tiap tahunnya. Adanya pandemi COVID-19 yang menjadi pemicu tingginya tingkat stres, meningkatnya jumlah pengangguran dan PHK, serta menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang negatif menjadi salah satu dari penyebab tingginya jumlah korban kekerasan terhadap anak (WHO, 2020).

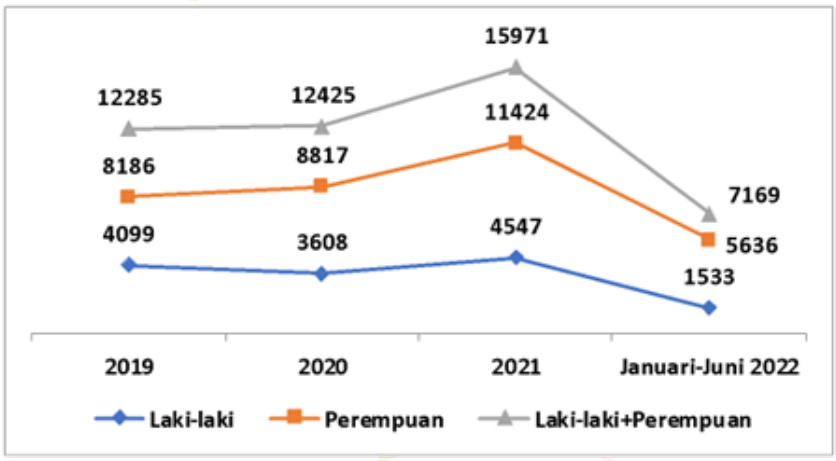

Gambar 10.9 Tren Jumlah Korban KtA Tahun 2021
Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

10.3.2 KtA Berdasarkan Kelompok Umur dan Status Perkawinan Korban

10.3.2.1 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Provinsi dan Kelompok Umur

Lampiran 10.20 menunjukkan kondisi jumlah korban kekerasan terhadap anak berdasarkan provinsi dan kelompok umur. Pada kelompok umur kurang dari enam tahun, korban kekerasan paling banyak dilaporkan dan dicatatkan di Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 171 korban, diikuti dengan Provinsi Jawa Barat sebanyak 160 korban, dan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 156 korban. Sementara jumlah korban dengan kelompok umur enam sampai

12 tahun paling banyak di Provinsi Jawa Timur sebanyak 451 korban, Provinsi Jawa Barat dengan 430 korban, dan Provinsi Jawa Tengah dengan 398 korban. Selanjutnya jumlah korban dengan kelompok usia 13-17 tahun terbanyak ada pada Provinsi Jawa Tengah dengan 730 korban, Provinsi Jawa Timur dengan 721 korban, serta Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah korban sebanyak 635 anak.

Banyaknya korban kekerasan terhadap anak di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah yang tercatat dan terlaporkan salah satunya terjadi karena kedua provinsi di Pulau Jawa tersebut memiliki cukup banyak kabupaten/kota dibandingkan dengan beberapa provinsi lainnya di Indonesia yaitu sebanyak 29 Kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur serta 29 Kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, kedua provinsi ini juga merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar serta memiliki ketersediaan akses layanan pengaduan yang lebih luas (SatuHarapan.com, 2022). Menyikapi hal ini, diperlukan perhatian secara khusus, baik oleh pemerintah pusat utamanya pemerintah daerah untuk mengimplementasikan berbagai terobosan melakukan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan. Menyediakan hotline bagi pelaporan tindak kekerasan anak dapat menjadi salah satu alternatif strategi bagi penyelamatan anak yang menjadi tindak kekerasan. Selain itu, upaya penegakan hukum yang tegas bagi para pelaku tindak kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan efek jera yang cukup signifikan bagi upaya meminimalisasi tindak kekerasan terhadap anak. Dengan demikian, upaya kolaborasi dari berbagai pihak untuk menyediakan perlindungan terhadap anak diharapkan dapat menekan angka kekerasan terhadap anak secara signifikan di seluruh wilayah Indonesia.

10.3.3 Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Status Perkawinan

Data Simfoni PPA, Kemen PPPA juga mengelompokkan korban kekerasan anak berdasarkan status perkawinan ke dalam empat kelompok yaitu NA (tidak diketahui), belum kawin, kawin dan cerai. Korban kekerasan terhadap anak dengan status belum kawin memiliki persentase terbesar, yaitu 89,62 persen (Gambar 10.10), dan kondisi ini juga terjadi di seluruh provinsi di Indonesia.

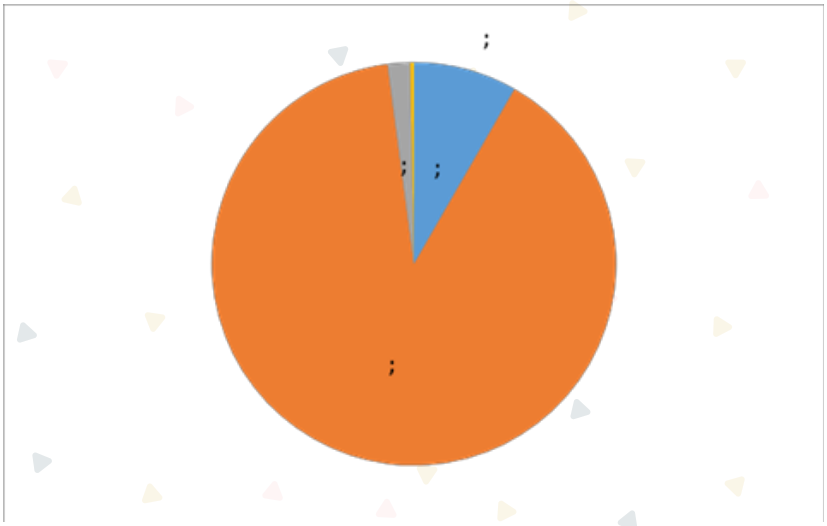

Gambar 10.10 Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Status Perkawinan Tahun 2021
Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

10.3.4 KtA Berdasarkan Jenis Kekerasan dan Layanan yang Diterima

10.3.4.1 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan

Berdasarkan data hasil Simfoni PPA, Kemen PPPA yang ditunjukkan pada Gambar 10.11, jenis kekerasan yang terjadi pada korban dibagi menjadi tujuh kelompok yaitu fisik, psikis, seksual, eksploitasi, TPPO, penelantaran dan lainnya. Jenis kekerasan tertinggi adalah kekerasan seksual dengan jumlah korban sebanyak 8.730 anak. Kekerasan pada anak, terutama kekerasan seksual dapat berdampak panjang bahkan hingga dewasa bagi anak yang mengalaminya. Beberapa dampak trauma kekeraasan seksual terhadap anak adalah hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa, trauma secara seksual, merasa tidak berdaya, serta stigma yang diperoleh (Noviana, 2015; Riany, 2021). Selain itu, anak-anak yang mengalami kekerasan secara seksual juga dapat mengalami gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, gangguan kecemasan, gangguan kepribadian serta identitas disosiatif (Levitan et al., 2003). Data terkait jumlah korban kekerasan ini mengindikasikan masih diperlukan upaya yang keras bagi pemerintah daerah untuk berkolaborasi menyediakan perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, eksploitasi, penelantaran dan bentuk kekerasan terhadap anak lainnya.

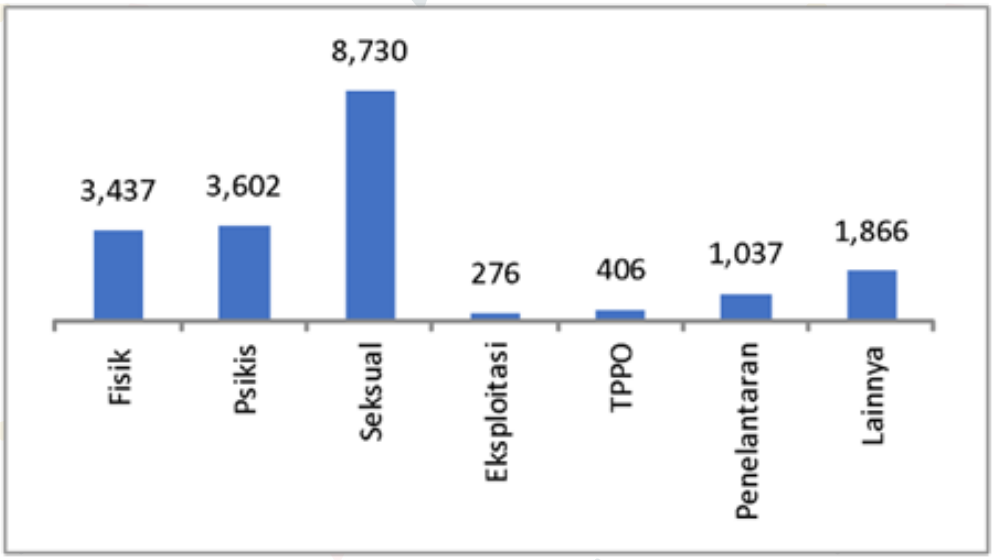

Gambar 10.11 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan Tahun 2021
Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

10.3.4.2 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Layanan yang Diterima

Sebagai upaya memenuhi hak-hak korban kekerasan terhadap anak, terdapat beberapa jenis layanan yang diterima oleh korban meliputi layanan pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemulangan, dan pendampingan tokoh agama. Jenis layanan tertinggi yang diberikan kepada korban adalah layanan pengaduan yaitu sebesar 5.071 pengaduan. Pengaduan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan. Jenis layanan ini menjadi yang paling banyak diterima karena merupakan layanan awal yang diterima oleh korban. Selain itu, adanya layanan SAPA 129 yang dapat diakses melalui telepon dan whatsapp dapat memberikan kemudahan bagi korban untuk memberanikan dirinya dalam melaporkan kekerasan yang diterima (setkab.go.id, 2022). Hasil analisis atas jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut provinsi dan jenis layanan yang diterima secara lengkap disajikan pada Gambar 10.12.

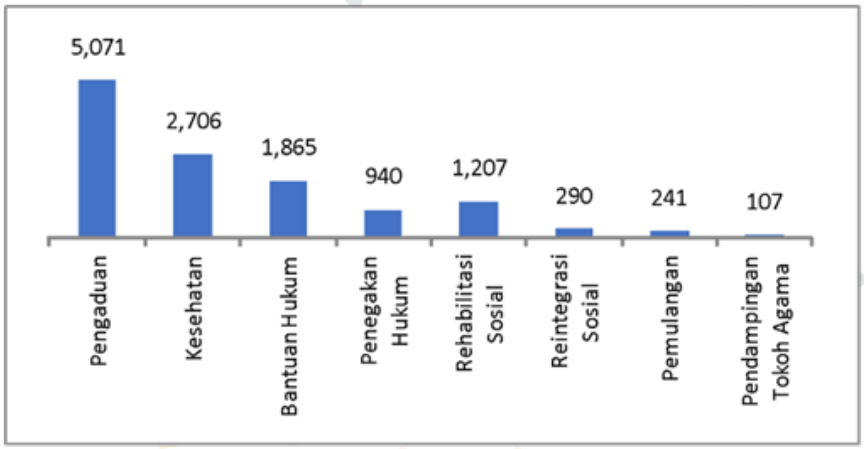

Gambar 10.12 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Layanan yang Diterima Tahun 2021
Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

10.3.4.3 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jumlah Layanan yang Diterima

Korban kekerasan terhadap anak tentu saja tidak hanya mendapatkan satu jenis layanan untuk mendukung dirinya pulih dari trauma akibat kekerasan tersebut. Seorang korban dapat memiliki beberapa jenis layanan dan dapat dilakukan secara bertahap dalam waktu yang berbeda. Terdapat beberapa kelompok jumlah layanan yang diterima oleh korban baik yang terdiri dari 1 jenis layanan, 2 jenis layanan, 3 jenis layanan, 4 jenis layanan, dan lebih dari 4 jenis layanan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi hak korban agar dapat menjalani kehidupan sehari-harinya dengan normal kembali. Berdasarkan tabel Lampiran 10.25, Provinsi Jawa Timur memberikan 1 dan 2 jenis layanan tertinggi, Provinsi DKI Jakarta memberikan 3, 4, dan lebih dari 4 jenis layanan tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah korban kekerasan terhadap anak di Jawa Timur adalah yang tertinggi di Indonesia, pemerintah daerah Jawa Timur telah menunjukkan kepeduliannya atas perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan anak dengan menyediakan jumlah layanan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Hal ini dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lainnya dalam menyediakan layanan untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan di wilayahnya masing-masing.

10.3.5 KtA Berdasarkan Tempat Kejadian

10.3.5.1 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Tempat Kejadian

Hasil analisis terhadap jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut tempat kejadian tahun 2021 disajikan pada Gambar 10.13. Data menunjukkan bahwa tempat kejadian kekerasan terhadap anak di Indonesia paling tinggi terjadi di rumah tangga. Hal ini sesuai dengan penelitian-penelitian terdahulu yang didukung oleh data WHO (2020) yang menunjukkan bahwa meningkatnya aktivitas yang dilakukan oleh keluarga di rumah serta tingginya tingkat stres menjadi alasan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di rumah tangga. Selain itu tempat kejadian kekerasan tertinggi selanjutnya terjadi di tempat lainnya diikuti dengan fasilitas umum.

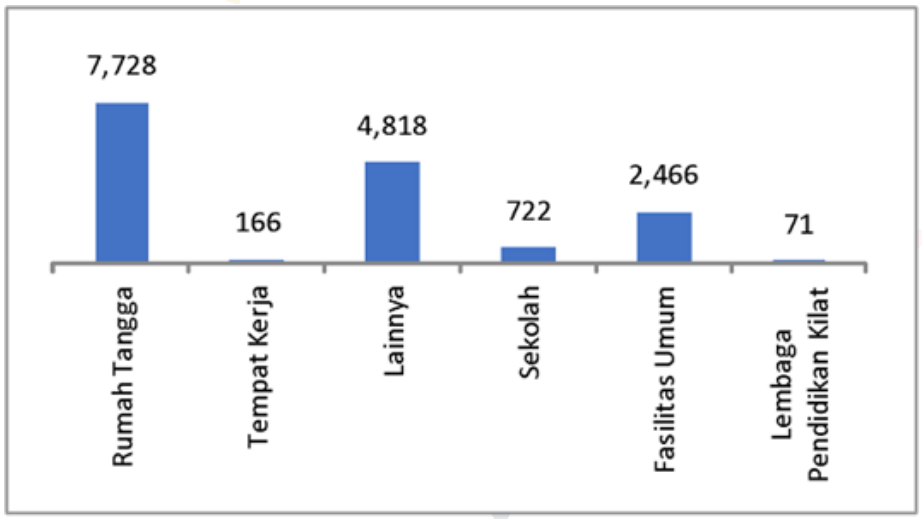

Gambar 10.13 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Tempat Kejadian Tahun 2021
Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

10.3.6 KtA Berdasarkan Hubungan Korban dan Pelaku

10.3.6.1 Persentase Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hubungan Pelaku dengan Korban

Berdasarkan data Simfoni PPPA yang dirilis oleh Kemen PPPA pada tahun 2021, terdapat beberapa kelompok hubungan pelaku dengan korban kekerasan anak meliputi orang tua, keluarga/saudara, suami/istri, tetangga, pacar/teman, guru, majikan, rekan kerja, NA (tidak diketahui), dan lainnya. Berdasarkan Gambar 10.14,

hubungan pelaku kekerasan terhadap korban paling banyak adalah pacar/teman sebanyak 25,70 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan upaya sosialisasi bagi masyarakat, khususnya keluarga bahwa berbagai tindak kekerasan baik yang dilakukan oleh orang lain maupun keluarga atau orang terdekat sekalipun tetap merupakan tindak kejahatan yang harus mendapat perhatian serius. Penyediaan layanan khusus bagi para korban kekerasan, khususnya anak dan penyediaan hukuman yang tegas bagi para pelaku kekerasan dapat menjadi strategi yang bertujuan menurunkan tindak kekerasan terutama pada anak secara signifikan. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kekerasan khususnya yang dilakukan oleh orang terdekat tentunya memiliki andil yang vital karena tanpa kepedulian dari masyarakat sekitar, upaya perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan tidak akan terlaksana secara optimal.

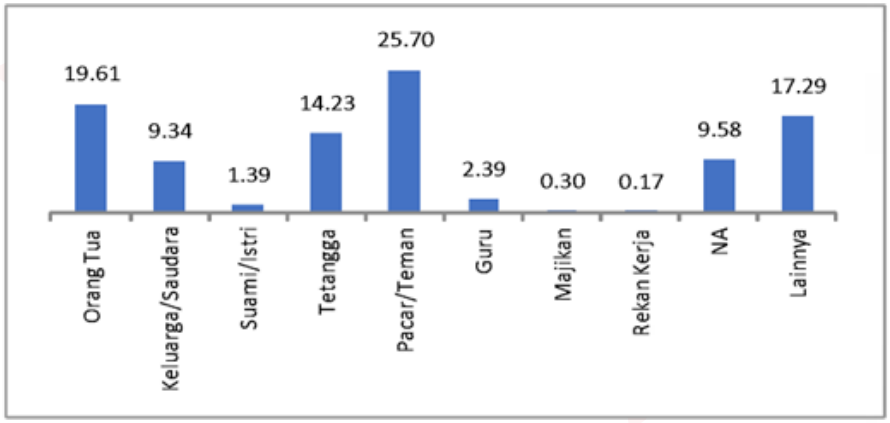

Gambar 10.14 Persentase Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hubungan Pelaku dengan Korban Tahun 2021
Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

Lampiran 10.1

Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2021

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
Aceh	13,23	21,40	18,75
Sumatera Utara	12,55	12,43	12,50
Sumatera Barat	7,94	10,42	9,24
Riau	8,52	10,13	9,49
Jambi	15,46	8,50	10,73
Sumatera Selatan	16,71	16,38	16,50
Bengkulu	18,42	19,36	19,05
Lampung	12,16	17,07	15,52
Bangka Belitung	5,20	8,92	6,87
Kepulauan Riau	8,19	13,62	8,58
DKI Jakarta	7,26		7,26
Jawa Barat	9,70	13,13	10,44
Jawa Tengah	12,25	14,18	13,19
DI Yogyakarta	14,10	16,04	14,60
Jawa Timur	10,07	17,16	13,26
Banten	7,50	11,45	8,70
Bali	4,95	7,27	5,64
Nusa Tenggara Barat	18,15	16,08	17,08
Nusa Tenggara Timur	10,92	29,46	25,18
Kalimantan Barat	6,46	10,63	9,17
Kalimantan Tengah	6,08	6,89	6,56
Kalimantan Selatan	5,35	7,16	6,30
Kalimantan Timur	7,24	12,38	8,92
Kalimantan Utara	8,14	13,21	10,09
Sulawesi Utara	7,67	13,97	10,61
Sulawesi Tengah	13,99	19,04	17,52
Sulawesi Selatan	6,11	14,84	10,96
Sulawesi Tenggara	10,96	17,88	15,43
Gorontalo	6,34	29,58	19,86
Sulawesi Barat	14,65	15,50	15,33
Maluku	8,96	31,89	22,60
Maluku Utara	6,17	9,37	8,54
Papua Barat	8,60	40,97	27,92
Papua	7,65	42,93	33,67
Indonesia	10,00	15,95	12,64

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2021

Lampiran 10.2

Persentase Penduduk Berumur 10-17 Tahun yang Termasuk Angkatan Kerja menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
Aceh	5,50	4,61	5,07	8,22	5,42	6,82	7,32	5,16	6,25
Sumatera Utara	10,48	9,89	10,19	22,49	18,03	20,33	16,17	13,71	14,98
Sumatera Barat	9,86	7,83	8,84	14,36	9,17	11,80	12,20	8,52	10,38
Riau	9,36	8,30	8,84	9,84	5,78	7,90	9,66	6,78	8,27
Jambi	7,32	4,60	5,95	10,07	4,37	7,25	9,18	4,44	6,82
Sumatera Selatan	8,98	7,28	8,12	11,76	6,29	9,07	10,78	6,65	8,73
Bengkulu	10,81	6,41	8,60	9,93	5,34	7,65	10,23	5,72	7,98
Lampung	9,50	8,51	9,02	17,93	8,89	13,50	15,26	8,77	12,09
Bangka Belitung	8,90	8,25	8,57	12,57	6,82	9,72	10,56	7,62	9,08
Kepulauan Riau	3,78	5,81	4,78	4,97	7,15	6,08	3,90	5,96	4,93
DKI Jakarta	2,96	3,55	3,26				2,96	3,55	3,26
Jawa Barat	5,73	4,87	5,31	8,45	6,63	7,56	6,32	5,26	5,80
Jawa Tengah	7,71	7,56	7,64	8,20	7,79	8,00	7,95	7,67	7,82
DI Yogyakarta	8,04	11,25	9,61	9,01	7,04	8,01	8,28	10,16	9,21
Jawa Timur	7,21	6,45	6,83	8,30	6,94	7,63	7,70	6,68	7,19
Banten	5,12	4,70	4,91	6,46	5,04	5,76	5,53	4,81	5,17
Bali	6,91	14,11	10,47	16,95	23,53	20,20	9,94	16,96	13,41
Nusa Tenggara Barat	12,75	13,37	13,06	19,74	17,26	18,49	16,20	15,31	15,75
Nusa Tenggara Timur	11,64	13,90	12,74	23,62	16,86	20,24	20,71	16,17	18,46
Kalimantan Barat	9,02	9,54	9,28	11,56	8,88	10,25	10,66	9,12	9,90
Kalimantan Tengah	9,04	7,96	8,49	11,46	9,95	10,71	10,49	9,13	9,81
Kalimantan Selatan	7,50	6,42	6,96	12,66	11,30	11,99	10,27	9,02	9,65
Kalimantan Timur	4,05	6,13	5,08	8,44	5,44	6,99	5,54	5,90	5,72
Kalimantan Utara	8,38	14,50	11,41	13,09	7,49	10,38	10,25	11,79	11,00
Sulawesi Utara	6,42	6,30	6,36	11,62	6,83	9,29	8,97	6,55	7,78
Sulawesi Tengah	13,86	8,10	11,01	18,57	11,48	15,06	17,12	10,43	13,81
Sulawesi Selatan	13,02	7,65	10,35	21,66	13,59	17,68	17,89	10,97	14,47
Sulawesi Tenggara	15,38	9,65	12,54	25,35	15,98	20,73	21,79	13,70	17,80
Gorontalo	6,99	7,98	7,49	17,20	9,49	13,40	13,02	8,85	10,95
Sulawesi Barat	16,67	12,86	14,80	19,22	11,26	15,21	18,70	11,57	15,13
Maluku	6,13	6,89	6,52	13,24	9,65	11,50	10,47	8,52	9,51
Maluku Utara	5,73	3,70	4,72	12,20	6,65	9,46	10,50	5,87	8,21
Papua Barat	7,32	6,14	6,75	16,81	14,92	15,88	12,82	11,32	12,09
Papua	8,35	4,51	6,40	19,43	17,66	18,58	16,85	14,32	15,62
Indonesia	**7,24**	**6,73**	**6,99**	**12,94**	**9,52**	**11,26**	**9,79**	**7,97**	**8,89**

Catatan: L (Laki-Laki), P (Perempuan), L+P (Laki-Laki + Perempuan)

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2021

Lampiran 10.3

Persentase Penduduk Berumur 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
Aceh	4,84	3,69	4,28	7,16	5,09	6,13	6,39	4,65	5,53
Sumatera Utara	8,83	8,86	8,85	21,92	17,46	19,76	15,04	12,90	14,00
Sumatera Barat	7,68	7,49	7,58	13,60	8,83	11,25	10,77	8,18	9,48
Riau	8,11	8,00	8,06	9,15	5,68	7,49	8,75	6,60	7,71
Jambi	6,42	3,77	5,08	9,21	3,71	6,49	8,31	3,73	6,03
Sumatera Selatan	8,06	6,80	7,42	10,63	5,82	8,27	9,72	6,18	7,96
Bengkulu	9,36	5,93	7,63	8,87	4,68	6,79	9,04	5,12	7,08
Lampung	7,28	7,84	7,55	16,94	8,28	12,70	13,88	8,15	11,08
Bangka Belitung	7,24	7,45	7,34	11,27	6,51	8,90	9,05	7,03	8,04
Kepulauan Riau	2,76	4,98	3,86	4,97	6,72	5,86	3,00	5,17	4,08
DKI Jakarta	2,17	2,43	2,30				2,17	2,43	2,30
Jawa Barat	4,02	3,93	3,98	6,60	5,65	6,13	4,58	4,31	4,45
Jawa Tengah	6,38	6,71	6,54	6,83	6,88	6,85	6,60	6,79	6,69
DI Yogyakarta	7,59	9,33	8,44	7,86	7,04	7,44	7,66	8,74	8,19
Jawa Timur	5,50	6,09	5,79	7,65	6,38	7,02	6,48	6,22	6,35
Banten	4,30	3,91	4,10	4,57	4,01	4,30	4,39	3,94	4,16
Bali	6,77	13,06	9,88	15,35	23,09	19,18	9,35	16,09	12,68
Nusa Tenggara Barat	12,50	13,03	12,76	19,43	17,04	18,23	15,92	15,03	15,47
Nusa Tenggara Timur	10,46	12,60	11,50	22,05	16,44	19,25	19,24	15,55	17,41
Kalimantan Barat	6,56	8,67	7,61	10,31	8,24	9,29	8,97	8,39	8,69
Kalimantan Tengah	8,05	7,30	7,67	10,05	9,74	9,90	9,25	8,73	8,99
Kalimantan Selatan	5,55	6,12	5,83	11,63	10,74	11,19	8,81	8,59	8,70
Kalimantan Timur	3,28	5,58	4,42	8,03	4,89	6,51	4,89	5,35	5,12
Kalimantan Utara	8,12	13,53	10,80	12,55	7,49	10,10	9,88	11,19	10,52
Sulawesi Utara	5,25	5,45	5,35	10,05	6,31	8,23	7,60	5,86	6,74
Sulawesi Tengah	11,73	7,89	9,83	17,18	11,06	14,15	15,49	10,08	12,82
Sulawesi Selatan	10,57	7,35	8,97	21,15	12,86	17,06	16,53	10,43	13,51
Sulawesi Tenggara	15,04	8,86	11,98	24,57	15,63	20,16	21,16	13,20	17,23
Gorontalo	6,31	7,98	7,15	17,00	9,35	13,23	12,62	8,77	10,71
Sulawesi Barat	14,09	12,86	13,49	18,84	11,17	14,97	17,86	11,50	14,68
Maluku	3,83	5,40	4,62	11,75	9,42	10,62	8,66	7,78	8,23
Maluku Utara	5,59	3,70	4,65	11,18	5,97	8,61	9,71	5,37	7,57
Papua Barat	4,17	6,14	5,12	15,79	14,62	15,21	10,91	11,15	11,03
Papua	6,48	4,46	5,45	17,86	16,65	17,28	15,21	13,56	14,41
Indonesia	**5,81**	**5,96**	**5,88**	**11,85**	**8,91**	**10,41**	**8,51**	**7,27**	**7,90**

Catatan: L (Laki-Laki), P (Perempuan), L+P (Laki-Laki + Perempuan)

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2021

Lampiran 10.4

Persentase Penduduk Berumur 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2021

Tipe Daerah	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki dan Perempuan			
	Pertanian	Manufaktur	Jasa	Total	Pertanian	Manufaktur	Jasa	Total	Pertanian	Manufaktur	Jasa	Total
Perkotaan	20,38	17,45	62,17	100,00	5,28	14,46	80,26	100,00	12,85	15,96	71,19	100,00
Perdesaan	61,41	12,92	25,67	100,00	36,55	11,38	52,08	100,00	50,97	12,27	36,76	100,00
Perkotaan dan Perdesaan	45,92	14,63	39,45	100,00	22,33	12,78	64,89	100,00	35,25	13,79	50,96	100,00

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2021

Lampiran 10.5

Persentase Penduduk Berumur 10-17 Tahun yang Bekerja Jenis Kelamin dan Sektor Pekerjaan Utama, 2021

Provinsi	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki dan Perempuan	
	Sektor Formal	Sektor Informal	Sektor Formal	Sektor Informal	Sektor Formal	Sektor Informal
Aceh	22,55	77,45	11,05	88,95	17,78	82,22
Sumatera Utara	8,63	91,37	7,03	92,97	7,91	92,09
Sumatera Barat	7,72	92,28	3,96	96,04	6,11	93,89
Riau	9,99	90,01	7,57	92,43	8,99	91,01
Jambi	17,62	82,38	23,32	76,68	19,38	80,62
Sumatera Selatan	12,66	87,34	13,36	86,64	12,93	87,07
Bengkulu	6,63	93,37	1,77	98,23	4,87	95,13
Lampung	8,77	91,23	6,72	93,28	8,03	91,97
Bangka Belitung	31,37	68,63	21,17	78,83	26,89	73,11
Kepulauan Riau	30,19	69,81	16,74	83,26	21,73	78,27
DKI Jakarta	16,78	83,22	31,55	68,45	24,62	75,38
Jawa Barat	17,77	82,23	19,86	80,14	18,76	81,24
Jawa Tengah	18,99	81,01	18,64	81,36	18,82	81,18
DI Yogyakarta	14,14	85,86	3,96	96,04	8,77	91,23
Jawa Timur	14,84	85,16	13,06	86,94	13,98	86,02
Banten	18,08	81,92	7,79	92,21	13,24	86,76
Bali	9,41	90,59	6,97	93,03	7,88	92,12
Nusa Tenggara Barat	6,47	93,53	4,03	95,97	5,28	94,72
Nusa Tenggara Timur	5,07	94,93	1,61	98,39	3,54	96,46
Kalimantan Barat	21,88	78,12	11,66	88,34	17,02	82,98
Kalimantan Tengah	14,63	85,37	3,15	96,85	9,03	90,97
Kalimantan Selatan	19,56	80,44	11,29	88,71	15,52	84,48
Kalimantan Timur	19,24	80,76	14,93	85,07	17,02	82,98
Kalimantan Utara	9,11	90,89	11,67	88,33	10,45	89,55
Sulawesi Utara	10,37	89,63	6,28	93,72	8,62	91,38
Sulawesi Tengah	7,04	92,96	4,46	95,54	6,03	93,97
Sulawesi Selatan	12,01	87,99	7,04	92,96	10,11	89,89
Sulawesi Tenggara	11,59	88,41	4	96	8,72	91,28
Gorontalo	15,61	84,39	8,4	91,6	12,68	87,32
Sulawesi Barat	15,32	84,68	4,31	95,69	10,99	89,01
Maluku	8,56	91,44	4,53	95,47	6,68	93,32
Maluku Utara	12,42	87,58	3,18	96,82	9,18	90,82
Papua Barat	4,84	95,16	2,69	97,31	3,78	96,22
Papua	1,57	98,43	0,28	99,72	0,98	99,02
Indonesia	**12,82**	**87,18**	**10,53**	**89,47**	**11,78**	**88,22**

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2021

Lampiran 10.6

Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10-17 Tahun yang Bekerja di Sektor Formal menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Laki-Laki				
	Estimasi	Standar Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	22,55	3,91	17,35	15,80	31,12
Sumatera Utara	8,63	1,26	14,56	6,47	11,44
Sumatera Barat	7,72	1,82	23,52	4,83	12,12
Riau	9,99	2,19	21,89	6,45	15,17
Jambi	17,62	3,37	19,10	11,96	25,21
Sumatera Selatan	12,66	2,26	17,87	8,84	17,79
Bengkulu	6,63	2,91	43,91	2,75	15,14
Lampung	8,77	1,79	20,42	5,84	12,97
Bangka Belitung	31,37	5,39	17,17	21,87	42,74
Kepulauan Riau	30,19	12,12	40,13	12,29	57,17
DKI Jakarta	16,78	7,98	47,54	6,18	38,19
Jawa Barat	17,77	3,15	17,70	12,42	24,79
Jawa Tengah	18,99	2,13	11,22	15,16	23,52
DI Yogyakarta	14,14	5,59	39,56	6,26	28,89
Jawa Timur	14,84	2,08	14,01	11,21	19,39
Banten	18,08	5,46	30,22	9,67	31,26
Bali	9,41	2,55	27,09	5,47	15,73
Nusa Tenggara Barat	6,47	1,76	27,14	3,77	10,88
Nusa Tenggara Timur	5,07	0,92	18,20	3,54	7,22
Kalimantan Barat	21,88	3,10	14,17	16,40	28,55
Kalimantan Tengah	14,63	3,29	22,51	9,27	22,32
Kalimantan Selatan	19,56	3,39	17,31	13,75	27,04
Kalimantan Timur	19,24	5,73	29,75	10,37	32,91
Kalimantan Utara	9,11	3,91	42,86	3,83	20,17
Sulawesi Utara	10,37	2,51	24,23	6,38	16,43
Sulawesi Tengah	7,04	1,74	24,79	4,30	11,32
Sulawesi Selatan	12,01	1,72	14,31	9,03	15,81
Sulawesi Tenggara	11,59	1,86	16,07	8,41	15,77
Gorontalo	15,61	3,57	22,88	9,81	23,94
Sulawesi Barat	15,32	3,60	23,47	9,51	23,75
Maluku	8,56	2,68	31,32	4,57	15,49
Maluku Utara	12,42	3,14	25,31	7,45	20,00
Papua Barat	4,84	1,97	40,73	2,15	10,54
Papua	1,57	0,51	32,68	0,83	2,97
Indonesia	**12,82**	**0,56**	**4,35**	**11,76**	**13,95**

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2021

Lampiran 10.6 (Lanjutan)

Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10-17 Tahun yang Bekerja di Sektor Formal menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Perempuan				
	Estimasi	Standar Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	11,05	3,27	29,58	6,08	19,25
Sumatera Utara	7,03	1,24	17,59	4,96	9,88
Sumatera Barat	3,96	1,63	41,13	1,75	8,72
Riau	7,57	2,12	27,98	4,33	12,91
Jambi	23,32	5,60	24,02	14,13	35,99
Sumatera Selatan	13,36	5,09	38,09	6,12	26,74
Bengkulu	1,77	0,97	54,84	0,60	5,10
Lampung	6,72	2,15	31,97	3,55	12,36
Bangka Belitung	21,17	5,79	27,37	11,97	34,65
Kepulauan Riau	16,74	9,57	57,14	4,98	43,57
DKI Jakarta	31,55	10,61	33,62	14,97	54,70
Jawa Barat	19,86	3,46	17,43	13,93	27,52
Jawa Tengah	18,64	2,26	12,11	14,61	23,48
DI Yogyakarta	3,96	2,10	53,07	1,38	10,86
Jawa Timur	13,06	2,27	17,39	9,22	18,20
Banten	7,79	4,04	51,88	2,73	20,28
Bali	6,97	1,72	24,65	4,27	11,19
Nusa Tenggara Barat	4,03	1,58	39,14	1,85	8,54
Nusa Tenggara Timur	1,61	0,52	32,16	0,86	3,02
Kalimantan Barat	11,66	2,66	22,77	7,38	17,96
Kalimantan Tengah	3,16	1,35	42,76	1,35	7,18
Kalimantan Selatan	11,29	3,00	26,61	6,60	18,64
Kalimantan Timur	14,93	5,05	33,81	7,45	27,67
Kalimantan Utara	11,67	5,27	45,17	4,63	26,48
Sulawesi Utara	6,28	3,07	48,83	2,36	15,70
Sulawesi Tengah	4,46	1,82	40,89	1,98	9,75
Sulawesi Selatan	7,04	1,51	21,50	4,59	10,65
Sulawesi Tenggara	4,00	1,23	30,84	2,17	7,25
Gorontalo	8,40	3,43	40,78	3,69	18,00
Sulawesi Barat	4,31	1,87	43,38	1,82	9,86
Maluku	4,53	2,22	48,94	1,71	11,48
Maluku Utara	3,18	1,89	59,46	0,98	9,87
Papua Barat	2,69	2,41	89,77	0,45	14,41
Papua	0,28	0,20	72,56	0,07	1,14
Indonesia	**87,18**	**0,56**	**0,64**	**86,05**	**88,24**

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2021

Lampiran 10.6 (Lanjutan)

Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10-17 Tahun yang Bekerja di Sektor Formal menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Laki-Laki + Perempuan				
	Estimasi	Standar Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	17,78	2,77	15,57	12,98	23,86
Sumatera Utara	7,91	0,89	11,26	6,33	9,85
Sumatera Barat	6,11	1,25	20,46	4,07	9,08
Riau	8,99	1,55	17,22	6,38	12,53
Jambi	19,38	3,04	15,66	14,11	26,02
Sumatera Selatan	12,93	2,40	18,54	8,91	18,39
Bengkulu	4,87	1,92	39,39	2,23	10,35
Lampung	8,03	1,43	17,81	5,64	11,32
Bangka Belitung	26,89	3,90	14,48	19,97	35,17
Kepulauan Riau	21,73	7,38	33,97	10,60	39,39
DKI Jakarta	24,62	6,76	27,47	13,78	40,02
Jawa Barat	18,76	2,39	12,75	14,51	23,90
Jawa Tengah	18,82	1,57	8,35	15,93	22,09
DI Yogyakarta	8,77	2,94	33,53	4,47	16,51
Jawa Timur	13,98	1,52	10,89	11,25	17,24
Banten	13,24	3,33	25,12	7,96	21,21
Bali	7,88	1,51	19,13	5,39	11,39
Nusa Tenggara Barat	5,28	1,26	23,82	3,29	8,37
Nusa Tenggara Timur	3,54	0,57	16,08	2,58	4,84
Kalimantan Barat	17,02	2,12	12,48	13,25	21,59
Kalimantan Tengah	9,03	1,89	20,95	5,95	13,49
Kalimantan Selatan	15,52	2,44	15,75	11,31	20,93
Kalimantan Timur	17,02	3,88	22,76	10,70	25,99
Kalimantan Utara	10,45	3,96	37,92	4,84	21,11
Sulawesi Utara	8,62	2,07	24,02	5,33	13,63
Sulawesi Tengah	6,03	1,29	21,45	3,94	9,13
Sulawesi Selatan	10,11	1,20	11,87	7,99	12,72
Sulawesi Tenggara	8,72	1,37	15,65	6,39	11,80
Gorontalo	12,68	2,64	20,79	8,35	18,80
Sulawesi Barat	10,99	2,39	21,77	7,10	16,63
Maluku	6,68	1,88	28,19	3,81	11,47
Maluku Utara	9,18	2,19	23,84	5,70	14,46
Papua Barat	3,78	1,51	39,90	1,71	8,13
Papua	0,98	0,29	29,59	0,55	1,75
Indonesia	**11,78**	**0,42**	**3,59**	**10,98**	**12,64**

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2021

Lampiran 10.7

Persentase Penduduk Berumur 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Tipe Daerah dan Sektor Pekerjaan Utama, 2021

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan dan Perdesaan	
	Sektor Formal	Sektor Informal	Sektor Formal	Sektor Informal	Sektor Formal	Sektor Informal
Aceh	20,09	79,91	17,00	83,00	17,78	82,22
Sumatera Utara	16,07	83,93	3,83	96,17	7,91	92,09
Sumatera Barat	6,94	93,06	5,60	94,40	6,11	93,89
Riau	10,68	89,32	7,83	92,17	8,99	91,01
Jambi	16,66	83,34	20,41	79,59	19,38	80,62
Sumatera Selatan	19,65	80,35	9,55	90,45	12,93	87,07
Bengkulu	7,51	92,49	3,30	96,70	4,87	95,13
Lampung	16,36	83,64	5,75	94,25	8,03	91,97
Bangka Belitung	33,92	66,08	19,69	80,31	26,89	73,11
Kepulauan Riau	21,11	78,89	25,03	74,97	21,73	78,27
DKI Jakarta	24,62	75,38			24,62	75,38
Jawa Barat	22,39	77,61	10,40	89,60	18,76	81,24
Jawa Tengah	19,86	80,14	17,78	82,22	18,82	81,18
DI Yogyakarta	8,98	91,02	8,07	91,93	8,77	91,23
Jawa Timur	19,85	80,15	8,14	91,86	13,98	86,02
Banten	16,05	83,95	7,11	92,89	13,24	86,76
Bali	8,44	91,56	7,22	92,78	7,88	92,12
Nusa Tenggara Barat	7,48	92,52	3,72	96,28	5,28	94,72
Nusa Tenggara Timur	5,26	94,74	3,22	96,78	3,54	96,46
Kalimantan Barat	18,92	81,08	16,14	83,86	17,02	82,98
Kalimantan Tengah	15,76	84,24	5,47	94,53	9,03	90,97
Kalimantan Selatan	19,87	80,13	13,55	86,45	15,52	84,48
Kalimantan Timur	21,21	78,79	11,35	88,65	17,02	82,98
Kalimantan Utara	14,08	85,92	4,43	95,57	10,45	89,55
Sulawesi Utara	7,45	92,55	9,43	90,57	8,62	91,38
Sulawesi Tengah	14,43	85,57	3,42	96,58	6,03	93,97
Sulawesi Selatan	15,00	85,00	8,11	91,89	10,11	89,89
Sulawesi Tenggara	19,43	80,57	5,17	94,83	8,72	91,28
Gorontalo	13,99	86,01	12,18	87,82	12,68	87,32
Sulawesi Barat	13,65	86,35	10,39	89,61	10,99	89,01
Maluku	6,70	93,30	6,68	93,32	6,68	93,32
Maluku Utara	6,93	93,07	9,61	90,39	9,18	90,82
Papua Barat	11,62	88,38	1,91	98,09	3,78	96,22
Papua	4,28	95,72	0,65	99,35	0,98	99,02
Indonesia	**17,17**	**82,83**	**8,01**	**91,99**	**11,78**	**88,22**

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2021

Lampiran 10.8

Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10-17 tahun yang Bekerja menurut Tipe Daerah dan Sektor Pekerjaan Utama,2021

Provinsi	Perkotaan				
	Estimasi	Standar Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	20,09	5,34	26,57	11,58	32,55
Sumatera Utara	16,07	2,37	14,74	11,95	21,28
Sumatera Barat	6,94	2,53	36,39	3,35	13,84
Riau	10,68	2,41	22,58	6,79	16,41
Jambi	16,66	6,20	37,22	7,69	32,43
Sumatera Selatan	19,65	5,95	30,26	10,46	33,85
Bengkulu	7,51	3,95	52,56	2,60	19,84
Lampung	16,36	4,08	24,96	9,82	25,99
Bangka Belitung	33,92	5,79	17,07	23,62	46,00
Kepulauan Riau	21,11	8,53	40,40	8,93	42,21
DKI Jakarta	24,62	6,76	27,47	13,78	40,02
Jawa Barat	22,39	3,26	14,55	16,65	29,41
Jawa Tengah	19,86	2,32	11,70	15,69	24,81
DI Yogyakarta	8,98	3,55	39,46	4,05	18,76
Jawa Timur	19,85	2,56	12,90	15,30	25,35
Banten	16,05	4,56	28,43	8,96	27,08
Bali	8,44	2,18	25,81	5,04	13,81
Nusa Tenggara Barat	7,48	2,50	33,44	3,83	14,12
Nusa Tenggara Timur	5,26	1,65	31,46	2,81	9,62
Kalimantan Barat	18,92	4,54	24,00	11,55	29,42
Kalimantan Tengah	15,77	4,37	27,72	8,94	26,30
Kalimantan Selatan	19,87	5,08	25,56	11,71	31,67
Kalimantan Timur	21,21	5,35	25,22	12,57	33,53
Kalimantan Utara	14,08	6,38	45,33	5,51	31,56
Sulawesi Utara	7,45	3,92	52,65	2,57	19,70
Sulawesi Tengah	14,43	4,71	32,67	7,39	26,28
Sulawesi Selatan	15,00	3,23	21,49	9,71	22,47
Sulawesi Tenggara	19,43	4,65	23,91	11,88	30,14
Gorontalo	13,99	5,50	39,29	6,23	28,48
Sulawesi Barat	13,65	5,46	39,99	5,99	28,16
Maluku	6,70	2,89	43,13	2,82	15,09
Maluku Utara	6,93	3,78	54,52	2,31	19,03
Papua Barat	11,62	6,56	56,49	3,62	31,53
Papua	4,28	2,37	55,47	1,42	12,22
Indonesia	**17,17**	**0,88**	**5,11**	**15,51**	**18,96**

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2021

Lampiran 10.8 (Lanjutan)

Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10-17 tahun yang Bekerja menurut Tipe Daerah dan Sektor Pekerjaan Utama,2021

Provinsi	Perdesaan				
	Estimasi	Standar Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	17,00	3,25	19,10	11,54	24,34
Sumatera Utara	3,83	0,63	16,46	2,77	5,27
Sumatera Barat	5,60	1,29	22,98	3,55	8,72
Riau	7,83	2,03	25,89	4,67	12,84
Jambi	20,41	3,48	17,03	14,42	28,06
Sumatera Selatan	9,55	1,81	18,94	6,54	13,73
Bengkulu	3,30	1,95	59,03	1,02	10,14
Lampung	5,75	1,46	25,31	3,48	9,37
Bangka Belitung	19,69	5,07	25,74	11,57	31,49
Kepulauan Riau	25,03	10,07	40,25	10,44	48,88
DKI Jakarta					
Jawa Barat	10,40	2,24	21,56	6,75	15,68
Jawa Tengah	17,78	2,12	11,95	13,99	22,33
DI Yogyakarta	8,07	4,75	58,82	2,44	23,53
Jawa Timur	8,14	1,63	20,05	5,46	11,97
Banten	7,12	3,53	49,59	2,62	17,91
Bali	7,22	2,05	28,41	4,09	12,42
Nusa Tenggara Barat	3,72	1,19	32,00	1,97	6,89
Nusa Tenggara Timur	3,22	0,60	18,65	2,23	4,63
Kalimantan Barat	16,14	2,29	14,20	12,13	21,15
Kalimantan Tengah	5,47	1,69	30,91	2,96	9,89
Kalimantan Selatan	13,55	2,68	19,81	9,09	19,72
Kalimantan Timur	11,35	5,24	46,12	4,42	26,20
Kalimantan Utara	4,43	2,44	55,21	1,47	12,56
Sulawesi Utara	9,43	2,17	23,03	5,95	14,64
Sulawesi Tengah	3,42	0,91	26,46	2,03	5,72
Sulawesi Selatan	8,11	1,05	13,00	6,27	10,43
Sulawesi Tenggara	5,17	0,94	18,24	3,60	7,36
Gorontalo	12,18	2,98	24,44	7,44	19,31
Sulawesi Barat	10,39	2,66	25,64	6,21	16,89
Maluku	6,68	2,28	34,14	3,38	12,79
Maluku Utara	9,61	2,49	25,94	5,71	15,73
Papua Barat	1,91	0,83	43,37	0,81	4,42
Papua	0,65	0,22	33,28	0,34	1,24
Indonesia	**82,83**	**0,88**	**1,06**	**81,04**	**84,49**

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2021

Lampiran 10.8 (Lanjutan)

Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10-17 tahun yang Bekerja menurut Tipe Daerah dan Sektor Pekerjaan Utama,2021

Provinsi	Perkotaan dan Perdesaan				
	Estimasi	Standar Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	17,78	2,77	15,57	12,98	23,86
Sumatera Utara	7,91	0,89	11,26	6,33	9,85
Sumatera Barat	6,11	1,25	20,46	4,07	9,08
Riau	8,99	1,55	17,22	6,38	12,53
Jambi	19,38	3,04	15,66	14,11	26,02
Sumatera Selatan	12,93	2,40	18,54	8,91	18,39
Bengkulu	4,87	1,92	39,39	2,23	10,35
Lampung	8,03	1,43	17,81	5,64	11,32
Bangka Belitung	26,89	3,90	14,48	19,97	35,17
Kepulauan Ria u	21,73	7,38	33,97	10,60	39,39
DKI Jakarta	24,62	6,76	27,47	13,78	40,02
Jawa Barat	18,76	2,39	12,75	14,51	23,90
Jawa Tengah	18,82	1,57	8,35	15,93	22,09
DI Yogyakarta	8,77	2,94	33,53	4,47	16,51
Jawa Timur	13,98	1,52	10,89	11,25	17,24
Banten	13,24	3,33	25,12	7,96	21,21
Bali	7,88	1,51	19,13	5,39	11,39
Nusa Tenggara Barat	5,28	1,26	23,82	3,29	8,37
Nusa Tenggara Timur	3,54	0,57	16,08	2,58	4,84
Kalimantan Barat	17,02	2,12	12,48	13,25	21,59
Kalimantan Tengah	9,03	1,89	20,95	5,95	13,49
Kalimantan Selatan	15,52	2,44	15,75	11,31	20,93
Kalimantan Timur	17,02	3,88	22,76	10,70	25,99
Kalimantan Utara	10,45	3,96	37,92	4,84	21,11
Sulawesi Utara	8,62	2,07	24,02	5,33	13,63
Sulawesi Tengah	6,03	1,29	21,45	3,94	9,13
Sulawesi Selatan	10,11	1,20	11,87	7,99	12,72
Sulawesi Tenggara	8,72	1,37	15,65	6,39	11,80
Gorontalo	12,68	2,64	20,79	8,35	18,80
Sulawesi Barat	10,99	2,39	21,77	7,10	16,63
Maluku	6,68	1,88	28,19	3,81	11,47
Maluku Utara	9,18	2,19	23,84	5,70	14,46
Papua Barat	3,78	1,51	39,90	1,71	8,13
Papua	0,98	0,29	29,59	0,55	1,75
Indonesia	**88,22**	**0,42**	**0,48**	**87,36**	**89,02**

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2021

Lampiran 10.9

Persentase Penduduk Berumur 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Jumlah Jam Kerja pada Pekerjaan Utama, 2021

Jenis Kelamin	0 jam	14 jam	15-40 jam	> 40 jam
Laki-laki	0,79	47,80	36,88	14,53
Perempuan	0,39	51,12	36,10	12,38
Laki-laki dan Perempuan	**0,61**	**49,30**	**36,53**	**13,56**

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2021

Lampiran 10.10

Persentase Penduduk Berumur 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Jumlah Jam Kerja pada Pekerjaan Utama, 2021

Tipe Daerah	0 jam	14 jam	15-40 jam	> 40 jam
Perkotaan	0,67	48,10	33,87	17,36
Perdesaan	0,57	50,14	38,39	10,89
Perkotaan dan Perdesaan	**0,61**	**49,30**	**36,53**	**13,56**

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2021

Lampiran 10.11

Persentase Penduduk Berumur 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Tipe Daerah dan Sektor Pekerjaan Utama, 2021

Provinsi	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki dan Perempuan	
	Sebelum Maret 2021	Setelah Maret 2021	Sebelum Maret 2021	Setelah Maret 2021	Sebelum Maret 2021	Setelah Maret 2021
Perkotaan	84,04	15,96	86,10	13,90	85,06	14,94
Perdesaan	82,69	17,31	85,49	14,51	83,86	16,14
Perkotaan dan Perdesaan	**83,20**	**16,80**	**85,76**	**14,24**	**84,36**	**15,64**

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2021

Lampiran 10.12

Persentase Penduduk Berumur 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2021

Jenis Kelamin	Maksimal lulus SD	SMP/MTs/SMPLB/Paket B	Minimal Lulus SMA/MA/ SMALB/Paket C
Laki-laki	49,40	45,94	4,65
Perempuan	47,15	46,64	6,21
Laki-laki dan Perempuan	**48,38**	**46,26**	**5,36**

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2021

Lampiran 10.13

Persentase Penduduk Berumur 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Tipe Daerah dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2021

Tipe Daerah	Maksimal lulus SD	SMP/MTs/SMPLB/Paket B	Minimal Lulus SMA/MA/ SMALB/Paket C
Perkotaan	44,79	49,00	6,22
Perdesaan	50,91	44,34	4,76
Perkotaan dan Perdesaan	**48,38**	**46,26**	**5,36**

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2021

Lampiran 10.14

Persentase Penduduk Berumur 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Status Pekerjaan Utama, 2021

Jenis Kelamin	Berusaha Sendiri	Berusaha dibantu Pekerja tidak tetap/ pekerja keluarga/ tidak dibayar	Berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar	Buruh/ karyawan/ pegawai	Pekerja bebas di pertanian	Pekerja be-bas di non pertanian	Pekerja keluarga/ tidak dibayar	Total
Laki-laki	3,69	1,05	0,10	12,72	3,68	4,65	74,12	100
Perempuan	4,10	0,87	0,15	10,38	1,05	1,57	81,88	100
Laki-laki dan Perempuan	**3,87**	**0,97**	**0,12**	**11,66**	**2,49**	**3,26**	**77,63**	**100**

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2021

Lampiran 10.15

Persentase Penduduk Berumur 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Tipe Daerah dan Status Pekerjaan Utama, 2021

Tipe Daerah	Berusaha Sendiri	Berusaha dibantu Pekerja tidak tetap/ pekerja keluarga/ tidak dibayar	Berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar	Buruh/ karyawan/ pegawai	Pekerja bebas di pertanian	Pekerja be-bas di non pertanian	Pekerja keluarga/ tidak dibayar	Total
Laki-laki	4,34	0,94	0,21	16,96	1,01	3,28	73,26	100
Perempuan	3,54	0,99	0,06	7,94	3,53	3,24	80,70	100
Laki-laki dan Perempuan	**3,87**	**0,97**	**0,12**	**11,66**	**2,49**	**3,26**	**77,63**	**100**

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2021

Lampiran 10.16

Rata-rata upah/gaji/pendapatan penduduk umur 10-17 tahun yang bekerja menurut tipe daerah dan jenis kelamin, 2021

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
Aceh	1.194.922	899.676	1.124.633
Sumatera Utara	1.011.087	689.941	882.986
Sumatera Barat	1.006.087	786.813	945.344
Riau	1.194.135	888.712	1.091.402
Jambi	1.383.865	871.514	1.194.007
Sumatera Selatan	1.038.686	457.701	807.536
Bengkulu	1.467.567	708.197	1.361.325
Lampung	1.171.131	1.077.131	1.142.920
Bangka Belitung	1.681.741	889.099	1.437.973
Kepulauan Riau	2.476.803	981.808	1.751.347
DKI Jakarta	2.213.444	2.469.322	2.387.423
Jawa Barat	1.258.711	1.218.078	1.238.839
Jawa Tengah	1.135.295	958.224	1.048.993
DI Yogyakarta	792.805	705.676	770.046
Jawa Timur	1.305.799	714.143	1.032.430
Banten	1.856.074	2.162.443	1.940.696
Bali	1.051.000	826.635	926.515
Nusa Tenggara Barat	766.788	672.855	731.939
Nusa Tenggara Timur	649.976	587.236	637.282
Kalimantan Barat	995.365	1.047.600	1.012.554
Kalimantan Tengah	1.425.993	815.726	1.322.047
Kalimantan Selatan	1.075.664	562.443	897.652
Kalimantan Timur	1.428.543	1.230.026	1.338.937
Kalimantan Utara	1.116.659	795.956	929.873
Sulawesi Utara	858.590	1.271.530	987.806
Sulawesi Tengah	733.788	541.439	678.499
Sulawesi Selatan	1.116.698	782.840	1.028.575
Sulawesi Tenggara	1.658.041	582.821	1.471.793
Gorontalo	656.242	807.765	697.066
Sulawesi Barat	1.252.516	774.308	1.178.923
Maluku	871.792	841.578	860.942
Maluku Utara	1.384.773	144.691	1.233.839
Papua Barat	1.466.584	1.550.691	1.496.117
Papua	1.751.957	1.621.348	1.735.036
Indonesia	1.206.533	985.576	1.117.532

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2021

Lampiran 10.17

Sampling Error Rata-rata upah/gaji/pendapatan Penduduk Umur 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Laki-Laki				
	Estimasi	Standar Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	1.194.922	294.742	24,67	616.226	1.773.619
Sumatera Utara	1.011.087	78.245	7,74	857.461	1.164.713
Sumatera Barat	1.006.087	174.535	17,35	663.405	1.348.769
Riau	1.194.135	201.010	16,83	799.472	1.588.799
Jambi	1.383.865	124.787	9,02	1.138.858	1.628.871
Sumatera Selatan	1.038.686	114.684	11,04	813.515	1.263.858
Bengkulu	1.467.567	98.977	6,74	1.273.236	1.661.898
Lampung	1.171.131	186.437	15,92	805.081	1.537.182
Bangka Belitung	1.681.741	180.355	10,72	1.327.631	2.035.851
Kepulauan Riau	2.476.803	766.592	30,95	971.675	3.981.931
DKI Jakarta	2.213.444	343.388	15,51	1.539.234	2.887.654
Jawa Barat	1.258.711	88.711	7,05	1.084.535	1.432.888
Jawa Tengah	1.135.295	75.616	6,66	986.830	1.283.760
DI Yogyakarta	792.805	326.078	41,13	152.582	1.433.027
Jawa Timur	1.305.799	136.169	10,43	1.038.445	1.573.153
Banten	1.856.074	419.908	22,62	1.031.626	2.680.522
Bali	1.051.000	229.203	21,81	600.983	1.501.018
Nusa Tenggara Barat	766.788	97.434	12,71	575.486	958.090
Nusa Tenggara Timur	649.977	36.247	5,58	578.810	721.143
Kalimantan Barat	995.365	82.754	8,31	832.887	1.157.844
Kalimantan Tengah	1.425.993	146.441	10,27	1.138.470	1.713.516
Kalimantan Selatan	1.075.664	145.714	13,55	789.568	1.361.759
Kalimantan Timur	1.428.543	181.905	12,73	1.071.391	1.785.695
Kalimantan Utara	1.116.659	233.724	20,93	657.766	1.575.553
Sulawesi Utara	858.590	86.300	10,05	689.148	1.028.032
Sulawesi Tengah	733.788	88.034	12,00	560.943	906.634
Sulawesi Selatan	1.116.698	78.593	7,04	962.388	1.271.009
Sulawesi Tenggara	1.658.041	407.593	24,58	857.772	2.458.311
Gorontalo	656.242	85.596	13,04	488.182	824.303
Sulawesi Barat	1.252.516	200.109	15,98	859.621	1.645.411
Maluku	871.792	212.480	24,37	454.607	1.288.977
Maluku Utara	1.384.773	177.646	12,83	1.035.983	1.733.563
Papua Barat	1.466.584	237.507	16,19	1.000.262	1.932.906
Papua	1.751.957	77.177	4,41	1.600.426	1.903.487
Indonesia	**1.206.533**	**36.269**	**3,01**	**1.135.326**	**1.277.739**

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2021

Lampiran 10.17 (Lanjutan)

Sampling Error Rata-rata upah/gaji/pendapatan Penduduk Umur 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Perempuan				
	Estimasi	Standar Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	899.676	140.769	15,65	623.176	1.176.176
Sumatera Utara	689.941	73.297	10,62	545.970	833.912
Sumatera Barat	786.813	148.281	18,85	495.557	1.078.068
Riau	888.712	136.426	15,35	620.743	1.156.681
Jambi	871.514	118.096	13,55	639.550	1.103.478
Sumatera Selatan	457.701	132.155	28,87	198.122	717.280
Bengkulu	708.197	-	-	-	-
Lampung	1.077.131	223.007	20,70	639.099	1.515.163
Bangka Belitung	889.099	73.586	8,28	744.561	1.033.637
Kepulauan Riau	981.808	370.290	37,72	254.481	1.709.135
DKI Jakarta	2.469.322	483.298	19,57	1.520.024	3.418.619
Jawa Barat	1.218.078	166.848	13,70	890.353	1.545.803
Jawa Tengah	958.224	67.738	7,07	825.172	1.091.276
DI Yogyakarta	705.676	133.770	18,96	442.924	968.427
Jawa Timur	714.143	65.019	9,10	586.433	841.853
Banten	2.162.443	326.024	15,08	1.522.064	2.802.822
Bali	826.635	127.897	15,47	575.418	1.077.851
Nusa Tenggara Barat	672.855	145.181	21,58	387.688	958.021
Nusa Tenggara Timur	587.236	91.819	15,64	406.884	767.588
Kalimantan Barat	1.047.600	162.348	15,50	728.714	1.366.486
Kalimantan Tengah	815.726	258.021	31,63	308.920	1.322.532
Kalimantan Selatan	562.443	133.746	23,78	299.738	825.148
Kalimantan Timur	1.230.026	210.048	17,08	817.448	1.642.605
Kalimantan Utara	795.957	213.651	26,84	376.302	1.215.611
Sulawesi Utara	1.271.530	97.439	7,66	1.080.140	1.462.921
Sulawesi Tengah	541.439	57.088	10,54	429.306	653.572
Sulawesi Selatan	782.840	119.935	15,32	547.264	1.018.417
Sulawesi Tenggara	582.821	46.500	7,98	491.486	674.156
Gorontalo	807.765	232.230	28,75	351.617	1.263.912
Sulawesi Barat	774.308	55.934	7,22	664.442	884.175
Maluku	841.578	68.243	8,11	707.534	975.622
Maluku Utara	144.691	11.736	8,11	121.639	167.743
Papua Barat	1.550.691	45.552	2,94	1.461.218	1.640.165
Papua	1.621.348	47.721	2,94	1.527.614	1.715.083
Indonesia	**985.576**	**51.875**	**5,26**	**883.732**	**1.087.421**

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2021

Lampiran 10.17 (Lanjutan)

Sampling Error Rata-rata upah/gaji/pendapatan Penduduk Umur 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Laki-Laki dan Perempuan				
	Estimasi	Standar Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
Aceh	1.124.633	228.564	20,32	675.898	1.573.369
Sumatera Utara	882.986	53.317	6,04	778.311	987.662
Sumatera Barat	945.344	128.062	13,55	693.923	1.196.764
Riau	1.091.402	139.586	12,79	817.356	1.365.448
Jambi	1.194.007	84.756	7,10	1.027.607	1.360.408
Sumatera Selatan	807.536	141.658	17,54	529.423	1.085.649
Bengkulu	1.361.325	89.759	6,59	1.185.103	1.537.546
Lampung	1.142.920	166.014	14,53	816.989	1.468.852
Bangka Belitung	1.437.973	148.667	10,34	1.146.098	1.729.848
Kepulauan Riau	1.751.347	699.240	39,93	378.544	3.124.150
DKI Jakarta	2.387.423	349.217	14,63	1.701.813	3.073.032
Jawa Barat	1.238.839	94.142	7,60	1.054.012	1.423.667
Jawa Tengah	1.048.993	50.731	4,84	949.395	1.148.591
DI Yogyakarta	770.046	247.805	32,18	283.537	1.256.555
Jawa Timur	1.032.430	91.406	8,85	852.974	1.211.887
Banten	1.940.696	346.450	17,85	1.260.519	2.620.873
Bali	926.515	130.442	14,08	670.420	1.182.609
Nusa Tenggara Barat	731.939	89.180	12,18	556.854	907.024
Nusa Tenggara Timur	637.282	31.470	4,94	575.497	699.067
Kalimantan Barat	1.012.554	84.000	8,30	847.638	1.177.469
Kalimantan Tengah	1.322.047	120.882	9,14	1.084.722	1.559.371
Kalimantan Selatan	897.652	111.737	12,45	678.281	1.117.024
Kalimantan Timur	1.338.937	120.954	9,03	1.101.472	1.576.403
Kalimantan Utara	929.873	217.961	23,44	501.955	1.357.792
Sulawesi Utara	987.806	58.485	5,92	872.985	1.102.628
Sulawesi Tengah	678.499	61.871	9,12	557.030	799.969
Sulawesi Selatan	1.028.575	62.167	6,04	906.525	1.150.626
Sulawesi Tenggara	1.471.793	335.589	22,80	812.940	2.130.647
Gorontalo	697.066	94.945	13,62	510.663	883.469
Sulawesi Barat	1.178.923	169.020	14,34	847.091	1.510.756
Maluku	860.942	132.854	15,43	600.113	1.121.771
Maluku Utara	1.233.839	135.894	11,01	967.042	1.500.636
Papua Barat	1.496.117	149.038	9,96	1.203.513	1.788.720
Papua	1.735.036	58.465	3,37	1.620.253	1.849.820
Indonesia	**1.117.532**	**29.538**	**2,64**	**1.059.540**	**1.175.524**

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2021

Lampiran 10.18

Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak menurut Provinsi Tahun 2019-2021 dan Januari-Juni 2022 (menurut Tahun Penginputan)

Provinsi	2019	2020	2021	Januari-Juni 2022
Aceh	406	404	386	228
Sumatera Utara	705	644	1.005	360
Sumatera Barat	538	286	706	233
Riau	403	244	689	252
Jambi	273	204	277	91
Sumatera Selatan	185	211	255	138
Bengkulu	101	91	147	57
Lampung	287	311	485	187
Bangka Belitung	120	117	109	62
Kepulauan Riau	138	286	231	123
DKI Jakarta	543	461	879	357
Jawa Barat	454	733	952	451
Jawa Tengah	1.062	1.205	1.121	478
Daerah Istimewa Yogyakarta	456	501	532	277
Jawa Timur	1.271	1.304	1.190	492
Banten	327	292	516	247
Bali	119	56	130	108
Nusa Tenggara Barat	315	449	613	255
Nusa Tenggara Timur	163	274	376	232
Kalimantan Barat	242	329	365	173
Kalimantan Tengah	114	92	142	80
Kalimantan Selatan	161	166	262	107
Kalimantan Timur	385	355	357	203
Kalimantan Utara	142	126	119	80
Sulawesi Utara	172	298	349	317
Sulawesi Tengah	261	181	278	128
Sulawesi Selatan	1.009	919	752	331
Sulawesi Tenggara	97	165	191	78
Gorontalo	159	131	256	79
Sulawesi Barat	112	19	170	26
Maluku	89	168	224	106
Maluku Utara	72	86	192	68
Papua	89	68	139	67
Papua Barat	87	102	122	48
Indonesia	11.057	11.278	14.517	6.519

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

Lampiran 10.19

Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak menurut Provinsi Tahun 2019-2021 dan Januari-Juni 2022 (menurut Tahun Penginputan)

Provinsi	2019			2020		
	Jumlah Korban Kekerasan	Jumlah Anak Laki-laki Korban Kekerasan	Jumlah Anak Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Korban Kekerasan	Jumlah Anak Laki-laki Korban Kekerasan	Jumlah Anak Perempuan Korban Kekerasan
Aceh	451	158	293	438	119	319
Sumatera Utara	862	298	564	775	265	510
Sumatera Barat	612	230	382	317	111	206
Riau	515	210	305	284	88	196
Jambi	291	88	203	218	40	178
Sumatera Selatan	195	57	138	245	74	171
Bengkulu	114	42	72	104	19	85
Lampung	335	89	246	384	121	263
Bangka Belitung	127	27	100	139	33	106
Kepulauan Riau	194	91	103	337	112	225
DKI Jakarta	550	203	347	462	129	333
Jawa Barat	560	224	336	872	316	556
Jawa Tengah	1189	367	822	1338	390	948
DI Yogyakarta	468	152	316	534	131	403
Jawa Timur	1439	515	924	1397	417	980
Banten	358	108	250	338	83	255
Bali	141	34	107	61	27	34
Nusa Tenggara Barat	332	131	201	463	113	350
Nusa Tenggara Timur	171	26	145	298	75	223
Kalimantan Barat	259	65	194	359	68	291
Kalimantan Tengah	122	26	96	93	20	73
Kalimantan Selatan	201	54	147	182	54	128
Kalimantan Timur	430	124	306	398	99	299
Kalimantan Utara	143	60	83	131	50	81
Sulawesi Utara	176	45	131	334	77	257
Sulawesi Tengah	272	79	193	197	38	159
Sulawesi Selatan	1024	377	647	938	348	590
Sulawesi Tenggara	105	19	86	171	43	128
Gorontalo	161	64	97	132	33	99
Sulawesi Barat	116	50	66	25	7	18
Maluku	95	31	64	185	41	144
Maluku Utara	80	9	71	88	11	77
Papua Barat	93	14	79	73	15	58
Papua	104	32	72	115	41	74
Indonesia	**12285**	**4099**	**8186**	**12425**	**3608**	**8817**

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

Lampiran 10.19 (Lanjutan)

Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak menurut Provinsi Tahun 2019-2021 dan Januari-Juni 2022 (menurut Tahun Penginputan)

Provinsi	2021			Januari - Juni 2022		
	Jumlah Korban Kekerasan	Jumlah Anak Laki-laki Korban Kekerasan	Jumlah Anak Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Korban Kekerasan	Jumlah Anak Laki-laki Korban Kekerasan	Jumlah Anak Perempuan Korban Kekerasan
Aceh	444	170	274	255	72	183
Sumatera Utara	1120	322	798	417	99	318
Sumatera Barat	798	281	517	254	72	182
Riau	757	218	539	288	48	240
Jambi	301	86	215	95	23	72
Sumatera Selatan	287	112	175	148	55	93
Bengkulu	160	27	133	61	10	51
Lampung	551	82	469	222	46	176
Bangka Belitung	120	35	85	75	13	62
Kepulauan Riau	299	91	208	146	35	111
DKI Jakarta	881	262	619	357	67	290
Jawa Barat	1091	331	760	511	121	390
Jawa Tengah	1255	334	921	554	81	473
DI Yogyakarta	547	175	372	285	48	237
Jawa Timur	1343	439	904	569	133	436
Banten	551	128	423	258	47	211
Bali	156	52	104	115	29	86
Nusa Tenggara Barat	642	143	499	270	48	222
Nusa Tenggara Timur	405	95	310	243	54	189
Kalimantan Barat	389	62	327	198	35	163
Kalimantan Tengah	154	38	116	88	23	65
Kalimantan Selatan	294	93	201	123	28	95
Kalimantan Timur	418	96	322	213	36	177
Kalimantan Utara	122	24	98	81	37	44
Sulawesi Utara	375	105	270	341	68	273
Sulawesi Tengah	329	85	244	138	22	116
Sulawesi Selatan	780	257	523	350	80	270
Sulawesi Tenggara	224	75	149	82	14	68
Gorontalo	260	91	169	81	17	64
Sulawesi Barat	177	79	98	26	8	18
Maluku	241	60	181	124	38	86
Maluku Utara	220	36	184	72	8	64
Papua Barat	152	35	117	73	5	68
Papua	128	28	100	56	13	43
Indonesia	**15971**	**4547**	**11424**	**7169**	**1533**	**5636**

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

Lampiran 10.20

Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021 (menurut Tahun Penginputan)

Provinsi	<6	6-12	13-17
Aceh	89	129	226
Sumatera Utara	156	329	635
Sumatera Barat	72	270	456
Riau	135	242	380
Jambi	20	79	202
Sumatera Selatan	26	96	165
Bengkulu	17	66	77
Lampung	36	199	316
Bangka Belitung	12	41	67
Kepulauan Riau	33	101	165
DKI Jakarta	104	292	485
Jawa Barat	160	430	501
Jawa Tengah	127	398	730
Daerah Istimewa Yogyakarta	52	156	339
Jawa Timur	171	451	721
Banten	75	181	295
Bali	26	59	71
Nusa Tenggara Barat	57	110	475
Nusa Tenggara Timur	62	83	260
Kalimantan Barat	41	82	266
Kalimantan Tengah	22	57	75
Kalimantan Selatan	55	101	138
Kalimantan Timur	61	147	210
Kalimantan Utara	15	24	83
Sulawesi Utara	62	117	196
Sulawesi Tengah	35	91	203
Sulawesi Selatan	100	208	472
Sulawesi Tenggara	16	74	134
Gorontalo	13	58	189
Sulawesi Barat	7	34	136
Maluku	27	79	135
Maluku Utara	14	37	169
Papua	31	41	80
Papua Barat	19	34	75
Indonesia	1.948	4.896	9.127

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

Lampiran 10.21

Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2021 (menurut Tahun Penginputan)

Provinsi	NA	Belum kawin	Kawin	Cerai
Aceh	13	424	6	1
Sumatera Utara	160	949	9	2
Sumatera Barat	20	766	12	0
Riau	82	665	5	5
Jambi	20	278	3	0
Sumatera Selatan	14	267	4	2
Bengkulu	13	146	0	1
Lampung	25	517	7	2
Bangka Belitung	28	91	1	0
Kepulauan Riau	20	276	3	0
DKI Jakarta	103	763	10	5
Jawa Barat	167	917	5	2
Jawa Tengah	78	1.155	18	4
Daerah Istimewa Yogyakarta	30	506	11	0
Jawa Timur	77	1.248	14	4
Banten	50	496	4	1
Bali	14	140	2	0
Nusa Tenggara Barat	57	474	106	5
Nusa Tenggara Timur	10	393	2	0
Kalimantan Barat	55	329	5	0
Kalimantan Tengah	9	142	2	1
Kalimantan Selatan	19	271	2	2
Kalimantan Timur	18	396	3	1
Kalimantan Utara	3	117	2	0
Sulawesi Utara	53	316	5	1
Sulawesi Tengah	33	290	3	3
Sulawesi Selatan	57	703	20	0
Sulawesi Tenggara	4	220	0	0
Gorontalo	4	252	2	2
Sulawesi Barat	36	137	3	1
Maluku	24	214	3	0
Maluku Utara	5	212	1	2
Papua	14	126	12	0
Papua Barat	9	117	0	2
Indonesia	1.324	14.313	285	49

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

Lampiran 10.22

Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan, 2021 (menurut Tahun Penginputan)

Provinsi	NA	Tidak Bekerja	Bekerja	Pelajar	Ibu Rumah Tangga	Swasta / Buruh	Pedagang / Tani / Nelayan
Aceh	17	114	4	305	3	1	0
Sumatera Utara	189	194	6	721	3	6	1
Sumatera Barat	25	179	9	578	5	2	0
Riau	180	142	5	426	1	1	2
Jambi	29	41	2	224	1	4	0
Sumatera Selatan	23	73	3	187	1	0	0
Bengkulu	27	18	0	115	0	0	0
Lampung	35	68	1	439	4	4	0
Bangka Belitung	25	14	1	80	0	0	0
Kepulauan Riau	22	68	4	202	3	0	0
DKI Jakarta	144	245	7	479	4	2	0
Jawa Barat	214	196	12	663	4	1	1
Jawa Tengah	109	149	25	957	3	12	0
Daerah Istimewa Yogyakarta	30	57	3	429	4	22	2
Jawa Timur	112	189	17	1.013	5	7	0
Banten	111	114	3	318	1	3	1
Bali	34	21	0	96	0	5	0
Nusa Tenggara Barat	74	97	2	395	67	6	1
Nusa Tenggara Timur	13	86	0	300	0	5	1
Kalimantan Barat	53	83	3	247	1	1	1
Kalimantan Tengah	8	18	1	121	1	5	0
Kalimantan Selatan	20	90	1	178	2	3	0
Kalimantan Timur	24	117	6	266	1	4	0
Kalimantan Utara	3	21	0	96	1	1	0
Sulawesi Utara	80	28	4	258	2	3	0
Sulawesi Tengah	38	50	2	235	2	1	1
Sulawesi Selatan	82	117	5	560	10	4	2
Sulawesi Tenggara	4	25	3	192	0	0	0
Gorontalo	23	23	2	207	4	1	0
Sulawesi Barat	36	44	1	94	2	0	0
Maluku	22	52	1	164	0	1	1
Maluku Utara	3	30	0	184	0	2	1
Papua	14	31	5	94	7	1	0
Papua Barat	3	22	2	100	0	1	0
Indonesia	1.826	2.816	140	10.923	142	109	15

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

Lampiran 10.22

Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan, 2021 (menurut Tahun Penginputan)

Provinsi	Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya	Sekolah	Fasilitas Umum	Lembaga Pendidikan Kilat
Aceh	262	5	75	24	76	2
Sumatera Utara	529	16	434	33	108	0
Sumatera Barat	385	10	156	101	145	1
Riau	460	23	153	29	92	0
Jambi	91	2	146	13	48	1
Sumatera Selatan	130	0	82	31	43	1
Bengkulu	103	1	28	6	22	0
Lampung	328	3	72	54	90	4
Bangka Belitung	58	3	23	5	31	0
Kepulauan Riau	158	2	91	7	41	0
DKI Jakarta	336	7	226	10	298	4
Jawa Barat	514	7	429	41	98	2
Jawa Tengah	618	12	327	62	235	1
Daerah Istimewa Yogyakarta	233	2	196	27	62	27
Jawa Timur	629	9	423	86	186	10
Banten	313	4	129	29	68	8
Bali	88	1	58	4	5	0
Nusa Tenggara Barat	365	5	166	14	92	0
Nusa Tenggara Timur	276	1	60	11	56	1
Kalimantan Barat	200	5	71	9	103	1
Kalimantan Tengah	109	1	24	5	15	0
Kalimantan Selatan	160	6	70	13	44	1
Kalimantan Timur	224	2	126	18	48	0
Kalimantan Utara	51	1	61	3	6	0
Sulawesi Utara	170	7	139	10	49	0
Sulawesi Tengah	151	6	124	4	43	1
Sulawesi Selatan	253	5	312	25	184	1
Sulawesi Tenggara	74	6	105	17	22	0
Gorontalo	69	1	144	9	37	0
Sulawesi Barat	40	1	98	10	26	2
Maluku	116	1	67	5	50	2
Maluku Utara	42	2	145	7	23	1
Papua	121	6	17	0	8	0
Papua Barat	72	3	41	0	12	0
Indonesia	7.728	166	4.818	722	2.466	71

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

Lampiran 10.24

Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak menurut Provinsi dan Jenis Kekerasan, 2021 (menurut Tahun Penginputan)

Provinsi	Fisik	Psikis	Seksual	Eksploitasi	TPPO	Penelan-taran	Lainnya
Aceh	102	183	188	6	1	71	78
Sumatera Utara	281	215	659	17	3	68	109
Sumatera Barat	145	79	472	16	1	61	103
Riau	103	123	398	4	3	46	181
Jambi	66	50	200	2	2	9	12
Sumatera Selatan	122	88	144	2	0	13	7
Bengkulu	17	57	114	5	1	11	8
Lampung	135	153	436	5	7	11	25
Bangka Belitung	44	29	66	0	0	7	3
Kepulauan Riau	77	97	182	4	1	28	25
DKI Jakarta	144	143	398	47	209	43	57
Jawa Barat	158	185	610	13	26	65	198
Jawa Tengah	216	331	810	12	17	64	75
Daerah Istimewa Yogyakarta	92	201	238	4	3	32	58
Jawa Timur	315	399	700	28	20	97	145
Banten	94	121	349	12	18	29	41
Bali	23	51	54	2	2	13	35
Nusa Tenggara Barat	115	93	199	4	5	32	262
Nusa Tenggara Timur	62	116	236	6	3	45	23
Kalimantan Barat	37	24	248	41	43	7	42
Kalimantan Tengah	41	50	77	3	0	9	28
Kalimantan Selatan	57	102	114	6	1	36	47
Kalimantan Timur	74	80	233	24	1	29	43
Kalimantan Utara	40	47	78	3	0	5	7
Sulawesi Utara	71	66	155	2	6	49	72
Sulawesi Tengah	85	97	191	4	3	51	24
Sulawesi Selatan	322	180	360	1	18	30	71
Sulawesi Tenggara	65	32	152	0	0	8	6
Gorontalo	104	3	144	1	0	1	11
Sulawesi Barat	91	27	70	1	1	7	7
Maluku	57	54	140	1	4	19	14
Maluku Utara	25	25	162	0	0	4	28
Papua	31	50	86	0	5	16	9
Papua Barat	26	51	67	0	2	21	12
Indonesia	3.437	3.602	8.730	276	406	1.037	1.866

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

Lampiran 10.25

Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak menurut Provinsi dan Jumlah Jenis Kekerasan, 2021 (menurut Tahun Penginputan)

Provinsi	1 jenis	2 jenis	3 jenis	>3 jenis
Aceh	288	127	29	0
Sumatera Utara	941	126	53	0
Sumatera Barat	724	69	5	0
Riau	662	89	6	0
Jambi	263	36	2	0
Sumatera Selatan	216	53	18	0
Bengkulu	107	53	0	0
Lampung	416	54	75	6
Bangka Belitung	99	13	8	0
Kepulauan Riau	210	63	26	0
DKI Jakarta	731	140	9	1
Jawa Barat	945	128	18	0
Jawa Tengah	1.021	198	36	0
Daerah Istimewa Yogyakarta	468	77	2	0
Jawa Timur	1.035	256	51	1
Banten	451	88	11	1
Bali	133	22	1	0
Nusa Tenggara Barat	584	48	10	0
Nusa Tenggara Timur	328	69	7	1
Kalimantan Barat	341	43	5	0
Kalimantan Tengah	115	24	15	0
Kalimantan Selatan	239	41	14	0
Kalimantan Timur	361	48	9	0
Kalimantan Utara	75	36	11	0
Sulawesi Utara	335	34	6	0
Sulawesi Tengah	230	72	27	0
Sulawesi Selatan	597	164	19	0
Sulawesi Tenggara	195	19	10	0
Gorontalo	256	4	0	0
Sulawesi Barat	153	21	3	0
Maluku	199	36	6	0
Maluku Utara	196	24	0	0
Papua	109	41	2	0
Papua Barat	84	37	7	0
Indonesia	13.107	2.353	501	10

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

Lampiran 10.26

Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak menurut Provinsi dan Jenis Layanan, 2021 (menurut Tahun Penginputan)

Provinsi	Pengaduan	Kesehatan	Bantuan Hukum	Penegakan Hukum	Rehabilitasi Sosial	Reintegrasi Sosial	Pemulangan	Pendampingan Tokoh Agama
Aceh	150	68	119	15	17	5	2	1
Sumatera Utara	297	251	169	48	12	14	20	4
Sumatera Barat	193	28	26	12	41	7	1	3
Riau	144	111	60	15	4	1	5	0
Jambi	141	26	16	14	47	17	2	0
Sumatera Selatan	71	33	9	3	2	1	2	1
Bengkulu	3	15	2	0	0	2	1	3
Lampung	112	152	130	27	16	9	21	3
Bangka Belitung	16	2	4	14	2	1	1	0
Kepulauan Riau	130	107	39	46	62	32	10	2
DKI Jakarta	684	7	462	108	429	35	44	0
Jawa Barat	285	84	56	7	19	1	11	5
Jawa Tengah	290	223	46	67	41	12	3	5
Daerah Istimewa Yogyakarta	225	165	53	20	99	11	5	0
Jawa Timur	554	332	44	79	183	68	23	11
Banten	233	83	68	116	26	8	6	4
Bali	39	34	43	14	4	1	0	1
Nusa Tenggara Barat	81	38	7	4	12	1	5	5
Nusa Tenggara Timur	122	34	47	33	44	2	6	14
Kalimantan Barat	45	54	17	16	3	9	12	6
Kalimantan Tengah	54	34	18	6	8	4	2	0
Kalimantan Selatan	75	43	14	3	3	5	2	1
Kalimantan Timur	164	89	45	52	82	2	6	2
Kalimantan Utara	9	76	0	2	5	0	2	0
Sulawesi Utara	116	37	57	6	3	18	4	6
Sulawesi Tengah	145	60	76	15	5	0	1	1
Sulawesi Selatan	224	327	64	19	5	4	10	17
Sulawesi Tenggara	103	57	49	58	5	0	0	5
Gorontalo	167	39	28	14	4	1	2	0
Sulawesi Barat	22	6	24	4	7	1	2	3
Maluku	85	35	50	16	3	16	4	1
Maluku Utara	40	21	4	71	9	1	22	1
Papua	15	35	3	13	4	0	3	1
Papua Barat	37	0	16	3	1	1	1	1
Indonesia	5.071	2.706	1.865	940	1.207	290	241	107

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

Lampiran 10.27

Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak menurut Provinsi dan Jumlah Layanan yang diterima, 2021 (menurut Tahun Penginputan)

Provinsi	1 jenis	2 jenis	3 jenis	4 jenis	>4 jenis
Aceh	112	63	18	22	50
Sumatera Utara	368	174	48	21	43
Sumatera Barat	212	68	8	3	2
Riau	136	91	8	13	7
Jambi	94	28	28	6	19
Sumatera Selatan	70	17	4	8	4
Bengkulu	10	16	0	0	0
Lampung	214	50	53	19	27
Bangka Belitung	16	8	7	2	2
Kepulauan Riau	57	74	45	18	42
DKI Jakarta	178	151	145	95	199
Jawa Barat	241	61	14	9	30
Jawa Tengah	315	119	45	12	31
Daerah Istimewa Yogyakarta	273	92	28	20	24
Jawa Timur	454	296	82	47	56
Banten	149	110	27	16	30
Bali	22	29	15	6	12
Nusa Tenggara Barat	120	16	7	1	2
Nusa Tenggara Timur	85	42	21	18	40
Kalimantan Barat	73	26	4	1	9
Kalimantan Tengah	59	25	15	4	4
Kalimantan Selatan	74	31	12	3	3
Kalimantan Timur	140	89	28	20	19
Kalimantan Utara	42	32	5	0	3
Sulawesi Utara	163	39	16	0	3
Sulawesi Tengah	122	53	20	14	21
Sulawesi Selatan	349	105	19	32	27
Sulawesi Tenggara	102	41	13	11	19
Gorontalo	144	19	23	3	0
Sulawesi Barat	51	9	1	4	0
Maluku	37	18	16	10	29
Maluku Utara	97	6	7	3	13
Papua	48	19	1	2	0
Papua Barat	25	26	5	1	1
Indonesia	4.652	2.043	788	444	771

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

Lampiran 10.28

Jumlah Pelaku Kekerasan terhadap Anak menurut Provinsi dan Hubungan Pelaku dengan Korban, 2021 (menurut Tahun Penginputan)

Provinsi	Orang Tua	Keluarga/ Saudara	Suami/Istri	Tetangga	Pacar/ Teman
Aceh	87	54	2	49	74
Sumatera Utara	166	72	2	160	162
Sumatera Barat	48	39	3	73	120
Riau	172	63	2	51	99
Jambi	42	17	1	33	93
Sumatera Selatan	38	19	2	38	41
Bengkulu	18	18	1	24	53
Lampung	64	42	1	99	139
Bangka Belitung	18	5	2	11	25
Kepulauan Riau	40	6	1	26	63
DKI Jakarta	109	20	4	91	55
Jawa Barat	111	45	3	55	91
Jawa Tengah	178	88	8	197	313
Daerah Istimewa Yogyakarta	59	13	8	25	109
Jawa Timur	267	78	12	147	276
Banten	87	23	2	46	48
Bali	31	9	1	6	12
Nusa Tenggara Barat	52	32	72	64	175
Nusa Tenggara Timur	78	45	2	46	72
Kalimantan Barat	19	19	2	16	45
Kalimantan Tengah	37	19	0	7	18
Kalimantan Selatan	73	16	3	24	62
Kalimantan Timur	82	25	1	30	62
Kalimantan Utara	7	2	0	5	6
Sulawesi Utara	86	34	0	37	73
Sulawesi Tengah	50	43	0	20	57
Sulawesi Selatan	76	93	23	108	244
Sulawesi Tenggara	31	24	0	24	91
Gorontalo	20	29	0	40	77
Sulawesi Barat	4	11	1	5	25
Maluku	30	25	1	43	52
Maluku Utara	19	22	0	22	78
Papua	25	22	0	7	39
Papua Barat	35	4	0	10	10
Indonesia	2.259	1.076	160	1.639	2.959

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

Lampiran 10.28 (Lanjutan)

Jumlah Pelaku Kekerasan terhadap Anak menurut Provinsi dan Hubungan Pelaku dengan Korban, 2021 (menurut Tahun Penginputan)

Provinsi	Guru	Majikan	Rekan Kerja	NA	Lainnya
Aceh	8	2	1	14	63
Sumatera Utara	14	6	1	178	133
Sumatera Barat	14	0	2	13	138
Riau	10	4	1	58	44
Jambi	11	0	0	38	43
Sumatera Selatan	6	0	0	40	45
Bengkulu	1	0	0	11	25
Lampung	28	0	1	52	55
Bangka Belitung	4	0	0	12	20
Kepulauan Riau	2	0	0	12	36
DKI Jakarta	8	2	0	27	23
Jawa Barat	21	0	2	28	84
Jawa Tengah	37	8	3	77	177
Daerah Istimewa Yogyakarta	3	0	0	8	25
Jawa Timur	27	3	0	99	205
Banten	9	1	0	5	49
Bali	1	0	0	11	19
Nusa Tenggara Barat	3	0	1	50	57
Nusa Tenggara Timur	4	2	0	15	78
Kalimantan Barat	4	1	1	11	34
Kalimantan Tengah	0	0	0	8	13
Kalimantan Selatan	2	0	0	18	34
Kalimantan Timur	3	0	1	19	28
Kalimantan Utara	1	1	0	1	3
Sulawesi Utara	5	3	0	28	68
Sulawesi Tengah	1	0	1	10	74
Sulawesi Selatan	21	0	1	145	98
Sulawesi Tenggara	3	0	2	15	38
Gorontalo	4	0	0	35	44
Sulawesi Barat	3	0	2	13	76
Maluku	14	0	0	22	39
Maluku Utara	3	0	0	19	50
Papua	0	0	0	8	10
Papua Barat	0	1	0	4	64
Indonesia	275	34	20	1.104	1.992

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

Daftar Pustaka

Adji, A., Hidayat, T., Tuhiman, H., Kurniawati, S., & Maulana, A. (2020). Pengukuran Garis Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Usulan Perbaikan. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Australian Government.

Ahmad, B. (2007). Sosiologi Hukum. Jakarta: Pustaka Setia.

Aini, N., & Rachman, T. (2020). Implementasi Sistem Administrasi Pembuatan Akta Kelahiran Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya - Papua. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 2(01), 10-26. Retrieved from https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/249

Allan. (2005). Pengertian Internet Dan Asal Usul Dari Kata Internet. Surabaya: Penerbit Indah.

Amaliah, D. (2015). PENGARUH PARTISIPASI PENDIDIKAN TERHADAP PERSENTASE PENDUDUK MISKIN. Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan Vol. 2 No. 3, 231-239.

Anas, A. Y., Riana, A. W., & Apsari, N. C. (2015). Desa dan Kota dalam Potret Pendidikan. Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2(3), (pp. 418-422).

Ara, M.A., Sudaryati, E., & Lubis, Z. (2018). Perbedaan perkembangan bayi usia 6-12 bulan berdasarkan pemberian ASI. Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kesehtaan, dan Ilmu Kesehatan. 2(1): 216-224.

Ardana, I. J., Arjana, I. B., & Ramang, R. (2016). PENGARUH LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL DAN KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA TERHADAP MUNCULNYA PEKERJA ANAK DI NTT (ANALISIS DATA SUSENAS DAN POTENSI DESA 2011). Jurnal Bumi Lestari Vol. 16 No. 2, 100-107.

Arsyad, S. S., Nugraha, A., & Nurhayati, S. (2022). Tren Kontribusi Proximate Determinant terhadap Fertilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Analisa SDKI 2002/2003 dan 2017). Jurnal Kesehatan Masyarakat.

Ayu, N. A., Rinto, M., & Wayan, N. (2021). PEMBELAJARAN TARI MAHABAJRA PADA EKSTRAKURIKULER DI SMK DWIJENDRA DENPASAR. Repo Isi DPS, 1-12.

Azzahra, I. M., Ichsan, & Andriani, K. M. (2022). MINAT ORANGTUA MENYEKOLAHKAN ANAK DI LEMBAGA PAUD PADA MASA PANDEMI COVID-19. Jurnal AUDHI Vol. 5 No. 1, 42-51.

Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua pada tahun 2015. Retrieved from https://lingkunganhidup.papua.go.id/gi/fckimage/file/LAP%20THN%20APBD%2015%20Oke.pdf

Badan Pusat Satistik. (2021). Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023. Jakarta: Badan Pusat Satistik.

Badan Pusat Statistik. (2017). Angka Kelahiran Total Menurut Provinsi 2012-2017. Retrieved from Badan Pusat Statistik: https://www.bps.go.id/indicator/30/1399/1/angka-kelahiran-total-menurut-provinsi.html

Badan Pusat Statistik. (2021). Berita Resmi Statistik No. 7/01/Th.XXIV. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2021). Berita Resmi Statistik No. 87/11/Th.XXIV: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2021 mencapai 72,29, meningkat 0,35 poin (0,49 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (71,94). Retrieved from Badan Pusat Statistik: https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/15/1846/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2021-mencapai-72-29--meningkat-0-35-poin--0-49-persen--dibandingkan-capaian-tahun-sebelumnya--71-94-.html

Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Pendidikan 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2022). Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Buta Huruf (ABH). Retrieved from Sirusa Badan Pusat Statistik: https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/7

Badan Pusat Statistik. (2022). Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah 2021-2022. Retrieved from Badan Pusat Statistik: https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html

Badan Pusat Statistik. (2022). STATISTIK INDONESIA 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2022). Berita Resmi Statistik No. 36/05/Th. XXV, 09 Mei 2022: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022, Februari 24). Ribuan Kepala Desa Berkomitmen Tingkatkan Kualitas PAUD di Desa. Retrieved from Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/02/ribuan-kepala-desa-berkomitmen-tingkatkan-kualitas-paud-di-desa

Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development

Experiments by Nature and Design. United States of America: The President and Fellows of Harvard College.

BPS. (2022). Angka Kesakitan/Morbiditas/Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan. Retrieved from Sistem Informasi Rujukan Statistik - View Indikator (bps.go.id)

Cahyani, N., Suciptawati, N., & Sukarsa, K. (2019). Identifikasi Faktor yang Memengaruhi Anak Putus Sekolah di Kabupaten Bandung. E-Jurnal Matematika Vol. 8(4), 289-297.

Chairulhaq, I. A., Hendarti, A. M., Fendi, R. M., & Fitrianto, A. R. (2021). Pendampingan Belajar Daring Untuk Mengurangi Kecanduan Gadget Pada Siswa Sekolah Dasar. EDUMASPUL: Jurnal Pendidikan, 5(2), 63–74.

Chaudhuri, S. and Roy, M. 2017. "Rural-urban Spatial Inequality in Water and Sanitation Facilities in India: A cross-sectional Study from Household to National Level," Applied Geography. Elsevier Ltd, 85, pp. 27–38. doi: 10.1016/j.apgeog.2017.05.003.

Cicih, L. H. M. (2011). Pengaruh perilaku ibu terhadap status kesehatan anak baduta di provinsi Jawa Tengah, Jurnal Sari Pediatri, Vol. 13, No. 1, Juni 2011

Dewan Jaminan Sosial Nasional-DJSN, 2021. Jaminan Kesehatan. Retrieved from Dewan Jaminan Sosial Nasional - Program SJSN (djsn.go.id)

Dewi, S., Listyowati, D., & Napitupulu, B. E. (2020). SEKTOR INFORMAL DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA. Jurnal Mitra Manajemen Vol. 11 No. 1, 29-38.

detikJatim. (2022). Ironi Hari Anak Nasional, Kasus Kekerasan Masih Marak di Jatim Retrieved from Baca artikel detikjatim, "Ironi Hari Anak Nasional, Kasus Kekerasan Masih Marak di Jatim" selengkapnya https://www.detik.com/jatim/berita/d-6195369/ironi-hari-anak-nasional-kasus-kekerasan-masih-marak-di-jatim.

Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. (2022). Retrieved from https://www.dinkes.acehprov.go.id/news/read/2022/06/09/1152/cakupan-imunisasi-dasar-lengkap-di-aceh-masih-belum-memenuhi-target. https://www.dinkes.acehprov.go.id/news/read/2022/06/09/1152/cakupan-imunisasi-dasar-lengkap-di-aceh-masih-belum-memenuhi-target.html

Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud. (2022). Ekstrakulikuler. Retrieved from DITPSD KEMENDIKBUD: http://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/ekstrakurikuler

Elmanora, Hastuti, D., & Muflikati, I. (2017). LINGKUNGAN KELUARGA SEBAGAI SUMBER STIMULASI UTAMA UNTUK

PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK USIA PRASEKOLAH. Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen, 143-156.

Endrawati, N. (2011). FAKTOR PENYEBAB ANAK BEKERJA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA (Study Pada Pekerja Anak Sektor Informal di Kota Kediri). Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM, 19-43.

Fahlevi, R., & Muhammad, S. (2017). FAKTOR SOSIAL EKONOMI YANG MEMPENGARUHI CURAHAN JAM KERJA PEKERJA ANAK DI KOTA BANDA ACEH. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Vol. 2 No. 1, 187-196.

Ferdiansyah, A., Triwoelandari, R., & Gustiawati, S. (2019). PENGARUH KEIKUTSERTAAN SISWA DALAM EKSTRAKURIKULER ROHIS TERHADAP MOTIVASI BELAJAR PADA MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK. Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM Metro Vol. 4 No. 2, 11-22.

Fogden, J., & Wood, G. (2009). Access to Safe Drinking Water and Its Impact on Global Economic Growth. Bothell, WA, USA: HaloSource Inc.

Fono, Y. M., Fridani, L., & Meilani, S. M. (2019). Kemandirian dan Kedisplinan Anak yang Diasuh oleh Orangtua Pengganti. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol. 3 Issue 2, 537-547.

Green, R.K. (2001). Homeowning, Social Outcomes, Tenure Choices, And U.S. Housing Policy. Journal Of Policy Development and Research. 5(2).

Green, R.K. & White MJ. (1997). Measuring The Benefits of Homeowning: Effects On Children. Journal Of Urban Economics. 41: 441-461.

Gunawan, B. T. (2019). PENGARUH JENDER TERHADAP KEPUTUSAN ANAK BEKERJA DI INDONESIA. Jurnal Ketenagakerjaan, 29-41.

Hadinegoro, S. (2011). Panduan Imunisasi Anak. Jakarta: IDAI.

Hakim, A. (2020). FAKTOR PENYEBAB ANAK PUTUS SEKOLAH. Jurnal Pendidikan Vol. 21 No. 2, 122-132.

Hasanah, H. (2014). BABY SMOKER: PERILAKU KONSUMSI ROKOK PADA ANAK DAN STRATEGI DAKWAHNYA. Sawwa: Jurnal Studi Gender, 9(2), 253-274. doi:https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.635

Hasyim, M. A., Puspitasari, F., & Veriyanto, A. (2022). DETERMINAN PARTISIPASI SEKOLAH PADA PEKERJA ANAK DI INDONESIA. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak (EJAK), 18-25.

Herlinawati, & Susanto, A. B. (2019). STRATEGI PENJANGKAUAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) MELALUI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP). Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Vol. 12 No. 1,

65-88.

IDAI. (2008). Bedah Asi. Jakarta: FKUI

Ife, J. (2008). Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

ILO. (2022). What is child labour. Retrieved from International Labour Organization: https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm

iNewsYogya.id. (2022). Pemkot Jogja Jemput Bola Pembuatan Akta Kelahiran, Ini yang Disasar. Retrieved from Pemkot Jogja Jemput Bola Pembuatan Akta Kelahiran, Ini yang Disasar (inews.id)

Inriyani, Y., Wahjoedi, & Sudarmiatin. (2017). PERAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR IPS. Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Kerjasama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud 2016, (pp. 1-7).

Ismoedijanto. (2003). Pengembangan Praktik Imunisasi Pada Anak. Surabaya: FK

Jamaludin, A. N. (2015). SOSIOLOGI PERKOTAAN: Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya. Bandung: CV Pustaka Setia.

Jenkins, R. (2017). 4 REASONS GENERATION Z WILL BE THE MOST DIFFERENT GENERATION. Retrieved from RYAN JENKINS: https://blog.ryan-jenkins.com/2017/01/26/4-reasons-generation-z-will-be-the-most-different-generation

Jennifer, H., & Saptutyningsih, E. (2016). Preferensi individu terhadap pengobatan tradisional di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. 16(1): 26-41.

Jumiyati, & Azlina, Y. (2021). Rapat: Komunikasi Bisnis yang Efektif. Jurnal AKRAB JUARA, 84-97.

Kamangi, S. N., Therik, W. A., & Suwartiningsih, S. (2022). Multi Persepsi tentang Pekerja Anak di Pasar Inpres Matawai, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur di Tengah Pandemi COVID-19. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1, 11-22.

Kemenkes. (2016). Pedoman Pekan Asi Sedunia Tahun 2016. Direktorat Gizi Masyarakat. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.

Kemenkes. (2021). Penurunan Prevalensi Stunting tahun 2021 sebagai Modal Menuju Generasi Emas Indonesia 2045. Retrieved from Penurunan Prevalensi Stunting tahun 2021 sebagai Modal Menuju Generasi Emas Indonesia 2045 – Sehat Negeriku (kemkes.go.id)

Kemenkes. (2022). Menkes Resmikan Bulan Imunisasi Anak Nasional Tahap I di Kepulauan Riau. Retrieved from Menkes Resmikan Bulan Imunisasi Anak Nasional Tahap I di Kepulauan Riau – P2P Kemenkes RI (kemkes.go.id)

Kemenko PMK. (2021). Menko PMK Beberkan Kunci Atasi Gizi Buruk dan Stunting. Retrieved from Menko PMK Beberkan Kunci Atasi Gizi Buruk dan Stunting | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (kemenkopmk.go.id)

Kementerian PPN/Bappenas. (2020, Septemebr 2). Bappenas: Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Turunkan Tingkat Perkawinan Anak Ke 6,94 Persen Pada 2030. Retrieved from Kementerian PPN/Bappenas: https://bappenas.go.id/index.php/id/berita/bappenas-kolaborasi-lintas-sektor-kunci-turunkan-tingkat-perkawinan-anak-ke-694-persen-pada-2030

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) & United Nations Children's Fund. (2017). SDGs Baseline Report on Children in Indonesia. Jakarta: Bappenas & UNICEF. Retrieved from https://www.unicef.org/indonesia/media/1471/file/SDG%20Baseline%20report%20Indonesian.pdf

Kemen PPPA. (2016). Isu Utama: Anak, Kemiskinan, dan Prostitusi. Retrieved from https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/601/isu-utama-anak-kemiskinan-dan-prostitusi

Kemen PPPA. (2018). Profil Anak Indonesia 2018. Retrieved from https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/74d38-buku-pai-2018.pdf

Kemen PPPA. (2019). Profil Anak Indonesia 2019. Retrieved from https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/e56dc-15242-profil-anak-indonesia_-2019.pdf

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1059/MENKES/SK/IX/2004 tentang Pedoman Penyelenggaran Imunisasi. Retrieved from https://www.regulasip.id/electronic-book/4957

Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran. (2012). Retrieved from PERBUP Kab. Lombok Tengah No. 33 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NO 56 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK TENGAH [JDIH BPK RI]

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan

Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). (1990). Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/63923/keppres-no-36-tahun-1990

Kertayana, I. K. (2017). Kertayana, I. K. (2017, October). Kondisi Kemiskinan Anak dan Harapan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia. Seminar Nasional Kependudukan & Kebijakan Publik, (pp. 40-51).

Lake, B. S., & Utami, E. D. (2022). Variabel-Variabel yang Memengaruhi Angka Buta Huruf(ABH)di Provinsi Papua Tahun 2020. Prosiding Seminar Nasional Official Statistics, pp. 113-122.

Laporan Department of Health and Human Services Amerika Serikat. (2000).

Lawansi, M. C. (2022). Pelayanan Akta kelahiran Melalui Aplikasi Silincah Dukcapil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Diploma thesis, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI. Retrieved from http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/7882

Lestary, H., & Sugiharti, S. Perilaku Berisiko Remaja Di Indonesia Menurut Survey Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (Skrri) Tahun 2007. Indonesian Journal of Reproductive Health, 1(3), 136-144.

Levitan, R. D., N. A. Rector, Sheldon, T., & Goering, P. (2003). Childhood Adversities Associated with Major Depression and/or Anxiety Disorders Incommunity Sample of Ontario Issues of Co-Morbidity and Specifity. Depression & Anxiety (online); 17, 34-42.

Lubis, H. M., & Saleh, A. (2020). Pekerja Anak Sebagai Buruh Batu Bata di Kelurahan Silandit Kota Padang Sidimpuan. Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP) Vol. 1 No. 1, 29-43.

Lubis, U. W., Hasibuan, B. L., Angreiny, H., & Tanjung, S. R. (2022). Faktor Resiko Kejadian yang Menyebabkan Buta Huruf Pada Anak Sekolah di Desa Batang Bulu Baru, Kecamatan Barumun Selatan, Padang Lawas. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), 1886-1889.

Mahbub, M., Purnamawati, D., Maslamah, S. S., & Fauziddin, M. (2020). Educational data mining with clustering technique on the distribution of civil servant teachers in Indonesia. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems 12(6), 2097-2103.

Maulin, A. (2021). Mengenal Tradisi Begawe Suku Sasak dan Eksistensinya di Tengah Pandemi Covid-19. Retrieved from Kompasiana: https://www.kompasiana.com/alifiamaulin3531/60d72e6dbb44861b4b63e634/mengenal-tradisi-

begawe-suku-sasak-dan-eksistensinya-di-tengah-pandemi-covid-19

Mellinda, & Sumarni, C. (2021). Estimation ofTotal Fertility Rate(TFR) Using Small Area Estimation(SAE) in Nusa Tenggara Timur (NTT) Province. The 1st International Conference on Data Science and Official Statistics (pp. 796-809). Politeknik Statistika STIS and Badan Pusat Statistik.

Mirnawati, Nurfitriani, Zulfiarini FM, Cahyati WH. (2018). Perilaku Merokok pada Remaja Umur 13-14 Tahun. HIGEIA. 2(3): 396-405

Mugiantri, S., Winarni, S., & Pangestuti, W. D. (2018). FAKTOR PENYEBAB REMAJA MENJADI ANAK JALANAN. Jurnal Pendidikan Kesehatan, 25-31.

Mujiati, & Yuniar, Y. "Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional di Delapan Kabupaten-Kota di Indonesia." Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, vol. 26, no. 4, 2016, pp. 201-210.

N. Fitria, and Z. Shaluhiyah, "Analisis Pelaksanaan Komunikasi Terapeutik Perawat di Ruang Rawat Inap RS Pemerintah dan RS Swasta," Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia, vol. 9, no. 2, pp. 183-195, Dec. 2016. https://doi.org/10.14710/jpki.9.2.183-195

Nandi. (2006). PEKERJA ANAK DAN PERMASALAHANNYA. Gea: Jurnal Geografi, 1-9.

Nikmah, F. A., Wardani, N. T., & Matsani, N. (2020). Apakah Kartu Indonesia Pintar Berhasil Menurunkan Angka Putus Bersekolah? Jurnal Komunikasi Pendidikan, Vol.4 No.2, 11-17.

Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya." Sosio Informa, 2015.

Nugraha, Y. A., & Supriatna, R. A. (2020). PERAN TEMAN SEPERMAINAN DALAM MEMBENTUK SIKAP PEMUDA PERDESAAN TERHADAP PEKERJAAN DI SEKTOR PERTANIAN PADI (Kasus Pemuda di Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor). JIA (Jurnal Ilmiah Agribisnis): Jurnal Agribisnis dan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, 1-10.

Nurhadi, & Sudirman. (2019, November 30). Angka Pernikahan Dini Masih Tinggi di Sulbar, Ini Penyebabnya. Retrieved from https://makassar.tribunnews.com/2019/11/30/angka-pernikahan-dini-masih-tinggi-di-sulbar-ini-penyebabnya: https://makassar.tribunnews.com/2019/11/30/angka-pernikahan-dini-masih-tinggi-di-sulbar-ini-penyebabnya

Nurhidayah, Y. (2018). Perbedaan gender dalam penggunaan

telepon seluler. ORASI jurnal dakwah dan komunikasi. 9(2): 97-114. 10.24235/orasi.v9i2.3695

Nurzanah, T.N., Zakianis, Wispriyono, B., & Anwar, A. (2020). Sanitasi dan air minum di daerah perkotaan dan pedesaan di Provinsi Bengkulu (analisis data potensi desa 2018). Jurnal Ekologi Kesehatan. 18(3):159-170. DOI:10.22435/jek.v3i18.2471

Oebaidillah, S. (2018). Angka Partisipasi Kasar PAUD Yogyakarta Tertinggi di Indonesia. Retrieved from Media Indonesia: https://mediaindonesia.com/humaniora/153680/angka-partisipasi-kasar-paud-yogyakarta-tertinggi-di-indonesia

Okezone.com. (2014). Pengguna Internet di Indonesia Meningkat karena Smartphone Murah. Retrieved from Pengguna Internet di Indonesia Meningkat karena Smartphone Murah : Okezone techno

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 62 Tahun 2014 tentang Ekstrakulikuler pada Pendidikan Dasar

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/174964/perpres-no-72-tahun-2021

Perdana, N. S. (2018). Dinamika Pekerja Anak: Studi Kasus Pekerja Anak pada Sektor Informal di DKI Jakarta. Atikan: Jurnal Kajian Pendidikan Vol. 8 No. 1, 27-40.

Permana, F. A., & Wijayanti, S. N. (2022). Peran Negara dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia. Media of Law and Sharia, 219-234.

Permenkes No. 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. (2020). Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/152505/permenkes-no-2-tahun-2020

PP No. 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5245/pp-no-33-tahun-2012

Praditama, Sandhi. “Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga dalam Perspektif Fakta Sosial.” Sosialitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosiologi-Antropologi, vol. 5, no. 2, 2015.

Pratiwi. (2020). PENGARUH EKSTRAKURIKULER PRAMUKA TERHADAP KARAKTER DISIPLIN SISWA SD. EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan, 62-70.

Primadini, F. (2018). Persepsi Orang Tua Terhadap Penggunaan Telepon Seluler Pada Anak Usia Sekolah Dasar. Prosiding Seminar Dan Diskusi Nasional Pendidikan Dasar 2018.

PROGRAM STUDI KAJIAN GENDER Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. (2016). PERKAWINAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM, KATOLIK, PROTESTAN, BUDHA, HINDU, DAN HINDU KAHARINGAN. Jakarta: Universitas Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Publikasi Kajian Peningkatan Pelayanan Kesehatan Berkualitas pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Papua dan Papua Barat (2022). Retrieved from https://sikompak.bappenas.go.id/storage/app/uploads/public/629/db9/1c0/629db91c0adcd710830428.pdf

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud. (2022). Tentang PIP. Retrieved from Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud: https://pip.kemdikbud.go.id/home/tentang

Putri, A.O., Malihah, E., & Nurbayani, S. (2014). EKPLOITASI PEKERJA ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI BENTUK PENYIMPANGAN SOSIAL (Studi Etnografi Anak-anak Pengumpul Koin Dermaga Pelabuhan Merak Kota Cilegon). Jurnal Sosietas Vol. 5 No. 1, 1-4.

Rahmawati, R. D., & Ramadhan, D. C. (2019). Manfaat air susu ibu (asi) pada anak dalam persepektif Islam. EDUSCOPE: Jurnal Pendidikan, Pembelajaran, dan Teknologi, 5(1), 24–34. https://doi.org/10.32764/eduscope.v5i1.376

Retnaningsih, H. (2019). PROGRAM INDONESIA PINTAR: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL BIDANG PENDIDIKAN (STUDI DI KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN). Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial, 161-177.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kepulauan Riau tahun 2021-2026. Retrieved from https://ppid.kepriprov.go.id/resources/informasi_publik/13/RENSTRA_DINKES_DAN_RSUD_PROV_KEPRI_TAHUN_2021-2026.pdf

Riany, Y.E. (2021). Strategi Dan Tantangan Pengasuhan Anak Di

Indonesia. Depok: Rajawali PERS.

Rizki, D. A., Sulastri, S., & Irfan, M. (2015). Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Bandung. Share: Social Work Journal, 5(1), 360-362.

Robst, John, Deitz R & McGoldrick K. (1999). Income Variability, Uncertainty, And Housing Tenure Choice. Regional Science and Urban Economics. 29: 219-229.

Rohmani, N. (2021). Analisis Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Di(PAUD) di Seluruh Indonesia. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol. 5 Issue 1, 625-632.

Rosiyanti, H., & Muthmainnah R. N. (2018). Penggunaan gadget sebagai sumber belajar mempengaruhi hasil belajar pada mata kuliah matematika dasar. FIBONACCI: Jurnal Pendidikan Matematika Dan Matematika. 4(1): 25-36. https://doi.org/10.24853/fbc.4.1.25-36

Ruchiyani, Y., Suriadi, B., Nainita, N., Cahaya, N., & Al-Ridho, N. (2022). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN EKONOMI INDONESIA. Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol.1 No.6, 1575-1584.

Rukanda, N., Nurhayati, S., & Ganda. (2020). PARTISIPASI KARANG TARUNA TERHADAP KEGIATAN MASYARAKAT MELALUI AKSI SOSIAL. Comm-Edu (Community Education Journal) 3(2), 144-155.

Safitri, A. O., Yunianti, V. D., & Rostika, D. (2022). Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Jurnal Basicedu Vol. 6 No. 4, 7096-7106.

Safitri, A., Marlina, L., & Murtopo, A. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang (Studi Kasus PAUD Kasih Ananda dan TK Satu ATAP). Jurnal Pendidikan dan Konseling, 2357-2544.

SatuHarapan.com. (2022). Jateng, Jabar dan Jatim Tertinggi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Retrieved from https://www.satuharapan.com/read-detail/read/jateng-jabar-dan-jatim-tertinggi-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan

Sanders, M. R., & Morawska, A. (2018). Handbook of Parenting and Child Development Across the Lifespan. Cham: Springer International Publishing AG,.

Santrock, J. W. (2011). CHILD DEVELOPMENT. New York: McGraw-Hill.

Sari, E. N., Dyatmika, G. E., & Dewi, N. S. (2021). STRATEGI GURU DALAM MEMPERTAHANKAN MINAT BELAJAR TARIPADASISWA DI

SEKOLAH DASAR. Padma Sari: Jurnal Ilmu Pendidikan, 10-18.

Sari, M., & Irianto, A. (2020). Pengaruh DariPematuhan Tata Tertib Sekolah dan Keikutsertaan Siswa Dalam Ekstrakurikuler Pramuka Terhadap Disiplin Siswa Dalam Belajar PadaSiswa SMA Swasta Akreditasi A di Kota Padang. Jurnal EcoGen, 1-6.

Sasmita, R. S. (2020). Pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 2(1), 99–103. https://doi.org/10.31004/jpdk.v2i1.603

Sekretariat Kabinet RI. (2022). Menteri PPPA: Laporkan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ke SAPA 129.

Retrieved from https://setkab.go.id/menteri-pppa-laporkan-tindak-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-ke-sapa-129/

Setiawan, H. H. (2017). AKTE KELAHIRAN SEBAGAI HAK IDENTITAS DIRI KEWARGANEGARAAN ANAK. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 3(1). https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.520

Setiyoko, A. B., Basri, A., Sa'adiyyah, A. M., Mahmud, T. A., & Asmawi, M. (2022). PERAN DINAS KOTA SERANG DALAM PEMELIHARAAN ANAK TERLANTAR TAHUN 2021. PROPATRIA Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 188-201.

Sistem Informasi Kemendikbud. (2022). Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni. Retrieved from https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/

Sistem Informasi Rujukan Statistik BPS. (2022). Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Provinsi. Retrieved from SIRUSA Badan Pusat Statistik: https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1576

Sumiyati. (2015). Hubungan jenis kelamin dan status imunisasi DPT dengan pneumonia pada bayi usia 0-12 bulan. Kesehatan Metro Sai Wawai. 8(2): 63-69

Sunarti, E. (2015). Orasi ilmiah Guru Besar IPB "Ketahanan Keluarga Indonesia: dari Kebijakan dan Penelitian Menuju Tindakan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). (2018).

Suteja, J., & Ulum, B. (2019). Dampak kekerasan orang tua terhadap kondisi psikologis anak dalam keluarga. Equalita, 1(2): 169-185.

Syahrial, S., & Nazara, S. (2006). "Determinan Tipe Kepemilikan Rumah Perkotaan Di Indonesia: Model Pilihan Kualitatif Menggunakan Data Susenas 2001". Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia 7 (1), 1-25. https://doi.org/10.21002/jepi.v7i1.142.

Syarfina, Yetti, E., & Fridani, L. (2018). PEMAHAMAN GURU PRASEKOLAH RAUDHATUL ATHFAL TENTANG KESIAPAN SEKOLAH ANAK . Jurnal Pendidikan Usia Dini Vol. 12, 153-163.

Tarigan, A. (2003). Rural-Urban Economic Lingkages Konsep & Urgensinya dalam Memperkuat Pembangunan Desa, Perencanaan Pembangunan, 3.

Thoomaszen, F. W. (2017). Peran keluarga dalam pemenuhan hak partisipasi anak pada Forum Anak Kota Kupang (FAKK). Persona: Jurnal Psikologi Indonesia , 82-97.

Tijow, M. A., & Risamasu, P. E. (2022). ANALISIS ANGKA PARTISIPASI ANAK PRASEKOLAH PADA PAUD DI PROVINSI PAPUA. Jurnal Pengelolaan Pendidikan, 21-29.

Tsalats, H. (2017). Perbedaan Latar Belakang Dalam Memilih Antara Asi Eksklusif dan Susu Formula Untuk Ibu yang Memiliki Bayi Usia 0-6 Bulan di Pedesaan dan Perkotaan. Undergraduate (S1) Thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2002). Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003

Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (2006). Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40202

Undang-Undang N0. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (2014). Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014

UNICEF. (1997). A Sanitation Handbook. New York: UNICEF.

UNICEF Indonesia. (2018). Konvensi Hak Anak: Versi anak anak. Retrieved from https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak

UNICEF Indonesia. (2020). Laporan Tahunan 2020 UNICEF Indonesia. Retrieved from Laporan Tahunan 2020 UNICEF Indonesia | UNICEF Indonesia

UNICEF. (2020). Perlindungan anak di Indonesia – Mengembangkan kebijakan dan peraturan yang kuat untuk setiap anak. Retrieved from https://www.unicef.org/indonesia/media/5651/file/Perlindungan.

United Nations Development Programme. (2004). Water

Governance for Poverty Reduction (K. Lewis, ed.). New York: United Nations Development Programme.

Wahyuni, & Sari, L. K. (2022). DeterminanEksploitasi Pekerja Anak Sektor Informal dari Sisi Jam Kerja di Indonesia Tahun 2021. Prosiding Seminar Nasional Official Stastitics 2022 (pp. 225-234). Politeknik Statistika ITS.

Widyastari, D. A., Isarabhakdi, P., & Shaluhiyah, Z. (2020). Intergenerational Patterns of Early Marriage and Childbearing in Rural Central Java, Indonesia. Journal of Population and Social Studies [JPSS], 250 - 264.

Wiguna, C. S. (2020). Modul Pembelajaran Geografi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

World Health Organization (WHO). (2020).

Yuhenita, N., Majid, Y. M., Murat, A. R., Muliyani, R., Alfahmi, R. A., & Abdillah, M. Z. (2021). Pendampingan dalam menghadapi pembelajaran di masa pandemi bagi warga dusun macanan. SELAPARANG: Jurnal pengabdian masyarakat berkemajuan. 4(2): 215-219. https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i2.3711

Zulkarnaen, & Handoyo, A. D. (2019). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENDIDIKAN TIDAK MERATA DI INDONESIA. PROSIDING SEMINAR NASIONAL "MENJADI MAHASISWA YANG UNGGUL DI ERA INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0", (pp. 20-24).